

TS 09/00
Ghufron
W

TESIS

WACANA DEMOKRASI PARA AKTIVIS

STUDI KASUS PADA KELOMPOK "AREK-AREK SUROBOYO
PRO-REFORMASI"



SYAMSUL GHUFRON

PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

WACANA DEMOKRASI PARA AKTIVIS

**STUDI KASUS PADA KELOMPOK "AREK-AREK SUROBOYO
PRO-REFORMASI"**

T E S I S

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial pada Program Pascasarjana
Universitas Airlangga**

Oleh
SYAMSUL GHUFRON
NIM 099612243-M

**PROGRAM MAGISTER ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

WACANA DEMOKRASI PARA AKTIVIS

Studi Kasus pada Kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi"

ini telah disetujui pada tanggal 27 Juli 1999, diuji pada tanggal 18 Agustus 1999 dan dinyatakan LULUS oleh panitia penguji tesis:

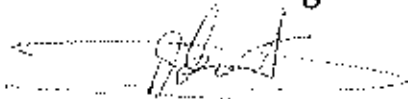
Ketua : Dr. Laurentius Dyson P., M.A.

Anggota : 1. Dede Octomo, Ph.D.

2. Drs. Priyatnoko, M.A.

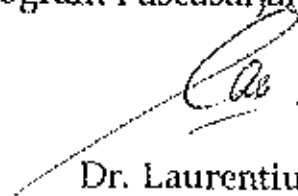
3. Dra. Pinky Saptandari, M.A.

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dede Octomo, Ph.D.
NIP 131453131

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Laurentius Dyson P., M.A.
NIP 130937724

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan hasil studi ini sebagai salah satu bagian dari tugas-tugas yang harus ditunaikan dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.

Studi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ada berbagai pihak serta nama yang sangat berjasa dalam membantu penyelesaian dan penulisan hasil studi ini. Karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih—hanya sebatas ini yang dapat saya berikan sebagai ungkapan rasa terima kasih saya, tentu saja dengan keyakinan dan harapan bahwa Allah akan memberikan balasan yang lebih baik bagi mereka yang saya sebut di bawah ini—kepada yang terhormat:

Para pejabat teras Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (Unisda): Drs. K.H. Masykuri Shodiq, S.H. selaku Rektor Unisda Lamongan serta Drs. Saifudin Zuhri, M.A. selaku Dekan FKIP Unisda yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Para Pejabat teras Universitas Airlangga: Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr. selaku Rektor Unair yang kemudian digantikan oleh Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H., Ph.D. serta pejabat teras di lingkungan Program Pascasarjana Unair: Prof. Dr. H. Soediono Tirtowidardjo, dr., DSTHT selaku Direktur PPS Unair

terutama Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial yang kemudian digantikan oleh Dr. Laurentius Dyson P., M.A. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program magister.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) yang telah memberikan bantuan finansial dalam bentuk beasiswa TMPD sehingga meringankan beban biaya saya dalam menyelesaikan studi.

Dede Oetomo, Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam studi ini yang dengan tekun, sabar, dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, petunjuk-petunjuk, bahkan motivasi sehingga studi ini dapat terselesaikan.

Semua pembina mata kuliah di Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial PPS Unair yang telah berjasa besar dalam menambah dan memperluas pengetahuan saya dan tentu saja sangat berguna bagi studi ini, khususnya Daniel T. Sparringa, Ph.D. yang dengan sukarela memberikan masukan-masukan bahkan berkenan meminjamkan disertasinya kepada saya untuk difotokopi karena isi disertasi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari studi ini.

Semua teman aktivis yang ada di Kaliwaron: Gunardi, Yuli, Dadang, Klotok, Anam, Anwar, Kriwul, Apank, Alibari serta yang ada di Klampis Ngasem: Muhaji, Bambang, Auk juga yang ada di kantong-kantong ASPR yang tak mungkin disebutkan satu persatu terutama Fitra dkk. yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi studi ini.

Semua toman sejawat yaitu peserta Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial PPS Unair Angkatan 1996/1997 yang dengan baik dan kompak bekerja sama untuk menghadapi dan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi bersama dalam bentuk saling memberi dan menerima masukan menuju jalan keluar dari problem masing-masing.

Secara khusus saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah saya (alm.), Ghozali, serta ibu saya, Kafinah, yang telah memberikan motivasi tentu saja disertai doa yang sangat berharga bagi saya serta istri saya, Siti Pathonah, dan kedua anak saya, Salman Faris dan Ahsanul Abidin, yang telah memberikan dorongan dan merelakan berkurangnya waktu mereka bersama saya yang kesemuanya itu mengantarkan saya sampai kepada terselesaikannya studi ini.

Akhirnya, saya menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya sehingga saya dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang berifat membangun demi sempurnanya tesis ini. Namun, saya tetap berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, almamater, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Surabaya, Agustus 1999

Syamsul Ghufron

ABSTRAK

Studi ini berbicara tentang wacana demokrasi para aktivis—terutama dalam merespons wacana Orde Baru dan dalam mengembangkan wacana demokrasi yang ideal. Pembicaraan studi ini lebih ditekankan pada pilar-pilar sentral wacana Orde Baru: demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional. Permasalahan dan tujuan utama studi ini didasarkan pada adanya keinginan untuk memahami respons para aktivis terhadap wacana Orde Baru pada tema-tema utama tersebut serta memahami wacana demokrasi yang mereka idealkan.

Studi ini termasuk dalam studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi setting studi adalah salah satu kelompok aktivis rakyat yang berada di kota Surabaya yang menamakan kelompoknya "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" (ASPR). Data dikoleksi dengan menggunakan tiga macam teknik koleksi data: dokumentasi (studi pustaka), observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Dalam menentukan jumlah subjek yang diwawancarai, studi ini menggunakan teknik "bola salju". Dengan demikian, jumlah subjek ditentukan berdasarkan kecukupan atau kejenuhan data dan tidak berdasarkan banyaknya subjek.

Untuk keperluan analisis data, digunakan beberapa konsep yang relevan dengan studi: wacana, demokrasi, wacana demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat, serta teori-teori yang relevan yaitu teori ideologi: hegemoni Gramsci serta konsep kekuasaan/pengetahuan Foucault dan teori perlawanan. Teori-teori ini terutama digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam studi ini serta menempatkan hubungan-hubungan di antara wacana Orde Baru dan wacana para aktivis.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa ASPR menolak wacana Orde Baru secara tegas dan mendalam pada semua komponen utama—demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, persatuan nasional. Hanya pada dua komponen bagian saja yang tidak terlihat adanya penolakan itu—yaitu dalam hal kedudukan ABRI di MPR yang diterima secara superficial dan bentuk negara kesatuan yang tidak diterima dan tidak ditolak. Penolakan itu selain terwujud dalam segala aktivitas ASPR: aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut ditegakkannya demokrasi dan hak asasi manusia, juga tersirat dalam bahasa yang mereka gunakan yang tergolong dalam wacana kontrahegemoni sebagai respons terhadap wacana hegemoni Orde Baru. Hal itu terlihat dari kosakata dan pernyataan mereka yang bertolak belakang dengan kosakata dan pernyataan yang digunakan Orde Baru.

Adapun wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, yaitu adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik. Untuk itu, dwifungsi ABRI harus dicabut: tidak ada lagi campur tangan ABRI dalam bidang sosial politik. Dalam membina persatuan nasional dan tegaknya demokrasi, haruslah diutamakan adanya keadilan dan pemerataan. Isu-isu ancaman seperti 'disintegrasi bangsa', 'SARA', 'komunis dan Islam radikal' tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Yang lebih diperlukan dalam hal ini adalah adanya pendidikan (terutama pendidikan politik) bagi rakyat—hal seperti ini sudah dilakukan ASPR dengan membentuk 'sekolah rakyat'—agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hasutan yang sengaja mengadu domba rakyat yang berdampak pada persatuan nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	8
Tujuan Studi.....	8
Manfaat Studi.....	9
Sistematika Tesis.....	9
BAB II KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN.....	11
Konsep Wacana.....	11
Konsep Demokrasi.....	13
Wacana Demokrasi.....	18
Hubungan Negara dengan Masyarakat.....	22
Konsep Ideologi.....	28
Konsep Hegemoni Gramsci.....	29
Konsep Kekuasaan/Pengetahuan Foucault.....	36
Teori Perlawanan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
Tipe Studi.....	43
Setting Studi.....	44
Koleksi Data.....	45
Analisis Data.....	55

BAB IV ORDE BARU.....	59
Format Politik Orde Baru.....	59
Hegemoni Orde Baru.....	69
Wacana Demokrasi Orde Baru.....	76
Demokrasi Pancasila.....	77
Dwifungsi ABRI.....	80
Persatuan Nasional.....	87
 BAB V AREK-AREK SUROBOYO PRO-REFORMASI: GENERASI BARU GERAKAN RAKYAT PRODEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA.....	 93
Gerakan Aktivis Mahasiswa.....	93
Generasi Baru LSM Prodemokrasi dan Hak Asasi Manusia.....	96
Kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi".....	97
 BAB VI DEMOKRASI PANCASILA: SLOGAN MENYESATKAN.....	 111
Orde Baru Sangat Tidak Demokratis.....	112
Uniknya: Melanggar Prinsip Demokrasi dan Menerapkan Sistem Negara Komunis.....	116
Massa Mengambang: Upaya Mobilisasi ke Golkar.....	118
Ekonomi dan Politik Tak Dapat Dipisahkan.....	120
Tahapan Demokrasi yang Tak Ada Habisnya.....	121
Negara Integralistik Berkultur Feodal.....	124
Diskusi.....	128
 BAB VII DWIFUNGSI: CERMIN AROGANSI ABRI.....	 143
Dwifungsi ABRI Mematikan Demokrasi.....	143
Tidak Hanya Jasanya, Kejahatannya Juga Banyak.....	147
Dwifungsi ABRI: Bukan Panggilan, Melainkan Paksaan.....	148
Militer dalam Birokrasi Sipil: Menyalahi Aturan.....	151
ABRI Modern karena Sipil Ditekan.....	152
ABRI: Tidak Solid, Ada Faksi-Faksi.....	155
Tanpa Senjata, ABRI Bukan Perekat Bangsa; Tanpa ABRI, Rakyat Akan Rekat Sendiri.....	156
Bukan Nasionalis, Melainkan Fasis.....	158
Sumber Instabilitas: ABRI, Bukan Sipil.....	159
Tidak Ada Tempat di DPR bagi ABRI.....	163
ABRI Berlagak Jagoan.....	165
ABRI dan Rakyat: Bukannya Manunggal, Melainkan Lawan.....	167
ABRI dan Golkar: Pilar-Pilar Negara Komunis.....	168
Diskusi.....	171

BAB VIII PERSATUAN NASIONAL:	
BENTENG KEBIJAKAN TAK BERMORAL	184
Pusat Tidak Adil, Daerah 'Ngamuk'	184
Sentralisasi Penyebab Disintegrasi	184
Negara Kesatuan atau Federasi Terserah, Yang Penting	
Keadilan Terwujud	187
SARA: Sebuah Kekayaan, Bukan Ancaman	190
Bukan Cinanya, Melainkan Rezimnya	193
Tetesnya yang Tak Kunjung Datang	196
Komunis dan Islam Radikal: Hantu Ciptaan Orde Baru	197
Soeharto yang Berbahaya, Bukan Komunis	198
Ancaman Islam Radikal Membodohi Rakyat	201
Diskusi	203
BAB IX PEMBAHASAN.....	213
Respons ASPR Terhadap Wacana Orde Baru	213
Demokrasi Pancasila	213
Dwifungsi ABRI	217
Persatuan Nasional	222
Wacana Demokrasi yang Ideal	232
BAB X KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORETIS.....	238
Kesimpulan	238
Implikasi Teoretis	242
Pertarungan antara Orde Baru dan Aktivis (ASPR) dalam Perspektif	
Gramscian dan Foucauldian	242
Kelompok ASPR dalam Konteks Teori Perlawanan	251
Rekomendasi	256
DAFTAR PUSTAKA.....	258

DAFTAR TABEL

TABEL 5.1 STRUKTUR ORGANISASI AREK-AREK SUROBOYO PRO-REFORMASI.....	102
TABEL 5.2 DAFTAR KANTONG AREK-AREK SUROBOYO PRO-REFORMASI.....	104
TABEL 9.1 RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU TENTANG DEMOKRASI PANCASILA.....	216
TABEL 9.2 RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU TENTANG DWIFUNGSI ABRI.....	221
TABEL 9.3 RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU TENTANG PERSATUAN NASIONAL.....	224
TABEL 9.4 WACANA HEGEMONI DAN KONTRAHEGEMONI.....	227
TABEL 9.5 WACANA DEMOKRASI YANG IDEAL.....	236

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini secara berturut-turut dibicarakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, manfaat studi, dan sistematika tesis.

Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarahnya, negara Indonesia tidak pernah lepas dari masalah pelik tentang demokrasi. Setiap terjadi ketidakberesan dan penyimpangan, yang dianggap sebagai sumber masalahnya adalah demokrasi. Hal itu terjadi karena adanya interpretasi yang berbeda terhadap demokrasi. Perbedaan interpretasi ini sering digunakan sebagai pembenaran bagi pihak-pihak tertentu demi kepentingannya. Untuk tujuan itu pulalah, istilah demokrasi lalu diberi label-label tertentu.

Persaingan interpretasi terhadap demokrasi itu sudah terlihat pada masa Orde Lama. Orde Lama dengan "Demokrasi Parlementer" dan "Demokrasi Terpimpin" dinilai oleh Orde Baru telah gagal dalam membangun demokrasi di Indonesia. Kedua jenis demokrasi itu dianggapnya tidak dapat diterima karena yang pertama melahirkan sebuah "ekses demokrasi" yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik akibat partai politik yang berkuasa dengan seenaknya, sedangkan jenis yang kedua dianggap hanya demokrasi dalam nama belaka karena sesungguhnya ia adalah sebuah kediktatoran presiden yang berkuasa tanpa batas sehingga membawa Indonesia pada kehancuran.¹

Karena itu, Orde Baru mengklaim dirinya sebagai rezim yang bertekad

¹ Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 126 & 203.

mengadakan koreksi total terhadap "kegagalan" sistem politik sebelumnya itu dan bertekad hendak "melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen".² Berdasarkan pertimbangan itulah, Orde Baru kemudian memberi nama demokrasi yang dianutnya dengan "Demokrasi Pancasila". Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, Orde Baru juga tidak pernah sepi dari adanya demonstrasi yang menuntut ditegakkannya demokrasi.

Dewan Mahasiswa ITB, misalnya, pada tanggal 8 Oktober 1970 mendatangi kediaman Presiden Soeharto dan meminta agar "meninjau kembali hubungan ABRI dan sipil serta menyesuaikan dengan kehidupan demokrasi yang dicita-citakan bersama".³ Pernyataan aksi bengong mahasiswa Bandung mengusulkan diwujudkan proses-proses "pengambilan keputusan" yang melibatkan masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun pengawasan sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis.⁴ Proposal mahasiswa Bandung dalam pertemuan "Gelora Kebangkitan 28 Oktober 1977" berlandaskan pemikiran bahwa masih banyak dijumpai terjadinya pemerkosaan atas demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak-hak politik warga negara.⁵ Pada 14 Januari 1978 mahasiswa ITB menuntut ditegakkannya demokrasi dengan cara memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok sosial untuk turut menentukan pimpinan nasional.⁶ Tuntutan pelaksanaan demokrasi oleh mahasiswa tahun 1978 itu juga bertujuan menyingkirkan Soeharto dari kursi kekuasaan.⁷

² Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 182; Lihat juga Syamsuddin Haris, *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998), h. 1.

³ Raillon, *Politik ...*, h. 82.

⁴ Hariyadhe, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional*, (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1995), h. 32.

⁵ Idem, h. 36.

⁶ Idem, h. 83.

⁷ Didik Supriyanto, *Perlawanan Para Mahasiswa: Protes Panjang NKK/BKK*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 61.

Tuntutan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara deras terlihat sejak terjadi krisis ekonomi yang paling buruk pada akhir tahun 1997. Di tengah krisis ekonomi itu terdapat realitas yang relevan dengan realitas menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan awal kemunculan Orde Baru. Realitas yang dimaksud adalah adanya gerakan massa yang di dalamnya melibatkan mahasiswa.⁸

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia mendorong mahasiswa bertindak sehingga unjuk rasa terjadi di segala penjuru. Karena secara universal dan alami kehidupan politik berperan sebagai komando atau koordinator segenap aspek kehidupan masyarakat, yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap kegagalan ekonomi tersebut adalah sistem politik Orde Baru yang produknya adalah terkendalakannya demokrasi dan rentannya fundamental ekonomi terhadap krisis.⁹

Karena itu, mahasiswa memandang bahwa kata kunci untuk keluar dari krisis adalah "reformasi" di segala lini. Bagi mahasiswa, reformasi politik berarti pergantian kepemimpinan nasional¹⁰ sehingga tema gerakan mahasiswa Angkatan 1998 ini seragam di segala penjuru tanah air, yaitu reformasi melalui pergantian kepemimpinan nasional atau tuntutan kepada pemerintah dan DPR agar segera melakukan reformasi menyeluruh.¹¹

Gerakan mahasiswa Angkatan 1998 tersebut memicu semua kampus termasuk kampus-kampus di Surabaya untuk ikut menyuarakan tuntutan demokratisasi. Sejak itulah bermunculan kelompok-kelompok yang menamakan dirinya dengan kata-kata "reformasi" seperti APR (Arek-Arek Pro-Reformasi),

⁸ Abdur Rozaki dan A. Wisnuhardana, "Gerakan Mahasiswa di Tengah Krisis Ekonomi Politik", dalam *Basis* No. 03—04, 1998, h. 30.

⁹ Arbi Sanit, "Politik Mahasiswa", dalam *Qatra* No. 23, 25 April 1998, h. 97.

¹⁰ Tony Hasyim dkk, "Bentrokan Setelah Menolak Dialog", dalam *Forum Keadilan* No. 1, 20 April 1998, h. 15.

¹¹ Hanibal W.Y. Wijayanta dkk., "Gerakan Reformasi Mencari Jalan", dalam *Forum Keadilan* No. 2,

MUPR (Mahasiswa Unair Pro-Reformasi), MUTER (Mahasiswa Ubaya Teriakkan Reformasi), KAMUS-PR (Komite Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro-Reformasi), dan sebagainya. Memang gerakan mahasiswa itu dapat dipahami juga sebagai usaha menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.¹²

Yang menarik adalah adanya kelompok-kelompok rakyat yang berkeinginan kuat untuk terlibat secara langsung dalam meneriakkan tuntutan reformasi itu, tetapi mereka tidak bisa bergabung dengan mahasiswa. Akhirnya, dibentuklah wadah gerakan rakyat yang sekaligus dapat menghubungkan kelompok-kelompok aktivis rakyat dengan aktivis mahasiswa. Salah satu kelompok aktivis di Surabaya yang menampung aktivis rakyat dan sekaligus menghubungkannya dengan aktivis mahasiswa adalah "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" (selanjutnya disingkat ASPR). Kelompok ASPR ini merupakan wadah gerakan rakyat yang merupakan gabungan dari berbagai kalangan, status, dan afiliasi politik.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa adanya tuntutan terhadap penguasa Orde Baru, Soeharto, untuk mundur dari kekuasaannya tidak lepas dari sistem politik Orde Baru itu sendiri utamanya dalam hal pelaksanaan demokrasi yang dianggap sebagai sumber adanya krisis ekonomi dan politik di negeri ini. Dengan demikian, terlihat adanya perbedaan interpretasi terhadap demokrasi, demokrasi Pancasila, di antara Orde Baru dan mahasiswa/rakyat. Orde Baru mengklaim dirinya telah menjalankan sistem demokrasi, sedangkan mahasiswa/rakyat justru menuntut mundur penguasa Orde Baru dengan alasan bahwa Orde Baru tidaklah demokratis dan menurut mereka perlu adanya reformasi. Karena itu, peneliti berkeinginan mengungkap bagaimana wacana demokrasi para aktivis terutama

4 Mei 1998, h. 11.

¹² Deliar Noer, "Denyut Nadi Mahasiswa", dalam *Forum Keadilan* No. 2, 4 Mei 1998, h. 31.

yang melibatkan elemen rakyat ini.

Ada beberapa alasan mengapa studi mengenai wacana demokrasi para aktivis rakyat ini perlu dilakukan. *Pertama*, wacana politik rakyat selama ini lebih banyak disorot dari kacamata mahasiswa yang aktivitas politiknya berperan sebagai "hati nurani rakyat",¹³ sedangkan studi ini berusaha mengungkap wacana politik para aktivis rakyat secara langsung yang selama ini tersingkir dari wacana politik normal karena adanya kebijakan massa mengambang.¹⁴

Kedua, studi yang mengungkap wacana politik (demokrasi) para aktivis rakyat dapat dikatakan masih langka. Wacana politik yang selama ini banyak diteliti adalah wacana mahasiswa,¹⁵ wacana intelektual,¹⁶ wacana petani,¹⁷ dan wacana buruh yang semuanya hanya menghasilkan gambaran wacana para aktivis yang terbatas pada persoalan tertentu. Studi ini memang didasarkan pada inspirasi yang didapat dari berbagai hasil studi tersebut. Namun, yang menjadi inspirasi utama adalah hasil studi yang dilakukan oleh (1) Siswati¹⁸ tentang upaya demokratisasi yang dilakukan PRD, (2) Daniel T. Sparringa¹⁹ tentang wacana intelektual Indonesia

¹³ Raillon, *Politik...*, h. 117.

¹⁴ Muhammad A.S. Hikam, "Bahasa dan Kekuasaan: Penghampiran Discursive Practice" dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 88.

¹⁵ Lihat Priyanto Wardi, "Gerakan Mahasiswa di Surabaya Era 1990-an" (1993), Heru Hendratmoko, "Gerakan Mahasiswa Indonesia" (1992); Ardibowo Gozali, "Hegemoni Kelas Penguasa dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Mahasiswa" (1996); yang kesemuanya adalah skripsi FISIP Universitas Airlangga Surabaya; Siswati, "Partai Rakyat Demokratik dan Demokratisasi: Suatu Studi tentang Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Demokratisasi", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1997.

¹⁶ Lihat Daniel T. Sparringa, "Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia", Tesis Doktoral, Flinders University of South Australia, 1997; Dedy Djarnaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Marochols Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

¹⁷ Lihat Hotman Siahaan, "Pembangunan Tersebut Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996; Abdul Aziz, "Negara dan Perlawanan Elite Petani: Suatu Perspektif Sosiologis Struktural tentang Perlawanan Elite Petani di Pedesaan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996.

¹⁸ Siswati, "Partai ...".

¹⁹ Sparringa, "Discourse ...".

dalam hal demokrasi, dan (3) Anders Uhlin²⁰ yang mengupas demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap atau sebagai bahan perbandingan dari studi-studi tersebut.

Ketiga, studi ini merupakan upaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh Daniel T. Sparringa dalam tesis doktoralnya yang menyatakan bahwa wacana demokrasi yang ditelitinya dari sisi intelektual dapat juga dilihat dari munculnya aktivis muda seperti mereka yang berada di PRD dan LSM yang belum terungkap dalam studinya.²¹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti lebih tertarik untuk menjadikan kelompok aktivis rakyat yang menamakan diri "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" (ASPR) ini sebagai setting studi. Apalagi ASPR ini merupakan kelompok aktivis rakyat yang keberadaannya relatif masih baru—yaitu sewaktu gencar-gencarnya tuntutan reformasi disuarakan—sehingga belum banyak diketahui visi atau ideologi mereka. Padahal mereka secara aktif turun ke jalan untuk menuntut ditegakkannya demokrasi. Dari kenyataan seperti itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana wacana demokrasi mereka.

Mengingat cakupan wacana demokrasi yang sangat luas sedangkan perlu adanya bentuk pembicaraan yang lebih operasional, studi ini membatasi pembicaraan pada tema-tema pokok berkaitan dengan wacana demokrasi tersebut. Dalam menentukan tema-tema ini, peneliti merujuk studi Daniel T. Sparringa yang menyatakan ada empat elemen pokok dalam wacana resmi Orde Baru, yaitu

²⁰ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) merupakan buku edisi Indonesia dari disertasinya yang berjudul *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy in a Changing World*, (London, Curzon Press, 1997).

²¹ Lihat Sparringa, "Discourse ...", h. 321.

Demokrasi Pancasila, Dwifungsi, persatuan nasional, dan SARA.²² Akan tetapi, dengan maksud untuk lebih menyederhanakan, dua elemen terakhir tersebut dalam studi ini digolongkan dalam satu tema "persatuan nasional" karena terdapat hubungan yang sangat erat di antara keduanya.

Adapun tema-tema yang menjadi pokok pembicaraan studi ini beserta sub-subnya adalah sebagai berikut:

Demokrasi Pancasila

Dalam tema ini, studi ini mencoba memahami respons ASPR terhadap Demokrasi Pancasila yang partikularistik, kebijakan massa mengambang, dan konsep negara integralistik.

Dwifungsi ABRI

Dalam lingkup tema ini, studi ini mencoba memahami respons ASPR terhadap konsepsi politik tentang dwifungsi ABRI, pengangkatan militer dalam birokrasi sipil, pengangkatan militer dalam parlemen, dan hubungan ABRI dengan Golkar.

Persatuan Nasional

Dalam hubungannya dengan tema ini, studi ini berusaha memahami respons ASPR terhadap hubungan pusat dan daerah, ketegangan SARA, ancaman ekstrem kiri dan kanan (komunis dan Islam radikal).

Tema-tema tersebut dijadikan sebagai acuan pembicaraan dalam menjawab permasalahan studi ini.

²² Idem, h. 4.

Rumusan Masalah

Studi ini berusaha mengungkap permasalahan pokok Bagaimana wacana demokrasi para aktivis khususnya pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi." Dalam perspektif tersebut, studi ini berusaha memahami permasalahan yang lebih khusus sebagai berikut:

- (1) Bagaimana kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" merespons wacana Orde Baru? Komponen-komponen manakah yang ditolak dan mana pula yang diterima? Apakah penolakan itu bersifat superfisial ataukah mendalam?
- (2) Wacana demokrasi macam apakah yang diidealkan oleh kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi"? Apakah wacana yang mereka kembangkan itu merupakan wacana alternatif?

Tujuan Studi

Secara umum, studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif dan eksplanatif mengenai wacana demokrasi para aktivis khususnya pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi".

Secara khusus, studi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan deskriptif dan eksplanatif tentang hal-hal berikut:

- (1) Respons kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" terhadap wacana Orde Baru; Komponen-komponen yang ditolak dan yang diterima mereka; Sifat penolakan mereka—superfisial ataukah mendalam.
- (2) Wacana demokrasi yang diidealkan oleh kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi"; Menentukan apakah wacana yang mereka kembangkan itu merupakan wacana alternatif.

Manfaat Studi

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- (1) Secara teoretis, sasaran studi ini adalah terkumpulnya data tentang wacana demokrasi kelompok aktivis khususnya pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" sehingga diharapkan hasil studi ini nanti dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan kajian teoretis bagi studi yang sejenis.
- (2) Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pengambil kebijakan, organisasi politik, atau lembaga-lembaga artikulasi kepentingan (DPR dan DPRD) terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan dapat diperjuangkan dalam proses politik yang ada.

Sistematika Tesis

Untuk memberikan gambaran secara umum, pada bab pertama ini dicantumkan sistematika tesis. Tesis ini terdiri atas sepuluh bab. *Bab pertama* menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi studi, masalah dan tujuan studi, serta manfaat studi. Pada *bab kedua* diuraikan beberapa konsep istilah yang digunakan dalam studi ini: konsep wacana, konsep demokrasi, wacana demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat serta teori yang dianggap relevan untuk analisis studi ini: teori ideologi (hegemoni Gramsci dan kekuasaan/pengetahuan Foucault) dan teori perlawanan. *Bab ketiga* memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang menyangkut tipe dan setting studi, koleksi data, dan analisis data.

Pada *bab keempat* dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wacana politik Orde Baru. Pembicaraan mengenai wacana politik Orde Baru ini dianggap

perlu mengingat studi ini berusaha mengungkap respons ASPR terhadap wacana tersebut. Dengan demikian, wacana Orde Baru yang menjadi wacana dominan ini dipakai sebagai anteseden dari wacana demokrasi para aktivis.

Pada *bab kelima* dipaparkan profil “Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi” sebagai generasi baru gerakan rakyat prodemokrasi dan hak asasi manusia. Karena pembentukannya tidak lepas dari hubungannya dengan gerakan aktivis mahasiswa, bagian ini diawali dengan uraian singkat gerakan aktivis mahasiswa dan proses terbentuknya gerakan rakyat ini.

Bab keenam sampai bab kedelapan berisi temuan lapangan yang disajikan berdasarkan tiga tema pokok di atas. *Bab keenam, ketujuh, dan kedelapan* secara berturut-turut menyajikan temuan lapangan dengan tema demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional. Sajian temuan lapangan itu disertai ruang diskusi. Ruang diskusi ini dimaksudkan untuk menghubungkan temuan lapangan dengan studi atau pendapat para ilmuwan lain.

Bab kesembilan dijadikan sebagai ruang pembahasan. Pada bagian ini peneliti berusaha membahas temuan lapangan yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bab pertama. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan dan tujuan studi ini.

Akhirnya, pada *bab kesepuluh* disampaikan kesimpulan studi yang disertai ruang implikasi teoretis. Ruang implikasi teoretis tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menempatkan hasil studi ini pada posisi teori yang relevan dengan dukungan studi-studi lain yang terkait dengan studi ini.

BAB II

KONSEP DAN TEORI YANG RELEVAN

Pada bab ini secara berturut-turut diuraikan beberapa konsep yang digunakan dalam studi ini yang meliputi wacana, demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat, serta teori yang relevan untuk mengadakan analisis data studi yang berupa teori ideologi (hegemoni Gramsci, kekuasaan/pengetahuan Foucault) dan teori perlawanan.

Konsep Wacana

Istilah wacana digunakan secara luas dalam teori dan analisis sosial berkenaan dengan cara-cara membangun pengetahuan dan praktik sosial. Pengkajian wacana dianggap penting karena proses-proses sosial politik tidak selalu berada dalam 'praksis kerja' yang terbatas pada pengendalian sarana teknis dan sistem reproduksi material, tetapi juga dalam 'praksis komunikasi' yang pengendalian sosialnya berada dalam sistem reproduksi ideasional yang terungkap dalam wacana.¹

Wacana ini dimanifestasikan dalam hal-hal khusus yang menggunakan bahasa dan bentuk-bentuk simbol yang lain. Sebagai fungsi pragmatik bahasa, secara sosial wacana terikat, dikonstruksi, dan direkonstruksi dalam kondisi khusus dan setting sosial tertentu. Wacana mampu merefleksikan hubungan-hubungan sosial maupun ideologi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dan merupakan refleksi sikap dan sifat bagi pengujarnya dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Wacana bukan hanya merupakan alat reproduksi untuk menyuarakan

¹ Yudi Latif dan Idi Subandyo Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), h.16.

kembali gagasan-gagasan, namun sebaliknya wacana dapat membentuk gagasan dan panduan aktivitas mental individu yang merupakan dasar realitas yang diciptakan.² Dengan perkataan lain, wacana dapat membangun pengalaman dan pengalaman dapat membentuk wacana.³

Foucault—sebagaimana diungkapkan Sparringa⁴—lebih memusatkan pandangan tentang kategori wacana pada konsep pernyataan. Menurut dia, arena wacana terdiri atas hal-hal yang bersaing dalam memberikan makna terhadap dunia dan dalam mengorganisasikan institusi dan proses sosial. Dalam pengertian ini, wacana menunjuk kepada hal-hal yang didapatkan dari pembicaraan/tulisan dan dari penciptaan makna tempat kekuatan sosial mengoperasikannya untuk menghasilkan maksud dan efek tertentu. Ini sebabnya wacana mewujudkan apa yang mereka definisikan sebagai pengetahuan dan karena itu menimbulkan kekuasaan.

Sementara itu, Richard Terdiman—seperti dikatakan Hikam⁵—mengartikan wacana sebagai “kompleksitas isyarat dan tindakan-tindakan yang mengatur keberadaan dan reproduksi sosial”. Jadi, wacana adalah “berbagai isu pokok yang diberikan kepada anggota dalam kelompok atau formasi sosial, yang menengahi antara rasa memiliki kelompok internal dengan kelompok lainnya”. Di dalam dan melalui wacana ini, perjuangan dapat terjadi. Namun, wacana bukanlah sekadar ekspresi perjuangan atau sistem dominasi, melainkan juga kekuasaan tempat seseorang memperluas pengaruhnya.

² Sri Wiryanti Budi Utami, *Pria/Wanita: Studi Perbedaan Wacana Proses Pengambilan Keputusan Masalah Publik di Lingkungan Kelompok*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1997, 36—37.

³ Idem, h. 41 & 58.

⁴ Sparringa, *“Discourse...”*, h. 31—32.

⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 172—173.

Berdasarkan uraian di atas, istilah "wacana" yang digunakan dalam studi ini mengacu pada segala pernyataan, gagasan, pemikiran serta tindakan/perilaku yang ditunjukkan oleh kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" yang berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Konsep Demokrasi

Secara harfiah, demokrasi diartikan sebagai "pemerintahan oleh rakyat". Akan tetapi, jika "pemerintahan oleh rakyat" ini diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan nasional, dapat dipastikan bahwa demokrasi tidak mungkin terwujud.⁶ Karena itu, saat ini ada kecenderungan kuat banyak negara mengartikan demokrasi dalam kaitannya dengan sistem perwakilan. Hal ini berarti bahwa keputusan tidak dicapai atas hasil suara keseluruhan penduduk, tetapi atas wakil-wakil rakyat yang terpilih.

Sehubungan dengan perkembangan konsep demokrasi ini, muncullah tiga pendekatan umum, yaitu (1) berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, (2) berdasarkan tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan (3) berdasarkan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Namun, demokrasi lebih banyak didefinisikan berdasarkan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Joseph Schumpeter, misalnya, memberikan rumusan konsep demokrasi yang menyatakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin.⁷

⁶ R. Siti Zubro, "Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoretis", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 32-33.

⁷ Lihat Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 4.

Dengan mengikuti tradisi Schumpeterian tersebut, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sistem politik dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan untuk berbicara, pers, berkumpul dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu. Sebaliknya, suatu sistem dikatakan tidak demokratis apabila oposisi tidak diperbolehkan di dalam pemilihan umum atau dikontrol dan dihalang-halangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, koran-koran oposisi disensor atau dibredel, atau hasil pemungutan suara dalam pemilihan dimanipulasi atau penghitungannya tidak benar.⁸

Definisi di atas mengisyaratkan bahwa demokrasi mengandung dua dimensi, yaitu kontes dan partisipasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Russel Bova⁹ yang menganggap demokrasi sebagai sebuah sistem politik minimal mempertemukan dua kriteria, yaitu (1) kriteria partisipasi, yang menganggap semua anggota komunitas politik yang dewasa mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses politik, khususnya dalam proses pemilihan pegawai-pegawai publik dan (2) kriteria kontestasi, yang menganggap pembuat keputusan politik dipilih melalui kompetisi di antara berbagai kandidat dan partai.

Konsep demokrasi yang bersumber pada tradisi Schumpeterian di atas ditekankan pada "kompetisi memperoleh suara rakyat/pemilih" sebagai esensi

⁸ Idem, h. 5-6.

⁹ Russel Bova, "Democracy and Liberty: The Cultural Connection", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 8, Number 1, January 1997, h. 113.

demokrasi. Definisi yang terbatas pada esensi itu disebut definisi "minimalis", disebut juga demokrasi elektoral atau demokrasi formal. Dikatakan minimalis karena betapa pun sentralnya arti pemilu dalam demokrasi, pemilu berlangsung hanya secara berkala dan hanya memberi peluang bagi rakyat untuk memilih alternatif-alternatif yang dikemas oleh orsospol dalam bentuk yang sangat umum atau sangat agregatif.¹⁰

Karena itu, diperlukan elaborasi lebih lanjut terhadap konsep demokrasi Schumpeter tersebut. Robert Dahl telah melakukannya dengan memperkenalkan konsep poliarki yang menghendaki tidak saja perlu adanya *kompetisi dan partisipasi politik* yang luas dari rakyat, tetapi juga harus ada tingkat-tingkat *kebebasan sipil* yang substansial (berbicara, pers, agama, berpendapat/berpikir, berkumpul, berorganisasi, dsb.) dan *pluralisme* sehingga memungkinkan rakyat membentuk dan menyatakan preferensi-preferensi politiknya secara bermakna.¹¹

Istilah poliarki didefinisikan sebagai suatu tatanan politik yang ditandai oleh adanya tujuh lembaga yang harus ada pada pemerintah agar dapat digolongkan sebagai suatu poliarki. Tujuh lembaga tersebut adalah¹²

- (1) Para pejabat yang dipilih melakukan pengawasan terhadap keputusan pemerintah.
- (2) Pemilihan umum yang bebas dan adil.
- (3) Hak suara yang inklusif, artinya semua orang dewasa berhak memberikan suara dalam pemilihan para pejabat.
- (4) Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.
- (5) Kebebasan menyatakan pendapat tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi dan ideologi.
- (6) Informasi alternatif, artinya warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif.
- (7) Otonomi asosiasional, artinya warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.

¹⁰ A. Haman Habib, "ABRI dan Demokratisasi Politik", dalam Selamat Ginting ed., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 22.

¹¹ Idem h. 23.

¹² Lihat Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya II*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 16.

Jauh lebih luas daripada demokrasi elektoral adalah demokrasi liberal. Selain pemilihan yang teratur secara berkala dan luber, demokrasi liberal juga (1) tidak menghendaki adanya 'bidang-bidang di luar jangkauan' pengawasan dan pengendalian rakyat yang dikuasai oleh segolongan tertentu saja, misalnya militer atau kekuatan-kekuatan soshopol lainnya yang tidak bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat) baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) mempunyai pertanggungjawaban 'vertikal', yakni pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan/rakyat, dan pertanggungjawaban 'horizontal', yaitu antara pemegang kekuasaan satu dengan yang lain (misalnya antara eksekutif dan legislatif) sehingga tercipta suatu *checks and balances* yang membantu melindungi konstitusi, menegakkan *rule of law* dan menjamin berlangsungnya proses musyawarah; (3) membuat ketentuan-ketentuan tentang pluralisme sipil dan politik serta kebebasan-kebebasan perorangan dan kelompok.¹³

Ciri demokrasi liberal selengkapnya¹⁴ adalah sebagai berikut:

(1) Real power lies—in fact as well as in constitutional theory—with elected officials and their appointees, rather than with unaccountable internal actors (e.g. the military) or foreign powers. (2) Executive power is constrained constitutionally and held accountable by other government institutions (such as an independent judiciary, parliament, ombudsman, and auditor general). (3) Not only are electoral outcomes uncertain, with a significant opposition vote and the presumption of party alternation in government over time, but no group that adheres to constitutional principles is denied the right to form a party and contest elections (even if electoral thresholds and other rules prevent smaller parties from winning representation in parliament). (4) Cultural, ethnic, religious, and other minority group, as well as traditionally disadvantaged or unempowered majorities, are not prohibited (legally or in practice) from expressing their interests in the political process, and from using their language and culture. (5) Beyond parties and intermittent elections, citizens have multiple,

¹³ Habib, "ABRI ...", h. 27.

¹⁴ Lihat Larry Diamond, "Is The Third Wave Over?" dalam *Journal of Democracy*, Volume 7, Number 3, July 1996, h. 23—24.

ongoing channels and means for the expression and representation of their interests and values, including a diverse array of autonomous associations, movements, and groups that they are free to form and join. (6) In addition to associational freedom and pluralism, there exist alternative sources of information, including independent media. (7) Individuals have substantial freedom of belief, opinion, discussion, speech, publication, assembly, demonstration, and petition. (8) Citizens are politically equal under the law, and the above-mentioned individual and group liberties are effectively protected by an independent, impartial judiciary whose decisions are enforced and respected by other centers of power. (9) The rule of law protects citizens from unjustified detention, exile, terror, torture, and undue interference in their personal lives not only by state but also by organized antistate forces. [(1) Kekuasaan berada pada pejabat-pejabat yang dipilih, tidak pada orang atau pejabat yang tidak dipilih (misalnya birokrat atau militer). (2) Kekuasaan pemerintah eksekutif dibatasi oleh konstitusi dan bertanggung jawab kepada lembaga-lembaga pemerintah lainnya (kehakiman yang bebas, parlemen, badan pemeriksa keuangan). (3) Hasil pemilu tidak boleh ditentukan sebelumnya, pihak oposisi harus memperoleh peluang untuk menang, serta harus ada kemungkinan pergantian partai/orsospol yang memerintah. Selain itu, kelompok-kelompok yang berpegang kepada ketentuan-ketentuan konstitusi tidak boleh dikebiri haknya untuk membentuk partai dan ikut dalam pemilu. (4) Kelompok-kelompok kultural, etnik, agama dan minoritas tidak boleh dilarang untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya dalam proses politik dan untuk menggunakan bahasa dan budayanya. (5) Selain melalui orsospol dan pemilu, rakyat mempunyai banyak saluran dan sarana lain untuk menyatakan kepentingan dan nilai-nilai yang dianutnya, bebas membentuk atau menjadi anggota berbagai macam perkumpulan yang otonom, gerakan, dan kelompok. (6) Selain kebebasan berasosiasi dan pluralisme, terdapat pula sumber-sumber informasi alternatif, termasuk media pers yang bebas. (7) Individu-individu mempunyai kebebasan beragama, berpendapat, berdiskusi, berbicara, publikasi, berkumpul, berdemonstrasi, dan menyampaikan petisi. (8) Setiap warga negara adalah sama di depan hukum dan undang-undang; kebebasan-kebebasan individu maupun kelompok dilindungi secara efektif oleh kehakiman yang bebas dan tidak berpihak serta semua keputusannya dihormati dan dilaksanakan oleh pusat-pusat kekuasaan lainnya. (9) Pemerintahan berdasar hukum melindungi warga negara dari penahanan yang tidak sah dan tidak beralasan, pengasingan, teror, penyiksaan, dan campur tangan yang tidak semestinya dalam kehidupan pribadinya, tidak saja oleh negara melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan organisasi antipemerintah.]

Selain bentuk demokrasi elektoral dan liberal, terdapat bentuk demokrasi *pseudo* (gadungan, pura-pura). Dalam demokrasi *pseudo* ini, partai-partai oposisi masih diizinkan berada secara legal dan mungkin juga berbagai ketentuan

konstitusional lainnya seperti dalam demokrasi elektoral, tetapi satu persyaratan krusial tidak ada, yaitu peluang yang fair dalam berkompetisi yang memungkinkan partai yang berkuasa (partai pemerintah) kalah dan kehilangan kekuasaan untuk memerintah.¹⁵

Jika suatu rezim tidak memiliki ciri-ciri demokrasi seperti di atas, dapat dikatakan bahwa rezim tersebut termasuk rezim otoriter. Rezim tersebut umumnya berupa rezim militer yaitu suatu rezim yang sangat otoriter, sistem politik negara dikuasai oleh kaum militer.¹⁶

Konsep demokrasi seperti di atas dipakai sebagai dasar analisis yang berkaitan dengan penilaian ASPR terhadap sistem politik Orde Baru, apakah sistem politik Orde Baru dapat dianggap demokratis atau tidak.

Wacana Demokrasi

Untuk pemahaman lebih mendalam terhadap kelompok ASPR, perlu dipertimbangkan pula ideologi mereka secara lebih terperinci. Preferensi ideologis tercermin dalam wacana demokrasi yang mereka gunakan. Karena itu, diperlukan uraian singkat mengenai bentuk-bentuk wacana demokrasi dengan harapan agar memudahkan peneliti dalam menentukan kategori wacana demokrasi kelompok ASPR. Untuk itu, studi merujuk studi Anders Uhlin¹⁷ yang membedakan wacana demokrasi menjadi tiga wacana utama yang terbagi ke dalam beberapa subwacana seperti uraian berikut.

¹⁵ Idem, h. 24.

¹⁶ Habib, "ABRI...", h. 27.

¹⁷ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 133—142.

Wacana Radikal

Wacana radikal mengacu pada bentuk-bentuk demokrasi partisipatoris yang lebih berorientasi kemasyarakatan atau melibatkan kelas bawah atau kelompok pinggiran. Demokrasi harus muncul dari bawah dan tidak bisa diberikan dari atas. Kandungan keputusan demokratis haruslah bertujuan pada emansipasi. Kesetaraan antarkelas dan/atau jenis kelamin dipandang sebagai prasyarat bagi berjalannya semua bentuk demokrasi. Demokrasi berarti kesetaraan politik, tetapi ini mustahil dicapai tanpa kesetaraan sosioekonomi. Pinsip-prinsip demokrasi harus dipraktikkan di seluruh bidang kehidupan terutama di bidang ekonomi. Wacana radikal ini meliputi wacana Marxis, wacana populis kiri, dan wacana feminis.

Wacana Marxis

Kesetaraan sosial dan ekonomi dipandang sebagai prasyarat bagi demokrasi. Karena itu, ekonomi sosialis dipandang sebagai prasyarat bagi demokrasi yang sejati sehingga bisnis swasta skala kecil lebih banyak diterima. Demokrasi ini tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat kelas menengah, tetapi juga melibatkan kelas bawah. Dalam hal strategi demokratisasi, wacana ini tidak menerima pendekatan gradualis. Yang dibutuhkan adalah transformasi mendalam dan dirasakan perlu adanya penggalangan massa.

Wacana Populis Kiri

Wacana ini juga memandang sosial dan ekonomi sebagai prasyarat demokrasi. Demokrasi harus diperluas ke wilayah ekonomi dan sosial dan diperlukan partisipasi masyarakat. Kandungan keputusan demokratis harus menguntungkan mayoritas rakyat kecil. Tekanan demokratisasi harus datang dari bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya negosiasi atau aliansi dengan kelompok elite.

Wacana Feminis

Wacana ini didasarkan pada kesetaraan antarjenis kelamin. Kesempatan akses yang sama pada lembaga politik dipandang sebagai prasyarat bagi demokrasi. Ciri-ciri umum wacana ini meliputi penekanan pada demokrasi partisipatoris serta struktur keputusan yang terdesentralisasi dan tidak hierarkis. Demokrasi harus tumbuh dari bawah, melibatkan perempuan di tingkat masyarakat bawah. Keputusan demokratis harus menyerang ketidakadilan gender dan mengarah pada emansipasi perempuan.

Wacana Liberal

Wacana liberal memandang ekonomi pasar sebagai prasyarat bagi demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi harus dipraktikkan di dalam politik, tetapi tidak boleh diperluas ke wilayah ekonomi karena akan mengancam ekonomi pasar dan merongrong demokrasi. Kebebasan sipil dan hak-hak individu dianggap penting dan harus dihargai dalam sebuah demokrasi perwakilan. Rakyat harus memilih wakil-wakilnya dalam sebuah pemilihan umum yang bebas. Mereka harus mampu memilih di antara beberapa elite yang bersaing, tetapi partisipasi yang terlalu banyak dari masyarakat tidak diinginkan. Demokratisasi merupakan proses gradual yang memperkuat organisasi-organisasi otonom dalam masyarakat sipil. Reformasi demokratis berlangsung terutama atas jaminan dari atas sehingga gerakan massa tidak diperlukan dan bahkan dapat mengancam proses demokratisasi. Wacana demokrasi liberal ini meliputi wacana demokratis sosial, wacana liberal politis, dan wacana liberal ekonomis.

Wacana Demokratis Sosial

Wacana ini memperjuangkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi menggunakan pendekatan terhadap reformasi politik dan transformasi sosial yang

bersifat gradual, melibatkan garis lunak yang mewakili rezim berkuasa, dan menekankan pentingnya penguatan masyarakat sipil.

Wacana Liberal Politis

Wacana liberal politis menaruh tekanan pada hak-hak politik individual, seperti kebebasan dan hak sipil dasar dan politis—kebebasan berpendapat, berbicara, dan sebagainya. Ciri pokok wacana ini adalah bahwa demokrasi dipandang sebagai kompetisi antarelite politik dan antarpantai. Para elite yang bersaing itu harus memperebutkan suara dalam pemilihan umum yang didasarkan pada hak pilih yang universal dan setara. Talanan kelembagaan seperti parlemen, lembaga eksekutif, dan peradilan merupakan hal sentral bagi wacana demokrasi ini.

Wacana Liberal Ekonomis

Wacana ini lebih peduli terhadap ekonomi pasar daripada demokrasi. Liberalisasi ekonomi akan mengarah pada liberalisasi kehidupan politik. Demokratisasi harus datang dari atas.

Wacana Konservatif

Wacana konservatif merupakan wacana yang tujuannya terletak pada aturan hukum sesuai dengan UUD 1945, tetapi tidak akan memperbolehkan reformasi sosioekonomi yang mendalam. Ekonomi pasar, kepemilikan swasta, sistem hukum yang mantap, dan khususnya stabilitas sosial, merupakan prasyarat bagi model demokrasi konservatif. Partisipasi politik dari kaum buruh dan petani diatasi sekuat mungkin. Wacana ini mengutamakan persatuan nasional yang mengesahkan sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan alasan melindungi Republik dari upaya-upaya "separatis". Perubahan sosioekonomi tidak diinginkan karena hal itu akan mengancam stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi. Demokratisasi mengambil bentuk reformasi gradual moderat yang tidak

mengganti struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Reformasi itu harus dipaksakan dari atas oleh kaum demokrat moderat dan garis lunak dalam elite penguasa yang sedang berkuasa.

Selain ketiga wacana di atas, ada wacana demokrasi Islam yang dibedakan atas modernisme, neomodernisme, dan transformisme.

Hubungan Negara dengan Masyarakat

Berbicara tentang demokrasi tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang interaksi antara negara dan masyarakat. Asumsinya adalah bahwa apabila masyarakat secara relatif kuat berhadapan dengan negara, demokrasi berlaku. Sebaliknya apabila negara kuat dan masyarakat lemah, demokrasi gagal. Sehubungan dengan hal tersebut, konsep negara dan masyarakat yang memandang demokratisasi sebagai hasil pemerkuatan dan pendinamisan masyarakat melawan negara¹⁶ dirasakan sangat penting untuk digunakan sebagai kerangka analisis. Untuk itu diperlukan adanya uraian tentang negara dan hubungannya dengan masyarakat.

Negara dianggap sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Ia dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat, bahkan memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya. Kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena ia merupakan lembaga yang mewakili kepentingan umum sehingga dapat

¹⁶ Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clyton: Monash University, 1992), h. 3 & 5.

memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.¹⁹ Karena itulah, negara dipandang sebagai organisasi yang unik. Ia berada di dalam sekaligus di atas masyarakat karena ia sebagai instrumen koalisi masyarakat yang memiliki otonomi. Ia memonopoli kewenangan paksaan, tetapi tetap mendapat legitimasi dari masyarakat karena klaimnya yang mewakili kepentingan umum.²⁰

Hubungan negara dengan masyarakat seharusnya merupakan hubungan simbiosis dengan tiap-tiap pihak harus memainkan peran masing-masing apabila ingin eksis dalam hubungan tersebut. Akan tetapi, hubungan seperti itu ternyata disalahgunakan oleh negara. Negara ternyata melakukan ekspansi dari masyarakat publik (*public society*) ke masyarakat sipil (*civil society*) dan pasar sehingga menjadi semakin kuat di hadapan masyarakatnya. Kekuatan itu seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, tetapi justru sering dipakai untuk mengeksploitasi masyarakat.²¹ Gejala peran negara yang dominan inilah yang berakibat pada terkesampingkannya dan terkekangnya masyarakat baik secara ekonomi maupun politik.²²

Di Indonesia, kekuatan negara muncul karena adanya peran militer yang amat kuat yang menguasai kehidupan politik maupun ekonomi sehingga tidak ada kekuatan masyarakat yang dapat mengimbangi kekuatan negara. Hal ini sesuai dengan tradisi pemikiran politik Barat yang memandang bahwa kehadiran negara di masyarakat sedang berkembang merupakan hambatan terhadap upaya

¹⁹ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), h. 106.

²⁰ Ramlan Surbakti, "Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dengan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 7—8.

²¹ I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 3.

²² Siti Aminah, "Dominasi Negara dalam Kehidupan Kelompok Marjinal di Perkotaan", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 86.

pencapaian keadilan sosial dan ekonomi karena memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang korup, yang mengabaikan kebutuhan-kebutuhan pokok warganya, dan yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.²³

Orde Baru tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang "relatif mandiri" berhadapan dengan masyarakat bahkan ia telah menjadi kekuatan dominan. Hal ini terjadi karena Orde Baru memang diciptakan terutama untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap masyarakat, terutama dalam upaya membelenggu aktivitas politik mereka agar proses akselerasi industrialisasi tidak terganggu. Dengan demikian, negara tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik raksasa yang terpadu, dinamis, menyebar, represif, birokratis, dan teknokratis. Karena itu, hubungan antara Orde Baru dengan masyarakat cenderung seperti hubungan antara penjajah dengan si terjajah—negara secara terus menerus meningkatkan pengawasan secara efektif dan menyingkirkan sektor massa dari partisipasi.²⁴

Karena gejala yang menandai Orde Baru sebagai negara dengan kekuatan dominan dan mensubordinasikan masyarakat, teori negara yang digunakan dalam studi ini adalah teori negara otonom Nicos Poulantzas sebagaimana yang telah digunakan oleh R. Eep Saefulloh Fatah dalam menganalisis Orde Baru.²⁵

Dalam pandangan Poulantzas, negara merupakan badan yang aktif, dominan, hegemonik, dan mandiri dalam membuat kebijakan dalam rangka mencapai tujuan untuk kepentingan negara. Untuk itu, fungsi utama negara adalah melakukan pembentukan dan pengaturan blok kekuasaan (*power bloc*) untuk

²³ Makmur Keliat, "Negara dan Globalisasi", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 22.

²⁴ Hikam, *Demokrasi ...*, h. 14 & 17.

²⁵ Lihat R. Eep Saefulloh Fatah, "Teori Negara dan Negara Orde Baru", dalam *Prisma* 12, Desember 1994, h. 85—103.

menjamin tercapainya tujuan-tujuan negara dengan mempergunakan sistem dominasi aparatur negara yang terdiri atas aparatur represif (penekan) dan aparatur ideologi. Aparatur represif bertugas menjalankan dan memaksakan kehendak negara kepada masyarakat, sedangkan aparatur ideologi bertugas mensosialisasikan ideologi negara.

Meskipun posisi negara sangat kuat, selalu ada beberapa ruang tempat beberapa kelompok secara aktif melakukan segala sesuatu untuk memperlebar kebebasan pribadi mereka dan membela kepentingan individu serta kelompok mereka.²⁶ Karena itu, sangat diharapkan munculnya kekuatan *civil society* untuk mengimbangi dominasi negara. Kekuatan-kekuatan itu diharapkan mampu mendorong sikap politik penguasa agar lebih demokratis dan realistis dalam melihat kenyataan perubahan yang terjadi di masyarakat.²⁷

Pembentukan *civil society* tidak berarti meniadakan negara karena peran negara tetap sangat diperlukan untuk menjamin dan/atau menyelenggarakan kepentingan umum yang merupakan hasil interaksi antara pemerintah dan *civil society*. Yang diharapkan dari hubungan negara dengan masyarakat ini ialah negara menjamin hak-hak asasi masyarakat, menghormati kebebasan berwacana publik, membiarkan lembaga-lembaga yang termasuk ruang publik mengurus rumah tangganya sendiri, dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan publik yang merupakan hasil wacana publik yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah. Jadi, hubungan ini berupa interaksi, bukan aksi-reaksi.²⁸

²⁶ Budiman, *State ...*, h. 367.

²⁷ Burhan Bungin, "Hubungan Negara dan Masyarakat: Analisis Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 16, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 11.

²⁸ Ramlan Surbakti, "Ditsoepol dan Pembentukan Civil Society", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 112.

Konsep *civil society* dihubungkan dengan hak asasi manusia yang kemudian disebut hak-hak sipil. Ia adalah sebuah masyarakat yang memiliki hak asasi. Sesuai dengan konsep ini, negara harus bertugas melindungi *civil society* apalagi mereka menjadi kekuatan nyata yang dapat mengubah sejarah umat manusia.²⁹ Dalam pengertian ini, *civil society* yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi.³⁰

Civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Masyarakat mandiri menyiratkan adanya kemandirian dan kemalangan politis sehingga tidak perlu sepenuhnya ditundukkan negara. Justru *civil society* merupakan entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang dan kecenderungan intervensi negara dan pada saat yang sama mampu melahirkan kekuatan kritis.³¹ Hikam mendefinisikan *civil society* sebagai

wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.³²

²⁹ Budiman, *State ...*, h. 4.

³⁰ Idem, h. 365.

³¹ Hikam, *Demokrasi ...*, h. 84—85.

³² Idem, h. 3.

Kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" dapat digolongkan ke dalam *civil society*—berdasarkan ciri-ciri yang tersebut dalam definisi *civil society* di atas—karena segala aktivitasnya berhubungan dengan perjuangan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak sipil, serta memperjuangkan kebebasan dan hak-hak rakyat melawan dominasi negara. Seringnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok ASPR untuk memprotes segala kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau untuk menyuarkan ditegakkannya demokrasi³³ merupakan bukti nyata bahwa kelompok ASPR bertindak sebagai kekuatan pengimbang dan menjadi kekuatan kritis. Karena itu, dari kelompok ini peneliti berharap dapat memahami wacana demokrasi mereka sebagai salah satu bentuk wacana demokrasi rakyat.

Untuk keperluan analisis data studi ini diperlukan adanya teori yang diharapkan dapat memberikan pola bagi interpretasi data, menghubungkan satu studi dengan lainnya, menginterpretasikan makna dari temuan yang diperoleh dari suatu studi, dan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi seperti itu.³⁴ Sesuai dengan permasalahan studi ini, teori yang digunakan adalah teori ideologi (hegemoni Gramsci, kekuasaan/pengetahuan Foucault) dan teori perlawanan. Berikut ini diuraikan teori-teori tersebut.

³³ Aktivitas semacam inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk menggolongkan kelompok ASPR dalam kelompok aktivis sesuai dengan definisi kata 'aktivis' yang terdapat dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 20.

³⁴ Ramlan Surbakti, "Teori dalam penelitian Ilmu Sosial", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 82.

Konsep Ideologi

Ideologi dapat dipahami secara positif dan dapat dipahami secara negatif. Dalam pengertian positif, ideologi berkenaan dengan sistem pendapat, nilai, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu dengan nilai kognitif yang bervariasi.³⁵ Ideologi juga diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka. Ideologi tampak sebagai penjelmaan dari suatu hasil konsensus bersama dari berbagai kelompok atau golongan kepentingan.³⁶ Sistem nilai atau kepercayaan itu diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu sebagai pegangan untuk menyaring arus informasi yang diterima.³⁷

Sementara itu, dalam pengertian yang negatif, ideologi dipahami sebagai konsep kritis yang berarti bentuk kesadaran palsu atau kebutuhan untuk melakukan penipuan, maksudnya bagaimana memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial, nilai kognitif dari ide-ide yang dipengaruhi oleh ideologi.³⁸ Dalam hal ini ideologi mempunyai peran penting dan merupakan kekuatan yang akar-akarnya tertanam di dalam macam-macam lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakkan sistem sikap dan nilai yang mendukung.³⁹ Ia sering digunakan untuk melindungi kepentingan elite-elite kepercayaan yang ditentukan secara sosial, bahkan sering digunakan untuk memelihara status quo

³⁵ Jorge Larraín, *Konsep Ideologi*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 199.

³⁶ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), h. 187.

³⁷ Lyman Tower Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), h. 3 & 5.

³⁸ Larraín, *Konsep ...*, h. 2.

³⁹ Utami, "Pria/Wanita ...", h. 42.

(kemapanan) atau sebagai pembenaran dari tindakan-tindakan yang ingin mengubah status quo.⁴⁰ Memang ideologi memainkan peran tepat dalam menyembunyikan hubungan antarkelas yang sebenarnya dengan menerangkan hubungan dominasi dan subordinasi. Dengan begitu, hubungan-hubungan sosial tampak harmonis dan individu-individu melaksanakan praktik-praktik reproduktif mereka tanpa perpecahan sehingga dapat mengesahkan struktur dominasi.⁴¹

Mengingat besarnya pengaruh ideologi pada kehidupan manusia dan memungkinkan kita menganalisis interaksi antara sistem politik dan lingkungannya yaitu antara para elite dan tingkah laku massa rakyat, studi ini berusaha mengungkap ideologi yang digunakan oleh penguasa Orde Baru dalam berhadapan dengan masyarakat sebagai lawan politiknya terutama berkaitan dengan masalah demokrasi di Indonesia. Teori ideologi yang digunakan dalam studi ini secara berturut-turut diuraikan di bawah ini.

Konsep Hegemoni Gramsci

Teori hegemoni Gramsci dinilai sangat signifikan untuk diterapkan dalam analisis studi ini karena fenomena yang ada—sebagaimana sebagian telah disinggung di atas—menunjukkan adanya dominasi negara (Orde Baru) atas masyarakat dalam masa yang cukup lama. Selain itu, perlu adanya pemahaman komprehensif tentang peran masa depan gerakan rakyat dan pendidikan massa—termasuk dalam hal ini aktivitas yang dilakukan ASPR—dalam formasi sosial di Indonesia ini.

⁴⁰ Didi Kriana, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), h. 62.

⁴¹ Larraín, *Konsep ...*, h. 47.

Dalam pandangan Gramsci, negara merupakan sebuah instrumen terpenting bagi ekspansi kekuatan kelas yang dominan dan sebuah kekuatan koersif yang membuat kelompok subordinat tetap lemah dan tidak terorganisasi sehingga kelas penguasa tetap dapat mempertahankan kekuasaannya.⁴² Untuk tujuan itu, negara sering menempuh dua cara, yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang kedua inilah yang disebut hegemoni.⁴³ Kepemimpinan moral dan filosofis, demikian Bocock menyebutnya, merupakan kepemimpinan yang dicapai melalui persetujuan aktif dari kelompok-kelompok utama dalam masyarakat, ⁴⁴ yaitu persetujuan yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi dominan yang ada dianggap sah.⁴⁵

Hegemoni, menurut Kolakowski⁴⁶, merupakan pengendalian kehidupan intelektual masyarakat oleh sarana-sarana budaya. Water lebih lanjut menjelaskan bahwa hegemoni merupakan upaya kelompok-kelompok sosial untuk mengendalikan 'organisasi-organisasi privat' supaya pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma dapat dimanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri.

Konsep hegemoni memang lebih menekankan pada ideologi itu sendiri, bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya sehingga upaya itu berhasil membentuk alam pikiran mereka. Pengaruh itu dimungkinkan karena manifestasi ideologi hegemonik berlangsung melalui pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan

⁴² Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, *Selections from the Prison of Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: International Publishers, 1992), h. 263.

⁴³ Heru Hendarto, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 74.

⁴⁴ Lihat Robert Bocock, *Hegemony*, (London: Tavistock Publications Limited, 1986), h. 11.

⁴⁵ Hendarto, "Mengenal ...", h. 81.

⁴⁶ Sebagaimana dikutip Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: SAGE Publications, 1994), h. 183.

dalam menafsirkan pengalaman tentang kenyataan. Proses penafsiran itu memang berlangsung secara tersembunyi (tersamar), tetapi terjadi secara terus-menerus. Artinya, secara sistematis ideologi hegemonik mencekoki orang banyak dengan pikiran-pikiran tertentu, doktrin-doktrin tertentu, bias-bias tertentu, sistem-sistem preferensi tertentu, bahkan "tuhan-tuhan" tertentu.⁴⁷

Kelompok dominan dalam suatu negara cenderung memaksakan visi hegemoni mereka melalui berbagai institusi seperti sekolah, media massa, agama, dan berbagai praktik manusia sehari-hari sehingga ideologi hegemonik tidak hanya merasuk ke dalaman ekonomi dan politik, tetapi juga ke dataran budaya dan ideologi bahkan dimungkinkan lewat proses regimentasi yang meluas sampai ke alam bawah sadar masyarakat.⁴⁸ Akan tetapi, seberapa besar kekuasaan negara bergantung pada kedalaman proses kekuasaan bermain dalam wilayah publik dan dunia swasta dan juga bergantung kepada hegemoni yang mengalir dari relasi tarik-menarik antara masyarakat madani dan sistem negara.⁴⁹

Walaupun hegemoni diperoleh melalui persetujuan dan penggunaan paksaan oleh satu kelas atas yang lainnya, persetujuan dalam proses hegemonik memainkan peran sangat penting. Bagi Gramsci, hegemoni adalah bentuk kontrol dan kekuasaan yang sangat penting. Dengan demikian, kekuasaan hegemonik lebih merupakan kekuasaan melalui 'persetujuan', yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial-politik yang ada.⁵⁰

⁴⁷ Lihat Idi Subandiy Ibrahim dan Dedy Djarnaluddin Malik, *Hegemoni Budaya*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1997), h. xv.

⁴⁸ Idem, h. xiii.

⁴⁹ Lihat Michael van Langenberg, "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idi Subandiy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 224.

⁵⁰ Fakih, *Masyarakat ...*, h. 56--57.

Karena itu, Gramsci⁵¹ selalu menghubungkan kekuasaan hegemonik ini dengan ungkapan-ungkapan psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis atau aspek-aspek aturan yang lain. Lebih jauh dijelaskan bahwa tidak semua individu bisa memberikan persetujuan itu. Kepatuhan tidaklah bersifat otomatis, tetapi haruslah diciptakan secara aktif. Dalam hal ini, hegemoni mencapai kemenangan melalui penciptaan persetujuan langsung secara aktif sebagai hasil dari adopsi kepentingan rakyat oleh kelas hegemonik.

Untuk mewujudkan hal itu, bahasa dipandang sangat penting untuk membentuk kepemimpinan moral dan intelektual sehingga bahasa ditempatkan sebagai sarana yang melayani fungsi hegemoni. Gramsci menekankan bagaimana pentingnya konotasi halus yang dapat membekukan persepsi dan konsepsi sehingga memudahkan penerimaan asumsi konvensional dan menghalangi pernyataan tentang ide-ide yang bertentangan. Dalam konteks ini, Gramsci mengakui bahwa setiap budaya memperlihatkan dan mengendalikan sistem nilai dan pandangan umum dalam bahasanya.

Sebagaimana dikatakan Gramsci bahwa setiap bahasa berisi elemen-elemen dunia. Hal ini berarti bahwa aktivitas mental akan tergantung pada karakter daftar kata yang ada. Di Indonesia penggunaan kata-kata seperti *pembangunan*, *persatuan nasional*, *kepentingan nasional*, *demokrasi Pancasila*, *dwifungsi* akan menghadirkan rintangan terhadap penyebaran gambaran alternatif dari masyarakat. Dengan demikian, selama individu-individu tertentu merasa tidak puas, selama itu pula mereka merasakan adanya kontradiksi antara definisi resmi

⁵¹ Sebagaimana dikutip Sparringa dalam "Discourse ...", h. 19—21 dan juga Hendarto dalam "Mengenal ...", h. 80—82.

dari realitas dan keadaan yang sebenarnya dari pemahaman mereka sendiri. Hal seperti inilah yang memungkinkan timbulnya perjuangan revolusioner.

Mengingat dominasi kelas merupakan sebuah kemenangan intelektual dan moral, Gramsci menyatakan bahwa perjuangan revolusioner tersebut akhirnya menjadi persoalan pendidikan: "setiap hubungan hegemoni perlu adanya hubungan pendidikan". Untuk menyukseskan perjuangan revolusioner ini diperlukan peran kaum intelektual. Dalam pandangan Gramsci, seorang intelektual adalah "setiap orang yang fungsi sosialnya adalah bertindak sebagai penyampai gagasan ke dalam masyarakat madani dan antara pemerintah dengan masyarakat madani". Ada dua kategori intelektual yang berbeda: intelektual organik dan tradisional. Yang pertama mencakup mereka yang mampu mengelaborasi bidang politik dan filosofis untuk memberikan kesadaran kepada anggota masyarakatnya, sedangkan yang kedua mencakup mereka yang memegang monopoli bagi sejumlah pelayanan: ideologi religius, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan pada masa itu, bersama-sama dengan sekolah, pendidikan, moralitas, keadilan, kemurahan hati, kerja yang baik, dan sebagainya.⁵²

Kategori intelektual yang sangat erat kaitannya dengan konsep pendidikan Gramsci adalah "intelektual organik". Gramsci mendefinisikan intelektual organik sebagai intelektual yang secara organis berakar di dalam rakyat dan bagian dari rakyat yang mengakuinya sebagai aktivis gerakan sosial. Gramsci menyatakan bahwa semua orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi intelektual dalam masyarakat. Setiap orang melaksanakan bentuk-bentuk aktivitas intelektual: sebagai seorang filosof, seniman, perasa. Mereka berpartisipasi di dalam sebuah konsepsi tentang dunia, memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab

⁵² Hoare dan Smith, *Selection ...*, h.7 & 9.

moral, dan karena itu mereka menyumbang usaha membenarkan atau mengubah konsepsi tentang dunia, juga mendorong ke arah cara berpikir yang baru.

Memang dalam konteks perjuangan ideologi (perlawanan terhadap hegemoni dominan), pendidikan adalah peran krusial intelektual organik dalam memunculkan kesadaran kritis. Bagi Gramsci, kesadaran kritis adalah hasil perjuangan ideologis yang dihasilkan oleh "opsir" intelektual dari kelas sosial yang bersaing.⁵³ Pentingnya peran intelektual organik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka berfungsi sebagai perantara di antara rakyat atau antara rezim dan rakyat serta berfungsi sebagai pemikir serta pengatur bagi kelompok mereka. Jika hubungan di antara mereka dijalin dalam sebuah kepaduan organik akan terjadi perubahan dari perasaan menjadi pemahaman dan pengetahuan. Jika hal itu dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka akan tercipta kekuatan sosial yang disebut *historical bloc*.⁵⁴ Kekuatan sosial inilah yang diharapkan mampu melakukan *counter hegemony* terhadap kekuatan dominan dan mampu menciptakan sejarah baru karena faktor penentu perubahan sosial terletak dalam masyarakat madani itu sendiri. Masyarakat madani menjadi kekuatan nyata yang telah mengubah sejarah umat manusia.

Memang pada saat-saat tertentu negara akan mengalami krisis hegemoni, yaitu ketika kelas yang memerintah telah kehilangan konsensusnya, sewaktu tidak lagi ada "kepemimpinan" tetapi hanya ada "dominasi" yang hanya menerapkan kekuatan koersif. Ini berarti bahwa massa yang besar jumlahnya telah tercerabut dari ideologi lama dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan pada apa yang biasanya mereka percayai.⁵⁵ Jika hal ini terjadi, akan terbuka jalan menuju

⁵³ Fakih, *Masyarakat* ..., h. 65.

⁵⁴ Hoare dan Smith, *Selections* ..., h. 418.

⁵⁵ Idem, h. 275—276.

transformasi revolusioner yang dapat meruntuhkan hegemoni kelas dominan. Dalam hal ini, perlu adanya usaha menemukan strategi yang tepat seperti yang dikonsepsikan Gramsci dengan strategi *war of position* "perang posisi"—suatu bentuk perjuangan penetrasi ideologis yang berlangsung terutama dalam sistem kelembagaan melalui pengembangan kesadaran kritis.⁵⁶ *War of position* ini memerlukan perjuangan politik yang jauh lebih kompleks, sebuah bentuk-bentuk perjuangan spesifik yang melibatkan elemen-elemen politik yang berusaha menang atas militer.⁵⁷ Konsep *war of position* ini didasarkan pada gagasan mengelilingi aparatus negara dengan suatu *counter hegemony* yang dibentuk bersama oleh organisasi massa sebagai basis pembentukan negara yang baru.⁵⁸ Memang *war of position* menunjuk pada sebuah strategi perlawanan untuk masa yang panjang.⁵⁹

Dengan adanya kondisi seperti itu, dimungkinkan pula adanya masa transisi yang ditandai "melenyapnya negara". Gramsci menggambarkan transisi ini secara bergantian sebagai "penyerapan kembali masyarakat politik ke dalam masyarakat madani" serta "menghilangnya masyarakat politik dan munculnya suatu masyarakat yang teratur". Institusi dan struktur legal "masyarakat politik" yang koersif akan menghilang secara bertahap sementara unsur-unsur masyarakat teratur (negara etik atau masyarakat madani) semakin nyata menunjukkan kemunculanrya.⁶⁰

Konseptualisasi hegemoni Gramsci mempunyai elemen-elemen yang relevan dengan konsep Foucault tentang wacana dan kekuasaan/pengetahuan. Foucault dan Gramsci sama-sama memberikan respek yang tinggi terhadap peran

⁵⁶ Hendarto, "Mengenal ...", h. 87.

⁵⁷ Christine Buci-Glucksmann, *Gramsci and the State*, (London: Lawrence and Wishart, 1980), h. 251.

⁵⁸ Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 173.

⁵⁹ Buci-Glucksmann, *Gramsci ...*, h. 252.

⁶⁰ Richard Bellamy, *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 202.

bahasa sebagai sebuah faktor yang berhubungan dengan struktur politik. Namun, Foucault memiliki pendirian yang lebih kuat tentang bagaimana kekuatan-kekuatan hegemonik harus dilawan dan ditolak. Dia memandang kemanusiaan dan kekuasaan sebagai hal yang jauh lebih kompleks dan bertentangan. Dengan menyoroti keragaman arti, Foucault mempertanyakan sejauh mana hegemoni dapat berjalan, dipertahankan, dan ditolak.⁶¹ Berdasarkan kenyataan tersebut, studi ini juga memanfaatkan teori Foucault karena diasumsikan adanya wacana kontra-hegemoni pada kelompok ASPR.

Konsep Kekuasaan/Pengetahuan Foucault

Foucault⁶² menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan secara langsung berhubungan satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa hubungan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang tidak mensyaratkan dan merupakan hubungan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan menciptakan pengetahuan dan sistem informasi baru. Sebaliknya, pengetahuan secara terus-menerus menghasilkan pengaruh-pengaruh kekuasaan.

Konsep kekuasaan yang dikembangkan Foucault⁶³ menolak gagasan tradisional bahwa kekuasaan bersifat represif. Ia lebih menekankan segi positif dari kekuasaan yang mampu membangun subjektivitas. Ia skeptis terhadap negatifnya kekuasaan dengan mengatakan:

Jika kekuasaan adalah sesuatu yang selalu represif, dan kekuasaan tidak berbuat apa pun kecuali mengatakan tidak, apakah kamu pikir orang akan mematuhi? Apa yang membuat kekuasaan memiliki kebaikan, apa yang menyebabkan ia diterima, adalah karena kenyataan bahwa kekuasaan tidak hanya membebani kita sebagai kekuatan yang mengatakan tidak, tetapi ia

⁶¹ Lihat Sparringa, "Discourse ...", h. 24.

⁶² Sebagaimana dikatakan Sparringa dalam "Discourse ...", h. 24 & 28.

⁶³ Seperti yang dikutip Hikam dalam *Demokrasi ...*, h. 171—172.

melewati dan menghasilkan sesuatu yang menyebabkan kesenangan, bentuk-bentuk pengetahuan, menghasilkan diskursus. Kita harus mempertimbangkan kembali soal kekuasaan dengan cara yang berbeda, ia butuh dipertimbangkan sebagai suatu jaringan produktif yang mengelola seluruh lembaga sosial, lebih daripada sebagai suatu contoh negatif di mana fungsi kekuasaan adalah represif.

Dengan demikian, Foucault mengartikan kekuasaan sebagai cara-cara yang beroperasi dalam unsur subjektivitas, produksi dan reproduksi kebenaran, serta dalam formasi pengetahuan. Raginya, kekuasaan lebih banyak disebarkan dan bagiannya yang fundamental terletak dalam pengetahuan. Karena itu, negara bukanlah tempat kekuasaan yang utama, melainkan tidak lebih dari institusi dan wacana dominan (seperti obat) yang menertibkan, menghukum, dan menggerakkan semua manusia.⁶⁴

Berdasarkan konsep itulah, Foucault berusaha menyelidiki mekanisme atau teknik kekuasaan dengan menganalisis hubungan mikro dari kekuasaan, tataran pembuluh dari kekuasaan yang merupakan inti kekuasaan yang menyentuh ke dalam setiap urat individu. Ia percaya bahwa kekuasaan dalam kenyataannya tidak hanya datang 'dari atas', tetapi juga 'dari bawah' atau 'dari dalam' diri masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan itu ada dan tersebar serta datang dari mana-mana.⁶⁵

Konsep kekuasaan/pengetahuan di atas juga mengandung pengertian bahwa dalam pengetahuan terkandung maksud untuk mengendalikan dan menguasai. Pengetahuan tentang 'pembangunan' yang sudah menjadi wacana dominan, misalnya, penafsirannya tergantung pada kekuasaan hegemonik dominan yang berada di tangan penguasa. Sejak wacana pembangunan mendominasi Dunia

⁶⁴ Lihat Sparringa, "Discourse ...", h. 26.

⁶⁵ Idem, h. 27—28.

Ketiga, wacana ini menjadi satu-satunya bentuk pengetahuan ekonomi, politik, dan budaya yang absah.⁶⁶

Teori-teori ideologi tersebut dianggap sangat sesuai digunakan untuk menganalisis kekuasaan Orde Baru yang bisa bertahan sampai 32 tahun. Teori-teori tersebut memang tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Teori-teori itu juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelompok ASPR merespons wacana Orde Baru. Hal itu kemungkinan bisa berupa wacana kontrahegemoni dan usaha-usaha yang dilakukan ASPR untuk memberikan pengetahuan kepada rakyat berkaitan dengan kesadaran akan hak-hak mereka. Adanya indikasi wacana kontra-hegemoni pada kelompok ASPR itu mengundang keinginan peneliti untuk menerapkan teori perlawanan yang diuraikan di bawah ini.

Teori Perlawanan

Studi mengenai perlawanan menganut tradisi dialektis yang memahami proses sosial sebagai interaksi kompleks antara aktor-aktor manusia dengan struktur sosial. Seseorang harus dipahami sebagai aktor-aktor sosial dalam menciptakan sistem-sistem signifikansi atau struktur-struktur makna serta menangani tingkah laku sosialnya sehari-hari.⁶⁷

Hal tersebut sesuai dengan gagasan Giddens⁶⁸ dengan teori strukturasinya yang terfokus pada praktik-praktik sosial, yaitu sebuah teori hubungan antara aktor (agen) dan struktur. Hal yang sangat pokok dari teori strukturasi adalah hal yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh-mempengaruhi yang bersifat dualitas

⁶⁶ Lihat Fakhri, *Masyarakat ...*, h. 92.

⁶⁷ Hikam, *Demokrasi ...*, h. 151.

⁶⁸ Sebagaimana dikatakan George Ritzer dalam *Sociological Theory*, (Toronto: McGraw-Hill Companies, Inc., 1996), h. 529.

dan dialektika antara aktor dan struktur. Dengan demikian, aktor dan struktur merupakan sebuah "dualitas" yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain karena semua tindakan aktor melibatkan struktur dan struktur melibatkan aktor.⁶⁹ Dengan kata lain, aktor dan struktur berinteraksi dalam proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Aktor merupakan hasil dari struktur, tetapi juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru.⁷⁰

Dalam dualitas seperti itu, aktor tidak diperlakukan sebagai orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak hanya menyetujui dan menyesuaikan dengan sistem nilai yang telah ditentukan, juga tidak hanya terkonstruksi oleh berbagai wacana dominan, tetapi aktor dipandang sebagai orang yang berpengetahuan luas yang siap merefleksikan kemampuan *self monitoring* sesuai dengan pengetahuan dan kesadarannya.⁷¹ Dengan demikian, aktor tidaklah semata-mata sebagai subjek yang pasif dan struktur tidak semata-mata mendominasi secara deterministik, tetapi ada peluang (*enabling*) bagi tindakan aktor.⁷² Tindakan aktor itu mungkin bisa digolongkan dalam bentuk perlawanan. Karena itu, perlu adanya uraian singkat mengenai teori perlawanan.

Hikam⁷³ melihat bahwa sekurang-kurangnya ada dua kecenderungan teoretis yang mengkaji kepatuhan dan perlawanan terhadap kekuasaan. *Pertama*, teori yang menganggap otoritas moral sebagai basis dari hubungan-hubungan sosial dan stabilitas sosial. Barrington Moore yang mewakili kecenderungan ini menjelaskan asal-usul dari kepatuhan dan perlawanan sosial dari perspektif otoritas

⁶⁹ Idem, h. 224.

⁷⁰ Lihat Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration*, (Cambridge: Polity Press, 1995), h. 25.

⁷¹ Idem, h. 79.

⁷² Seperti dikatakan oleh Giddens serta Bryan dan Jery yang dikutip oleh Aziz dalam "Negara ...", h. 25.

⁷³ Lihat Hikam, *Demokrasi ...*, h. 151—155.

moral. Hasil studinya menunjukkan bahwa revolusi disebabkan oleh kebiadaban moral di dalam masyarakat yang mengarahkan kemarahannya menjadi suatu gerakan sosial. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketidakadilan sosial sebagai suatu derivasi pengertian dari keberangan moral telah menyebabkan terjadinya banyak gerakan perlawanan. Ketidakadilan sosial dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam setiap sistem sosial: koordinasi sosial, kekuasaan pembagian kerja, dan distribusi barang. Jika penguasa gagal menangani ketiga elemen tersebut, perlawanan terhadap kekuasaan akan terjadi.

Kedua, teori yang memandang adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhadap kekuasaan. Stanley Milgram sebagai wakil dari kecenderungan ini mengajukan jawaban bahwa kepatuhan dan perlawanan didasarkan pada rangsangan luar sebagai faktor utamanya. Menurut eksperimentasi laboratorisnya, hukuman dan paksaan dari luar memainkan peran menentukan dalam menciptakan kepatuhan dan melemahkan kemampuan perlawanan. Perlawanan terhadap kekuasaan hanya terjadi dengan dukungan kolektif dan jarang sekali muncul dari kehendak individual. Dukungan sosial lebih berpengaruh untuk menciptakan perlawanan sosial ketimbang otoritas moral individual. Memang otoritas moral individu tidaklah absen walaupun ia tidak menghasilkan timbulnya perlawanan terbuka.

Susan Eckstein dalam buku *Power and Popular Protest*⁷⁴ mengemukakan faktor-faktor yang mendorong orang melakukan perlawanan. Struktur sosial merupakan konsekuensi ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang menimbulkan perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok

⁷⁴ Sebagaimana dikutip Siahaan dalam "Pembangkangan ...", h. 33.

masyarakat yang berbeda dalam jenjang. Mereka yang menguasai sarana pemaksa fisik dan sarana produksi kekayaan akan memiliki kekuasaan untuk menguasai mereka yang tidak memilikinya. Kekuasaan itu mencakup ide maupun sumber daya material. Kaum buruh dan kaum miskin mengadakan perlawanan bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan, melainkan karena terbatasnya sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan.

Adanya gagasan bahwa ideologi kelas yang dikuasai bisa menyusup dan melawan ideologi hegemonik menyebabkan perlu adanya teori perlawanan digunakan dalam analisis mengenai hubungan negara dan masyarakat khususnya yang ditunjukkan oleh kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" ini.

Dapat dikatakan bahwa meskipun Orde Baru menggunakan ideologi-ideologi seperti disebutkan di atas dalam menafsirkan makna demokrasi untuk mempengaruhi masyarakat madani agar mempunyai interpretasi makna demokrasi seperti apa yang dikehendaki olehnya, tidak berarti bahwa ia akan aman dari interpretasi yang berbeda dengan interpretasi yang diberikannya. Ia tentu akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat madani yang mengerti akan keburukan ideologi yang digunakan karena tentu saja mereka paham betul perbedaan antara ideologi (dalam makna negatif) dan pengetahuan yang berdasarkan kebenaran.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Keith Foulcher bahwa tipe perlawanan budaya ini merupakan sebuah bentuk khusus dari aktivitas oposisionis. Ia menyandarkan pada pengakuan legitimasi negara dalam sebuah cara yang sadar dan sengaja. Di tempatnya, di wilayah perkotaan, kelas menengah terpelajar

dengan pengertian kebangsaannya sebagai sebuah entitas pluralistik di dalam proses formasi ini memainkan peran sebagai imbalan terhadap budaya negara.⁷⁵

Dengan demikian, dianggap perlu adanya studi yang cermat mengenai wacana demokrasi kaum aktivis khususnya pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" untuk melihat apakah wacana demokrasi mereka menunjukkan adanya perlawanan terhadap wacana Orde Baru atau tidak, serta sebab-sebab apa yang menjadikan mereka mengadakan perlawanan jika terdapat aspek itu.

.....

⁷⁵ Keith Foulcher, "The Construction of an Indonesian National Culture: Patterns of Hegemony and Resistance", dalam Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clyton: Monash University, 1992), h. 309.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang menyangkut tipe studi, setting studi, koleksi data, dan analisis data.

Tipe Studi

Studi yang berusaha mengungkap wacana demokrasi para aktivis ini dapat dikategorikan ke dalam studi kualitatif karena mengacu pada studi tentang kehidupan dan perilaku orang, juga tentang perubahan sosial, atau hubungan interaksi pada suatu kelompok¹, yaitu interaksi antara Orde Baru dan kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi".

Dipilihnya metode kualitatif dalam studi ini juga didasarkan pada keyakinan epistemologis bahwa realita-realita simbolik yang kualitatif serta cenderung subjektif dalam aksi-aksi manusia itu tidaklah akan mungkin didatakan dan dianalisis begitu saja dengan menggunakan metode-metode konvensional², apalagi studi ini bermaksud menemukan dan memahami wacana demokrasi para aktivis yang belum banyak diketahui.

Dengan demikian, digunakannya metode kualitatif dengan harapan bahwa studi ini dapat memberikan detail fenomena wacana demokrasi para aktivis yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif dan memungkinkan peneliti untuk mengkaji wacana demokrasi para aktivis secara mendalam dan rinci.³ Karena itu

¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research*, (Newbury Park, California: SAGE Publications, 1990), h. 17.

² Soetandyo Wignyosoebroto, "Grounded Research: Apa dan Bagaimana", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 159—160.

³ Lihat Dede Oetomo, "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 153.

pula, studi ini dirancang dengan menggunakan studi kasus dengan harapan dapat menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" secara mendalam dan terinci apalagi fokus studi ini terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata⁴, yaitu wacana demokrasi para aktivis khususnya pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi".

Setting Studi

Metode kualitatif sangat sesuai diterapkan pada studi yang bermaksud untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci⁵ sehingga menghasilkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Berdasarkan pendapat tersebut, studi ini berusaha membatasi studi wacana demokrasi para aktivis dengan setting pada kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" (ASPR). Pengambilan setting pada kelompok ASPR ini didasarkan pada kenyataan bahwa ASPR ini merupakan kelompok gerakan rakyat generasi baru karena terbentuk pada saat-saat tuntutan reformasi digulirkan di Indonesia ini. Selain itu, dalam kelompok ini berkumpul dan berinteraksi para aktivis yang berasal dari berbagai elemen rakyat dengan berbagai macam status dan afiliasi politik. Di antara mereka ada yang berstatus sarjana, mahasiswa, buruh, tukang becak, dan sebagainya dengan afiliasi politik yang beraneka ragam pula: PUDI, PDI Pro-Mega, PKB, PRD, dan sebagainya.

Studi ini memang tidak dimaksudkan untuk mencari generalisasi, melainkan untuk mencari makna *idiografik*, yaitu makna dalam konteks dan waktu tertentu.⁶

⁴ Lihat Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

⁵ Emy Susanti Hendrarso, "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995), h. 210.

⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 125.

Meskipun demikian, studi ini diarahkan untuk menggambarkan keberagaman, kekayaan, kedalaman, dan keseluruhan kompleksitas dari wacana demokrasi para aktivis khususnya kelompok ASPR. Karena itulah, peneliti berusaha mendeskripsikan wacana demokrasi para aktivis dengan berbagai keberagamannya. Artinya, peneliti berusaha menggali wacana demokrasi para aktivis dari berbagai macam anggota yang status dan afiliasi politiknya berbeda-beda.

Koleksi Data

Secara garis besar, data studi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu data tentang wacana demokrasi para aktivis yang dianggap sebagai data utama dalam studi ini dan data tentang wacana Orde Baru. Data tentang wacana Orde Baru memang hanya berfungsi sebagai data tambahan, tetapi dianggap sangat perlu dipaparkan dalam studi ini karena berfungsi sebagai anteseden dari wacana demokrasi para aktivis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan sumbernya, data utama studi ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dari subjek studi,⁷ dalam hal ini adalah para aktivis pada kelompok ASPR, yang berkaitan dengan wacana demokrasi mereka. Sebaliknya, data tentang wacana Orde Baru sebagai data tambahan dihimpun dari sumber tertulis: buku, majalah ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, atau sumber tertulis lainnya.

Bertolak dari jenis dan sumber data tersebut, dalam studi ini digunakan teknik-teknik koleksi data seperti diuraikan sebagai berikut:

⁷ Lihat Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1975), h. 5; Lihat pula Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 112.

(1) Teknik Dokumentasi

Studi ini menggunakan teknik dokumentasi untuk menggali data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya⁸ yang ada kaitannya dengan wacana Orde Baru. Dengan demikian, data tentang wacana Orde Baru yang berkaitan dengan demokrasi dikumpulkan dari berbagai sumber tulisan, baik itu berupa hasil studi atau kajian yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku atau dimuat dalam majalah, surat kabar, maupun bahan tertulis lainnya.

(2) Teknik Observasi

Dalam studi ini peneliti juga menggunakan teknik observasi karena studi ini berlangsung dalam interaksi sosial antara peneliti dan subjek studi, kelompok ASPR, di dalam lingkungan mereka sehingga peneliti harus menenggelamkan diri di dalam kehidupan subjek, berbicara, bergurau, bersatu rasa, dan ikut menghayati kehidupan serta pengalaman mereka.⁹ Peneliti melakukan observasi partisipan khususnya partisipasi aktif karena peneliti berusaha melakukan apa yang dilakukan subjek studi dan mencoba mempelajari perilaku-perilaku mereka.¹⁰

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan wacana demokrasi para aktivis khususnya pada kelompok ASPR yang terlukis dalam setiap kegiatan mereka, baik dalam aksi-aksi demonstrasi, acara-acara diskusi, maupun dalam pembicaraan sehari-hari karena pada hakikatnya wacana mereka terwujud dalam berbagai perilaku, perkataan, bahkan pemikiran mereka.

⁸ Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

⁹ Bogdan dan Taylor, *Introduction ...*, h. 5

¹⁰ James P. Spradley, *Participant Observation*, (Florida: Holt, Rinehart and Winston, 1980), h. 60.

Pelaksanaan observasi ini berlangsung sejak adanya ide untuk menjadikan kelompok ASPR sebagai setting studi ini—sejak persiapan pembuatan usulan studi—sampai pada penulisan tesis ini. Karena observasi yang dilakukan peneliti bersifat partisipasi aktif, peneliti berusaha selalu bersama subjek—kelompok ASPR—baik dalam pembicaraan sehari-hari, diskusi di kantong-kantong ASPR, maupun dalam aksi demonstrasi.

(3) Teknik Wawancara

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dalam koleksi data ini. Wawancara yang digunakan ini dapat digolongkan ke dalam wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan para aktivis ASPR yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam sehingga dapat memberikan data yang berharga tentang wacana demokrasi para aktivis. Adapun aktivis ASPR yang dianggap memiliki pengetahuan luas dan mendalam itu adalah mereka yang menjadi pemrakarsa terbentuknya kelompok tersebut serta yang ditunjuk sebagai guru sekolah rakyat—program pendidikan politik yang disediakan untuk rakyat (penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada bab kelima tesis ini).

Dalam koleksi data di lapangan terutama yang menggunakan teknik observasi dan wawancara ini, peneliti menggunakan alat perekam karena data utama sebagian besar berupa kata-kata subjek yang diucapkan, sedangkan peneliti sendiri tidak mungkin mengingat seluruh isi percakapan itu tanpa alat perekam.

Jumlah subjek dalam studi ini memang tidak ditentukan karena dalam studi kualitatif terutama studi kasus seperti ini, besar kecilnya (jumlah) subjek tidak dapat dijadikan sebagai ukuran utama. Yang terpenting dalam studi seperti ini adalah

kedalaman, kompleksitas, dan kekayaan/kelengkapan data. Karena itu, jumlah subjek ditentukan berdasarkan kecukupan data. Salah satu ukurannya adalah kejenuhan data. Kejenuhan data diukur berdasarkan pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau—sudah mulai terjadi pengulangan informasi, kegiatan koleksi data sudah dapat diakhiri.¹¹

Penentuan subjek yang diwawancarai menggunakan teknik “bola salju”—mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak. Berdasarkan teknik ini, penentuan subjek dilakukan jika subjek sebelumnya sudah diwawancarai dan hasil wawancaranya sudah dianalisis. Setiap subjek berikutnya ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan informasi yang sudah dijangkau dan dianalisis.

Pelaksanaan wawancara mendalam dalam studi ini berlangsung setelah peneliti mengenal subjek-subjek yang memiliki pengetahuan luas baik mengenai sejarah terbentuknya dan perkembangan kelompok ASPR ini, maupun mengenai wacana demokrasi. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 20 Oktober 1998. Hasil wawancara pertama ini ditranskrip ke dalam bentuk tulis untuk dianalisis. Setelah diadakan analisis dan interpretasi terhadap hasil wawancara pertama itu, dilakukan wawancara-wawancara berikutnya yang juga dianalisis dengan teknik yang sama dengan analisis terhadap hasil wawancara pertama sampai dirasakan adanya kejenuhan data.

Setelah dilakukan wawancara dengan lima subjek yang dianggap benar-benar mengetahui sejarah terbentuknya dan perkembangan ASPR serta wacana demokrasi mereka, terasa adanya pengulangan informasi—adanya keseragaman

¹¹ Lihat Moleong, *Metodologi ...*, h. 166.

wacana demokrasi yang dijarah dari subjek. Dengan kata lain, telah muncul tanda-tanda adanya kejenuhan data. Untuk memastikan apakah telah terjadi kejenuhan data atau belum, dilakukan wawancara dengan subjek keenam. Dari hasil wawancara keenam itu sudah tidak terjaring informasi yang baru lagi. Karena itu, peneliti memutuskan untuk mengakhiri koleksi data dengan teknik wawancara ini berdasarkan keyakinan bahwa sudah terjadi kejenuhan data. Keyakinan akan adanya kejenuhan data itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa pada setiap wawancara peneliti berhasil membicarakan secara tuntas tema-tema studi dengan keenam subjek yang dianggap mampu mewakili kelompok mereka. Keenam subjek itu ialah: Fitra (F), Gunardi (G), Auk (AU), Bambang (B), Apank (AP), dan Yuli (Y).

Fitra (F) adalah seorang aktivis kawakan sehingga ia sendiri tidak tahu sejak kapan menjadi aktivis. Dalam perjalanan hidupnya, ia sering mengadakan perlawanan. Perlawanan itu sudah ditunjukkannya sejak ia duduk di kelas 6 SD terhadap wali kelasnya. Kelas 3 SMP ia sudah melakukan demonstrasi di sekolahnya terutama ditujukan kepada guru PMP-nya. Di SMA ia pernah mengadakan diskusi panel kepemudaan atau kepemimpinan siswa. Ia juga pernah menolak kewajiban membeli karcis acara pertunjukan band. Pernah melakukan penolakan terhadap pembelian kalender yang diwajibkan sekolahnya dalam bentuk pembakaran kalender. Namun, itu semua tidak didasari hal-hal yang bersifat politis. Ketika berkuliah di ITS, ia membentuk forum komunikasi, Forum Dinamika Mahasiswa ITS, dan menyelenggarakan sarasehan politik pertama yang sejak 12 tahun tidak ada kegiatan politik di sana. Setelah bertemu dengan Gembos—aktivis kawakan lain—yang sudah punya jaringan luas, ia bekerja sama di FKMS, mendirikan FKMS baru. Dia juga turut memfasilitasi pendirian forum komunikasi mahasiswa Jawa

Timur di empat kota: Surabaya, Malang, Jombang, Jember dengan nama FKMS, FKMM Malang, Formajo Jombang, FKMJ Jember. Arek asli Banyuwangi ini memang tidak begitu tertarik terhadap aktivitas kuliah secara formal—dia hanya intens berkuliah pada tiga semester pertama—karena dia merasa tidak memperoleh apa-apa dari perkuliahan secara formal tersebut. Karena itulah, akhirnya ia terkena aturan DO (*drop out*) pada tahun 1997.

Gunardi (G) adalah aktivis alumnus ITS yang mulai tertarik pada gerakan setelah melihat kawan-kawan geraknya melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang dihadapi rakyat. Dari keinginannya untuk ikut terlibat dalam gerakan yang mempunyai kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat lemah seperti itu, Arek Suroboyo asli yang masuk ITS tahun 1990 ini mulai bergabung dalam gerakan. Keterlibatannya dalam diskusi-diskusi yang membicarakan gerakan atau penyikapan terhadap kasus-kasus yang ada menyebabkan arek jeboian ITS program Statistik yang berhasil lulus tahun 1997 ini mulai peka terhadap kasus-kasus rakyat yang semuanya diyakini sebagai akibat dari kesalahan sistem yang ada. Semua kasus tersebut tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah justru pendekatan keamanan yang dijalankan menambah masalah baru dalam penanganan kasus-kasus rakyat. Karena itu, dia bersama kawan-kawannya sepakat membentuk Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) di Jakarta. Bahkan ia pernah merasakan hidup di sel Salemba karena aksi bersama FAMI tersebut dalam memperjuangkan penyelesaian kasus Nipah. Keterlibatannya dalam gerakan juga didorong oleh rasa iba melihat kawan-kawannya yang miskin. Sejak kecil ia selalu hidup bersama kawan-kawannya yang miskin dan orang-orang pinggiran. Ia percaya bahwa kemiskinan yang dialami kawan-kawannya itu sebagai akibat kesalahan sistem.

Untuk itu, ia melakukan pendampingan-pendampingan terhadap rakyat terutama bagaimana mengusahakan pemberdayaan rakyat. Bagaimana rakyat bisa mendapatkan akses-aksesnya sehingga mereka bisa mengakses kepentingan-kepentingan mereka termasuk kepentingan ekonomi. Aktivis yang mulai tahun 1998 *concern* pada anak karena merasa lebih bisa menekuni problem anak ini yakin bahwa dengan melihat kasus anak, ia bisa melihat problem kebapakan karena problem anak ini tidak terlepas dari keluarganya yang menjadi sumber masalah. Bahkan masalah anak harus juga dikaji dari problem sebenarnya yang menyebabkan munculnya anak jalanan. Ia lebih *concern* pada anak karena ia yakin bahwa anak harus diselamatkan lebih dulu sebelum membicarakan orang tuanya yang otomatis nanti juga membicarakan komunitas kampung-kampung atau lokasi-lokasi tempat tinggal mereka.

Yuli (Y) adalah seorang aktivis alumnus Unair. Sejak mulai kuliah tahun 1993, ia bergabung dalam "Kelompok Belajar Mentari" (KBM) yang kemudian menjadi PRD. Karena di KBM ia tidak boleh mengadvokasi dan mendukung teman-temannya dari kelompok FAMI yang masuk penjara, akhirnya pada tahun 1994 ia memilih keluar dari KBM. Pada tahun yang sama, ia kemudian bergabung dengan HMI. Akan tetapi, selama di HMI—sampai tahun 1995—dia merasa tidak mendapatkan apa-apa dari organisasi itu. Akhirnya ia masuk LSM "Yayasan Humaniora Indonesia" (YHI) yang bergerak dalam masalah perempuan, khususnya petani-petani perempuan di Tuban. Ia masih di YHI ini sampai kuliahnya di Unair lulus pada tahun 1998 akhir. Bahkan pada tahun 1995 itu selain aktif di YHI, ia juga aktif di LSM anak jalanan, di "Yayasan Nanda Dian Nusantara" Jakarta yang pada akhirnya keluar pada tahun 1996. Di luar LSM, ia bersama teman-temannya

mantan HMI yang *mbalelo* membuat kelompok sendiri dengan nama "Kelompok Studi Kemangi" yang lebih *concern* pada pengupasan masalah-masalah kemiskinan pedesaan. Dari berbagai LSM yang pernah diikutinya, ia sampai pada puncak kebingungan terhadap program LSM yang setengah-setengah. Dalam pandangannya, banyak LSM termasuk LSM anak yang parsial, artinya membicarakan anak tetapi tidak pada akar masalah. Bahkan ketika ia bergabung dengan gerakan mahasiswa, ia menilai bahwa gerakan mahasiswa hanya berpikir politis, tidak mempunyai kepedulian langsung menggarap anak itu sendiri atau akar masalah si anak. Karena ketidakpuasannya terhadap kelompok gerakan mahasiswa dan LSM anak itu, akhirnya sesudah lulus kuliah ia bersama teman-temannya seperti Gunardi, Nina, Alan, dan yang lain membentuk yayasan ALIT (Arek Lintang) dengan tujuan membantu penyelesaian problem anak yang dipandang sangat *complicated* yang diyakini sebagai dampak negatif dari ketidakmampuan sistem untuk memberikan ruang kepada anak-anak. Karena yayasan ini memandang kesalahan sistem, titik tembak mereka bukan hanya pada sosial, tetapi pada struktural—pada tingkat kebijakan politis. Menurut dia, munculnya anak jalanan tidak terlepas dari komunitas mereka dalam keluarga yang termasuk dalam komunitas marginal yang jelas terpinggirkan oleh sistem. Dengan dasar itu serta dengan tujuan melakukan pendampingan terhadap anak beserta komunitasnya, ia membentuk yayasan ALIT dan sekaligus sebagai ketua yayasan ini. Dalam sejarah kehidupannya, aktivis ini sering menunjukkan sikap perlawanan. Ketika duduk di kelas III SD, ia sudah berani melawan gurunya yang otoriter—tidak mau mengakui kesalahannya. Di kelas I SMP ia bahkan sempat *cengkiwing-cengkiwingan* di dalam kelas dengan guru ekonominya yang otoriter. Di kelas III

SMP ia pernah menentang guru olahraganya yang bersifat diskriminatif karena bermata keranjang. Di SMA ia senang menentang teman-temannya yang *endheh*. Bahkan ketika kasus 'pereks' masuk sekolah, ia terlibat dalam kasus teramai sepanjang sejarah SMA 4 Surabaya karena ia memukul, menindas, menjambak, dan menendang pereks-pereks di SMA-nya itu. Memang diakui bahwa sejak kecil ia tidak lepas dari perlawanan. Ibu tiri yang sering menuduhnya tanpa bukti pernah dilempar dengan setrika. Semua dosennya pun tidak luput dari semprotannya. Sekarang ia menemukan wadah yang tepat yaitu ASPR. Hanya di ASPR-lah ia bisa menyumpah siapa pun termasuk Soeharto.

Apank (AP) adalah salah seorang aktivis yang berusaha mencari jalan yang berbeda dengan yang digariskan keluarganya. Orang tua dan saudara-saudaranya yang melarangnya terlibat dalam politik dibuatnya tak berdaya karena aktivis ini tertarik memasuki gerakan setelah bertemu dengan para aktivis di FKMS. Arek asal Banyuwangi yang nama lengkapnya Mohammad Jafar ini mulai mengenal gerakan sejak masuk kuliah di ITATS tahun 1993. Sejak tahun itulah arek yang mengambil program Teknik Industri: Elektro Arus Kuat ini mulai sering bermain di FKMS. Dengan adanya "insiden 21"—insiden tertangkapnya dua puluh satu mahasiswa berkenaan dengan kasus penghinaan presiden di Jakarta, dia mulai tergugah untuk bergabung dalam gerakan dan saat itu ia sering terlibat dalam aksi-aksi solidaritas terhadap mereka. Bahkan pada tahun 1995 ia pernah membangun komunitas sendiri—walaupun komunitas ini hanyalah komunitas biasa sekadar *ngobrol-ngobrol* bersama siapa saja yang ditemuinya dan mau diajak *ngobrol bareng* tentang kondisi kehidupan bernegara. Akan tetapi, karena hal itu tidak ada kelanjutannya, tahun 1996 ia bergabung lagi dengan FKMS dan tahun 1997

bersama Fitra mengembangkan PUDI di Surabaya. Sejak itu sampai sekarang, aktivitasnya lebih banyak di PUDI. Terbentuknya ASPR pada tahun 1998 yang merupakan gabungan para aktivis dari PUDI, PDI Promeg, dan SBSI itu membuat ia banyak terlibat dalam aktivitas ASPR. Dalam ASPR ini, ia lebih bisa berkiprah di kalangan rakyat dengan tujuan memihak kepada rakyat. Arek ITATS yang sampai tahun 1999 ini belum berhasil menyelesaikan kuliahnya ini sejak SD sampai STM belum pernah masuk di organisasi. Namun, di daerah asalnya ia pernah membangun komunitas bahkan menjadi figur di sana. Ia paling tidak suka melihat kekerasan; baik fisik maupun mental (ketidakadilan). Di STM ia pernah berpukulan dengan gurunya.

Auk (AU) dan Bambang (B) adalah aktivis generasi baru yang sebelumnya juga bergabung dengan FKMS. Mereka aktif dalam gerakan bahkan sangat giat dalam memberikan pendidikan politik dalam setiap acara sekolah rakyat diadakan. Auk yang nama lengkapnya Paulus Heru Nugroho ini bahkan sering melakukan aktivitas di luar kota karena memang ia sudah lulus dari kuliahnya di Unair—ia alumnus Unair program D3 Akuntansi. Berbeda dengan Bambang yang masih harus berjuang menyelesaikan tugas akhirnya di ITS Jurusan Fisika MIPA.

Pelaksanaan wawancara berpedoman pada tema-tema studi ini: demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, persatuan nasional. Berangkat dari tema-tema tersebut, wawancara berlangsung dengan cara mengikuti arus pembicaraan subjek, tetapi diusahakan tidak sampai menyimpang dari tema. Dengan teknik seperti itu, peneliti berusaha menemukan perspektif makna dari subjek studi sehingga yang diutamakan di sini adalah perspektif subjek pada fenomena wacana demokrasi

sebagaimana mereka memandangnya, bukan seperti apa yang dipandang peneliti.¹²

Berdasarkan pertimbangan itu, dalam pelaksanaan wawancara mendalam ini peneliti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis, melainkan hanya menyiapkan *interview guide* yang berisikan rambu-rambu untuk mengarahkan peneliti agar tidak terjebak mencari data di luar permasalahan dan tujuan studi.¹³ Karena studi ini bertujuan memahami respons ASPR terhadap wacana Orde Baru, peneliti lebih banyak meminta tanggapan subjek berkenaan dengan klaim-klaim yang dibuat Orde Baru khususnya dalam lingkup tema-tema studi ini. Pada setiap wawancara rata-rata diperlukan waktu 2—3 jam.

Selain data hasil wawancara, data studi ini juga dilengkapi dengan data hasil observasi. Dari hasil observasi dalam suatu diskusi, berhasil direkam topik-topik pembicaraan yang sesuai dengan tema dan permasalahan studi ini. Adapun subjek-subjek yang pembicaraannya berhasil direkam adalah Fitradjaya (F), Kariyono (K), Desta (DT), dan Daniel T. Sparringa (DS). Data rekaman hasil observasi ini pun ditranskrip ke dalam bentuk tulis, lalu dianalisis dengan langkah-langkah yang diuraikan pada bagian berikut.

Analisis Data

Untuk tujuan memudahkan analisis data, diusahakan semua data diubah dalam bentuk tulis lebih dahulu. Setelah seluruh data yang terkumpul ditranskrip

¹² Lihat Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (California: SAGE Publication, Inc., 1989), h. 82.

¹³ Lihat Sudarso, "Metode dan Prosedur Penelitian", dalam Suyanto dkk., *Metode ...*, h. 60.

dalam bentuk teks tertulis, data itu kemudian dianalisis. Proses analisis dan penafsiran data dalam studi ini lebih banyak mengikuti pendapat Lexy J. Moleong.¹⁴

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data baik yang dihimpun dari studi pustaka studi literatur maupun yang berupa catatan etnografis¹⁵ yang dihimpun dari observasi dan wawancara. Setelah ditelaah, diadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang disusun dalam tema-tema dan sub-subtema sambil memberikan kode-kode tertentu.

Supaya lebih jelas, langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data ini diurutkan sebagai berikut.

- (1) Peneliti menelaah data tentang wacana politik Orde Baru dan wacana demokrasi para aktivis secara lengkap dan cermat.
- (2) Peneliti menyeleksi dan mereduksi data. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan wacana Orde Baru dan wacana demokrasi para aktivis serta menyisihkan data yang tidak ada relevansi dengan keduanya.
- (3) Peneliti merinci data dan mengklasifikasikannya ke dalam tema-tema utama yang sudah ditentukan. Tema utama itu kemudian dipisah-pisahkan ke dalam subtema dan akhirnya ke dalam persoalan-persoalan yang lebih khusus. Tiap-tiap persoalan khusus itu mempunyai catatan-catatan tersendiri yang berisi pernyataan-pernyataan relevan yang dibuat subjek.

¹⁴ Moleong, *Metodologi ...*, h. 189—214.

¹⁵ Catatan etnografis terdiri atas catatan lapangan tertulis, baik catatan hasil observasi, wawancara, rekaman, buku harian atau dokumen pribadi lainnya. Lihat James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 89.

- (4) Peneliti menyajikan data. Karena data yang diperoleh dalam studi ini berupa kata-kata, data disajikan dalam bentuk catatan deskriptif dengan cara mengutip pernyataan subjek apa adanya dan bukan meringkaskan apa yang dikatakan.¹⁶ Kutipan pernyataan subjek itu diberi kode sesuai dengan inisial subjek dan teknik koleksi data. Dalam studi ini, kode inisial subjek yang digunakan seperti yang sudah dibicarakan pada bagian subjek penelitian (koleksi data), sedangkan kode teknik koleksi data ada dua macam: W berarti data digali dari wawancara dan D berarti data dihimpun dari diskusi. Kode tersebut ditempatkan dalam tanda kurung pada posisi akhir setiap kutipan pernyataan subjek.

Setelah dinalisis dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian diadakan pembatasan (penafsiran) data dengan menggunakan metode analisis komparatif¹⁷ yang tahap-tahap pelaksanaannya diuraikan satu per satu sebagai berikut.

- (1) Perbandingan peristiwa atau pernyataan subjek yang aplikatif terhadap setiap tema. Pada tahap ini peneliti membandingkan peristiwa atau pernyataan subjek untuk satu tema tertentu dengan peristiwa atau pernyataan sebelumnya dalam kelompok yang sama dan kelompok yang berbeda pada tema yang sama.
- (2) Integrasi tema dan kawasannya. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara peristiwa atau pernyataan subjek dengan sub-subtema dan persoalan-persoalan khusus sehingga dihasilkan akumulasi pengetahuan yang berkenaan dengan persoalan-persoalan suatu tema yang sudah siap diintegrasikan dan dihasilkan suatu kesatuan yang utuh. Integrasi juga dilakukan terhadap satu tema dengan

¹⁶ Muhadjir, *Metodologi ...*, h. 102.

¹⁷ Lihat Moleong, *Metodologi ...*, h. 107—213.

tema lainnya sehingga konsep berkembang setelah bermacam-macam tema dengan sub-subnya menjadi terintegrasi.

- (3) Pembatasan konsep. Tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan reduksi atau memformulasikan konsep ke dalam seperangkat konsep yang tinggi tingkatan abstraksinya atas dasar keragaman seperangkat tema dan sub-subnya. Reduksi ini tidak hanya dilakukan dengan jalan perbandingan antarkelompok yang berasal dari segi substantif, tetapi juga dilakukan dengan jalan perbandingan dari kepustakaan atau pendapat para ahli. Dengan demikian, dilakukan aplikasi konsep kepada situasi yang lebih luas yang tentu saja dengan tetap memperhatikan kaitan konsep dengan data.
- (4) Penulisan tesis. Tahap ini dilakukan setelah kegiatan mengumpulkan catatan-catatan dari setiap tema dan mempelajarinya. Kerangka analisis peneliti tentu saja sudah berbentuk konsep substantif yang disusun dalam pernyataan-pernyataan yang beralasan tepat.

.....

BAB IV

ORDE BARU

Pada bab ini dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wacana politik Orde Baru. Wacana yang dipaparkan pada bagian ini merupakan hasil-hasil studi pustaka (literatur). Karena sangat luasnya lingkup pembicaraan mengenai Orde Baru ini, paparan ini dibagi atas tiga subbab, yaitu format politik Orde Baru, Hegemoni Orde Baru, dan Wacana Demokrasi Orde Baru. Sebagai hasil studi pustaka terutama dari studi yang telah dilakukan peneliti lain, ketiga subbab yang diuraikan di bawah ini dianggap bersifat sangat objektif.

Format Politik Orde Baru

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Orde Baru menilai Orde Lama "gagal" melaksanakan pembangunan ekonomi dan menciptakan sistem politik yang stabil. Karena penilaian itu, Orde Baru mengklaim dirinya berusaha mengadakan koreksi terhadap "kegagalan" sistem politik sebelumnya itu dengan jalan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam rangka mewujudkan semangat dan tekad itu, Orde Baru sejak paruh kedua 1960-an melakukan restrukturisasi politik dan ekonomi dengan tujuan ganda, tercapainya stabilitas politik di satu pihak dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain.

Untuk membenarkan tujuannya tersebut, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus memobilisasi dukungan rakyat, para pemimpin Orde Baru melancarkan program pembangunan. Mereka berusaha menjelaskan mengapa berketetapan hati untuk melakukan pembangunan. Berkaitan dengan hal ini,

Schiller, sebagaimana dikutip Mohtar Mas'ood,¹ menyatakan bahwa mereka memandang pembangunan itu:

(1) sebagai bukti kesetiaan mereka pada nilai-nilai perjuangan yang dianut pemerintah Soeharto sejak awal; (2) sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mengatasi persoalan kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin; (3) sebagai tujuan yang cocok untuk era sekarang; (4) sebagai sesuatu yang esensial bagi keamanan Indonesia; (5) sebagai upaya memenuhi aspirasi kemerdekaan; dan (6) sebagai sesuatu yang memberi peluang ke arah kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, dalam masa-masa awal Orde Baru, perhatian terus-menerus diarahkan untuk mengadakan depolitisasi massa secara sistematis dalam rangka menciptakan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik-konflik sosial dan pada saat yang sama memaksimalkan produktivitas ekonomi.² Salah satu jalan yang ditempuh untuk menopang kinerja tersebut, Orde Baru telah memadukan tiga kekuatan utama: militer, birokrasi, dan teknokrasi.³

Tekad untuk membangun perekonomian dan menciptakan kestabilan politik itulah yang mendasari sistem politik Orde Baru yang bercirikan: pelembagaan peran sosial-politik (dwifungsi) ABRI, penentuan "sistem-perwakilan", yaitu adanya sistem pengangkatan dalam lembaga perwakilan rakyat, sistem kepartaian yang "tertutup" dan depolitisasi yang ditandai oleh adanya kebijakan massa mengambang, sentralisasi pemerintahan dengan penekanan pada otonomi yang bertanggung jawab, pembangunan ekonomi yang mengandalkan modal asing dan bantuan luar negeri, magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif, dan kontrol arbitrer atas kehidupan pers.⁴

¹ Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 48.

² Latif dan Ibrahim, *Bahasa ...*, h. 27.

³ Melik dan Ibrahim, *Zaman ...*, h. 174.

⁴ Haris dan Sihbudi, *Menalaah ...*, h. 182-183; lihat pula Mochtar Pabottingi, "Pengantar", dalam Haris dan Sihbudi, *Menalaah ...*, h. viii.

Restrukturasi Politik Pasca-1966

Reorganisasi institusional yang dirancang Orde Baru bertujuan membangun politik yang tertib, suatu mekanisme yang dapat menjamin proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu, para ahli strategi Orde Baru menerapkan beberapa metode kerja. *Pertama*, mereka menciptakan semacam "kabinet dapur" yang terdiri dari penasihat-penasihat dekat Jenderal Soeharto. *Kedua*, implementasi kebijaksanaan pemerintah dijamin dengan menempatkan perwira-perwira ABRI dalam jabatan-jabatan pemerintah sipil, dengan mengintensifkan jaringan intelijen, maupun dengan metode-metode konvensional untuk meningkatkan sentralisasi dan efisiensi birokrasi. *Ketiga*, metode pengendalian perwakilan kepentingan dengan cara membuat kedua badan legislatif menjadi lebih tanggap terhadap keinginan pemerintah dan memaksa kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk bergabung dengan organisasi-organisasi korporatis yang disponsori pemerintah. Metode kerja tersebut digunakan dengan tujuan agar tercipta hal-hal berikut:⁵

Birokrasi Sipil yang Terkendali Ketat

Salah satu soal terbesar yang dihadapi pemerintah baru yang berketetapan hati untuk melakukan reformasi ekonomi secara radikal adalah bagaimana membuat program-program pemerintah bisa berjalan efektif dan tidak diselewengkan birokrasi. Untuk itu, Orde Baru mengadakan pembaharuan birokrasi yang diarahkan (1) untuk memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi, (2) untuk membuat birokrasi tanggap

⁵ Mas'ood, *Negara ...*, h. 50—69; lihat pula Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 150—175.

terhadap kehendak kepemimpinan di pusat, dan (3) untuk memperluas wewenang pemerintah baru dan mengkonsolidasikan pengendaliannya atas daerah-daerah.

Tindakan pertama menghasilkan sentralisasi semua proses pembuatan kebijaksanaan publik penting. Pemerintah pusat menyiapkan GBHN, REPELITA, dan APBN. Strategi kedua mendorong semakin banyaknya perwira militer dan teknokrat sipil ke dalam departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintah Orde Baru memerlukan birokrasi yang mampu menjalankan perubahan yang ditempuh melalui upaya menempatkan perwira dan teknokrat reformis yang bisa dikendalikan oleh pemimpin tertinggi pada jabatan-jabatan birokrasi. Tindakan ketiga mendorong proses penempatan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat pada jabatan pemerintahan daerah sebagai gubernur atau bupati dan yang paling dipercaya oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah perwira ABRI.

Angkatan Bersenjata yang Terintegrasi

Konflik faksional di dalam angkatan dan persaingan antara TNI-AD dan angkatan lain merupakan persoalan tersendiri pada masa-masa awal Orde Baru. Akan tetapi, akhirnya Soeharto berhasil membina kesatuan di dalam TNI-AD dan kemudian di seluruh ABRI dengan menggunakan metode-metode berikut: (1) menyingkirkan mereka yang dianggap kiri dan mereka yang mau memindahkan kesetiaan mereka dari Soekarno ke Soeharto, (2) memindahkan mereka yang menjadi pimpinan faksi-faksi yang antagonistik ke daerah-daerah yang jauh atau ke luar negeri atau ke posisi-posisi yang tidak penting dalam staf militer atau birokrasi sipil pusat, (3) menggunakan institusi-institusi dalam ABRI untuk menyalurkan kritik dan nasihat, (4) menyokong faksi-faksi dalam kelompok-kelompok politik

yang menguntungkan faksi Soeharto, dan (5) mengubah struktur organisasional ABRI.

Badan Legislatif yang Lebih Tanggap

Pemerintah berhasil membuat badan legislatif tanggap terhadap kemauan pihak eksekutif. Salah satu ciri paling penting dari usaha ini adalah adanya pelembagaan mekanisme *recall*. Metode disipliner ini memungkinkan dewan pimpinan pusat (DPP) partai untuk menarik kembali wakilnya dalam DPR yang tidak tunduk pada pengarahannya partai. Pemerintah menggunakan peraturan ini untuk mengendalikan perilaku anggota DPR. Mekanisme ini membantu pemerintah dalam membatasi keragaman opini dalam politik legislatif. Pemilu yang dilaksanakan hanya mengabsahkan politik DPR yang terkendali itu.

Politik Kepartaian yang Disederhanakan

Pemerintah tidak bisa mengandalkan partai-partai politik untuk mendukung upaya pembangunan. Sementara itu, Soeharto harus mematuhi keputusan MPRS tentang pemilu 1968 sebagai jalan konstitusional. Karena itu, yang menjadi pikirannya adalah bagaimana melaksanakan pemilu tanpa mengorbankan program ekonomi. Untuk itu, kelompok penasihat Soeharto menghasilkan beberapa strategi berikut: (1) membentuk sebuah kelompok politik baru dalam DPR yang terdiri dari politisi nonpartai yang mempunyai komitmen terhadap program pembangunan pemerintah, (2) menyederhanakan partai politik melalui fusi, dan (3) mendukung sistem perwakilan korporatis.

Reorganisasi Sekber Golkar

Kebutuhan untuk memiliki kelompok perwakilan dalam DPR dan sebuah "electoral machine" mendorong pimpinan Orde Baru untuk mengkooptasi Sekber Golkar dan menempatkan orang-orangnya sendiri dalam kepemimpinan organisasi itu. Bersama dengan sekutu sipil, para perwira intelijen membentuk "electoral machine" di dalam sekber Golkar yang disebut Badan Pengendali Pemilihan Umum (Bapilu) yang ternyata cukup efektif dalam memperluas pengaruh organisasi itu ke seluruh negeri. Peraturan Mendagri juga melarang pegawai negeri menjadi anggota parpol dan mengharuskan "monoloyalitas" pada pemerintah. Peraturan ini membuat banyak pegawai negeri meninggalkan partai politik dan bergabung dalam sekber Golkar. Organisasi tersebut sudah terkoordinasi dengan lebih baik, memiliki tujuan-tujuan yang lebih jelas, dan mempunyai kepemimpinan yang bertekad kuat serta didukung oleh aparat birokrasi. Buah dari reorganisasi itu adalah kemenangan besar dalam pemilu 1971 (62,8 persen suara pemilih). Kemenangan ini merupakan ganjaran yang luar biasa besar terhadap pendekatan konstitusional Soeharto dan membuka pintu ke arah perpolitikan yang konstitusional, tetapi terkendali ketat.

Fusi Partai-Partai

Langkah pertama ke arah penyederhanaan partai dilakukan Soeharto pada 27 Februari 1970 ketika bertemu dengan pimpinan partai-partai untuk membahas pengurangan jumlah partai. Pertemuan itu menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi di dalam DPR pada Maret 1970, yaitu (1) Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari FNI, IPKI, Murba, PARKINDO, dan Partai Katolik dan (2) Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Dengan demikian, sebuah pola untuk penyederhanaan partai sudah

ditetapkan. Langkah terakhir dilakukan setelah pemilu 1971, sembilan partai politik tersebut sepakat untuk berfusi menjadi dua. Pada Januari 1973 Kelompok Persatuan Pembangunan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak itu Indonesia mempunyai sistem tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI.

Sistem ini dipertahankan oleh pemerintah melalui berbagai cara. Yang *pertama* adalah mekanisme *recall*, yang memungkinkan pimpinan partai untuk mengenakan tindakan disipliner terhadap wakilnya di DPR kapan saja atas saran pemerintah. Cara *kedua* berupa persyaratan bahwa setiap anggota partai yang ingin menduduki jabatan pimpinan harus mendapat izin dari pemerintah. Cara *ketiga* adalah intervensi pemerintah dalam kongres, musyawarah nasional, atau muktamar partai guna mencegah naiknya pemimpin partai yang tidak bisa diajak bekerja sama. Cara *keempat* adalah mencegah partai agar tidak memperoleh anggota dari kalangan pegawai negeri. Yang *terakhir* adalah penerapan gagasan "massa mengambang", yaitu melarang aktivitas partai di pedesaan kecuali pada masa kampanye pemilu lima tahun sekali.

Korporatisasi Organisasi Sosial

Strategi pembentukan satu partai politik yang disponsori pemerintah dibarengi dengan dorongan pembentukan kelompok-kelompok kepentingan korporatis yang digabungkan dalam jaringan Golkar. Tujuan penerapan sistem seperti itu adalah untuk meredam konflik antarkelas dan antarkelompok dan demi menciptakan keselarasan, keharmonisan, dan kerja sama dalam hubungan antara negara dan masyarakat.

Sasaran pertama korporatisasi adalah suatu organisasi profesi yang mewakili pegawai negeri yang kemudian terkenal dengan nama KORPRI. Sejak pembentukannya, KORPRI sangat efektif dalam menggerakkan pegawai negeri beserta keluarganya untuk memilih calon-calon Golkar dalam pemilu dan dalam menjauhkan mereka dari kegiatan parpol. Ketidakpatuhan pada tuntutan Korpri bisa berakibat hilangnya pekerjaan yang berarti penderitaan yang besar. Sasaran korporatisasi kedua adalah organisasi perburuhan, FBSI (sekarang SPSI). Sasaran penting ketiga adalah sektor bisnis, KADIN. Selain itu, korporatisasi juga diterapkan di banyak bidang kehidupan lain, seperti PWI, MUJ, KNPI, HKTI, HNSI, dan Kowani.

Korporatisasi ini menggambarkan upaya pemerintah menyalurkan perwakilan kepentingan masyarakat dengan cara-cara yang bisa mencegah ketidakstabilan. Keinginan keras untuk menjaga ketertiban telah menaksa pemerintah untuk melakukan apa saja demi menekan konflik antarkelas dan antarkelompok kepentingan, sementara kebutuhan untuk menggalakkan produktivitas ekonomi telah membuat pemerintah membatasi perwakilan kepentingan kelas bawah, tetapi membuka beberapa lembaganya untuk dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok bisnis utama.

Format politik Orde Baru seperti di atas terbukti ampuh untuk melancarkan program-programnya. Ditinjau dari sudut pandang makro, barangkali tak seorang pun meragukan keberhasilan pemerintah Orde Baru mewujudkan obsesi ganda, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dalam bidang politik, harus diakui bahwa Orde Baru merupakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik terlama sepanjang sejarah Republik kita. Dengan modal kestabilan politik itu, Orde Baru tak hanya bisa mencatat prestasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,

melainkan juga pengurangan jumlah penduduk miskin secara absolut. Prestasi itu bisa pula dilihat dari pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan perlistrikan, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya.⁶

Meskipun begitu, bukan berarti bahwa Orde Baru benar-benar berhasil memenuhi segala aspirasi rakyat. Selama Orde Baru muncul realitas politik-ekonomi yang negatif. Yang memprihatinkan adalah meluasnya korupsi, kolusi, dan monopoli baik di bidang ekonomi maupun politik. Realitas negatif tersebut sudah tentu tidak menguntungkan masa depan bangsa Indonesia. Tuntutan atas pemih yang bersih, misalnya, tak jarang berbenturan dengan keengganan pemerintah untuk memperbaruinya sehingga bermuara pada tindak kekerasan massa dalam bentuk unjuk rasa dan kerusuhan. Begitu pula organisasi birokrasi dan aparat negara pada umumnya, memicu perlawanan massa rakyat yang marah terhadap mereka. Di sisi lain, para pemimpin masyarakat maupun wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR baik pusat maupun daerah, begitu pula MPR, ternyata "asyik sendiri" dan bahkan cenderung membiarkan diri terkooptasi oleh kecenderungan politik Orde Baru.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang dihasilkan Orde Baru bukanlah stabilitas yang sebenarnya melainkan stabilitas semu karena hasil dari pemaksaan. Kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat dikontrol secara ketat bahkan masyarakat kelompok bawah dilarang berpolitik praktis sehingga mereka tersingkir dari wacana politik normal. Dengan demikian, hubungan antara negara Orde Baru dan masyarakat ditunjukkan oleh adanya dominasi negara atas masyarakat.

⁶ Haris, *Menggugat ...*, h. 1-2.

Hubungan antara negara dan masyarakat yang bersifat dominatif tersebut ditandai oleh adanya Negara Birokratik Otoriter (NBO) yang tumbuh bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Karena itu, negara berusaha menjauhkan rakyat dari urusan politik dengan cara-cara yang represif, korporatif, maupun birokratis.⁷

Meskipun begitu, dalam diri Orde Baru terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya. Menurut Liddle,⁸ kelemahan-kelemahan itu adalah (1) adanya kesenjangan ideologis antara Demokrasi Pancasila dengan demokrasi murni, (2) adanya ketegangan birokrat sipil dan militer, (3) kesenjangan persepsi dengan kenyataan mengenai sifat dasar pembelahan politik massa saat ini, berlawanan dengan 20 tahun silam, (4) kepedulian yang besar terhadap konsekuensi-konsekuensi distributif kebijakan ekonomi pemerintah, dan (5) beberapa perselisihan dalam tubuh ABRI tentang suksesi. Selain itu, Orde Baru sudah cukup lama diperhadapkan dengan tiga dilema yang berkaitan satu sama lain: antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, stabilitas politik dan partisipasi, serta antara demokrasi semu dan demokrasi yang sesungguhnya.⁹

Kelemahan-kelemahan tersebut membuat Orde Baru tidak bisa bertahan selamanya. Apalagi Orde Baru yang termasuk negara birokratik otoriter itu mulai goyah seiring dengan munculnya krisis politik yakni munculnya perpecahan di kalangan elite dan krisis ekonomi yaitu ketika negara mengalami kesulitan akibat ekonomi biaya tinggi, guncangan pasar internasional, atau kegagalan proses industrialisasi.

⁷ Supriyanto, *Perlawanan ...*, h. 32.

⁸ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 113.

⁹ Mochtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis Politik dan Arah Pemecahannya", dalam Haris dan Sihbudi, *Menelaah ...*, h. 29.

Hegemoni Orde Baru

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dua prinsip paling pokok rezim Orde Baru adalah "stabilitas politik" dan "pembangunan ekonomi". Dalam pandangan Orde Baru, stabilitas dianggap sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Karena itu, Orde Baru berusaha menciptakan depolitisasi massa yang sistematis yang dijalankan dengan strategi seperti sudah disebutkan di atas.

Selain itu, Orde Baru juga menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengekalkan legitimasi. Pendekatan ditawarkan Gramsci ini adalah 'hegemoni' yang diperhadapkan dengan istilah 'penindasan'. Hegemoni berarti perluasan dan pelestarian "kepatuhan aktif" dari kelompok-kelompok yang didominasi oleh kelas yang berkuasa lewat penggunaan kepemimpinan intelektual, moral, dan politik yang mewujudkan dalam bentuk-bentuk kooptasi institusional dan manipulasi sistemis atas teks dan tafsirnya.¹⁰

Dalam konteks Dunia Ketiga, hegemoni mengambil bentuk dalam konsep pembangunan. Ide pembangunan itu berhasil menciptakan keberagaman antagonisme dan identitas, kaum petani, kaum marginal perkotaan, kelompok 'tradisional', perempuan, dan lain-lain, yang menjadi subjek perjuangan dalam bidangnya masing-masing.¹¹

Karena itu, Orde Baru membangun arena wacana hegemonik yang memerlukan wacana yang beragam tetapi berhubungan yang mencakup wacana tentang 'pembangunan', 'kesatuan bangsa', 'ancaman nasional', 'Pancasila', 'Demokrasi Pancasila', dan 'Dwifungsi' yang kesemuanya secara bersama-sama membentuk citra sentral negara Orde Baru sebagai orde pembangunan, orde

¹⁰ Lihat Latif, *Bahasa ...*, h. 16.

¹¹ Lihat Marzouk Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 57.

stabilitas, orde konstitusional, orde yang bersih, orde yang teratur. Seperangkat kosakata baru telah dihasilkan untuk membangun 'potret diri' Orde Baru utamanya melalui bahasa.¹²

Pembangunan merupakan contoh terbaik untuk memahami bagaimana hegemoni berlangsung karena pembangunan pada dasarnya menciptakan ideologi baru serta propaganda yang canggih untuk mengganti ideologi, kultur, dan politik rakyat yang ter subordinasi. Sebagai hegemoni, pembangunan menciptakan konsep realitas seluruh lapisan masyarakat dalam semua kelembagaan dan dimanifestasikan secara perorangan sehingga mempengaruhi prinsip cita rasa, moralitas, adat-istiadat, keagamaan dan politik, maupun hubungan sosial, terutama dalam konotasi intelektual dan moral.¹³

Ketika Orde Baru muncul, kata kuncinya adalah 'pembangunan'. Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang sedang membangun. Karena lebih terpusat pada pembangunan ekonomi, pembangunan ini menggunakan jargon-jargon ekonomi pembangunan seperti 'akselerasi', 'linggal landas', 'pertumbuhan', 'teknologi', 'modernisasi', 'efisiensi', dan sebagainya.¹⁴

Untuk menunjukkan kepentingan sentral dari 'pembangunan' sebagai salah satu pilar Orde Baru dapat diambil beberapa contoh. Indikasi yang jelas dari besarnya kepentingan 'pembangunan' terhadap arena wacana Orde Baru di antaranya terlukis dalam istilah-istilah 'Bapak Pembangunan', 'Orde Pembangunan' dan 'Kabinet Pembangunan', serta berbagai institusi lain yang diberi label 'pembangunan'. Kata kunci ini telah menjadi fokus wibawa dan legitimasi dan titik

¹² Sparringa, 'Discourse ...', h. 100.

¹³ Fekih, *Masyarakat ...*, h. 86.

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, 'Komunikasi dan Perubahan Politik di Indonesia', dalam Latif, *Bahasa ...*, h. 53.

permulaan untuk menginterpretasi kembali fakta-fakta lama dan menunjuk wacana yang akan datang.¹⁵

Istilah 'pembangunan' mengendap dalam bentuk doktrin yang secara konsisten melegitimasi keberadaan Orde Baru. Orde Baru telah mengkonstruksi 'pembangunan' sebagai sesuatu yang membawa pembangunan, kekayaan, dan stabilitas. Istilah 'pembangunan' dalam Orde Baru telah dideskripsikan sebagai gagasan modernisasi yang dicapai melalui perencanaan ilmiah dan administrasi yang stabil. Setiap perbedaan pendapat dengan prinsip-prinsip pembangunan akan diperlakukan sebagai tindak subversif.¹⁶

Orde Baru membuat komitmen untuk membangun dengan memperkenalkan rencana pembangunan ekonomi lima tahun. Dalam melaksanakan hal ini, mereka menciptakan hegemoni budaya dengan jalan membangun Indonesia ke dalam sebuah keadaan ekonomi dan politik yang modern, yang diekspresikan dalam istilah terbaik mereka "Orde Baru". Meskipun hal ini menunjukkan bahwa Orde Baru telah menjalankan tema-tema yang bermacam-macam untuk memperoleh legitimasi politik dari massa. Semuanya itu dapat ditelusuri kembali pada arena wacana utama. Konstruksi arena wacana Orde Baru terletak pada penciptaan budaya politik Indonesia baru yang digambarkan dalam dasar pikiran "pembangunan ekonomi melalui stabilitas politik". Konstruksi Orde Baru tentang Demokrasi Pancasila, misalnya, secara jelas memasukkan Dwifungsi sebagai bagian integral dari sejarah dan struktur politik Indonesia dan menolak pemisahan militer dari politik seperti yang dijumpai pada model Barat. Konsepsi

¹⁵ Ariel Heryanto, "The Development of 'Development'", dalam *Indonesia* No. 46, Oktober 1988, h. 11.

¹⁶ Langenberg, "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony", dalam Budiman, *State ...*, h. 124—125; lihat pula Langenberg, "Negara ...", h. 227.

Dwifungsi juga mengandung klaim bahwa ABRI lebih bersifat 'rasional' daripada sipil.¹⁷

Dalam pandangan Daniel T. Sparringa,¹⁸ hegemoni rezim Orde Baru secara pokok telah diciptakan melalui penguatan dan pembuktian keaslian politik otonomi negara. Hal ini secara mendasar melukiskan rezim sebagai perwakilan dari beberapa kepentingan yang berkembang dalam masyarakat sipil. Demikian gagasan yang diuraikan untuk memasukkan juga ide sentral dari negara-bangsa utamanya yang bersumber dari nasionalisme Indonesia dan sumber-sumber legitimasi yang lain seperti 'Pembangunan', 'Pancasila', 'UUD 1945', 'persatuan nasional'. Meskipun begitu, sebagai sebuah proses meliputi usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk menciptakan hegemoni melalui bahasa.

Proses-proses sosial seperti hegemoni direalisasikan dalam usaha terus-menerus untuk menekankan keunggulan kepentingan nasional atas beberapa kepentingan setempat yang khusus. Hal ini dicapai melalui usaha sistematis oleh rezim untuk membangun sebuah rangkaian wacana untuk menciptakan hegemoni, yaitu 'kepemimpinan moral dan intelektual'. Sebuah ilustrasi yang baik tentang hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sejak Orde Baru berkuasa, beberapa istilah baru telah diperkenalkan atau paling tidak diberi interpretasi dan makna baru. Sebagai contoh, pembangunan nasional, stabilitas nasional, kebudayaan nasional, kepribadian nasional, konsensus nasional, persatuan nasional, ancaman nasional, ideologi nasional, disiplin nasional, wawasan nasional, dan beberapa 'nasional' yang lain. Istilah-istilah ini secara bersama-sama membentuk arena wacana dan sistem wacana yang menetapkan dasar bagi hegemoni Orde Baru.

¹⁷ Sparringa, 'Discourse ...', h. 102.

¹⁸ Idem, h. 102—107; lihat pula Sparringa, 'Nasionalisme Orde Baru dan Globalisasi: Sebuah Taksonomi Sosiologi Politik Intelektual Indonesia', dalam Susilo, *Masyarakat ...*, h. 55—60.

Istilah-istilah yang berhubungan ini diperlukan untuk menciptakan 'logika' sebagai kebutuhan untuk penciptaan *common sense* yang diperlukan untuk menghasilkan persetujuan yang bersifat umum. Dari pengujian secara tekstual dan kontekstual, penggunaan istilah-istilah tersebut dapat menciptakan dasar bagi hegemoni Orde Baru. Berdasarkan itu semua, Sparringa merekonstruksi apa yang menjadi 'logika' Orde Baru, yaitu sebuah logika yang meletakkan dasar-dasar yang penting bagi terciptanya hegemoni. Pembangunan nasional dan stabilitas nasional merupakan pilar utama arena wacana Orde Baru. Terdapat sembilan dasar pemikiran, masing-masing dengan logikanya sendiri dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kesembilan 'logika' yang dimaksud dipaparkan satu per satu dimulai dari 'pembangunan' sebagai tema sentral.

Logika Pertama

"Pembangunan nasional hanya dimungkinkan jika ada stabilitas (politik) nasional; sebaliknya adanya pembangunan akan menimbulkan stabilitas yang pada gilirannya akan membantu keberhasilan pembangunan." Untuk mendukung logika ini, Orde Baru telah mendefinisikan orde lama Soekarno sebagai orde yang ditandai dengan kekacauan politik, ketidakaturan dan malapetaka ekonomi. Pada sisi lain, Orde Baru telah melukiskan dirinya sebagai "orde pembangunan" yang melaksanakan pembangunan, menjunjung tinggi (menegakkan) konstitusi, dan mewakili seluruh masyarakat. Banyak gagasan tentang otonomi negara dikaitkan dengan hal ini.

Logika Kedua

"Stabilitas hanya dimungkinkan jika ada persatuan nasional". Contoh-contoh yang bersumber dari periode sebelum masa Orde Baru, termasuk demokrasi liberal tahun 1950-an dan masa Soekarno, secara terus-menerus telah digunakan untuk membatasi segala sesuatu seperti politik massa dan politik "aliran".

Logika Ketiga

"Persatuan nasional hanya dimungkinkan di bawah kepemimpinan nasional." Hanya negara yang dapat menetapkan kepemimpinan nasional sejak masyarakat madani dipisah-pisahkan. Periode politik aliran dalam tahun 1950-an dan 1960-an juga telah digunakan untuk mendukung tuntutan ini.

Logika Keempat

"Kepemimpinan nasional hanya dapat dicapai jika platform (program) budaya bersama ada dalam masyarakat madani." Karena tidak adanya program bersama dalam masyarakat madani, wawasan nasional yang didasarkan pada ideologi nasional Pancasila sangat penting keberadaannya. Hal ini menetapkan masyarakat madani dengan sebuah cara (means) untuk bersatu di bawah negara-bangsa Indonesia.

Logika Kelima

"Pancasila, ideologi nasional, berakar pada budaya dan karakter Indonesia sendiri." Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa Pancasila itu unik/khas, spesifik, dan bentuk ideologi yang paling tepat bagi Indonesia. Dalam logika ini, demokrasi Pancasila diberi keunggulan atas bentuk-bentuk ideologi lain dengan karakter dan budaya asing.

Logika Keenam

"Rakyat perlu menyadari bahwa ada segala sesuatu yang dapat mengancam integritas ideologi nasional, persatuan nasional, stabilitas nasional yang pada akhirnya merupakan ancaman langsung bagi pembangunan nasional dan integritas Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa." Hal ini yang disebut gagasan awal adanya "ancaman nasional". SARA lalu dirasakan sebagai ancaman komunisme dan

fundamentalisme agama. Bagi masyarakat multibudaya seperti Indonesia yang secara etnis, agama, dan ras sangat berbeda, ketegangan sangat tidak mungkin dihindarkan. Namun demikian, untuk kepentingan persatuan nasional, stabilitas nasional, dan pembangunan nasional, berbagai bentuk perlawanan, budaya atau ideologi dapat dirasakan secara logis/sah sebagai ancaman.

Logika Ketujuh

"Memperhatikan ancaman ini sungguh amat nyata' dan masyarakat 'masih terpecah belah' menurut garis primordial, maka sangatlah penting untuk memiliki sebuah lembaga yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dari ancaman seperti itu. Lembaga yang dapat dipandang sebagai paling setia kepada Pancasila, dan karenanya mampu menjadi wasit yang netral dan pelindung yang sejati dari bangsa, adalah ABRI." Peran sejarah militer di Indonesia dipakai untuk mendukung argumentasi bahwa ABRI adalah satu-satunya 'penyelamat', 'pelindung', dan 'penjamin' yang dapat diandalkan untuk menjaga keutuhan persatuan nasional dan negara nasional Indonesia.

Logika Kedelapan

"Untuk memungkinkan ABRI menjalankan fungsi-fungsi seperti itu, kepada ABRI harus diberikan hak untuk secara langsung terlibat dalam masalah-masalah sosial dan politik." Di sinilah dwifungsi mendapatkan tempatnya dalam wacana politik Orde Baru. Karena kepentingannya, peran ABRI dalam memelihara dan mempertahankan persatuan nasional, stabilitas nasional, dan pembangunan nasional, ABRI sudah sepatutnyalah untuk dimasukkan sebagai salah satu modal pembangunan.

Logika Kesembilan

"Untuk membantu negara, khususnya ABRI, menjalankan peran politiknya sebagai

'wasit', 'pelindung', dan 'penjamin' pembangunan nasional secara lebih efektif dan absah, berbagai tindakan perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan." Ini membukakan jalan bagi rezim Orde Baru untuk melakukan tindakan-tindakan hampir tanpa batas yang secara logis keabsahannya dapat ditelusuri kembali ke dalam logika-logika yang diuraikan sebelumnya. Tindakan-tindakan itu meliputi, misalnya pemberian kursi di DPR pada fraksi ABRI dan diperkenalkannya doktrin kekaryaan yang memungkinkan ABRI menduduki jabatan-jabatan sipil dalam birokrasi.

Logika yang memberikan dasar bagi *common sense* politik ini telah memberikan negara dengan klaim-klaim yang logis dan sah untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya agar mampu membatasi berbagai macam bentuk oposisi yang pada akhirnya akan memperkuat hegemoni negara. Banyak contoh dapat ditarik untuk memberikan ilustrasi ini: asas tunggal Pancasila, litsus, Bakorstranas, pembekalan anggota DPR, dan penciptaan UU baru dalam semua bidang yang ditujukan untuk "menyukseskan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

Wacana Demokrasi Orde Baru

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian depan bahwa pembicaraan mengenai wacana demokrasi ini dalam studi ini ditempatkan pada tiga tema utama, yaitu demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional. Berikut ini dipaparkan wacana demokrasi Orde Baru berkaitan dengan ketiga tema utama tersebut. Paparan berikut merupakan hasil studi pustaka terutama yang bersumber dari hasil studi Daniel T. Sparringa¹⁹ dan M. Najib Azca.²⁰

¹⁹ Wacana Demokrasi Orde Baru ini diinterpretasikan oleh peneliti dari wacana demokrasi intelektual kelompok orthodox dalam studi Sparringa, "Discourse ..." yang dianggap mewakili wacana resmi Orde Baru.

Demokrasi Pancasila

Sebelum membicarakan demokrasi pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila, perlu disinggung secara singkat definisi demokrasi. Demokrasi secara umum meliputi prinsip "kedaulatan rakyat" dan didefinisikan sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Di Indonesia, termasuk pada masa Orde Baru, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam MPR yang merupakan bentuk perwakilan tertinggi dari seluruh bangsa Indonesia. Adanya lembaga MPR itu dijadikan sebagai bukti bahwa Orde Baru termasuk negara yang demokratis.

Sejak awal Orde Baru sudah mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis. Bagi Orde Baru, demokrasi yang dijalankannya, demokrasi Pancasila, memiliki ciri khas tersendiri yang menggambarkan ciri-ciri dan kepribadian asli bangsa Indonesia yang diberi sifat-sifat ideologi negara Pancasila yang unik dan berbeda dengan bentuk-bentuk ideologi lain. Orde Baru menolak demokrasi liberal karena dianggap mengutamakan individualisme serta mengabaikan masyarakat atau negara dan menolak demokrasi sosialis karena dianggap hanya mengutamakan negara serta mengabaikan hak-hak individu. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai model demokrasi yang dapat memberikan keseimbangan antara individu dan negara.

Pembicaraan tentang demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari salah satu kebijakan Orde Baru yang disebut kebijakan "massa mengambang".

²⁰ M. Najib Azca, *Hegemoni Tentara*, (Yogyakarta: LKIS, 1998).

Massa Mengambang

Orde Baru menganggap bahwa sebagian besar rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Keadaan seperti itu dianggap tidak menunjang implementasi demokrasi dan bisa membahayakan keberhasilan pembangunan ekonomi dan persatuan nasional. Orde Baru melihat bahwa banyak rakyat Indonesia yang belum paham terhadap demokrasi dan kenyataan itu akan membingungkan rakyat jika mereka menggunakan demokrasi sekarang.

Karena itu, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan massa mengambang atau depolitisasi massa. Langkah ini tentu tanpa tujuan. Orde Baru secara jelas bertujuan menciptakan stabilitas nasional karena dalam pandangan Orde Baru jika rakyat diberi kebebasan untuk berpolitik praktis, tidak akan dapat dihindarkan adanya konflik-konflik di antara rakyat itu sendiri yang secara otomatis mengancam stabilitas nasional. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya ancaman bagi kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Untuk menghindari ancaman tersebut, Orde Baru menetapkan kebijakan massa mengambang ini.

Sebagai upaya melancarkan kebijakan massa mengambang, Orde Baru juga menetapkan program-program pembangunan yang dianggapnya lebih realistis dan pragmatis. Hal ini berarti bahwa Orde Baru lebih mengutamakan pembangunan ekonomi daripada pembangunan politik. Orde Baru yakin bahwa tingkat ekonomi rakyat yang masih rendah menjadi penghambat pelaksanaan demokrasi. Karena itu, lebih dulu dijalankan program-program pembangunan dengan tujuan memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Begitu ekonomi rakyat sudah mapan, demokrasi akan berjalan dengan sendirinya.

Adanya usaha mengutamakan pembangunan ekonomi daripada politik mengisyaratkan bahwa Orde Baru mengidealkan pelaksanaan demokrasi secara bertahap. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar rakyat masih rendah tingkat pendidikan dan ekonominya sebagaimana disebutkan di atas, Orde Baru percaya bahwa demokrasi harus diimplementasikan secara bertahap, "satu langkah pada satu waktu" sesuai dengan pembangunan masyarakat Indonesia sebagai kesefuruhan. Perubahan yang tiba-tiba hanya akan menciptakan beberapa problem, yang pada gilirannya mungkin merusak keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia. Bagi Orde Baru, pembangunan ekonomi jauh lebih penting daripada demokrasi itu sendiri. Aplikasi demokrasi liberal hanya akan menciptakan instabilitas.

Salah satu isu yang tak kalah popufernya dalam demokrasi Pancasila adalah konsep negara integralistik. Berikut ini dipaparkan secara garis besar konsep negara integralistik tersebut.

Negara Integralistik

Orde Baru mengidealkan terbentuknya "masyarakat Pancasila" dalam arti perbedaan agama, etnis, ras, kepercayaan, dan sebagainya tidak memecah belah rakyat. Hal ini berarti bahwa Orde Baru berusaha mempertahankan keharmonisan sosial antara kelompok sosial yang berbeda. Keharmonisan sosial antara pengikut agama yang berbeda direalisasikan dalam bentuk negara-bangsa Indonesia yang berakar pada gagasan "negara otonom".

Untuk menciptakan masyarakat seperti itu, Orde Baru menggunakan gagasan tradisional Jawa yang mengharuskan masyarakat hidup secara aman, harmonis, dan tenteram. Orde Baru mengidealkan rakyat seperti sebuah keluarga

yang harmonis, seluruh anggotanya saling memelihara dan saling peduli. Negara harus menjadi pusat pelindung rakyat Indonesia atau menjadi pihak yang "ngayomi lan ngayemi". Dalam hal ini Orde Baru menekankan pentingnya negara sebagai perwakilan total dan integral dari seluruh rakyat. Dengan demikian, Orde Baru ini memandang sebuah negara integral sebagai sentral.

Dwifungsi ABRI

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi ABRI dalam masalah sosial politik atau yang dikenal dengan konsep dwifungsi ABRI karena dwifungsi ABRI ini menjadi pilar utama arena wacana resmi yang dikembangkan oleh Orde Baru. Karena itu, berikut ini dipaparkan wacana Orde Baru tentang Dwifungsi ABRI. Pembicaraan mengenai Dwifungsi ABRI ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu konsepsi tentang Dwifungsi ABRI, dasar legitimasi Dwifungsi ABRI, pengangkatan militer dalam birokrasi sipil, pengangkatan militer dalam parlemen, dan hubungan ABRI dengan Golkar.

Konsepsi tentang Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus.²¹ Konsep dwifungsi ABRI dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan

²¹ Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 1.

bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²²

Orde Baru melihat bahwa dwifungsi merupakan sebuah konsep politik yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik Indonesia yang memang unik bahkan dwifungsi diakui oleh hukum. GBHN sendiri menyatakan bahwa ABRI merupakan satu dari lima aset nasional untuk pembangunan nasional. Karena itu, konsep dwifungsi ABRI tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi Pancasila yang bersifat spesifik Indonesia. Selain itu, dwifungsi menjaga dari kemungkinan adanya ABRI yang melakukan kudeta sehingga akan memperburuk konflik sosial dan politik.

Dasar Legitimasi Dwifungsi ABRI

Dalam hubungannya dengan dwifungsi, Orde Baru mengembangkan beberapa argumentasi pokok yang dipakai untuk memberikan legitimasi politik pada ABRI untuk terlibat langsung dalam masalah-masalah politik.²³ *Pertama*, ABRI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rakyat. Sokongan utama adalah kenyataan bahwa ABRI terlahir dari kekuatan rakyat, ABRI dibentuk oleh kekuatan-kekuatan milisi, bukan oleh pemerintah. *Kedua*, sejak awalnya ABRI terlibat dalam masalah-masalah nonprofesional kemiliteran, artinya keterlibatan militer dalam masalah sosial dan politik adalah bagian integral dari sejarah perkembangan politik Indonesia. *Ketiga*, ABRI merupakan satu-satunya kekuatan yang dalam sejarahnya

²² Konsep dwifungsi seperti ini dikemukakan oleh Pangab dalam seminar nasional IV AIPPI 13 Februari—16 Februari 1991 h. 13 sebagaimana dikutip oleh Yahya A. Muhaimin, "Pengantar", dalam Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. vi.

²³ Mengenai dasar legitimasi dwifungsi ABRI ini dapat dilihat pada Daniel Sparringa, "Dari 'Sebuah Panggilan' ke 'Kembali ke Barak Sekarang': Sebuah Taksonomi Paradigma Intelektual Indonesia tentang Dwifungsi ABRI", dalam *117 Post* No. 2, Oktober 1998, h. 5.

selalu tampil sebagai "penyelamat" negara proklamasi 17 Agustus 1945. *Keempat*, Indonesia yang merupakan masyarakat plural dan heterogen ini dipahami sebagai masyarakat yang memiliki potensi besar bagi berkembangnya antagonis etnis, agama, ras, dan golongan (SARA). Karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu, ABRI memotret dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang secara ideologis tidak terpecah-pecah sehingga mampu melaksanakan tugas tersebut. *Kelima*, kesetiaan tak terbatas pada ideologi negara, Pancasila, sebagaimana terdapat dalam Sumpah Prajurit merupakan ilustrasi untuk menunjukkan kuatnya komitmen ABRI pada negara sekaligus penegasan pada sifat otonomi hubungan ABRI terhadap pemerintah.

Senada dengan pendapat di atas, M. Najib Azca²⁴ menyatakan bahwa dasar dan landasan peran sosial politik ABRI bertolak dari sejarah, yakni adanya saham TNI pada awal perjuangan kemerdekaan RI. Saham tersebut disebabkan antara lain karena lemahnya pemerintahan sipil sebagai akibat *cek-cok* internal parpol, *cek-cok* antarpapol, *cek-cok* parpol dengan pemerintah, maupun *cek-cok* internal pemerintah. Karena itu, berkembang pandangan di kalangan militer bahwa mereka sebagai pemegang saham utama republik. Selain itu, kalau pemerintahan diserahkan kepada sipil yang lemah itu mereka hanya akan berperan sebagai "pemadam kebakaran".

Selain itu, dominasi peran ABRI dalam kehidupan sosial politik disebabkan tidak tertatanya kaderisasi di lingkungan sipil. Berbeda dengan kaderisasi di lingkungan militer yang berjalan sistematis. ABRI merupakan kekuatan riil karena segala sesuatu memerlukan dukungan ABRI. Banyaknya orang ABRI yang menjadi

²⁴ Lihat Azca, *Hegemoni ...*, h. 107.

pembantu-pembantu penting presiden menunjukkan bahwa ABRI secara riil politik merupakan sumber rekrutmen yang bagus dibanding yang lain.

Dengan demikian, menurut pandangan ABRI, dwifungsi ABRI bersifat permanen selama negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena dwifungsi ABRI merupakan bagian dari demokrasi Pancasila. Selain itu, karena adanya faktor-faktor yang bersifat permanen yang menghendaki fungsi sospol ABRI, yaitu: (1) kondisi geografis yang luas dan (2) pluralisme kultural yang tinggi yang membutuhkan adanya alat perekat.

Salah satu wujud Dwifungsi ABRI adalah pengangkatan ABRI (ABRI) dalam birokrasi sipil. Bagian berikut memaparkan hal tersebut.

Pengangkatan Militer dalam Birokrasi Sipil

Aplikasi pengangkatan ABRI dalam birokrasi sipil dipandang sebagai bagian dari doktrin "kekaryaan" sebagai pelaksanaan dwifungsi. Alasan pokok pengangkatan ABRI dalam birokrasi sipil adalah perlunya personel yang berkualitas untuk mendukung pembangunan ekonomi. ABRI-lah yang dianggap sangat berperan menciptakan lingkungan kondusif bagi suksesnya pembangunan.

ABRI ditempatkan dalam birokrasi sipil karena kepemimpinannya yang diharapkan. Banyaknya orang ABRI yang menduduki birokrasi sipil misalnya menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya merupakan cerminan bahwa masyarakat menganggap ancaman masih ada sehingga ABRI dianggap masih diperlukan. Berkaitan dengan itu, berikut dipaparkan masalah kepemimpinan ABRI.

Kepemimpinan ABRI

Jelas dinyatakan bahwa ABRI merupakan satu kelompok paling penting dalam membawa pembangunan Indonesia. Alasan pokok menyandarkan pada dua

dasar: (1) tidak ada organisasi tunggal yang lain yang mempunyai kepemimpinan sekuat ABRI dan seefektif organisasi ABRI, (2) ABRI dipandang sebagai satu-satunya kelompok yang secara relatif bebas dari konflik ideologi. Kombinasi dari dua faktor tersebut membuat ABRI sebagai kekuatan yang mengarahkan sosial dan politik dalam politik Indonesia termasuk kepemimpinan nasional.

ABRI, melalui kepemimpinannya, mampu bertindak sebagai pemersatu bangsa. Tanpa kepemimpinan ABRI, bangsa akan pecah dan terbagi-bagi ke dalam bangsa-bangsa yang terpisah. ABRI mampu sebagai perekat bangsa karena ABRI mengikuti tradisi menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok dan karena itu, ABRI dapat menjaga kesatuan bangsa.

ABRI merupakan satu-satunya organisasi yang bebas dari konflik ideologi. Melalui kepemimpinannya, ABRI mampu bertindak sebagai perekat bangsa karena mengikuti tradisi menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Karena itu, ABRI mengklaim dirinya sebagai organisasi yang paling nasionalis.

Sebaliknya, Orde Baru melihat kepemimpinan sipil sebagai penyebab instabilitas politik dan malapetaka ekonomi di Indonesia. Hal seperti itu diperkuat dengan menunjuk keadaan pada tahun 1955-an karena pada waktu itu terjadi pertikaian di antara kekuatan sipil akibat dari adanya perang ideologi di antara mereka. Kepemimpinan sipil khususnya kepemimpinan partai politik telah gagal mempertahankan persatuan bangsa pada masa lalu karena perbedaan ideologis. Konflik ideologis di antara pemimpin sipil menyebabkan instabilitas di negara ini dan merusak mayoritas penduduk secara ekonomi.

Pengangkatan Militer dalam Parlemen

Orde Baru beranggapan bahwa keterlibatan ABRI di parlemen merupakan bagian integral dwifungsi dan bagian demokrasi Pancasila. Kehadiran ABRI di lembaga perwakilan bersifat keharusan supaya dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mengamankan negara ini.

Pemberian jatah kursi untuk ABRI itu didasarkan pada pertimbangan bahwa jika ABRI ikut pemilihan umum dampaknya akan lebih buruk dan lebih rawan dan dimungkinkan ABRI akan mengupayakan kepentingan sendiri sehingga kepentingan nasionalnya hilang serta dimungkinkan adanya pengelompokan di tubuh ABRI. Bahkan dikhawatirkan ABRI akan melakukan kudeta jika tidak berada di MPR dan sewaktu-waktu merasa tidak puas. Dengan turutnya ABRI membuat kebijakan, dia dituntut ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan itu dalam posisi sebagai utusan golongan. ABRI harus ada di DPR karena DPR adalah tempat proses pengambilan keputusan pemerintahan dan kenegaraan.

Peran sopol ABRI di DPR adalah sebagai stabilisator dan dinamisator, yaitu (1) menyumbangkan pikiran melalui DPR, (2) menjamin bahwa pencapaiannya dalam kondisi yang harmonis. Stabilisator mengandung pengertian sebagai penegak dalam memelihara keseimbangan dan persatuan seluruh kekuatan sosial berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memelihara kesadaran dan ketahanan mental ideologis, berpendirian teguh terhadap asas-asas, prinsip, dan tujuan perjuangan, cepat dapat menangkap gejala-gejala yang muncul sebagai cetusan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan memberikan penampungan dan atau penyalurannya dengan tekad yang teguh dalam mengamankan cita-cita.

Peran sebagai dinamisator dapat diartikan sebagai unsur penggerak, pelopor, pengambil inisiatif untuk berbuat sesuatu yang positif dan pendobrak

kemacetan. ABRI sebagai dinamisor harus aktif mempercepat proses transformasi (dari nilai-nilai tradisional ke modern) agar senantiasa terdapat keselarasan antara tingkat kemajuan pembangunan dan kondisi masyarakat saat itu.²³

Peran sopol ABRI di legislatif (DPR/MPR) bersifat permanen karena berfungsi untuk mengimbangi kekuatan eksekutif dan harus mengamankan agar produk-produk legislatif tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Peran ABRI di DPR sebagai stabilisor dan dinamisor juga terlihat ketika terjadi hal-hal tertentu, ABRI akan menunjukkan ke mana arah yang harus dituju.

Yang lebih penting lagi adalah kehadiran ABRI di DPR dan MPR merupakan wujud kemanunggalan ABRI-rakyat. Dengan demikian, ABRI bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.

Membicarakan ABRI tidak bisa ditupakan dari pembicaraan tentang hubungan ABRI dengan Golkar. Karena itu, di bawah ini dipaparkan sekilas masalah hubungan ABRI dan Golkar.

ABRI dan Golkar

Sejak kelahirannya, Golkar memang mempunyai hubungan "khusus" dengan ABRI. ABRI-lah yang menjadi sponsor dan bidan kelahiran Golkar. Karena itu, pada awal perjalanannya, ABRI memberi dukungan penuh dan memihak kepada Golkar dalam melakukan program-program politiknya.

Hal itu dilakukan ABRI dengan pertimbangan perlu adanya kekuatan politik yang dominan. Jika ABRI keluar dari Golkar, tidak akan ada lagi kekuatan politik yang dominan. Jika Golkar ricuh, kekuatan-kekuatan politik yang lain ikut ricuh. Akibatnya, tidak akan tercipta situasi politik yang stabil dan kuat untuk bisa

²³ Soebijono, 'Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI', dalam Soebijono dkk., *Dwifungsi ...*, h. 147.

menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Jadi, ABRI masih diperlukan di Golkar untuk menjaga stabilitas Golkar dan mencegah munculnya berbagai macam aliran yang laten.

Selain dwifungsi ABRI, persatuan nasional juga merupakan tema penting yang menjadi inti arena wacana Orde Baru.²⁶ Berikut ini dipaparkan masalah persatuan nasional tersebut.

Persatuan Nasional

Persatuan nasional juga termasuk wacana utama yang ditonjolkan Orde Baru. Wacana ini ditonjolkan sebagai alat untuk mematikan pihak-pihak yang dianggap berbahaya bagi Orde Baru. Sebagai wacana dominan, di dalamnya terdapat isu-isu yang diklaim berbahaya bagi persatuan nasional. Isu-isu yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman nasional itu di antaranya adalah ancaman disintegrasi bangsa, ancaman SARA, dan ancaman komunis serta Islam radikal.

Persatuan nasional sebenarnya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama menyangkut bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka membagi/menggunakan kekuasaan di antara mereka. Dilihat dari sudut itu, persatuan nasional mencakup dua masalah utama: (1) bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara dan (2) bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya.²⁷

Bagi masyarakat yang relatif homogen, mengatasi masalah persatuan nasional tidaklah begitu sulit. Akan tetapi, bagi masyarakat yang bersifat heterogen

²⁶ Lihat Sparrings, "Dari ...", h. 5.

²⁷ Claude Ake, *A Theory of Political Integration*, (Illinois: The Dorsey Press, 1967), h. 13.

seperti Indonesia hal itu merupakan persoalan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian serius. Apalagi secara geografis, negara kepulauan seperti Indonesia ini memiliki sifat yang lebih mendorong ke arah fragmentasi dan perbedaan daripada ke arah integrasi.

Karena itu, tema persatuan nasional ini tidak dapat dilepaskan dari adanya isu-isu yang mengancam persatuan nasional itu. Melihat adanya isu-isu yang mengancam persatuan nasional tersebut, Orde Baru menonjolkan adanya semangat persatuan yang harus dipertahankan karena adanya potensi perpecahan dalam masyarakat multi-etnik seperti Indonesia. Akhirnya, muncullah istilah yang mendukung adanya persatuan nasional, di antaranya "kepentingan nasional", "kepentingan pembangunan" yang sebenarnya hanyalah dipakai oleh Orde Baru sebagai alat untuk menekan pihak-pihak yang tidak sependapat dengan Orde Baru. Semangat persatuan itu diklaim sebagai aset paling penting bagi pembangunan nasional.

Untuk memahami bagaimana usaha Orde Baru mempertahankan persatuan nasional ini, di bawah ini secara berturut-turut akan dipaparkan beberapa isu yang berkaitan dengan tema tersebut.

Hubungan Pusat dan Daerah

Pada isu hubungan pusat dan daerah ini muncul tema-tema kecil yang menjadi bagian. Di antaranya yang paling menonjol adalah hubungan Jawa (Jakarta) dan luar Jawa (luar Jakarta) dan negara kesatuan/negara federasi. Kedua tema kecil tersebut akan mewarnai paparan berikut.

Orde Baru melihat bahwa Jawa akan tetap menjadi pusat pembangunan ekonomi dan budaya Indonesia karena secara historis telah menjadi pusat inspirasi

terhadap bangsa secara keseluruhan. Kerajaan Jawa, kerajaan Mojopahit, dan Jawa di bawah kolonial Belanda dijadikan sebagai fakta sejarah. Selain itu, pembangunan lebih dipusatkan di Jawa (Jakarta) dengan alasan bahwa wilayah tersebut paling padat penduduknya. Selain itu, banyaknya pulau dianggap bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk mencegah terjadinya disintegrasi itu pula, Orde Baru berusaha memperkuat Jakarta sebagai pusat pemerintahan sehingga tak terkalahkan oleh pulau-pulau di luar Jawa.

Negara Kesatuan dan Negara Federasi

Orde Baru lebih tertarik kepada negara kesatuan daripada negara federasi dengan alasan bahwa sebagian besar orang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gagasan negara kesatuan. Ini merupakan sebuah isu keramat dan tak dapat disentuh. Sistem federasi dianggap hanya akan membawa malapetaka bagi Indonesia.

Ada dua alasan utama terhadap penolakan struktur negara federasi. *Pertama*, terdapat makna historis negara kesatuan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Meninggalkan negara kesatuan berarti mengingkari makna sejarah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. *Kedua*, penolakan bersifat ekonomis, artinya jika Indonesia menjadi federasi banyak daerah akan dirugikan, khususnya bagi mereka yang miskin dalam sumber alam, seperti Nusa Tenggara Timur dan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara dipandang akan menderita dari penghapusan sistem kesatuan.

Sebagai jalan tengah dari bentuk negara kesatuan dan federasi di atas, Orde Baru menganggap perlu adanya desentralisasi dan otonomi untuk tetap mempertahankan persatuan nasional. Akan tetapi, otonomi yang diberikan

pemerintah pusat kepada daerah adalah otonomi yang bertanggung jawab. Pandangan Orde Baru tentang implementasi otonomi adalah bahwa otonomi tidak boleh menyebabkan kekacauan ekonomi atau gangguan persatuan nasional dan tidak boleh melemahkan Jakarta sebagai pemerintah pusat.

Ancaman SARA

Orde Baru melihat bahwa SARA merupakan ancaman bagi persatuan nasional. Selain masalah perbedaan agama, problem yang dianggap sebagai ancaman yang paling berarti di antaranya adalah problem minoritas Cina, problem ketegangan kelas, dan ancaman komunis serta Islam radikal. Berikut ini dipaparkan pandangan Orde Baru tentang problem-problem tersebut.

Problem Minoritas Cina

Minoritas Cina menjadi satu problematik dan isu sensitif dalam membentuk persatuan nasional. Problem paling serius adalah kesenjangan yang luas antara warga Cina dan mayoritas pribumi yang meliputi budaya, sosial, dan paling penting kesenjangan ekonomi. Minoritas Cina menjadi kaya dan mayoritas pribumi miskin dipandang sebagai hal yang menyakitkan hati, tidak dapat diterima, dan tidak adil yang menyebabkan kemarahan dan frustrasi di antara warga pribumi. Situasi ini secara mudah dapat menimbulkan ketegangan rasial antara pribumi dan Cina sebagaimana pada masa lalu.

Dalam mengatasi problem di atas, Orde Baru lebih menyukai pendekatan asimilasi. Orde Baru berkeyakinan bahwa minoritas Cina harus dapat diintegrasikan melalui asimilasi budaya dengan cara warga Cina mengadopsi budaya pribumi.

Namun, asimilasi yang dilaksanakan Orde Baru hanya bersifat fisik atau simbolik, seperti mengganti nama Cina dengan nama Indonesia.

Problem minoritas Cina di atas juga memperlihatkan adanya pertentangan kelas, ketegangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Memang ketegangan kelas juga menjadi masalah sampai saat ini. Berikut ini dipaparkan kebijakan Orde Baru dalam menyelesaikan masalah ketegangan kelas.

Problem Ketegangan Kelas

Indonesia mempunyai problem dalam distribusi kekayaan dengan ketimpangan yang sangat besar antara kaya dan miskin. Isu ketimpangan yang secara resmi dikenal dengan istilah "kesenjangan sosial", "kesenjangan ekonomi", atau "kecemburuan sosial", malahan "ketimpangan ekonomi" menggambarkan hegemoni arena wacana Orde Baru.

Orde Baru cenderung menganggap bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin sebagai sesuatu yang tak terelakkan dan menganggap bahwa hal itu merupakan bagian dari proses pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan mereka, "pemerataan" (distribusi ekonomi) hanya dimungkinkan setelah terdapat keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka menyatakan bahwa pembangunan diperlukan untuk memperluas "kekayaan ekonomi" atau "kue nasional" sebelum ia dapat didistribusikan dan dinikmati oleh bagian rakyat yang lebih luas. Mereka juga percaya bahwa distribusi ekonomi akan menyebar melalui "trickle down effect".

Ancaman Komunis dan Islam Radikal

Orde Baru percaya bahwa komunis tetap merupakan ancaman berarti. Karena itu, bangsa Indonesia tidak boleh meremehkan kemungkinan kebangkitan

kembali komunis. Mereka menunjuk munculnya ideologi demokrasi sosialis yang dipandang sebagai akar-akarnya di dalam komunis.

Selain itu, ada sebagian anggapan bahwa Islam radikal juga merupakan ancaman nyata atau setidaknya-tidaknya mempunyai potensi mengancam persatuan nasional. Apa yang disebut sebagai peristiwa Tanjung Priok dan Lampung yang terjadi pada tahun 1980-an dan beberapa peristiwa yang melibatkan pembakaran gereja akhir-akhir ini dapat dijadikan sebagai contoh utama.

BAB V

AREK-AREK SUROBOYO PRO-REFORMASI: GENERASI BARU GERAKAN RAKYAT PRODEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini dipaparkan sejarah pembentukan dan perkembangan kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi". Karena pembentukannya tidak lepas dari gerakan mahasiswa, bagian ini akan diawali dengan sejarah singkat gerakan mahasiswa.¹

Gerakan Aktivis Mahasiswa

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal gerakan mahasiswa. Mahasiswa telah berpartisipasi dalam setiap perubahan penting dalam sejarah Indonesia. Sejak awal 1970-an gerakan mahasiswa telah diarahkan untuk menentang rezim Orde Baru. Protes-protes mahasiswa antara tahun 1970 dan 1978 yang sudah dirujuk di bab 1 merupakan kasus yang signifikan.

Represi keras yang diberlakukan pemerintah terhadap gerakan mahasiswa 78 telah menggoreskan trauma bagi aktivis mahasiswa 80-an. Kebijakan NKK/BKK sejak tahun 1979 membuat aktivis mahasiswa merasa "mati kutu". Keterbatasan ruang gerak ini membuat aktivis mahasiswa mengalihkan kegiatannya ke luar kampus. Kecenderungan besar aktivis mahasiswa yang mengalihkan kegiatannya di luar kampus memiliki dua format aktivitas yang berbeda yakni (1) Kelompok Studi yang memiliki kecenderungan pada "aksi informasi" dan (2) Lembaga Swadaya

¹ Pembicaraan tentang gerakan mahasiswa yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan hasil studi pustaka terutama dari dua sumber utama. Kedua sumber utama yang dimaksud adalah hasil penelitian Hendratmoko, "Gerakan ..." dan hasil penelitian Uhlir, *Oposisi*

Masyarakat (LSM) yang memiliki kecenderungan pada "aksi konkret" dengan terjun langsung membantu kelompok-kelompok masyarakat miskin dan marginal.

Pada akhir 1980-an, sebuah gelombang baru demonstrasi mahasiswa dimulai. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan tema yang lazim bagi gerakan protes mahasiswa ini. Berbeda dengan protes-protes mahasiswa pada 1970-an yang berfokus pada isu-isu nasional misalnya kepemimpinan nasional, strategi pembangunan dan peran modal asing serta korupsi, gerakan mahasiswa pada akhir 1980/1990-an berkonsentrasi pada isu-isu lokal terutama masalah penggusuran tanah milik rakyat kecil, khususnya petani. Gerakan mahasiswa 1980/1990-an ini menunjukkan gejala pergeseran orientasi yang berbeda dengan gerakan mahasiswa 1970-an.

Pilihan untuk membela rakyat tertindas dengan mengikutsertakan mereka dalam proses pembelaan itu didasarkan pada pemahaman kritis para aktivis mahasiswa bahwa perubahan sosial yang benar-benar berarti bagi rakyat harus dimulai dari rakyat sendiri. Rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Inilah sisi ideal pemikiran aktivis mahasiswa yang menginginkan perubahan sosial dari bawah. Format aktivitas baru ini, yakni mendorong dan memfasilitasi rakyat tergusur agar berani mengartikulasikan kepentingannya, ditempuh dengan beberapa tahap kerja yang harus dilakukan aktivis mahasiswa: (1) tahap investigasi, (2) tahap pengorganisasian, dan (3) tahap aksi. Keseluruhan tahap ini disebut sebagai program advokasi.

Kolaborasi aktivis mahasiswa dengan rakyat miskin di pedesaan dan perkotaan merupakan wajah baru gerakan mahasiswa di era Orde Baru. Dengan demikian, gerakan mahasiswa yang baru ini lebih luas, memiliki kesadaran politik

lebih tinggi, dan lebih siap dalam mengambil risiko aksi politik dibanding generasi gerakan mahasiswa sebelumnya. Solidaritas mereka terhadap petani dan buruh menunjukkan bahwa peran mereka dalam perkembangan politik saat ini merupakan bagian dari peningkatan protes masyarakat.

Aktivis-aktivis mahasiswa yang lebih radikal (yang pada kenyataannya tidak hanya memiliki perhatian pada isu-isu di dalam kampus, tetapi juga mencoba menjangkau petani dan buruh) mengklaim adanya perbedaan ideologis mendasar di antara organisasi-organisasi mahasiswa. Mereka melihat kelompok mereka sendiri sebagai organisasi yang sadar politik yang dilandaskan pada analisis ekonomi dan politik, sedangkan gerakan mahasiswa yang lain hanya dilihat sebagai "kekuatan moral" semata.

Meskipun gerakan mahasiswa ini tidak memiliki basis massa luas, ciri paling signifikan dari generasi aktivis mahasiswa ini adalah bahwa ia telah melahirkan organisasi-organisasi politik di luar kampus yang menyerukan perubahan politik dan sering kali mencari dukungan dari kaum buruh dan petani. Dengan demikian, gerakan mahasiswa 1980/1990-an telah ikut andil bagi radikalisasi oposisi demokratis di Indonesia.

Kelompok-kelompok aksi mahasiswa pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan tempat tinggal (kota) tempat berkuliahnya para aktivis mahasiswa tersebut. Dalam hal ini dikenal kelompok-kelompok seperti BKMJ (Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta), BKMB (Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung), FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta), IMS (Ikatan Mahasiswa Solo), FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya), FKMM (Forum Komunikasi Mahasiswa Malang, FKMB (Forum

Komunikasi Mahasiswa Bali), dan sebagainya. *Kedua*, kelompok yang dibentuk berdasarkan pembelaan mahasiswa atas isu atau kasus tertentu.

Di antara kelompok-kelompok aksi mahasiswa di atas, salah satu kelompok yang berada di Surabaya adalah FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya). Kelompok inilah yang berjasa memprakarsai terbentuknya kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi.

Generasi Baru LSM Prodemokrasi dan Hak Asasi Manusia

Pendirian LSM-LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia yang baru ini sebagian besar berasal dari gerakan baru mahasiswa 1980-an. Kampanye politik mereka yang radikal dan kecenderungan dalam banyak kasus untuk menjangkau kaum buruh dan petani membedakan mereka dari LSM-LSM senior yang telah mapan.

LSM-LSM baru ini sering dijalankan oleh aktivis yang masih berstatus mahasiswa atau mantan mahasiswa dan serupa dengan gerakan mahasiswa dalam banyak aspek ideologis dan strategis. Sementara kelompok aktivis mahasiswa memiliki basis di universitas dan hanya terdiri dari mahasiswa, generasi baru LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia ini memiliki basis di luar kampus dan keanggotannya terbuka bagi nonmahasiswa.

Generasi baru LSM-LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia ini telah membantu menempatkan perjuangan demi demokrasi dengan kukuh pada agenda perjuangan di Indonesia. Kritisme mereka yang berani dan lantang terhadap rezim berkuasa telah membuat takut elite penguasa. Akan tetapi, LSM-LSM ini tidak membentuk sebuah kekuatan politik yang kukuh untuk demokratisasi. Tidak ada strategi koheren bagi perjuangan jangka panjang demi demokrasi dan gerakan ini

terpecah-pecah ke dalam sejumlah kelompok kecil. Perpecahan ini sebagian disebabkan oleh perbedaan ideologis, sebagian merupakan perselisihan pribadi, tetapi juga merupakan akibat dari ancaman perindasan hebat yang akan dihadapi oleh satuan gerakan yang luas. Namun demikian, terdapat kerja sama signifikan di antara banyak organisasi ini dan mereka bersatu padu dalam kampanye-kampanye tertentu. Kecuali beberapa upaya oleh kelompok yang lebih radikal dalam LSM-LSM ini untuk mengorganisasikan kaum buruh dan petani dan membuat jaringan dengan organisasi-organisasi yang lebih berbasis massa, LSM-LSM ini tidak mempunyai basis massa. Mereka mengandalkan sejumlah individu setia yang siap menanggung risiko besar dalam berjuang demi masyarakat yang lebih adil.

Salah satu wujud dari generasi baru LSM prodemokrasi dan hak asasi manusia seperti yang dipaparkan di atas adalah kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi". Untuk mengetahui lebih jauh kelompok ini, berikut dipaparkan sejarah pembentukan dan perkembangannya.

Kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi"

Pada bagian ini dipaparkan secara lengkap hal-hal yang berkaitan dengan kelompok "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" mulai dari latar belakang pembentukannya, perkembangannya, program-programnya, sampai pada sekolah rakyat yang dibentuknya.

Latar Belakang Pembentukan ASPR

Sejak pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang paling buruk di Indonesia. Menyikapi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, mahasiswa

bertindak sehingga unjuk rasa terjadi di segala penjuru. Karena yang dianggap sebagai sumber dari kegagalan ekonomi tersebut adalah kehidupan politik di bawah Orde Baru, mahasiswa memandang bahwa kata kunci untuk keluar dari krisis adalah "reformasi" di segala lini terutama reformasi politik. Bagi mahasiswa, reformasi politik berarti pergantian kepemimpinan nasional.

Dalam momentum krisis tersebut, tidak hanya mahasiswa yang tergerak hatinya untuk meneriakkan tuntutan reformasi, tetapi ada juga kelompok-kelompok rakyat yang berkeinginan kuat untuk terlibat secara langsung di dalam aksi-aksi menuntut reformasi. Mereka berkeinginan keras ikut berpartisipasi dalam gerakan, tetapi tidak mempunyai wadah, sedangkan kampus sendiri tidak mampu menampung rakyat dari semua lapisan masyarakat itu. Padahal kondisi seperti itu merupakan saat yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat sebagaimana harapan aktivis gerakan prodemokrasi.

Berangkat dari situasi yang demikian, FKMS (Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya) sebagai pusat gerakan aktivis mahasiswa Surabaya yang sebelumnya memang sudah memiliki jaringan dengan masyarakat di luar kampus mencoba mengajak elemen-elemen yang lain untuk membentuk "Suara Rakyat Surabaya". Akan tetapi, usaha ini dinilai tidak begitu berarti perkembangannya sehingga kemudian digagalkan. Sebagai penggantinya, FKMS mencoba membangun partisipasi rakyat yang lebih luas. Fitradjaja, salah seorang tokoh FKMS, mencoba membuat desain baru yang tidak menggunakan nama FKMS dengan harapan bisa melibatkan sebanyak mungkin orang terutama yang berada di luar kampus/mahasiswa. Akhirnya dibentuklah kelompok yang disebut APR (Arek-arek Pro Reformasi). Kelompok ini dimaksudkan untuk memberdayakan mahasiswa maupun rakyat di luar mahasiswa. Akan tetapi, dalam perjalanannya kantong-

kantong FKMS yang berada di beberapa kampus ternyata berkembang dengan pesat karena adanya momentum reformasi sehingga jumlah kantong di kampus-kampus bertambah banyak dan meluas. Hal ini tentu saja menjadikan APR kewalahan sehingga tidak mampu lagi mengorganisasikan rakyat yang ada di luar mahasiswa. Berangkat dari situ, kemudian dibuat kelompok tersendiri yang secara manajemen terpisah. Kelompok ini dikhususkan untuk mengorganisasikan atau memberdayakan rakyat yang ada di luar mahasiswa dan diberi nama "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" atau disingkat ASPR.

Pembentukan dan Perkembangan ASPR

ASPR sebagai wadah gerakan rakyat lahir pada bulan Maret 1998 sebagai hasil dari kerja sama dengan beberapa organisasi yang sudah ada di Surabaya, yakni komunitas Klampis/FKMS, PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia), Sakera (Satuan Kedaulatan Rakyat), SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), dan FPPDI (Forum Pemuda Partai Demokrasi Indonesia). Sejak semula wadah ini dimaksudkan sebagai organ gerakan untuk membangun basis di kampung-kampung di Surabaya. Pada awalnya, ASPR hanya mampu menjadi organ aksi massa yang kekuatannya merupakan akumulasi dari hasil kerja yang telah dilakukan oleh kelompok pendiri masing-masing. Saat itu aksi yang dilakukan lebih mengarah pada tuntutan turunnya Soeharto.

Pemrakarsa berdirinya ASPR ini adalah tokoh-tokoh komunitas FKMS yang ingin langsung mengorganisasikan rakyat, di antaranya Fitradjaja, Gunardi, Klotok, Kriwul, Anam, Apank, dan sebagainya. Mereka kemudian menghubungi kelompok-kelompok rakyat yang ada sebagaimana disebutkan di atas.

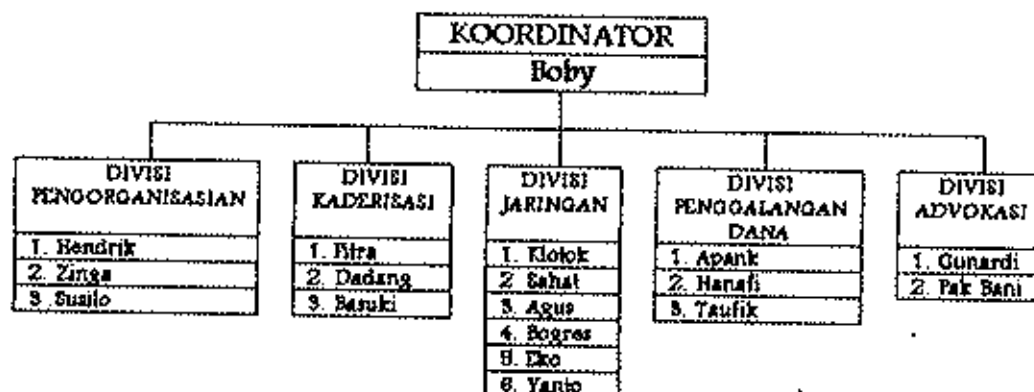
Memang pembentukan kelompok ini tidak mementingkan segi organisasi-onal seperti yang terdapat pada organisasi yang sudah mapan. Pertimbangan yang digunakan kelompok seperti ASPR ini adalah mudah dibentuk, luwes, dan praktis. Karena sifatnya sebagai forum komunikasi, dalam kelompok ini tidak ada keanggotaan yang tetap. Orang-orang yang datang dalam acara-acara diskusi yang diadakan ASPR bisa saja dianggap sebagai anggota ASPR, bahkan ada orang yang tidak pernah bersinggungan dengan ASPR dan tidak pernah tahu sama sekali tempat sekretariat ASPR yang ada di Jalan Kaliwaron III/8 ini merasa menjadi anggota ASPR. Kelompok ASPR yang berasaskan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dengan menggunakan semboyan "Rakyat Menang Berkuasa" ini memang tidak didesain secara formal sehingga tidak memiliki AD/ART.

Tujuan utama dibentuknya ASPR ini adalah menangkap suara-suara rakyat dan mengorganisasikan rakyat, juga penyadaran dan pemberdayaan rakyat dalam politik yang selama ini masih buta politik. Dengan perkataan lain, ASPR bertujuan membangun kekuatan rakyat. Dengan begitu diharapkan mereka mengetahui hak-hak politik mereka, dan pasti memperjuangkan demokrasi. ASPR memang tidak menentukan tujuan secara detail dan membiarkan ASPR ini menjadi wadah rakyat untuk belajar berdemokrasi. Tujuan makronya adalah demokrasi dan keadilan sosial. ASPR ini dijadikan sebagai wadah gerakan rakyat untuk menuju demokrasi. ASPR yakin bahwa demokrasi dan keadilan sosial itu hanya bisa diwujudkan apabila rakyat kuat. Untuk membangun kekuatan rakyat itulah dibentuklah ASPR ini. Demokrasi tidak mungkin turun dari atas, rakyatlah yang harus merebut demokrasi itu.

Sejak bulan Juni 1998, ASPR membangun tahapan baru. Elemen-elemen pendiri seperti Sakera, SBSI, PUDI dan kantong-kantong yang terbentuk di kampung-kampung seperti SAPUK, GMPR, SAMPUR sepakat untuk mewujudkan ASPR benar-benar menjadi organisasi gerakan rakyat di luar kampus untuk kota Surabaya dengan kerja pengorganisasian yang utuh. Untuk itu, ASPR mulai menata pengorganisasian dengan jalan menumbuhkan dan membina kantong-kantong ASPR yang basisnya berada di kampung-kampung. ASPR terus mengadakan jaringan dengan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi jaringan FKMS dan juga mencoba membuat jaringan baru yang ada di luar mahasiswa. ASPR selalu berusaha mencoba menumbuhkan gerakan rakyat, sebagaimana yang dilakukan mahasiswa, dengan semangat ASPR. Usaha menumbuhkan gerakan rakyat itu disertai dengan usaha pembinaan kepada mereka yang berupa pendidikan politik kepada rakyat yang kemudian disebut 'sekolah rakyat'.

Untuk mempermudah pembagian tugas, ASPR membentuk struktur organisasi sederhana yang terdiri atas koordinator dan divisi-divisi. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan personelnnya itu seperti terdapat pada tabel berikut ini.

TABEL 5.1
STRUKTUR ORGANISASI AREK-AREK SUROBOYO
PRO-REFORMASI



Bagaimana menumbuhkan dan membina kantong-kantong itu? Mulanya ada seseorang yang tertarik dengan ASPR, ia diminta membangun komunitas kecil di kampungnya walaupun sulit harus diupayakan, kemudian ada perwakilan dari ASPR yang bermain ke tempat tersebut untuk menumbuhkan komunitas itu. Tiga atau empat orang motor di tempat tersebut diajak berdiskusi atau diberi selebaran sampai mereka menginginkan dibentuk sekolah rakyat di tempatnya maka dibentuk sekolah rakyat.

ASPR berkeyakinan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan cara menyebarkan ide, sedangkan materialisasinya kantong itu sendiri, tetapi hakikatnya adalah persebaran ide sampai ke kantong-kantong itu. Dengan demikian, bukti adanya persebaran ide itu adalah sudah termaterialisasikan ide itu dalam bentuk kantong-kantong tersebut. Jadi, gerakan ASPR bukan gerakan ide saja, tetapi gerakan persebaran ide dan mematerialisasikan ide. Hanya dengan itulah perubahan dapat diwujudkan. Kalau perubahan ini tidak dimaterialisasikan hanya

menjadi ide perubahan saja tidak akan pernah terjadi perubahan. Jadi, perubahan harus dengan mengorganisasikan dan membangun kekuatan rakyat.

Karena itu, ASPR berusaha mengajak rakyat bergabung, tetapi itu bukan ide dasar. Ide dasarnya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi mereka. Sebenarnya juga ada yang datang dan bergabung ke ASPR atas kemauannya sendiri. Motivasi mereka bergabung dengan ASPR terutama mereka ingin adanya perubahan.

Mereka senang terhadap pendidikan politik. Mereka biasanya tahu adanya sekolah rakyat yang dibentuk ASPR dari kampung lain. Sekolah rakyat ini ternyata memberikan banyak keuntungan, di antaranya dapat mengurangi ketegangan antara kampung satu dengan sebelahnya karena ASPR berusaha membuka interaksi antarkampung, memperluas pengetahuan pemuda kampung tersebut, bahkan membuka ajang bisnis kecil-kecilan seperti usaha sablon, bisnis topi, jaket, kaos, dan sebagainya.

ASPR tidak memaksa rakyat masuk untuk bergabung dengan ASPR, tetapi hanya mengajak membangun kekuatan. Rakyat mau menjadi ASPR atau tidak terserah mereka, tetapi kalau sadar akan pentingnya kekuatan rakyat, mereka pasti menjadi anggota ASPR. Sebagai contoh, ada kelompok SAPUK (Solidaritas Arek Pandegiling Untuk Keadilan). Kelompok SAPUK membuat nama sendiri tanpa menggunakan istilah ASPR dan kalau SAPUK menjadi lebih besar daripada ASPR, ASPR tidak merasa dirugikan. Yang penting itu juga kekuatan rakyat.

Usaha yang dilakukan ASPR ternyata tidak sia-sia. Di Surabaya sudah terbentuk sekitar 40 kantong yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya: Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Tengah. Adapun kantong-kantong ASPR yang dimaksud tertera pada tabel di bawah ini.

TABEL 5.2
DAFTAR KANTONG AREK-AREK SUROBOYO PRO-REFORMASI

No.	Kantong	Mayoritas Pekerjaan	Existing Kegiatan	Ada/Tidak Kasus	Solid/ Belum
Surabaya Timur					
1.	Bronggalan	Tukang Becak	D I	Tidak Ada	Solid
2.	Kapas				
3.	Kaliwaron	Penganggur	S K		
4.	Kalikepiting				
5.	Kalidami		U		
6.	Kalijudan	Pengamen	S		
7.	Klampis Ngasem	Siswa SMU/ Penganggur	I	Tidak Ada	
8.	Deles	Pedagang Kaki Lima	R	Tidak Ada	Belum
9.	Nginden		U		
10.	Kendangsari	Buruh	T		
11.	Mleto	Bengkel	I N		
Surabaya Utara					
1.	Benteng	Tukang Becak	Diskusi Rutin	Tidak Ada	Solid
2.	Wonosari				
3.	Sidotopo				
Surabaya Barat					
1.	Wiyung	Swasta/ Petani	Diskusi Rutin	Ada Kasus Tanah	Solid
2.	Wedoroanom				
3.	Benowo				
4.	Tandes	Buruh		Tidak Ada	Belum
5.	Manukan				
6.	Tambak Mayor				
7.	Jilidro				
8.	Simo Mulyo	Penganggur		Ada	Solid
9.	Simo Jawar	Siswa SMU/ Penganggur			
Surabaya Selatan					
1.	Darmo Kali	Buruh Transpor	Diskusi Rutin	Tidak Ada	Solid
2.	Bungurasih				
3.	Waru	B			
4.	Bunduran	U			
5.	Ketegan	R		Ada	
6.	Rungkut	U			
7.	Kedurus	H			
8.	Driyorejo	Petani			
9.	Ngelom	Penganggur			
10.	Pulo Wonokromo				

Surabaya Tengah					
1.	Demak	Pedagang Kaki Lima	Dikuwi Rutin	Tidak	Solid
2.	Bubutan	Penganggur/ PKS		Ada	
3.	Pandegiling	Penganggur/ Pengamen		Tidak Ada	
4.	Petemon			Tidak Ada	
5.	Ngagel				
6.	Wonorejo				
7.	Dinoyo				

Memang tidak semua kantong menunjukkan perkembangan yang kuat dan bagus. Ada yang cuma 6 orang dengan susah payah membangun kantong, mengadakan kegiatan di kantong. Lagi pula belum setiap kantong itu ada sekolah rakyatnya. Sekolah rakyat yang sudah berjalan dengan baik di antaranya adalah SAPUK, Manyar (Mleto), Bronggalan, Benteng, Sawah Pulo, Demak, Manukan, Gading, Kapas Madya, dan Klampis. Bahkan ada yang sampai kewalahan menjangkau permintaan dari rakyat di kantong itu. Contohnya, ASPR Jlidruh dan Klampis yang membentuk sekolah rakyat sampai dua kelas. Dua kelas yang ada di Klampis terdiri atas satu kelas untuk rakyat umum dan satu kelas lainnya terdiri atas siswa SLTP yang menamakan kelompoknya "Grilkot" (Grilyawan Kota).

Diakui bahwa tidak semua peserta sekolah rakyat aktif dalam mengikuti sekolah rakyat karena mereka juga punya kesibukan lain sehingga hadirnya tidak setiap sekolah rakyat itu ada. Akan tetapi, ada peserta yang selalu hadir pada setiap saat sekolah rakyat itu ada.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa berdasarkan jenis pekerjaan dan kasusnya, anggota ASPR umumnya berasal dari rakyat lapisan bawah bahkan di setiap kantong terdapat pengangguran. Mereka jelas mempunyai keinginan-

keinginan tertentu, yaitu ingin berubah, minimal mereka tahu bagaimana cara untuk mengubah. Itulah sebabnya, seharusnya yang menjadi solusi dari rezim selama ini adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini, rakyat ini harus dicerdaskan. Sekolah rakyat yang dibentuk ASPR ini tidak melihat pendidikan peserta. Ada yang protokol SD, ada yang lulus SMA, ada yang pernah kuliah, bahkan ada yang sudah sarjana. Mereka umumnya memandang sekolah rakyat ini sebagai hal yang baru.

Terhadap kampung-kampung yang berkasus, seperti Wedoroanom, Driyorejo, Gresik, Karang Menjangan, Wiyung yang sebagian besar menghadapi kasus tanah, ASPR memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan atau advokasi. Bagaimana mereka mampu menyelesaikan persoalan itu dengan cara mereka, kalau mereka ingin menjual tanahnya ya silakan, tetapi ASPR juga memberi penyadaran.

Usaha yang dilakukan itu tidak hanya terbatas di dalam kota Surabaya, tetapi meluas sampai luar kota seperti Jombang, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar, Ngawi, bahkan Jakarta. Jaringan-jaringan itu dibentuk dengan pendekatan perkawanan. Anggota ASPR yang berasal dari Surabaya datang dan tinggal untuk sementara di kota-kota tersebut untuk mengorganisasikan rakyat sampai terbentuk kelompok/komunitas sampai akhirnya mereka bisa mengorganisasikan kelompoknya sendiri. Di Jakarta terbentuk kelompok yang diberi nama SORAK (Solidaritas Rakyat untuk Keadilan), sedangkan di Ngawi terbentuk kelompok yang diberi nama FKMI (Forum Komunikasi Masyarakat Independen).

Program Kegiatan ASPR

Program-program yang dilaksanakan ASPR adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengorganisasian, dalam hal ini ASPR berusaha merapikan organisasi terutama dengan jaringan kantong-kantong yang sudah ada agar bisa lebih akseleratif atau ada percepatan. *Kedua*, kaderisasi atau pendidikan, dalam hal ini ASPR mendirikan sekolah rakyat. Memang belum semua kantong ASPR mampu mendirikan sekolah rakyat ini. Dari 40 kantong yang ada, 12 kantong yang sudah mendirikan sekolah rakyat dan berjalan rutin/reguler dan ada 6 kantong yang sudah mendirikan sekolah rakyat, tetapi belum berjalan secara rutin. *Ketiga*, jaringan, dalam hal ini ASPR mencoba membuat jaringan dengan kota-kota lain. Kalau ada jaringan luar negeri, sebenarnya merupakan jaringan milik FKMS. Jaringan luar negeri itu biasanya dijalankan dengan para alumni FKMS atau mantan aktivis gerakan mahasiswa yang sekarang ini berada di luar negeri.

Sekolah Rakyat

Sehubungan dengan tujuan utama membangun kekuatan rakyat dan program kerja di atas, aktivitas/kegiatan yang dilakukan ASPR tidak menyimpang dari usaha menumbuhkan kekuatan rakyat. Bagaimana usaha itu dilakukan? *Pertama* bagaimana rumusan kekuatan rakyat itu sendiri. Kekuatan rakyat itu adalah kumpulan kekuatan individu. ASPR tetap berpijak bahwa satu orang pun merupakan bagian dari rakyat. Rakyat yang kuat dalam pandangan ASPR adalah rakyat yang tahu akan permasalahannya, harapan dan kebutuhannya, kenyataannya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, penyebab adanya kesenjangan, dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. *Kedua*, berangkat dari kebutuhan, dalam

hal ini bagaimana rakyat mampu memenuhi kebutuhannya, rakyat harus tahu akan hak-haknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan itu. Berangkat dari situ, kekuatan rakyat itu sebenarnya adalah akumulasi kekuatan individu dan bagaimana rakyat ini mampu mengorganisasikan diri. Dari kekuatan yang ada itu, bagaimana rakyat mampu melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, dan menuntut haknya. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana ASPR menumbuhkan atau menciptakan potensi kekuatan rakyat, kalau sudah tercipta potensi itu kemudian bagaimana mengkinetikkan potensi tersebut.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, dibentuklah sekolah rakyat yang berupa pendidikan politik bagi rakyat agar mereka memiliki keberdayaan. Materi pendidikan politik itu dibagi menjadi tiga kelompok besar yang masing-masing disediakan untuk jenjang yang berbeda, yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Target utama pemberian materi tersebut adalah kekuatan rakyat yang tahapannya dimulai dari kesadaran mereka. Materi-materi yang dimaksud dipaparkan satu per satu sebagai berikut.

Pertama, penguatan individu pada tingkat wawasan yang meliputi memahami persoalan/permasalahan, kesenjangan antara harapan dan kenyataannya, bagaimana menyelesaikannya (semua wawasan). Target yang akan dicapai untuk peserta kelas satu ini adalah pemahaman wawasan yang sederhana tentang realita politik yang ada, ide-ide politik yang seharusnya, kesenjangan antara ide dan realita, apa permasalahannya, bagaimana maksudnya, bagaimana penyelesaiannya. Begitu juga halnya dengan ekonomi, bagaimana konsepnya, bagaimana realitanya, apa persoalannya, bagaimana mengatasinya. Dengan

demikian, mereka diharapkan paham terhadap masalah, akar masalah, dan penyelesaian. Wawasan seperti itu yang menjadi dasar pemikiran dan wawasan itu berkaitan dengan politik, ekonomi, negara, rakyat, pemerintah, partai, serta wawasan yang umum.

Kedua, materinya meliputi bagaimana berorganisasi, membangun kekuatan komunitas, bekerja sama kelompok (wawasan dan keterampilan). Target yang akan dicapai untuk peserta kelas dua ini adalah keterampilan untuk berorganisasi mulai dari retorika, kerja kelompok, manajemen organisasi, sampai pada tulis, minimal membuat sebuah pernyataan.

Ketiga, kembali ke penguatan individu, wawasan dan keterampilan juga, bagaimana satu orang itu mampu menciptakan sebuah komunitas, dan melakukan sebuah kerja gerakan yang boleh dia pilih sendiri. Materi ketiga ini juga meliputi wawasan peradaban. Target yang akan dicapai untuk peserta kelas tiga ini adalah penguatan individu kembali baik yang berkenaan dengan penguasaannya maupun keterampilannya yang harus lebih baik karena setelah lulus dari kelas tiga ini mereka harus mampu melakukan sebuah kerja politik, membangun jaringan, membangun opini, mengorganisasikan, membentuk sebuah komunitas, dan bernegosiasi.

Memang diakui bahwa perjalanan sekolah rakyat ini belum teratur. Hal ini terjadi di antaranya karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik guru maupun siswa, hanya termasuk dalam kerja sosial. Artinya belum tersedia dana untuk mereka. Karena itu, kalau sewaktu-waktu ada kesibukan lain apalagi kalau sudah berbenturan dengan ekonomi, umumnya mereka menelantarkan sekolah rakyat ini.

Yang menjadi guru atau memberikan pendidikan di sekolah rakyat ini selain dari anggota ASPR sendiri, juga dari relasi-relasinya seperti dari FKMS dan alumninya bahkan ada yang dari kelompok buruh. Mereka itu adalah Fitra, Ali, Klotok, Apank, Muhaji, Auk, Ali Fahmi, Bambang, Kariyono, Buki, Desta, dan Kemplo. Selain itu, juga didatangkan staf pengajar perguruan tinggi yang sangat respek terhadap gerakan massa yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Beliau-beliau itu adalah Dede Oetomo, Daniel T. Sparringa, dan kawan-kawan.

BAB VI

DEMOKRASI PANCASILA: SLOGAN MENYESATKAN

Sebagaimana disebutkan pada bab I bahwa studi yang berusaha memahami respons ASPR terhadap wacana Orde Baru ini dibagi atas tiga tema utama: demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional. Karena tiap-tiap tema tersebut mempunyai lingkup pembicaraan yang sangat luas, temuan lapangan ini pun disajikan berdasarkan ketiga tema tersebut yang terbagi atas tiga bab: bab VI, bab VII, dan bab VIII. Temuan lapangan yang dipaparkan pada bab-bab tersebut merupakan respons ASPR terhadap wacana Orde Baru, sedangkan wacana Orde Baru itu sendiri sudah diuraikan pada bab IV. Karena itu, paparan temuan lapangan ini lebih mengutamakan wacana ASPR dan tidak ada lagi pembicaraan mengenai wacana Orde Baru. Memang tidak tertutup kemungkinan adanya pembicaraan singkat tentang wacana Orde Baru, tetapi hal itu hanyalah dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan/kesesuaian respons ASPR terhadap hal yang direspons.

Pada bab VI yang membicarakan tema demokrasi Pancasila ini dipaparkan respons ASPR terhadap demokrasi Pancasila yang partikularistik, kebijakan massa mengambang, dan konsep negara integralistik. Demokrasi Pancasila memang merupakan salah satu isu yang menonjol dalam membicarakan wacana demokrasi pada masa Orde Baru. Orde Baru memotret dirinya sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Betulkah bahwa Orde Baru benar-benar sudah layak disebut sebagai negara yang demokratis? Berikut ini disajikan temuan lapangan berupa respons ASPR terhadap demokrasi Pancasila. Meskipun tema ini dibagi menjadi tiga subtema seperti disebutkan di atas, muncul pula persoalan-persoalan yang lebih khusus—yang tentu saja masih berhubungan dengan tema

dan subtema di atas—sehingga temuan lapangan ini dibagi atas beberapa subpokok pembicaraan sesuai dengan temuan lapangan.

Orde Baru Sangat Tidak Demokratis

Hal yang paling utama dalam membicarakan tema demokrasi Pancasila ini adalah pandangan tentang demokrasi Pancasila itu sendiri, apakah demokrasi Pancasila itu merupakan sistem politik yang demokratis atau tidak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, paparan temuan lapangan ini diawali dengan pandangan ASPR terhadap demokrasi Pancasila.

Meskipun Orde Baru memotret dirinya sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang dibuktikan dengan lembaga-lembaga demokrasi seperti adanya partai politik, pemilu, DPR/MPR, ternyata ASPR berpandangan lain. ASPR menilai bahwa Orde Baru sangat tidak demokratis. Penilaian mereka terhadap ketidakdemokratisan Orde Baru ini memang bermacam-macam. Alasan utama tidak demokratisnya Orde Baru adalah tidak terlibatnya rakyat dalam proses politik. Bahkan suara rakyat pun tidak pernah didengar oleh penguasa Orde Baru sehingga rakyat tidak berharga sama sekali. Segala sesuatunya selalu bersumber pada negara.

ASPR melihat bahwa Orde Baru sangat tidak demokratis. Sebetulnya sebelum ASPR terbentuk—sejak di FKMS—tokoh-tokoh ASPR sudah anti-Orde Baru dan penentang Soeharto. Tidak demokratis karena rakyat tidak punya suara. Rakyat tidak punya harga. Semuanya dari kekuasaan negara, mulai dari yang paling mendasar. Keterlibatan rakyat itu ndak ada. (F/W)

Kondisi seperti itu jelas bertentangan dengan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat seharusnya terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasil.

Padahal kalau ngomong masalah demokrasi, rakyat harusnya memiliki keterlibatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil. Empat syarat ukuran demokrasi ini tidak ada sama sekali, perencanaan semuanya juga dari penguasa. (F/W)

ASPR memang tidak menolak demokrasi perwakilan atau parlementaria karena memang dipandang tidak mungkin Indonesia ini mengikuti demokrasi langsung mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak serta wilayah yang sangat luas. Namun, yang menjadi permasalahan adalah dalam demokrasi perwakilan yang dijalankan Orde Baru itu wakil-wakil yang duduk di parlemen ternyata bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil penguasa. Hal ini terbukti dari tidak adanya upaya dari wakil-wakil yang duduk di lembaga MPR itu untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, lembaga MPR ini tidak bisa dijadikan sebagai cermin adanya kedaulatan rakyat.

Uha ya wakil itu wakilnya siapa? Apakah dalam Orde Baru itu rakyat pernah punya wakil. Berarti kan itu hanyalah mekanisme dari filosofi demokrasi tadi itu. Dalam merencanakan memang tidak mungkin masing-masing individu yang namanya rakyat ini ikut merencanakan. Dari lima UU politik itu kan bisa jadi ukuran, betapa majelis permusyawaratan rakyat yang dikatakan sebagai wujud kedaulatan itu ndak tercermin. Bukannya kita menentang perwakilannya, ndak, tapi wakilnya ini harus bertul-betul wakil rakyat. Kita tidak menolak parlementaria. (F/W)

Cuman yang di sini kelirunya rakyat yang memilih wakilnya ini. Wakil di sini bukan wakil rakyat, tapi wakil partai. Sehingga dia tidak memperjuangkan suara rakyat. (AP/W)

Adanya penilaian bahwa anggota parlemen hanyalah wakil penguasa sebenarnya bersumber dari cara pembentukan lembaga itu yang dinilai tidak

demokratis. Berdasarkan kenyataan yang ada, pembentukan lembaga perwakilan itu diwarnai oleh adanya penunjukan atau pengangkatan dan adanya pembatasan jumlah partai. Hal inilah yang menjadikan anggota parlemen itu berstatus sebagai wakil penguasa. Meskipun ada wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, ASPR tetap menganggap bahwa wakil yang dipilih itu bukanlah pilihan rakyat, melainkan pilihan penguasa. Penilaian seperti itu diberikan berdasarkan alasan bahwa ketiga partai yang ada selama Orde Baru semuanya adalah partai penguasa dan bukan partai milik rakyat. Ini terlihat dari proses pemilihan ketua partai. Seorang ketua partai tidak boleh ditentukan sendiri oleh anggotanya, tetapi harus mendapat persetujuan dari pemerintah, melalui mendagri, lebih dulu.

Kalau memang lembaga perwakilan itu mencerminkan demokrasi, pembentukan lembaga perwakilan itu demokratis atau ndak. Ternyata kan ndak. Katanya saja demokratis, ternyata pembentukannya sendiri ndak demokratis. Pembentukan lembaga perwakilan yang dianggap demokratis ini tidak demokratis. Masih adanya penunjukan tanpa ada pemilihan dari rakyat. Itu kan menyalahi demokrasi. Terus pembatasan terhadap organ yang ada yang harus duduk di legislatif. Kalau kemarin dibatasi hanya tiga parpol itu kan sudah tidak demokratis. Salah satu ciri yang tidak demokratis kan itu. (B/W)

Sebanyak 60% diangkat Soeharto—belakangan 57,5%, 40% dipilih melalui pemilu dengan model pemilu yang semacam itu. Perencanaan, pelaksanaannya, pengawasannya (panwaslak) semuanya rezim. Hasilnya tidak diikuti oleh partai yang jelas-jelas tidak bisa dikatakan sebagai partainya rakyat. Memilih ketua partai saja kalau tidak disetujui mendagri sebagai pembina politik ndak jadi. Jelas tidak demokratis. (F/W)

Melihat pelaksanaan demokrasi yang tidak mengikutsertakan rakyat dalam proses politik seperti itu, ASPR menilai bahwa Orde Baru memahami demokrasi sebagai pertentangan antara kelompok yang kuat, dalam hal ini negara/penguasa, dan kelompok yang lemah, dalam hal ini rakyat. Karena itu, selama Orde Baru rakyat yang lemah itu selalu kafah dan ditindas oleh penguasa yang kuat.

Pemahaman demokrasi seperti itu menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap keragaman yang ada, tidak boleh berbeda pendapat dengan negara. Yang berbeda pendapat dianggap antipembangunan. Hal-hal seperti ini menyebabkan tidak adanya proses demokrasi sehingga ditolak secara tegas oleh ASPR.

Pada masa Orde Baru kan demokrasi dipahami sebagai pertentangan antara yang kuat dan yang lemah, yang besar dan yang kecil. Teman-teman itu menghilangkan pemaknaan demokrasi yang seperti itu. Demokrasi itu perbedaan yang harus dibina. Kalau Orde Baru kan ndak, tidak boleh ada keragaman. Demokrasi dipahami yang menang dan yang kalah, yang besar dan yang kecil. Itu yang ditolak teman-teman. Itu sorotan dasar terhadap demokrasi yang dilakukan Orde Baru. (B/W)

Rakyat tidak diajari untuk berbeda pendapat. Rakyat tidak pernah diajari untuk bertukar pikiran antara yang berbeda pendapat ini. Mereka selalu mengatakan bahwa yang berbeda pendapat itu antipembangunan. Ini kan tidak ada proses demokrasi. (Y/W)

Kekuatan yang dimiliki Orde Baru itu tentu saja tidak terlepas dari adanya kelompok-kelompok yang mendukungnya. Kelompok utama pendukung kekuatan Orde Baru ini adalah militer dan kaum kapitalis. Karena adanya dukungan dari kedua kelompok ini, militer yang memiliki senjata dan kaum kapitalis yang memiliki dana yang besar, akhirnya Orde Baru bersifat sentralisme. Orde Baru tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang jelas-jelas mendukung kekuatan Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaannya.

Pertama, sistemnya ya itu masih sentral, dengan menggunakan kekuatan militer, terus termasuk kapital, dalam hal di sini konglomerat itu. Itu yang akhirnya menimbulkan kita untuk bergerak. Ternyata yang dipentingkan bukan rakyat. Hanya orang-orang tertentu saja. (AP/W)

Melihat kenyataan seperti itu, akhirnya ASPR menilai bahwa Orde Baru menjalankan demokrasi hanya sebagai slogan karena pada kenyataannya Orde

Baru tidak menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam demokrasi, di antaranya tidak adanya kebebasan yang dimiliki rakyat.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dalam slogan saja. Demokrasi Pancasila itu tidak benar. Kalau demokrasi yang demokrasi tidak ada demokrasi Pancasila. (G/W)

Kan dia lewatkan misalnya individu ngomong di koran atau menulis. Kebebasan itu tidak ada. Berarti ini juga menjadi ukuran, tidak ada demokrasi. Berorganisasi pun batasannya sudah demikian ketat. Organisasi yang lahir tidak mencerminkan organisasi bahwa itu organisasinya rakyat, negara semua. (F/W)

Orde Baru tetap mengklaim dirinya sebagai rezim yang demokratis. Demokrasi Pancasila yang dianutnya diklaim sebagai demokrasi yang unik dan spesifik Indonesia. Berikut ini dipaparkan respons ASPR terhadap klaim tersebut.

Uniknya: Melanggar Prinsip Demokrasi dan Menerapkan Sistem Negara Komunis

Argumen Orde Baru berkaitan dengan demokrasi Pancasila yang partikularistik yang harus dibedakan dengan demokrasi liberal ternyata ditolak oleh ASPR. ASPR menyatakan bahwa apabila demokrasi Pancasila itu sistem politik seperti yang dijalankan oleh Orde Baru berarti demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi. Menurut ASPR, demokrasi tidak bisa bersifat spesifik atau unik. Keunikan demokrasi di Indonesia bersumber dari adanya label-label tertentu yang diberikan, misalnya demokrasi Pancasila. Pemberian label-label seperti itu menyebabkan sistem politik yang dijalankan menjadi tidak demokratis. Demokrasi Pancasila dinilai ASPR sebagai demokrasi yang unik justru karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Prinsip demokrasi berupa kedaulatan rakyat, misalnya, tidak pernah ditegakkan, tetapi justru

dilumpuhkan. Selain itu, keunikan demokrasi Pancasila adalah karena menerapkan sistem negara komunis. Hal itu terbukti dari digunakannya tiga pilar kekuasaan oleh Orde Baru: militer, birokrasi, dan partai.

Itu kan hanya siasat penguasa untuk menjadikan versi demokrasi, demokrasi ala mereka. Demokrasi kok khusus. (Y/W)

Itu aku melihatnya mulai dari Soekarno mengatakan demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, termasuk Soeharto demokrasi Pancasila. Ya uniknya karena di sini keluar dari demokrasi itu sendiri. Jadi, bukan demokrasi namanya itu. Demokrasi ya jelas mementingkan pada rakyat di mana rakyat berdaulat penuh. Di sini kan nggak. Sehingga dikatakan unik. Ada campuran komunisnya. Jadi itu bukan demokrasi. Jadi belum demokrasi. (AP/W)

Kalau yang disebut demokrasi Pancasila itu adalah politik yang selama ini dijalankan oleh Orde Baru berarti demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi. Cuma namanya saja ada demokrasi, tapi itu bukan demokrasi. Saya menyebut pemerintahan Soeharto itu adalah di tatanan komunis politiknya, bukan demokrasi. Dia menggunakan militer, birokrasi, dan partai-partai, tiga pilar kekuasaan. (F/W)

Nah itu, saya sendiri juga ndak tahu, demokrasi Pancasila itu yang kaya apa. Kalau demokrasi Pancasila itu seperti yang diterjemahkan Orde Baru seperti kemarin, kan demokrasi Pancasila itu ndak bener. Kalau demokrasi Pancasila sendiri kalau yang diterjemahkan Orde Baru itu demokrasi Pancasila berarti kami menolak. (B/W)

Sebenarnya penilaian ASPR terhadap demokrasi Pancasila yang dikatakan tidak demokratis itu lebih menekankan pada aplikasi atau pelaksanaan teknisnya. ASPR tidak mempermasalahkan Pancasilanya. Pancasila tetap dianggap memiliki nilai-nilai yang luhur. Jika nilai-nilai itu diaplikasikan dengan sebenarnya akan tercipta kehidupan yang harmonis. Masalahnya adalah nilai-nilai Pancasila yang dianggap luhur itu tidak diaplikasikan secara benar sehingga aplikasi dan interpretasinya bergantung sepenuhnya pada kepentingan kekuasaan saja. Sebagai contoh tidak adanya pengakuan dari rezim terhadap adanya keragaman yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Tapi kalau Pancasila itu sendiri dipahami sebagai nilai-nilai terus kita menerjemahkan dalam demokrasi yang sebenarnya, di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada keragaman yang kemarin tidak pernah diterjemahkan oleh Orde Baru yang mengekang adanya keragaman itu. Adanya *mono-mono* itu kan sebagai bukti adanya pengekangan keragaman itu yang dilakukan Orde Baru. Kalau demokrasi Pancasila sendiri kalau yang diterjemahkan Orde Baru itu demokrasi Pancasila berarti kami menolak. (B/W)

Demokrasi Pancasila yang diklaim sebagai demokrasi yang unik tersebut tidak bisa dilepaskan dari salah satu kebijakan Orde Baru yang disebut kebijakan "massa mengambang". Karena itu, paparan berikut berisi pandangan-pandangan ASPR berkenaan dengan kebijakan tersebut.

Massa Mengambang: Upaya Mobilisasi ke Golkar

Kebijakan 'massa mengambang' yang dibuat Orde Baru bertujuan menciptakan stabilitas nasional karena dalam pandangan Orde Baru jika rakyat diberi kebebasan untuk berpolitik praktis, tidak akan dapat dihindarkan adanya konflik-konflik di antara rakyat itu sendiri yang secara otomatis mengancam stabilitas nasional.

Kebijakan tersebut ternyata mendapat sorotan tajam dari ASPR. Mereka mengatakan bahwa kebijakan massa mengambang itu menunjukkan berbagai ketidakberesan demokrasi pada masa Orde Baru. Pada satu sisi, jika berpandangan bahwa rakyat masih rendah tingkat pendidikannya atau bodoh sehingga tidak bisa memahami demokrasi, Orde Baru seharusnya berusaha mencerdaskan mereka sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa". Lagi pula, walaupun seandainya rakyat benar-benar masih bodoh tidak berarti bahwa rakyat tersebut tidak boleh terlibat sama

sekali dalam proses politik mengingat konsep demokrasi adalah "pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat".

Berarti ada dua persoalan yang disodorkan. Pertama, penilaian terhadap rakyat yang bodoh, itu tugasnya negara kan yang minterkan. Di Mukadimah UUD 1945 jelas itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apa kemudian kalau rakyat bodoh rakyat tidak boleh terlibat? Dengan segala yang dimiliki oleh rakyat, rakyat boleh terlibat. Dan harus memikirkan itu. Kalau rakyat bodoh kan butuhnya pintar. (F/W)

Kalau bodohnya, ya. Saya katakan bodoh. Cuma solusinya dari pemerintah yang keliru. Karena bodohnya rakyat memang dibuat untuk bodoh. Mestinya kalau tahu rakyatnya bodoh, ini kan diberi solusi entah itu pendidikan yang mencerdaskan rakyat. (AP/W)

Rakyat yang dianggap masih bodoh itu memang dibuat lebih bodoh lagi oleh Orde Baru. Usaha pembodohan rakyat ini tentu saja tanpa tujuan. Dengan kebodohannya itu, rakyat tidak akan memiliki daya kritis. Keadaan rakyat seperti itulah yang diharapkan Orde Baru sebab rakyat yang memiliki sifat kritis akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi Orde Baru. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Orde Baru itu hanya berguna untuk kepentingan penguasa Orde Baru semata, tidak memikirkan kepentingan rakyat sama sekali.

Ini nggak malah dibodohi. Ini kan kelirunya pemerintah pada solusinya. Karena rakyat bodoh dianggap nggak perlu memikirkan politik, tapi tidak diajarkan untuk berpolitik. (AP/W)

Konsep massa mengambang itu sendiri kayaknya itu memang dikehendaki oleh kekuasaan supaya masyarakat ini tidak mempunyai daya kritis yang lebih. (B/W)

Pada sisi yang lain, kebijakan massa mengambang itu hanyalah merupakan taktik yang dijalankan Orde Baru untuk mengekalkan kekuasaannya. Dengan adanya larangan terhadap rakyat untuk berpolitik praktis, Orde Baru lebih mudah memobilisasi rakyat untuk mendukung partai pemerintah, Golkar, karena

kemenangan total partai pemerintah tersebut jelas akan mengekalkan kekuasaannya.

Yang kedua, Di masa Orde Baru massa mengambang ini hanyalah sebuah trik untuk memudahkan mobilisasi ke Golkar. (F/W)

Kebijakan "massa mengambang" tersebut disertai dengan kebijakan Orde Baru yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengesampingkan pembangunan politik. Berikut ini dipaparkan respons ASPR terhadap hal itu.

Ekonomi dan Politik Tak Dapat Dipisahkan

Sebagai upaya melancarkan kebijakan massa mengambang, Orde Baru juga menetapkan program pembangunan ekonomi yang dianggapnya lebih realistis dan pragmatis. Program ini dijalankan dengan tujuan memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Begitu ekonomi rakyat sudah mapan, demokrasi akan berjalan dengan sendirinya.

Dalam pandangan ASPR, langkah yang ditempuh Orde Baru itu tidak tepat. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Bahkan ekonomi juga merupakan produk politik. Keduanya harus dijalankan secara bersamaan.

Bagaimana mungkin kalau rakyat bisa berpikir tentang ekonomi kalau tidak berpikir tentang politik. Ekonomi juga produk politik dan tidak bisa dipisahkan dari politik. Bagaimana dia menyelesaikan ekonomi? Itu kan caranya dengan cara politik. (F/W)

Selain itu, pembangunan yang menggunakan konsep "trickle down effect" yang hanya menekankan pada pertumbuhan dan mengesampingkan pemerataan sangat ditentang oleh ASPR. Konsep tersebut tidak pernah terwujud karena belum pernah ada tetesan ke bawah sebagai berkah dari pertumbuhan ekonomi itu.

Konsep pembangunan Orde Baru seperti itu dinilai tidak adil dan bersifat diskriminatif karena ada unsur memihak kepada konglomerat dan tidak memperhatikan kemakmuran rakyat.

Tapi di sini memacu pada pertumbuhannya, bukan pada pemerataannya. Ternyata bukan gelas yang dipakai, tetapi balon sehingga semakin membesar, nggak netes-netes. (AP/W)

Kalau "trickle down effect" itu diasumsikan seperti itu berarti ada diskriminasi. Artinya, masih ada pemilahan kelas-kelas. Nah, ini sudah menyalahi aturan demokrasi lagi seharusnya saya juga berhak untuk mendapatkan sesuatu, tapi dipandang oleh kekuasaan saya tidak berhak. (B/W)

Adanya usaha mengutamakan pembangunan ekonomi daripada politik mengisyaratkan bahwa Orde Baru mengidealkan pelaksanaan demokrasi secara bertahap. Supaya bisa memahami tanggapan ASPR, berikut ini dipaparkan mengenai hal tersebut.

Tahapan Demokrasi yang Tak Ada Habisnya

Berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar rakyat masih rendah tingkat pendidikan dan ekonominya sebagaimana disebutkan di atas, Orde Baru mengimplementasikan demokrasi secara bertahap, "satu langkah pada satu waktu". Perubahan yang tiba-tiba diyakini akan menciptakan beberapa problem yang merusak keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia.

ASPR memang tidak menolak pandangan bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan sekaligus, tetapi harus ditempuh melalui tahapan-tahapan tertentu. Akan tetapi, yang terjadi selama Orde Baru adalah tidak adanya keterbukaan atau tahapan-tahapan yang jelas dalam mengaplikasikan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Ketidakjelasan tahapan itu menandakan bahwa Orde Baru tidak berniat

melaksanakan demokrasi. Istilah tahapan dalam demokrasi itu hanya dipakai sebagai dalih untuk mempertahankan kekuasaannya. Jika tahapan-tahapan demokrasi itu benar-benar ditempuh oleh Orde Baru, sudah waktunya Indonesia ini mengikuti demokrasi yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun tahapan-tahapan itu tidak ada habis-habisnya. Bahkan tahapan itu tidak pernah ditempuh Orde Baru. Sebagai buktinya, sampai sekarang rakyat dikatakan tetap saja bodoh dan miskin.

Demokrasi itu sendiri memang tidak bisa dilaksanakan sekaligus, tetapi harus bertahap, tetapi yang penting untuk mendukung demokrasi kan harus ada keterbukaan di segala hal, tidak ada pemenggalan informasi untuk kebutuhan politik kelompok tertentu. (G/W)

Penyadaran itu memang harus bertahap, tetapi kan tahapan-tahapan itu yang kaya apa. Kalau mereka mengatakan bertahap toh kita sudah puluhan tahun, tahapan-tahapan itu ndak selesai. Kenyataannya kan tahapan-tahapan itu ndak ada. Artinya, mereka menggunakan itu, menggunakan istilah itu asli semua hanya untuk mempertahankan apa yang sudah mereka bikin dan mereka buat. (B/W)

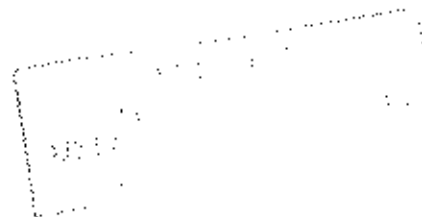
Melihat kenyataan bahwa Orde Baru tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan demokrasi sebagai akibat dari kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan itulah, ASPR menilai bahwa sistem politik yang dijalankan Orde Baru tidak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat. Karena itu, ASPR berkeyakinan bahwa rakyat harus menyusun sistem politiknya sendiri dan tidak perlu lagi mengikuti sistem politik negara. Rakyat harus menyusun dan menggunakan strategi sendiri. Hanya dalam taktis dan teknis saja rakyat mengikuti sistem politik negara. Untuk mewujudkan harapan itu, hal yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah membangun kekuatan rakyat. Dalam membangun kekuatan rakyat inilah diperlukan tahapan-tahapan dari bawah.

Begini, ada politiknya negara. Ada politiknya rakyat. Ini pandangan saya. Apakah politik negara ini dengan segala aturan formalitas negara dan segala macam itu bisa bermanfaat bagi rakyat. Kita memandang ya yang selama ini ada itu tidak bermanfaat buat rakyat. Jadi, rakyat harus menggunakan politiknya sendiri. Kalaupun kita memanfaatkan politik negara, itu dalam rangka taktis saja atau mungkin teknis. Tapi strateginya adalah politik rakyat ini. Bagaimana membangun kekuatan rakyat itu yang memerlukan tahapan-tahapan. Tahapannya apa ya tahapan di politik rakyat itu. Tapi sudah tidak perlu lagi kita memindahkan politik negara. (F/W)

Dengan demikian terlihat jelas bahwa ASPR menganggap demokrasi itu tidak bisa diturunkan dari atas/penguasa, tetapi harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri. Anggapan seperti itu didasari keyakinan bahwa demokrasi identik dengan sebuah cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan rakyat atau keadilan di kalangan rakyat. Karena yang tahu kebutuhan rakyat itu bukan penguasa/negara, melainkan rakyat sendiri, cara yang ditempuh juga harus ditentukan oleh rakyat sendiri bukan oleh penguasa. Dengan proses tersebut, diharapkan segala kebutuhan rakyat terpenuhi dan keadilan dapat tercipta.

Begini, tujuannya kan keadilan di mana terpenuhi kebutuhan tiap-tiap orang yang ada di dalamnya/warganya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, rakyat sendirilah yang tahu apa kebutuhan itu. Rakyatlah yang menentukan caranya untuk memenuhi kebutuhan itu dan caranya itu namanya demokrasi. Sehingga tidak bisa dilepaskan. Kalau mencari cara lain untuk menciptakan keadilan, artinya berharap dari elite politik, ndak bisa itu. ASPR meyakini keadilan itu hanya tercipta dengan demokrasi dan itu adalah wilayah politik rakyat itu tadi, bukan dari atas. (F/W)

Untuk memperjuangkan adanya demokrasi di negara ini diperlukan adanya usaha pemberdayaan rakyat yang selama ini tidak pernah dilakukan Orde Baru. Pemberdayaan itu di antaranya dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada rakyat sehingga rakyat tahu akan kewajiban-kewajibannya, hak-haknya, serta menerima dan membina adanya keragaman di kalangan rakyat yang tidak perlu dipersoalkan lagi.



Pendidikan politik itu harus dilakukan dari rakyat bawah harus diberdayakan dari masyarakat bawah. Pembinaan itu harus dari bawah. Pemberdayaan itu harus dilakukan. Masyarakat harus tahu hak-haknya, kewajibannya apa, keseimbangan antara kewajiban dan hak. Masyarakat harus mengakui bahwa heterogenitas itu merupakan sebuah keragaman yang harus dibina. (B/W)

Salah satu isu yang tak kalah populernya dalam demokrasi Pancasila adalah konsep negara integralistik. Bagaimana ASPR memandang konsep negara integralistik ini?

Negara Integralistik Berkultur Feodal

Orde Baru mengidealkan rakyat seperti sebuah keluarga yang harmonis, seluruh anggotanya saling memelihara dan saling peduli. Negara harus menjadi pusat pelindung rakyat Indonesia atau menjadi pihak yang "ngayomi lan ngayemi". Dalam hal ini Orde Baru menekankan pentingnya negara sebagai perwakilan total dan integral dari seluruh rakyat. Dengan demikian, Orde Baru ini memandang pentingnya sebuah negara integral sebagai sentral atau dikenal dengan negara integralistik.

ASPR menolak konsep negara integralistik yang dijalankan Orde Baru. Dalam pandangan ASPR, negara integralistik yang menganggap negara seperti sebuah keluarga itu hanyalah memanfaatkan kultur bangsa kita yang feodal. Hal itulah yang menyebabkan adanya sentralistik. Hubungan bapak dan anak yang cenderung bersifat searah dan tidak mengharapkan adanya hubungan timbal balik dianggap sebagai sumber permasalahan. Dalam budaya feodal, seorang anak haruslah selalu patuh terhadap apa yang dikatakan bapaknya. Seorang anak tidak memiliki kebebasan bahkan kesempatan sedikit pun untuk memberikan kritik,

permintaan atau usul kepada sang bapak. Dengan demikian, konsep negara integralistik memandang negara sebagai segala-segalanya yang harus dipatuhi oleh rakyat.

Negara integralistik itu kan pemahaman secara kultur. Memahami kultur bangsa kita yang feodal dan memanfaatkannya. Itu aja yang sebetulnya dimaksudkan Soeharto. Jadi, ASPR menentang konsep negara integralistik. Itu memanfaatkan sisi feodalisme bangsa ini. (F/W)

Penerapan konsep negara integralistik oleh Orde Baru merupakan usaha merancukan posisi rakyat dan penguasa. Konsep tersebut berusaha menempatkan penguasa pada posisi yang sangat kuat dan menentukan segala-galanya. Posisi penguasa seperti itu diibaratkan oleh ASPR sebagai sebuah berhala yang segala keputusannya tidak menerima masukan dari rakyat.

Jadi mengatakan bahwa kesatuan antara rakyat dengan pemerintah hakikatnya dalam satu keluarga, bapak anak akhirnya rancu. Rakyat menjadi menganggap negara itu sebagai berhala. Negara itu tidak bisa diotak-atik. Pemerintah tidak bisa diotak-atik. (F/W)

Posisi negara seperti di atas menjadikan negara sebagai pusat dari segala-galanya atau negara sentris. Padahal negara itu sendiri sebetulnya hanyalah sebuah alat. Alat rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Karena hanya sebagai alat, posisi negara tidak boleh lebih kuat daripada posisi rakyat. Posisi keduanya haruslah sejajar bahkan posisi rakyatlah yang seharusnya lebih kuat. Kalau posisi rakyat kuat, aparatur negara haruslah mengikuti segala keinginan rakyat. Sebagaimana diungkapkan ASPR dalam sebuah diskusi di GMPR Pandegiling berikut:

Negoro iku mek alate rakyat thok. Bukan apa-apa negara itu. Mendirikan negara itu adalah alatnya rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, antara rakyat dan negara itu seharusnya sejajar. Dan

pemerintah ini alatnya negara, kan disebut aparatur negara. Aparatur negara itu artinya alatnya negara. Seharusnya aparatur negara, pemerintah, itu adalah abdinya rakyat. Kudu manut karo rakyat. (F/D)

ASPR menolak konsep negara integralistik yang diterapkan Orde Baru itu karena konsep tersebut jelas berlawanan arus dengan prinsip demokrasi. Negara yang seharusnya hanyalah berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan rakyat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan sebaliknya, negara menjadi sangat kuat dan tidak mau mendengar suara rakyat apalagi memperjuangkannya. Akhirnya rakyat tidak memiliki kekuatan sama sekali.

Padahal sebetulnya negara itu sebagai alat. Paham negara integralistik itu tidak memandang negara sebagai alat, tapi kan negara sentris. ASPR memandang rakyat yang menjadi sentral. Mau diapakan negara itu ya apa katanya rakyat. Jadi, ASPR menentang konsep negara integralistik. (F/W)

Konsep negara integralistik itu merupakan salah satu penyebab tidak adanya demokrasi pada masa Orde Baru. Rakyat diposisikan sebagai seorang anak yang tidak memiliki kebebasan sama sekali. Padahal demokrasi mensyaratkan adanya kebebasan rakyat.

... rakyat ini bukan hanya sekedar anak yang harus dikasih, tapi juga dibiarkan mereka bebas untuk menyatakan yang lainnya, berbuat yang lainnya sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri. Di sini yang tidak diberi kesempatan. Sehingga ya hanya perintah-perintah aja, instruksi ini. (AF/W)

Tidak adanya kebebasan rakyat dalam perwujudan konsep negara integralistik itu terlihat juga dari adanya paksaan dari pihak negara kepada rakyat untuk selalu patuh. Adanya kepatuhan rakyat kepada negara karena adanya paksaan, bukan karena kesadaran. ASPR mencontohkan hubungan pusat dan

daerah yang lebih bersifat sentralistik dan tidak adanya pemerataan. Kekuasaan sentralistik yang diterapkan Orde Baru itu dinilai ASPR sebagai sebuah kerajaan.

Negara integralistik kan tidak boleh dipahami seperti itu. Negara integralistik harus dipahami dengan kesadaran bukan dengan paksaan. Kesadaran orang menyatakan integral antara daerah satu dengan pusat itu kan sebuah kesadaran, ndak boleh dipaksa. Kalau modelnya kayak kemarin itu pemaksaan untuk jadi satu, bukan integralistik, tapi sebuah kerajaan. Semua harus tunduk ke pusat, bukan integralistik, tapi kerajaan baru. (B/W)

ASPR bahkan berpandangan bahwa rakyat tidak perlu lagi patuh dan tunduk kepada negara karena negara tidak mau dan tidak mampu melindungi dan mengayomi rakyat. Kepatuhan itu tidak boleh dipaksakan dari atas, melainkan datang dari sebuah kesadaran. Timbulnya kesadaran itu bersumber dari terpenuhinya segala kebutuhan rakyat. Dengan kata lain, jika hak-haknya terpenuhi, rakyat akan sadar sendiri untuk patuh kepada pemimpin yang memperjuangkan pemenuhan akan hak-hak rakyat.

Kalau pimpinan tidak mampu melindungi kita, mengayomi kita kan sudah hak kita untuk tidak taat. Artinya, untuk membikin prosedur sendiri supaya cita-citanya tercapai. Kalau semua harus dipahami kamu harus taat, kamu harus taat, ya kalau yang ditaati bener. Jadi, tidak muncul dari atas ketaatan itu. Ketaatan itu muncul dari sebuah kesadaran. Kesadaran itu ada kalau masyarakat itu memang sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (B/W)

Tidak adanya kemauan negara untuk melindungi rakyat terbukti dari berbagai kasus yang melibatkan rakyat. Dalam kasus tanah, misalnya, rakyat selalu ditempatkan pada posisi yang kalah oleh negara. Bahkan negara cenderung melindungi individu atau kelompok tertentu yang berpihak kepadanya. Kalau demikian yang terjadi, negara itu bukanlah pelindung dan pengayom rakyat,

melainkan pelindung dan pengayom kelompok tertentu yang mendukung penguasa.

Kalau ngayomi kan gini. Kalau ada katakana lah kasus tanah yang riil akan selalu dihadapi oleh masyarakat, harus ada bukti surat tanah. Kalau ngomong ngayomi kan harus ada garis tengah. Selama ini kan ndak selalu saja masyarakat dikalahkan untuk kepentingan baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan kekuasaan. Ini ndak bisa dikatakan ngayomi. Ngayomi sekelompok orang ya, tetapi kalau ngayomi masyarakat ndak. Konflik-konflik di masyarakat kan selalu saja rakyat yang dikalahkan. Mana bisa kita ngomong ngayomi kalau selalu saja rakyat yang dikalahkan. (B/W)

D i s k u s i

Setelah dipaparkan temuan lapangan berkaitan dengan tema demokrasi Pancasila seperti di atas, perlu diadakan ruang diskusi. Dalam ruang ini, temuan lapangan studi ini seperti yang dipaparkan di atas dikaitkan dengan studi lain atau pendapat para ilmuwan yang berhubungan dengan temuan lapangan ini.

Temuan lapangan menyatakan bahwa Orde Baru sangatlah tidak demokratis karena rakyat tidak dilibatkan dalam proses politik. Temuan seperti itu memiliki dasar yang kuat karena ciri paling mendasar dari setiap sistem demokrasi, yaitu ide bahwa rakyat seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan politik, baik langsung maupun melalui para wakil pilihan mereka.¹

Temuan ini sekaligus mendukung beberapa studi yang terdahulu di antaranya hasil penelitian I. Gede Janamijaya² dan hasil penelitian Anders Uhlin³ yang juga menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru bukanlah pemerintahan yang demokratis, namun cenderung otoriter yang kukuh.

¹ Sargent, *Ideologi ...*, h. 44.

² I. Gede Janamijaya, "Partisipasi Politik dalam Pembangunan Politik Masa Orde Baru, 1966—1992", Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996, h. 177.

³ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 65.

Memang prinsip dasar kehidupan yang demokratis adalah setiap rakyat ikut aktif dalam proses politik. Namun, kalau setiap rakyat ikut serta dalam setiap proses politik, demokrasi justru tidak akan berjalan. Demokrasi baru bisa berjalan kalau masyarakat sadar bahwa mereka memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan atau kalau pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka yang dibentuk berdasarkan hasil satu pemilu. Cara ini menjamin rakyat ikut serta dalam proses politik tanpa sepenuhnya terlibat dalam proses itu. Dengan demikian, keikutsertaan rakyat yang paling utama dalam proses politik adalah dalam menyusun agenda politik untuk dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka.⁴

Karena ide sentral yang terdapat dalam istilah 'demokrasi' adalah konsep perwakilan, yaitu bagaimana suara rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan, peranan rakyat terbatas dalam hal membentuk suatu pemerintahan dengan hanya memilih wakil-wakil mereka yang akan membuat keputusan politik dan bukan menyelesaikan masalah-masalah politik itu sendiri. Itulah sebabnya, demokrasi perwakilan ini disebut demokrasi elitis.⁵

Temuan lapangan menunjukkan bahwa rakyat tidak mempunyai wakil di lembaga parlemen (DPR/MPR). Semua anggota parlemen selama Orde Baru bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil penguasa. Temuan ini senada dengan pendapat Syamsuddin Haris yang menyatakan bahwa MPR yang dibayangkan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, sejak awal Orde Baru mayoritas anggotanya (60%) masih diangkat oleh pemerintah. Selain itu, para anggota DPR yang dihasilkan pemilu-pemilu Orde Baru lebih merupakan wakil partai mereka

⁴ Imawan, *Membedah ...*, h. 79—80.

⁵ Dwi Susanto dkk., 'Kecenderungan Demokrasi Elitis di Negara-Negara Sedang Berkembang', dalam *Prisma* 6, 1988, h. 43—44.

daripada wakil rakyat. Mereka dipilih oleh para pengurus partai, sebagian lagi bahkan oleh pemerintah sendiri, yang kemudian disahkan oleh rakyat melalui pemilu. Setelah menjadi anggota DPR/MPR, kedaulatan para wakil rakyat tersebut kemudian diambil alih oleh negara melalui tangan partai dan fraksi.⁶

Memang dalam demokrasi elitis seperti itu, lembaga-lembaga keparlemenan lebih mengabdikan kepada kepentingan negara daripada kepada kepentingan rakyat. Distribusi kekuasaan lebih terpusat pada sekelompok kecil orang yang menentukan jalannya kehidupan politik. Karena itu, ide tentang perwakilan hampir sepenuhnya tidak ada dalam ide tentang demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, lembaga perwakilan itu tidak mungkin mengartikulasikan dan memperjuangkan nasib rakyat bahkan berusaha menghalangi munculnya pihak-pihak yang berusaha mengartikulasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.⁷ Hal ini didasarkan pada fakta bahwa partai dan fraksi selaku kepanjangan tangan negara akan segera *recall* anggota yang vokal—sebutan bagi anggota DPR yang menyuarakan aspirasi rakyat yang sebenarnya—dari lembaga perwakilan.⁸

Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa posisi rakyat kita dalam pembentukan DPR amat marginal. Pada setiap pemilu, rakyat harus menerima para wakil, yang bukan hanya tak dikenalnya, dan belum tentu mengenal aspirasi serta kepentingan mereka, tapi juga ditentukan secara sepihak oleh elite OPP dan

⁶ Haris, *Menggugat ...*, h. 146; lihat pula Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 200.

⁷ Erik Sazono, 'Demokratisasi dalam Kepolitikan Orde Baru', dalam *Prisma* 10, Oktober 1994, h. 56.

⁸ Haris, *Demokrasi ...*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h. 200.

pemerintah (melalui litsus). Karena itu, para anggota legislatif lebih bertanggung jawab kepada OPP dan pemerintah daripada kepada rakyat yang diwakilinya.⁹

Pemilu di dalam format politik Orde Baru sejauh ini memang lebih berfungsi sebagai alat legitimasi utama bagi negara ketimbang sebagai alat kontrol bagi rakyat terhadap penguasa. Pemilu bahkan menjadi salah satu perangkat hegemoni yang sangat efektif bagi Orde Baru untuk memperkokoh legitimasi politik pemerintah.¹⁰ Pemilu dalam negara otoriter berarti proses legitimasi, bukan proses perubahan sosio-ekonomi dan politik, tetapi proses mengukuhkan kembali kekuasaan negara. Model pemilu macam ini adalah model pemilu mobilisasi, artinya semua lapisan masyarakat dimobilisasi untuk ikut pemilu demi terlegitimasinya suatu format sistem kekuasaan negara. Karena itu, fungsi pemilu itu hanya untuk mempertahankan status quo.¹¹ Sifat pemilu seperti itu biasanya sudah direkayasa sehingga muncul suatu istilah yang kontradiktif, yaitu "pemilu" dengan "target". Apabila persentase hasil pemilu itu persis seperti yang ditargetkan, sangatlah wajar jika timbul kesan bahwa pemilu tersebut hanya merupakan suatu *political farce* atau "dagelan politik".¹²

Apalagi Orde Baru menempatkan DPR sebagai subordinasi negara atau sekurang-kurangnya partner pemerintah dalam mencapai targetnya. Kecenderungan ini selain tecermin pada "pengaturan" dan penataan terhadap DPR, juga pada pengendalian orsospol, kontrol terhadap proses dan pelaksanaan pemilu serta rekrutmen tertutup atas calon-calon anggota legislatif yang akan mengisi DPR. Struktur DPR sengaja dirancang agar tidak berdiri (otonom) berhadap-

⁹ Haris, *Menggugat ...*, h. 257.

¹⁰ Idem, h. 146; lihat pula Janamijaya, "Partisipasi ...", h. 149.

¹¹ Aribowo, "Partisipasi-Polarisasi dalam Pemilu 'Baru'", dalam *Jawa Pos*, 8 Maret 1999, h. 1.

¹² Amin Rais, "Pengantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. xvii—xxv.

hadapan dengan pemerintah, tapi justru diusahakan agar mendukungnya. Kebijakan pembinaan politik, mekanisme litsus, politik izin, restu dan konsultasi, mekanisme *recalling* diciptakan dalam kerangka kontrol negara terhadap orsospol dan kontrol orsospol terhadap anggotanya di DPR.¹³ Karena itu, DPR hasil lima pemilu selama Orde Baru nyaris tak mampu melaksanakan tiga fungsi utama wakil rakyat: fungsi penyalur aspirasi rakyat, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan.¹⁴ Tata tertib MPR yang mengatur kedaulatan terletak pada fraksi, bukan pada anggota secara individual menjadi salah satu penyebab tersubordinasinya DPR/MPR karena MPR akan mengabdikan pada kekuasaan yang memilih maupun mengangkatnya sehingga presiden bisa mendikte MPR.

Melihat kenyataan seperti itu, sangatlah tepat apa yang dikatakan Myron Weiner¹⁵ yang mengatakan bahwa salah satu ciri terpenting kepolitikan Orde Baru adalah terjadinya krisis partisipasi politik, suatu keadaan yang ditandai oleh adanya anggapan pemerintah bahwa berbagai tuntutan dan tingkah laku politik masyarakat yang ingin berperan serta dalam proses politik dan pemerintahan adalah tidak sah dan ilegal.

Terjadinya krisis partisipasi itu juga karena tersumbatnya proses partisipasi politik yang disebabkan oleh adanya hal-hal berikut. *Pertama*, tekanan dan represi sepanjang Orde Baru telah menipiskan keberanian masyarakat untuk bersikap kritis dan melakukan aksi-aksi politik yang melawan nilai dan kepentingan negara. Penangkapan dan diterapkannya UU Antisubversif dalam pemberian sanksi politik dari negara terhadap pelaku unjuk rasa amat menyumbat partisipasi politik. *Kedua*,

¹³ Hars, *Menggugat ...*, h. 239 & 241.

¹⁴ Sudarsono dkk., "Menggugat Para Wakil Rakyat", dalam *Forum Keadilan: Edisi Khusus "Parlemen Kita Sepanjang Sejarah"*, Agustus 1997, h. 10.

¹⁵ Sebagaimana dikutip R. Eep Saefullah Fatah dalam "Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru", dalam *Prisma* 4, April 1994, h. 9.

sebagai konsekuensi sikap pejabat terhadap kritik. Pejabat kita tidak terbiasa dikritik. *Ketiga*, kecenderungan untuk menggeser orientasi ideologi dan politik ke arah yang lebih pragmatis. Dengan usaha itu, masyarakat menjadi sangat pragmatis dan kalkulatif.¹⁶

Penyumbatan partisipasi rakyat itu mengandung pengertian bahwa Orde Baru tidak melegalkan adanya oposisi. Demokrasi Pancasila jelas-jelas menolak semua format politik yang menempatkan oposisi dan konflik sebagai bagian dari persaingan politik.¹⁷ Dengan demikian, Orde Baru tidak dapat disebut demokratis karena memang tidak membolehkan adanya oposisi. Tidak diperbolehkannya oposisi dalam sistem politik Indonesia menambah citra politik Indonesia yang otoriter karena hanya di negara-negara otoriter saja oposisi tidak boleh ada.¹⁸

Itu semua terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pemahaman Orde Baru terhadap demokrasi. Demokrasi yang dianggap sebagai pertentangan antara kelompok yang kuat (negara/penguasa) dan kelompok yang lemah (rakyat) menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap keragaman yang ada. Peran negara menjadi sangat dominan dalam membatasi partisipasi politik masyarakat. Ini terlihat dari masih berlakunya pelemahan potensi partai politik melalui pembatasan jumlah dan ruang gerak (kebijakan massa mengambang) ditambah dengan penyeragaman asas-asas buat semua kekuatan sosial-politik dalam masyarakat.¹⁹

Peran negara yang dominan itu tidak lepas dari adanya pendukung utamanya, yaitu militer dan kaum kapitalis. Karena adanya dukungan dari kedua kelompok ini, Orde Baru bersifat sentralistis. Hal ini terungkap juga oleh Uhlin

¹⁶ Janamijaya, "Partisipasi ...", h. 137—138.

¹⁷ Sparringa, "Nasionalisme ...", h. 53—54.

¹⁸ Habib, "ABRI ...", h. 40.

¹⁹ Nur Inam Subono, "Demokratisasi Masyarakat, Apa yang Harus Dilakukan?", dalam *Prisma* 6, 1988, h. 60.

yang menyatakan bahwa masyarakat bisnis di Indonesia memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penetapan kebijakan. Di luar sebagian unsur komunitas pengusaha, masyarakat Indonesia tampaknya masih benar-benar dikontrol dan didominasi oleh negara. Kemampuan ekonomi dan militer negara sangat besar. Kekuasaan negara dilaksanakan melalui patronase dan penindasan.²⁰

Memang esensi terpenting dari kecenderungan politik Orde Baru adalah berlangsungnya reduksi sistematis atas peranan masyarakat sipil dalam politik. Militer dan birokrasi mengambil alih peran itu melalui depolitisasi di tingkat massa dan mekanisme "pembinaan" pada tingkat elite. Karena itu, tidak heran apabila sebagian sarjana lebih melihat fenomena Orde Baru sebagai kepolitikan birokrasi seperti tercermin dalam beberapa identifikasi teoretis: *bureaucratic polity*, *bureaucratic authoritarianism*, atau bahkan "negara pegawai" model kolonial. Artinya, operasi sistem politik lebih dikendalikan dan ditentukan oleh birokrasi ketimbang masyarakat politik sipil. Dalam konteks yang lebih luas, Schmitter menyebutnya sebagai gejala "korporatisme negara", yaitu usaha mereduksi keterlibatan masyarakat dengan tujuan menjamin kelestarian dan tujuan-tujuan subjektif negara.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara bersifat dominan dan terlalu kuat di hadapan rakyat. Dalam hubungan seperti itu, jelas demokrasi tidak berjalan karena dominasi dan tekanan negara membuat organisasi otonom dalam masyarakat sulit berkembang. Supaya demokrasi bisa berjalan, harus dilakukan usaha pemberdayaan terhadap rakyat agar mereka bisa aktif terlibat dalam proses politik.

²⁰ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 45.

²¹ Haris, *Menggugat ...*, h. 32.

Hal itu seiring dengan pendapat intelektual oposisionis (kaum universalis)²² yang menuntut adanya keterlibatan rakyat secara langsung dalam politik. Menurut mereka, demokrasi harus dapat menjamin hak-hak dasar rakyat: kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan sebagainya yang memungkinkan mereka terlibat secara langsung dalam politik.

Orde Baru yang menggunakan dalih adanya keunikan demokrasi Pancasila hanyalah merupakan upaya Orde Baru untuk menggunakan penafsirannya sendiri terhadap demokrasi Pancasila. Yang terjadi dengan keunikan itu justru karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri bahkan Orde Baru menerapkan sistem politik negara komunis. Hal ini terbukti dari adanya tiga pilar kekuasaan: militer, birokrasi, dan partai yang kesemuanya juga digunakan dalam sistem politik negara komunis. Hal ini seiring dengan pendapat Liddle yang mengatakan bahwa militer Indonesia dalam banyak hal menyerupai partai komunis Soviet, dengan kepresidenan Indonesia sebagai sekretaris jendralnya.²³

Meskipun begitu, Pancasila tetap dianggap memiliki nilai-nilai yang luhur. Yang menjadi persoalan utama dengan Pancasila ini bukan terletak pada kelima prinsip itu sendiri, tetapi pada statusnya sebagai ideologi negara dan upaya Soeharto untuk memonopoli penafsirannya, dengan menuduh seluruh penentangannya sebagai anti-Pancasila. Propaganda pemerintah tersebar melalui penataran indoktrinasi wajib tentang Pancasila, program promosi Pancasila (P4).²⁴

Memang betul bahwa cara atau gaya mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis tidak perlu sama, antara lain karena latar belakang pertumbuhan politik yang berbeda-beda atau karena kebudayaan politik yang berlainan sehingga

²² Sparringa, "Discourse ..." h. 124.

²³ Uhlin, *Oposist ...*, h. 45.

²⁴ Idem, h. 57.

diberikan ajektif pada sistem demokrasi yang dianut, seperti demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, atau demokrasi Pancasila. Namun, sering terjadi penekanan yang terlalu berlebihan terhadap gaya yang ingin ditonjolkan sehingga melupakan intisari atau hakikat demokrasi yang sebenarnya. Bahkan penekanan yang berlebihan terhadap gaya cenderung dipakai untuk menutupi atau membenarkan tingkah laku politik yang bertentangan dengan sistem demokrasi yang sesungguhnya.²⁵

Dalam praktik politik ternyata apa yang dinyatakan sebagai model demokrasi lokal tersebut tak lebih dari pembenaran bagi sistem politik otoriter yang berpihak pada dan menguntungkan sekelompok kecil orang.²⁶

Orde Baru selalu berusaha melanggengkan kekuasaannya. Hal itu antara lain ditempuh dengan jalan menerapkan kebijakan "massa mengambang" yang melarang rakyat bawah berpolitik praktis. Temuan lapangan juga menolak kebijakan tersebut karena kebijakan itu hanyalah merupakan usaha memenangkan Golkar yang juga berarti usaha melanggengkan kekuasaan oleh rezim. Temuan ini sekaligus mendukung hasil studi Bambang Kuncoro yang menyimpulkan bahwa kebijakan massa mengambang yang diterapkan Orde Baru menyebabkan rakyat tidak berdaya dalam masalah politik. Ketidakberdayaan itu memperlancar mobilisasi massa ke Golkar yang lebih banyak mendominasi sosialisasi politik rakyat.²⁷

Memang untuk kelanjutan status quo dibutuhkan stabilitas politik secara terus-menerus, dalam hal ini keterlibatan aktif massa rakyat bisa mendatangkan instabilitas. Karena itu, terhadap setiap rakyat yang hendak menyuarakan

²⁵ Alfian, *Pemikiran ...*, h. 244.

²⁶ Sasono, "Demokratisasi ...", h. 91.

²⁷ Bambang Kuncoro, "Perilaku Politik Warga Pinggiran: Studi tentang Perubahan Perilaku Memilih Warga Desa pada Pemilu Tahun 1971-1997 di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998, h. 76-77.

kepentingan ekonomi-politiknya, para penguasa selalu mencurigainya. Massa rakyat selalu dianggap bodoh dalam merumuskan tuntutan. Tuntutan mereka dianggap tidak murni dan semata-mata hasutan para penunggang yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan. Akibatnya, segala keputusan mengenai hajat hidup orang banyak terbatas pada elite birokrasi. Birokrasi dengan dukungan para elite militer menjadi lembaga politik yang dominan sehingga lembaga lain di luar itu terlihat lemah. Konsekuensinya, masyarakat tidak bisa melakukan kontrol sosial.²⁸

Kebijakan massa mengambang itu mencerminkan tidak adanya demokrasi. Kebijakan itu dijalankan bertujuan untuk mengambil legitimasi dari ideologi "pembangunan", yakni ideologi yang memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, bukannya kebebasan politik dan hak asasi manusia.²⁹

Kebijakan itu diambil berdasarkan pemikiran Lipset yang percaya bahwa modernisasi merupakan faktor pendorong utama bagi munculnya kehidupan yang demokratis. Modernisasi akan meningkatkan standar pendidikan rakyat, yang menyebabkan rakyat lebih kritis menerima dan menjangkau informasi sehingga mereka dapat lebih menggunakan rasionalitas daripada emosi pada waktu menentukan pilihan.³⁰ Bertolak dari keyakinan tersebut, Orde Baru melaksanakan pembangunan nasional dengan memprioritaskan bidang ekonomi. Sebagai prakondisinya ditegakkan stabilitas politik sehingga tercipta sistem politik dan pemerintahan yang efektif sebagaimana diperlihatkan oleh ketinggian daya intervensinya terhadap kehidupan masyarakat.³¹

²⁸ Amiruddin, "Demokratisasi dan Negara Orde Baru", dalam *Prisma* 11, November 1994, h. 92.

²⁹ Ariel Heryanto, "The Development of 'Development'", *Indonesia* No. 46, Oktober 1988.

³⁰ Imawan, *Membedah ...*, h. 92.

³¹ Arbi Sanit, "Organisasi Politik, Organisasi Massa dan Politik Demokratisasi Masyarakat", dalam *Prisma* 6, 1988, h. 3.

Namun, komitmen Orde Baru tentang peningkatan kualitas demokrasi yang seiring dengan pembangunan ekonomi ternyata tidak dapat dipertahankan karena pemikiran yang menjadi landasan, paradigma Lipset yang menyejajarkan pembangunan ekonomi dengan demokratisasi, tak terbukti. Negara-negara yang sudah mengalami kemajuan ekonomi juga tidak mengalami demokratisasi yang berarti. Orientasi pembangunan ekonomi Orde Baru menekankan pada pertumbuhan, sebagai lawan pemerataan, membutuhkan model stabilitas yang bersifat otokratik dan bukan stabilitas konsensual. Stabilitas model ini tidak mendukung pemerataan pembangunan sekaligus tidak berhasil menumbuhkan partisipasi yang otonom.

Dengan demikian, kebijakan massa mengambang yang bertujuan menekan politik rakyat secara tegas ditolak. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari politik. Keduanya harus dijalankan secara bersamaan. Karena itu, demokratisasi politik harus berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Rakyat yang secara struktural tertindas karena adanya akumulasi kekuatan ekonomi di tangan satu pihak, sulit untuk mengembangkan praktik demokrasi politik.³²

Demokrasi memang tidak bisa diturunkan dari atas atau dari penguasa, tetapi harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri. Demokrasi tidak bisa diperoleh sebagai sebuah hadiah sebab siapa pun yang memegang kekuasaan tidak akan memberikannya. Demokrasi harus diperjuangkan. Untuk itu, diperlukan adanya usaha pemberdayaan rakyat yang di antaranya dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada rakyat sehingga rakyat tahu akan kewajiban-kewajibannya, hak-haknya, serta menerima dan membina adanya keragaman di

³² Adi Sasono, "Demokratisasi Politik, Seiring dengan Demokratisasi Ekonomi", dalam *Prisma* 6, 1988, h. 56.

kalangan rakyat. Pembentukan dan pembangunan sebuah masyarakat madani adalah bagian penting dalam penegakan demokrasi. Kekuatan rakyat merupakan satu-satunya "alat" yang ampuh untuk perjuangan menjatuhkan penguasa-penguasa otoriter dan mewujudkan demokratisasi di segala aspek kehidupan. Jadi, turun ke jalan atau demonstrasi adalah satu-satunya alat yang ampuh.³³

Rezim Orde Baru mengandalkan seperangkat struktur ide untuk melegitimasi pemerintahan yang otoriter. Budaya Indonesia khususnya budaya Jawa sering dianggap mendukung otoritarianisme. Uhlin mengutip pendapat Lubis yang mencirikan tiga aspek budaya Indonesia 'yang telah melanggar hak asasi manusia' untuk memperkuat pendapatnya. Ketiga aspek yang dimaksud adalah (1) kepercayaan terhadap hierarki sosial yang didasarkan pada gagasan Jawa tentang hubungan antara *kawula* dan *gusti*, (2) obsesi terhadap keselarasan dan keteraturan, dan (3) penekanan pada kewajiban melampaui hak.³⁴

Budaya Jawa yang dianggap mendukung otoritarianisme itu terwujud dalam konsep negara 'integralistik' sebagaimana dikemukakan Soepomo. Menurut konsep ini, negara Indonesia harus menjadi sebuah kesatuan organis dan memberikan pengaruh menonjol terhadap konstitusi Indonesia yang mengutamakan bangsa dan negara, bukan individu. Temuan lapangan menunjukkan bahwa interpretasi Orde Baru atas pemikiran Soepomo sebenarnya hanya merupakan usaha memanfaatkan kultur feodal sehingga terjadi adanya sentralistik. Karena itu, temuan ini menyamakan konsep negara integralistik tersebut dengan sistem kerajaan. Temuan ini diperkuat Sparringa yang menyatakan bahwa interpretasi Orde Baru atas pemikiran Soepomo itu jelas tidak mendukung usaha memperkuat masyarakat

³³ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 202 & 213.

³⁴ Idem, h. 55.

madani yang memang sejak awalnya tidak pernah kuat. Sebuah kondisi yang menghambat berkembangnya konsep dan praktik demokrasi yang sesungguhnya.³⁵

R. Eep Saefullah Fatah³⁶ yang menyatakan bahwa interpretasi itu hanya menjadikan pemusatan kekuasaan secara kumulatif di tangan presiden sangat sesuai dengan temuan ini. Fatah melihat adanya sebuah paralelisme historis antara raja Jawa masa lampau dengan Presiden Soeharto yang tampaknya tak terjadi secara kebetulan. Karena memang kultur presiden yang sangat kental dipengaruhi kultur Jawa yang berpengaruh terhadap pemikiran politiknya dan terhadap cara menjalankan kekuasaan tersebut. Pola pemusatan kekuasaan ini terbentuk karena posisi Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, Panglima Tertinggi ABRI, dan kepala eksekutif sekaligus. Masih dalam rangka pemusatan kekuasaan tersebut adalah adanya instrumen yang menonjol untuk itu yaitu Dwifungsi ABRI yang sudah menjelma menjadi ideologi.

Studi Sparringa juga mendukung temuan ini. Pemusatan kekuasaan pada tangan sebagian kecil masyarakat, khususnya sekitar "istana", hegemoni budaya "priyayi" Jawa, dan kegagalan rezim Orde Baru untuk mengizinkan individu-individu dalam masyarakat madani untuk menggunakan hak-hak dasar dipandang sebagai akar dari problem dalam hubungan menuju demokrasi di Indonesia. Dominasi militer dalam politik juga menciptakan problem lebih jauh terhadap tradisi demokrasi.³⁷

Interpretasi Orde Baru semacam itu jelas bertentangan dengan konsep negara integralistik. Dalam teori integralistik, negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan

³⁵ Sparringa, "Nasionalisme ...", h. 55.

³⁶ Lihat R. Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

³⁷ Sparringa, "Discourse ...", h. 137—138.

masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara berdasar aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Berbeda dengan konsep teori integralistik tersebut, pandangan Soepomo lebih mengutamakan persatuan keseluruhan dalam negara, yaitu negara dalam pengertian satuan organis dan totaliter, serta menolak adanya hak-hak dasar bagi rakyat karena dianggap mencerminkan pandangan dualistis yang liberal-individualistis. Pandangan itu jelas mengandung indikasi adanya usaha pengaburan batas negara dengan rakyat karena konsep itu tidak menjelaskan letak dan hubungan kekuasaan dalam negara.³⁶

Dari keseluruhan pembicaraan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa temuan lapangan menunjukkan adanya penolakan terhadap demokrasi Pancasila yang dijalankan Orde Baru karena dalam faktanya sistem politik tersebut sangat tidak demokratis—bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penolakan terhadap demokrasi Pancasila ini sekaligus memperkuat studi Sparringa yang diwakili kaum oposisionis yang juga menolak secara menyeluruh gagasan demokrasi Pancasila sebagaimana yang dikonstruksikan oleh rezim. Demokrasi Pancasila dipandang sebagai konsep yang tidak jelas dan membingungkan. Mereka mencelanya sebagai demokrasi yang diciptakan dengan sengaja oleh rezim Orde Baru untuk mempertahankan status quo dan menyembunyikan agenda dan kepentingan politiknya. Mereka menentang nilai-nilai inti demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara. Bahkan mereka tidak hanya menolak bentuk, tetapi juga isi

³⁶ Marsilan Simanjutak, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta: PT Anem Kosong Anem, 1997), h. 85 & 246.

demokrasi Pancasila dan berpendapat bahwa Pancasila pada kenyataannya antidemokrasi. Mereka juga beranggapan bahwa demokrasi Pancasila disusun oleh elite Orde Baru digunakan sebagai senjata politik untuk membatasi dan menghentikan berbagai bentuk perlawanan yang datang dari publik. Istilah Pancasila dimanipulasi secara politik sebagai cara paling efektif untuk mempertahankan status quo. Praktik-praktik demokrasi Pancasila digambarkan sebagai "democracy" sebagai ganti "demokrasi" karena rezim tidak mengizinkan berbagai bentuk oposisi untuk berkembang.³⁹

³⁹ Sparringa, "Discourse ...", h. 131—132.

BAB VII

DWIFUNGSI: CERMIN AROGANSI ABRI

Sebagaimana sudah disebutkan di bagian depan bahwa pembicaraan mengenai tema Dwifungsi ABRI ini dibagi atas beberapa subtema, yaitu konsepsi tentang Dwifungsi ABRI, pengangkatan militer dalam birokrasi sipil, pengangkatan militer dalam parlemen, dan hubungan ABRI dengan Golkar. Berikut ini dipaparkan respons ASPR terhadap wacana Orde Baru berkaitan dengan tema dan sub-subtema tersebut.

Dwifungsi ABRI Mematikan Demokrasi

Seperti halnya dengan tema demokrasi Pancasila, hal yang paling utama dalam membicarakan tema dwifungsi ABRI ini adalah pandangan tentang dwifungsi ABRI itu sendiri—apakah dwifungsi ABRI merupakan konsepsi politik yang sudah tepat atau tidak tepat jika dihubungkan dengan sistem politik yang demokratis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, paparan temuan lapangan ini diawali dengan pandangan ASPR terhadap dwifungsi ABRI.

Dwifungsi ABRI—suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik—yang diklaim Orde Baru sebagai sebuah konsep politik yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik Indonesia dan juga tidak dapat dipisahkan dari konsep demokrasi Pancasila yang bersifat spesifik Indonesia ditolak secara tegas oleh ASPR.

ASPR menilai bahwa keterlibatan ABRI di wilayah sipil atau sosial politik inilah yang menjadi sumber tidak adanya demokrasi di Indonesia. Organisasi ABRI yang memberlakukan sistem komando dipandang sebagai aturan yang sangat

bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, jika terjun ke masalah sosial politik, ABRI jelas tidak mungkin menghilangkan budaya yang mereka miliki, sistem komando, tersebut. Karena itu pula, kalau ABRI masuk ke dalam wilayah sosial politik jelas hal itu akan menghilangkan atau mematikan demokrasi di Indonesia.

ABRI jelas ndak mungkin demokratis, wong struktur kerjanya, prosedur kerjanya saja sudah komando kok demokratis, ndak mungkin demokratis. (B/W)

Karena dalam sistemnya ABRI sendiri kan sistem perintah di mana bawahan harus mematuhi atasan. Ini kan yang dianggap tidak demokrasi. Artinya ABRI kalau menjalankan dwifungsi, demokrasi tidak akan jalan. (AP/W)

Mereka mempunyai budaya yang sama sekali tidak demokratis, di sana yang berlaku kan komando. Kalau selalu ikut campur tangan dalam masalah-masalah sipil, ABRI akan menjadi penghambat bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. ABRI harus kembali ke barak. Tanpa itu, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. (G/W)

Adanya keyakinan bahwa ABRI merupakan sebab utama tidak adanya demokrasi di Indonesia ini juga tecermin dalam syair yang mereka nyanyikan dalam setiap aksi demonstrasi yang mereka lakukan seperti berikut:

Hilang semakin hilang
demokrasi di negri ini
teman kami banyak yang hilang
banyak yang hilang
diculik ABRI
teman kami banyak yang hilang
banyak yang hilang
diculik ABRI

Hilang semakin hilang
demokrasi di negri ini
teman kami banyak yang mati
banyak yang mati
dibunuh ABRI
teman kami banyak yang mati
banyak yang mati
dibunuh ABRI

ASPR juga menilai bahwa keberadaan ABRI di wilayah sipil menjadi sebab utama adanya KKN karena mereka akan berdagang dengan kekuatan senjatanya.

Tapi nggak usah ikut politiklah. Kalau sudah pegang senjata mau berpolitik lagi akhirnya ia berdagang dengan kekuatan senjata. (F/W)

Dwifungsi itu yang menjadi biang KKN. Tentara kok disuruh mengurus masalah sipil. Kan tidak ada dasarnya. (Y/W)

Karena menganggap dwifungsi ABRI merupakan sumber segala permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, ASPR menuntut agar dwifungsi ABRI dicabut. Ini berarti bahwa ABRI hanya boleh berperan dalam bidang pertahanan dan tidak perlu lagi berperan dalam bidang sosial politik. Jadi, ABRI harus kembali ke barak.

Pada prinsipnya tegas ASPR, militer ke barak. Dia diberi tempat terhormat di pertahanan. ABRI ini menjadi bagian dari aparaturnya negara kan, pemerintah, alat pemerintahan, termasuk birokrasi kan gitu. (F/W)

Kalau menurut pandangan saya ya ABRI sebagai alat pertahanan di mana ABRI hanya menjaga kedaulatan wilayah RI dari serangan musuh dari luar gitu aja. Jelas ketika posisinya hanya sebagai penjaga pertahanan ini, mereka hanya ada pada markas-markas mereka. Untuk struktur di tubuh ABRI lalu mereka tetap harus dilokalisasi di daerah-daerah khusus ABRI di mana di situ berlaku hukum-hukum ABRI. (AU/W)

Mereka mempunyai fungsi sendiri. Mereka mempunyai sebuah dunia tersendiri. ABRI itu mempunyai dunia tersendiri dengan wacana tersendiri juga, dengan sistem kerja yang tersendiri juga. Makanya teman-teman menuntut ABRI tetap jadi alat pertahanan itu kan posisinya ya seperti itu. Ya struktur-struktur yang sifatnya pertahanan itulah yang ditempati ABRI. (B/W)

Yang jelas dwifungsi ABRI itu harus dihapus. Dikembalikan pada fungsi semula, ABRI ini sebagai pengamanan negara. (AP/W)

Dwifungsi harus dicabut, ya seharusnya mengurus masalah tempur mempertahankan negara dari ancaman luar negeri. (G/W)

ASPR memang mengakui bahwa tugas ABRI sangat berat. Karena itu, sebagai kompensasinya, ABRI harus disejahterakan. Akan tetapi, kesejahteraan itu tidak diusahakan dengan jalan memberikan tempat dalam bidang sosial politik, tetapi diberi gaji yang lebih tinggi daripada yang diberikan sekarang ini.

Artinya di sini karena ABRI tidak punya hak untuk berpolitik, ini dia punya keistimewaan, artinya kesejahteraannya lebih dari yang lainnya. Itu jaminan dari masyarakat. Harus dimakmurkan. Karena ya dengan tugas yang dianggap berat ini. (AP/W)

... disejahterakanlah dia itu, gajinya ditinggikan. (F/W)

Rupanya tuntutan terhadap ABRI untuk kembali ke barak ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan ada sebagian rakyat yang melihat bahwa ABRI di Indonesia tidak berfungsi sama sekali sehingga muncul adanya tuntutan agar ABRI dibubarkan saja. Hal ini tecermin dalam salah satu syair yang dinyanyikan ASPR pada waktu mengadakan aksi demonstrasi. Syair ini sebenarnya merupakan plesetan dari mars ABRI.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
tidak berguna bagi rakyatnya
bubarkan saja ganti pramuka atau menwa
kalau hanya bisa baris saja

Akan tetapi, tuntutan terhadap ABRI agar kembali ke barak tidak berarti bahwa anggota ABRI tidak diberi kesempatan sama sekali untuk duduk di birokrasi atau di wilayah-wilayah sipil. Anggota ABRI tetap diberi kesempatan untuk menduduki wilayah sipil, namun dengan syarat bahwa mereka harus melepaskan baju ABRI-nya dan mau bercampur bau dengan rakyat. Artinya, ketika memasuki wilayah sipil, mereka tidak boleh lagi memberlakukan hukum militer di dalam

wilayah sipil. Mereka wajib mengikuti hukum sipil. Mereka tidak boleh lagi menggunakan cara-cara militer dalam menangani sebuah persoalan.

Silakan duduk di birokrasi, tapi tanggalkan baju ABRI-nya. Artinya, sudah tidak ada keterkaitan antara dia dengan ABRI sehingga ketika terjadi sebuah dinamika di masyarakat bukan ABRI-nya yang dibawa-bawa. (B/W)

Ketika mereka keluar dari daerah-daerah khusus ABRI ini, mereka wajib dalam wilayah hukum sipil, bukan hukum militer. (AU/W)

Boleh, dalam hal ini tapi dia harus melepas baju kemiliterannya. Artinya kalau dia masuk ke militer dia tidak punya hak untuk dipilih. Kalau dia ingin untuk dipilih ya dia harus melepas baju kemiliterannya. (AP/W)

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa argumen untuk melegitimasi dwifungsi ABRI di antaranya adalah sebagai balas jasa dan sebagai sebuah panggilan. Berikut ini secara berturut-turut diuraikan bagaimana respons ASPR terhadap kedua argumen tersebut.

Tidak Hanya Jasanya, Kejahatannya Juga Banyak

Terhadap klaim ABRI sebagai satu-satunya kekuatan yang tampil sebagai "pejuang" dan "penyelamat" negara sehingga harus diberi tempat dalam urusan-urusan sosial dan politik, ASPR berpendapat bahwa klaim seperti itu hanya dibuat-buat oleh rezim Soeharto. ASPR menilai bahwa yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan bukanlah ABRI melainkan rakyat (laskar rakyat).

Ndak ada, ndak berjasa perasaan saya. Tahun 45 dulu yang menang bukan ABRI-nya, laskar rakyat. Kalau itu dikatakan angkatan perang mungkin karena waktu itu kondisi negara lagi perang di mana kondisi negara lagi perang adalah wajar suatu negara untuk menyusun kekuatan rakyat yang ada di dalamnya untuk melakukan perang. Cuman itu bukan ABRI itu, juga golongan dari rakyat yang mengangkat senjata. (AU/W)

Dan ngomong jasanya banyak juga klaim di saat-saat gerakan tentara ndak ada, itu kan gerakan rakyat. (B/W)

Klaim Orde Baru itu dinilai sebagai klaim yang dibuat-buat karena adanya kenyataan bahwa banyak rakyat yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi tidak mendapat bagian apa-apa. Klaim tentang jasa yang banyak bagi negara itu hanya digunakan Orde Baru untuk tetap menguasai negara ini sepenuhnya. Karena itu pula, ASPR menilai bahwa penguasa Orde Baru tidak lain adalah sebagai perampok negeri ini.

Kalau ngomong jasanya banyak, Pak Dhe saya juga jasanya banyak dalam mengusir penjajah Belanda, tapi ndak pernah mendapat bagian. Tapi bukan berarti karena banyak jasanya terus dapat bagian yang banyak. Rampok itu namanya. (B/W)

Selain itu, ASPR menilai bahwa kekuatan yang dimiliki ABRI juga digunakan untuk menjalankan segala kejahatan: menindas, membunuh, membantai, dan menculik rakyat untuk kepentingan penguasa Orde Baru.

Kejahatannya juga banyak, dalam menindas, membunuh, membantai, menculik, dan segala macam dengan kekuatannya. Itu kan bisa-bisanya Soeharto saja. (F/W)

Dwifungsi ABRI: Bukan Panggilan, Melainkan Paksaan

Salah satu argumen yang dikembangkan Orde Baru untuk memberikan legitimasi politik dwifungsi ABRI adalah adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural dan heterogen yang dipahami sebagai masyarakat yang memiliki potensi besar bagi berkembangnya antagonis etnis, agama, ras, dan golongan (SARA). Karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, ABRI memotret dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang secara

ideologis tidak terpecah-pecah sehingga mampu melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, Orde Baru melihat bahwa dwifungsi merupakan permintaan dari rakyat, sebagai panggilan, agar ABRI terlibat dalam masalah sosial politik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pandangan ASPR, klaim adanya permintaan rakyat terhadap dwifungsi ABRI itu sebenarnya bersumber dari adanya konsensus nasional yang dibuat oleh para anggota DPR/MPR yang jelas-jelas tidak representatif dan tidak aspiratif. Berdasarkan pandangan itu, mereka tetap menganggap bahwa dwifungsi bukanlah kehendak rakyat melainkan kehendak elite penguasa.

Asumsi rakyat meminta ABRI itu akhirnya dwifungsi ABRI itu menjadi konsensus nasional yang disepakati di tingkatan DPR/MPR. Tapi kita kan harus melihat bahwa DPR/MPR waktu itu kan sangat tidak aspiratif/representatif kalau dikatakan mereka adalah perwakilan dari rakyat. Saya menilai bahwa adanya dwifungsi itu bukan kehendak rakyat. (AU/W)

Ini bukan atas kehendak rakyat, tapi atas kehendak kekuasaan. (AP/W)

ASPR melihat adanya usaha ABRI dan Orde Baru agar rakyat meminta ABRI terlibat dalam urusan sosial politik. Usaha tersebut dilakukan ABRI dengan membesar-besarkan sesuatu yang diklaim sebagai ancaman. Selain itu, ABRI sendiri sering membuat kerusuhan sebagai upaya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ancaman kerusuhan itu memang ada. Jika kerusuhan benar-benar terjadi, tidak ada kekuatan lain yang diharapkan dapat mengatasinya kecuali ABRI karena hanya ABRI-lah yang memiliki senjata. Berdasarkan keyakinan seperti itu, ASPR menilai bahwa permintaan rakyat terhadap dwifungsi ABRI bukanlah permintaan yang tulus, melainkan permintaan yang dipaksakan oleh ABRI sendiri.

Yang terjadi sebenarnya rakyat dipaksa-paksa minta, gitu kan guyonan aja. Yang maksa minta juga ABRI sendiri. Begini ABRI kan ngomong rakyat yang

minta dan ABRI kan membuat suatu tindakan supaya rakyat minta ya dengan jalan mengancam, membuat kekisruhan. Kan itu bikin-bikinannya ABRI juga. Dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung militer punya andil dalam setiap kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini. (F/W)

Dengan begitu, tampaknya ABRI merupakan satu-satunya kekuatan yang dapat menjaga rasa aman rakyat. Untuk itu, kemudian ABRI membuat daerah operasi militer. Sebenarnya usaha tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan rakyat, melainkan juga berakibat terjadinya kekerasan.

Artinya dia mengatakan kebutuhannya itu kan untuk aman, kemudian dia bikin daerah operasi militer, kan gitu untuk menjawab kebutuhan itu, bikin kekerasan. (F/W)

Adanya paksaan terhadap rakyat untuk meminta ABRI agar berdwifungsi tidak terlepas dari adanya usaha rezim Orde Baru memperlancar program-programnya. Program-program Orde Baru tentu tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh rakyat. Untuk tujuan itu, Orde Baru berusaha membuat rakyat tunduk kepada rezim melalui alatnya yang bernama ABRI.

Ini tujuan rezim pada waktu itu supaya bisa memperlancar programnya dia sehingga menggunakan ABRI ini yang tujuannya bisa membuat rakyat ini tunduk. Artinya ya sebagai penekanan-penekanan. (AP/W)

Usaha-usaha yang dilakukan ABRI seperti di atas memang membuahkan hasil yang gemilang. Banyak rakyat menjadi semakin percaya kepada ABRI. Mereka beranggapan bahwa segala permasalahan akan menjadi beres jika ABRI berada di belakangnya. Memang hal seperti ini diakui oleh ASPR merusak mental rakyat. Dikatakan begitu karena beresnya semua permasalahan yang ditangani ABRI disebabkan oleh adanya ketakutan dari rakyat, bukan karena permasalahan itu terselesaikan.

Karena selama ini pola pikir rakyat dikungkung dalam militer, militer, militer, akhirnya terciptalah di benak rakyat ini kan, di benak orang banyak ini bahwa militerlah yang mampu menyelesaikan persoalan dan setelah itu terjadi dimanfaatkan. (F/W)

Ada mental masyarakat kita yang rusak, mereka merasa kalau dibackingi ABRI semua persoalan akan beres, di balik itu beresnya karena ketakutan, bukan karena permasalahan yang terselesaikan. (G/W)

Salah satu wujud Dwifungsi ABRI adalah pengangkatan militer (ABRI) dalam birokrasi sipil. Bagian berikut memaparkan pandangan-pandangan ASPR terhadap hal tersebut.

Militer dalam Birokrasi Sipil: Menyalahi Aturan

Alasan pokok pengangkatan militer dalam birokrasi sipil adalah perlunya personel yang berkualitas untuk mendukung pembangunan ekonomi. ABRI-lah yang dianggap sangat berperan menciptakan lingkungan kondusif bagi suksesnya pembangunan.

Dalam pandangan ASPR, pengangkatan militer dalam birokrasi sipil jelas tidak sesuai dengan aturan negara demokrasi. ASPR melihat bahwa pengangkatan militer dalam birokrasi sipil itu tujuan utamanya adalah stabilitas politik. Namun, stabilitas yang dicapai Orde Baru ini memerlukan banyak korban jiwa karena stabilitas yang dicapai hanyalah stabilitas semu, dalam arti stabilitas yang dipaksakan.

Menyalahi aturan, jelas. Satu tujuan dengan adanya militerisasi birokrasi kan supaya stabilitas terjaga, tapi dasar pertimbangannya adalah pokoknya stabil, tidak pernah mengetahui konflik yang terjadi ketika mempertahankan stabilitas ini. ABRI itu untuk mempertahankan stabilitas butuh korban jutaan nyawa. Itu harus disadari. Untuk mempertahankan stabilitas, kan ndak bener itu. Stabilitas yang dipaksakan. (B/W)

Orde Baru mengklaim bahwa ABRI dilibatkan dalam birokrasi sipil didasarkan pada anggapan: (1) tidak ada organisasi tunggal yang mempunyai kepemimpinan sekuat dan seefektif organisasi ABRI, (2) ABRI dipandang sebagai satu-satunya kelompok yang secara relatif bebas dari konflik ideologi. Bagian berikut akan memaparkan respons ASPR terhadap hal-hal tersebut.

ABRI Modern karena Sipil Ditekan

Klaim bahwa tidak ada organisasi tunggal yang mempunyai kepemimpinan sekuat ABRI mengisyaratkan bahwa organisasi ABRI merupakan organisasi paling modern. Menanggapi klaim tersebut, ASPR menilai bahwa tidak benar kalau ABRI dikatakan organisasi yang paling modern. Sebuah organisasi dikatakan modern jika organisasi itu dapat menghasilkan output yang lebih baik. ABRI sendiri tidak pernah menghasilkan output yang lebih baik bahkan lebih terpuruk.

Kalau saya menilai bahwa organisasi paling modern saat ini ya ndak. Ternyata ABRI ya ndak modern. Yang dikatakan organisasi yang modern adalah organisasi yang menghasilkan output yang lebih baik. Ternyata ABRI sampai sekarang tidak pernah menghasilkan output yang lebih baik. Ndak ada kalau saya melihat output ABRI yang lebih baik, malah lebih terpuruk. (AU/W)

Adanya pandangan bahwa ABRI merupakan organisasi paling modern itu karena sampai saat ini belum pernah ada kesempatan bagi sipil untuk memimpin bangsa ini. Sifat modern itu muncul hanya karena belum ada organisasi lain, organisasi sipil, yang menjadi bandingannya. Hal itu terjadi karena sipil memang tidak diberi kesempatan oleh ABRI. Akhirnya, yang tampak hanyalah ABRI.

Kalaupun ABRI dikatakan organisasi paling modern karena memang tidak pernah ada salah satu kesempatan bagi suatu organisasi dalam hal ini organisasi rakyat atau organisasi kepartaian yang bisa diberi ruang gerak yang lebih bebas dalam masa-masa kemarin sehingga permikiran bahwa

ABRI merupakan organisasi yang paling modern itu yang muncul selama ini karena memang tidak pernah ada kesempatan bagi sipil. (AU/W)

ASPR mengakui bahwa kaderisasi dalam tubuh ABRI memang sangat sistematis. Hanya saja kaderisasi itu tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan karena kaderisasi dalam tubuh ABRI itu tidak ditujukan pada kemampuan personel dalam memimpin bangsa, melainkan hanya ditujukan untuk karier mereka. Jadi, kaderisasi dalam tubuh ABRI tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa ABRI merupakan organisasi yang memiliki nilai lebih daripada organisasi sipil yang lain. Apalagi organisasi ABRI hanya menonjolkan adanya satu pendapat dan tidak mengakui adanya perbedaan pendapat, artinya ABRI menolak adanya pertarungan wacana yang dianggapnya sebagai sumber instabilitas. Untuk mencegah terjadinya instabilitas itulah, ABRI selalu menyodorkan senjatanya kepada siapa pun yang dianggapnya sebagai musuh. Dengan demikian, yang ada dalam tubuh ABRI hanyalah bahasa perang dan kaderisasi yang ada di dalamnya hanya kaderisasi dalam hal yang berhubungan dengan karier mereka, bukan kaderisasi dalam hal memimpin bangsa.

Kalau kaderisasi di bidang mereka ya. Saya salut sama ABRI. Kaderisasinya sangat sistematis, berurutan sekali. Tapi kan bukan kaderisasi untuk memimpin. Kaderisasinya kan bukan kaderisasi untuk memimpin bangsa. Kalau kaderisasi untuk karier di jabatan mereka ya, terstruktur sekali, dari tamtama, bintara, perwira. Pangkat ini jabatannya ini ya dan mereka dididik sesuai dengan step-steptnya, untuk tentara lho, untuk bidang mereka. Tapi untuk memimpin negara kan ndak, harus ada pertarungan wacana, sing keliru yo kudu nyingkir. Ndak usah nggunaake senjata, harus mengakui bahwa ini yang benar. Itu kan yang ndak ada. Bahasa mereka kan bahasa perang. Siapa pun yang di hadapan mereka kan selalu dianggap musuh. Itu bukan kaderisasi itu. (B/W)

ASPR menilai bahwa banyaknya personel ABRI yang duduk di birokrasi sipil bukan karena hanya ABRI yang mampu memimpin bangsa ini, tetapi itu hanyalah

keinginan ABRI untuk tetap menguasai negara ini. Untuk mewujudkan keinginan itulah, ABRI selalu menekan rakyat. Sebenarnya rakyat juga ingin melawan. Akan tetapi, karena tekanan yang dilakukan ABRI sangat sistematis, ABRI dapat berkuasa secara terus-menerus.

Menurut penilaian ASPR, sebenarnya ABRI tidak mampu memimpin masyarakat sipil dengan alasan bahwa keahlian ABRI bukan memimpin masyarakat sipil. ASPR berpendapat bahwa ABRI hanya mampu memimpin anggota ABRI saja dan tidak mungkin mampu memimpin masyarakat sipil. Hal itu didasarkan pada argumen bahwa struktur masyarakat sipil jauh berbeda dengan struktur organisasi ABRI. Dengan demikian, ilmu yang dimiliki personel ABRI jelas tidak dapat diterapkan dalam memimpin masyarakat sipil. Apalagi sifat kepemimpinan ABRI jelas-jelas menggunakan sistem komando. Dengan sistem ini personel yang pangkatnya lebih rendah tidak mungkin dapat membantah atau menyalahkan personel yang pangkatnya lebih tinggi. Artinya, dengan sistem komando itu segala sesuatu selalu datang dari atas.

Jadi, itu ndak bener karena konsep memimpin mereka kan memaksa. Jadi, harus dipahami bahwa stabilitas yang terjadi kemarin itu bukan karena sebuah kesadaran, tetapi karena sebuah paksaan. Sebenarnya ada keinginan untuk melawan, keinginan untuk memberontak. Keinginan untuk menuntut itu ada, cuma karena persoalan ABRI lebih tersistematis dalam menekan, itu yang menyebabkan dia berkuasa. Kalau ngomong kepemimpinan, jelas sama sekali mereka ndak mampu memimpin. Bagaimana seorang kolonel mampu memimpin daerah kabupaten yang melindungi sekian banyak masyarakat yang sangat heterogen. Kalau dia memimpin ABRI ndak persoalan, artinya masih di masyarakat ABRI sendiri karena mereka yang sudah terlatih seperti itu. Tapi kalau mereka terus ditetapkan dalam sebuah struktur masyarakat sipil ini yang tidak berlaku. Jadi, ilmu mereka memang sudah lain dengan ilmunya sipil. Apapun alasannya, apa yang dia miliki itu tidak bisa diterapkan untuk masyarakat sipil. Dengan struktur komando bagaimana bisa mengatakan salah terhadap pimpinannya kalau pimpinannya itu pangkatnya lebih tinggi kan ndak mungkin. Sementara di sipil itu kan ndak berlaku. Sampeyan salah ya harus mengakui salah, kalau di tingkatan militer kan ndak. Kebenaran ada pada senjata. (B/W)

Berdasarkan argumen tersebut, ABRI hanya mampu memerintah kalau pemerintahannya bersifat otoriter. Sebaliknya, jika mengharapkan pemerintahan yang demokratis, ABRI jelas tidak mampu melaksanakannya. Dengan perkataan lain, kepemimpinan ABRI dapat disejajarkan dengan kepemimpinan yang bersifat otoriter.

Tapi kalau ngomong memerintah, jelas pemerintahan itu dasarnya mungkin demokratis ya karena ABRI tidak ada yang demokratis berarti ndak bener. Kalau ngomong sipil ndak mampu memerintah. Lain lagi kalau pemerintahan itu otoriter, ABRI pakarnya. (B/W)

ABRI: Tidak Solid, Ada Faksi-Faksi

Klaim bahwa ABRI merupakan satu-satunya kelompok yang secara relatif bebas dari konflik ideologi mengisyaratkan bahwa ABRI merupakan organisasi paling solid. Menanggapi klaim tersebut, ASPR menilai bahwa ABRI solid karena keinginan mereka untuk tetap berkuasa, bukan karena ideologi mereka. Hal itu terbukti dari adanya kenyataan bahwa mereka hanya bersatu ketika berhadapan dengan sipil dan demokrasi.

Ketika berhadapan dengan sipil dan demokrasi, mereka pasti bersatu karena mereka kan ingin terus berkuasa. Jadi, ABRI itu solid karena dia ingin terus berkuasa, militer ini. Dan yang menyatukan itu bukanlah ideologi mereka sebetulnya, kepentingan untuk tetap berkuasa. Itu aja alasannya. (F/W)

Ternyata ABRI tidak bisa disebut sebagai organisasi yang solid karena di dalam tubuh ABRI banyak terdapat faksi. Adanya faksi-faksi di tubuh organisasi ABRI itu sebagai akibat dari adanya permainan para birokrat ABRI dalam wilayah

sipil. ABRI merah putih dan ABRI hijau, misalnya, terjadi karena masing-masing dari mereka memperebutkan tempat-tempat strategis di wilayah sipil.

Kalau dikatakan solid ya belum bisa, wong banyak faksi di tubuh ABRI sendiri. Karena adanya permainan-permainan para birokrat ABRI dalam wilayah sipil ini yang menyebabkan mereka terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kepentingannya masing-masing. Contohnya, kalau dulu ada ABRI yang disebut merah putih, ABRI hijau yang sama-sama sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan mereka dalam wilayah sipil yang mereka perebutkan. Akhirnya kelompok-kelompok ini membagi diri masing-masing dalam tubuh ABRI sendiri. (AU/W)

Ini juga berarti bahwa ABRI tidak bisa dikatakan bersifat netral karena personel-personelnya juga berusaha memementingkan faksi atau kesatuan masing-masing.

Militer juga seringkali memementingkan kesatuan masing-masing sehingga kalau dikatakan militer itu netral tidak bisa. (G/W)

Tanpa Senjata, ABRI Bukan Perekat Bangsa; Tanpa ABRI, Rakyat Akan Rekat Sendiri

Orde Baru mengklaim bahwa ABRI mampu sebagai perekat bangsa karena ABRI mengikuti tradisi menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok dan karena itu, ABRI dapat menjaga kesatuan bangsa.

ASPR menolak klaim tersebut. Menurut mereka, justru ABRI yang sering memunculkan adanya konflik horizontal di antara rakyat sehingga terjadi instabilitas. Keutuhan dan stabilitas yang diciptakan ABRI selama ini hanyalah keutuhan dan stabilitas semu karena semuanya dipaksakan dengan dukungan senjata. Semua itu merupakan virus yang disebarkan ABRI sehingga menimbulkan konflik di antara rakyat.

Kemarin-kemarin stabil jelas, tapi stabilitasnya dengan todongan senjata. Begitu sekarang ada sebuah peluang, masalah itu muncul, masalah yang kemarin-kemarin dipendam. Konflik horizontal. Jadi, secara tidak langsung perjalanan mereka itu sudah menanamkan virus-virus konflik dengan stabilisator yang memaksa tadi. Nah, sekarang virus-virus itu muncul. ABRI sendiri kan kerjanya memaksa bukan berarti utuh. Utuhnya utuh dipaksakan. Masyarakat harus seperti ini. (B/W)

Bagi ASPR, demokrasi tidak harus menampilkan adanya keutuhan dan kesatuan tanpa mengakui adanya perbedaan dan keberagaman. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa demokrasi mengakui adanya perbedaan. Tidak adanya pengakuan terhadap adanya perbedaan merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama yang jelas-jelas menunjukkan perbedaan ideologi. Kalau perbedaan ini dijadikan satu atau diseragamkan, jelas hal itu tidak akan bisa tercipta.

Kalau gitu ya nggak usah ngomong demokrasi kalau nggak ngakui perbedaan. Artinya ABRI dalam hal ini harus melihat kalau ngomong demokrasi ya berarti harus ada perbedaan-perbedaan dan itu sah dalam demokrasi. Kalau hanya satu ya bukan demokrasi. Artinya itu kita mengakui Pancasila ini untuk rakyat ya sebagai dasar saja, bukan sebagai asas. Wong di sini ada agama Hindu, Islam, dia kan punya ideologi-ideologi tertentu. Nggak bisa kalau dijadikan satu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu yang gimana? Kalau sebagai dasar ya. (AP/W)

Tapi ABRI melihatnya ini kan ini harus dipaksakan untuk menjadi satu. Artinya menjadi satu di bawah komando saya (ABRI). Jadi, ndak bener kalau mereka menggunakan contoh BB. (B/W)

ASPR melihat bahwa isu kesatuan dan keutuhan bangsa ditonjolkan ABRI hanya untuk menjawab kebutuhan ABRI sendiri. Dengan alasan keutuhan bangsa, ABRI membuat daerah operasi militer yang tidak lepas dari adanya kekerasan.

Artinya dia mengatakan kebutuhannya itu kan untuk aman, kemudian dia bikin daerah operasi militer, kan gitu untuk menjawab kebutuhan itu, bikin kekerasan. Sebetulnya kan kalau mau jadi satu ya harus adil sih. (F/W)

ASPR percaya betul bahwa bangsa Indonesia ini akan padu dengan sendirinya tanpa campur tangan ABRI dengan syarat sistem yang digunakan adalah sistem desentralisasi. Dengan sistem ini, suku-suku bangsa di Indonesia secara otomatis akan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat terpenuhi dari daerah mereka sendiri. Dengan adanya rasa saling membutuhkan itulah, tercipta kepaduan dan kesatuan di antara mereka.

Kalau kita sudah memakai sistem yang desentralisasi ini ada saling keterikatan kebutuhan. Di sini yang akan menghalang persatuan itu. Artinya Kalimantan itu tidak punya beras, Jawa punya beras bisa berhubungan langsung. Sebaliknya apa yang dimiliki Kalimantan dan tidak dimiliki Jawa. Ini akan menimbulkan perekat tersendiri. Nggak mungkin akan terjadi perpecahan nantinya. (AP/W)

Bukan Nasionalis, Melainkan Fasis

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ABRI mengklaim sebagai satu-satunya organisasi yang bebas dari konflik ideologi. ABRI mengklaim dirinya mampu bertindak sebagai perekat bangsa karena selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok. Dengan perkataan lain, ABRI mengklaim dirinya sebagai organisasi yang paling nasionalis.

Menanggapi hal tersebut, ASPR menganggap bahwa sebenarnya ABRI itu tidak nasionalis. Selama ini nasionalisnya ABRI itu hanya dilihat dari kemampuan ABRI dalam menjaga keutuhan bangsa. Padahal keutuhan bangsa itu tercipta bukan karena kemampuan ABRI memimpin bangsa ini, melainkan karena senjata yang disandangnya.

Kalau dikatakan bersifat nasionalis sih ndak. Kalau nasionalis itu diartikan mampu menjaga keutuhan bangsa ya. Mampu aja wong ABRI selalu menggunakan senjatanya. Kalau orang mengkritik dia selalu nodongkan

senjata. Berarti panglimanya sudah di atas nasionalis. Jadi, istilah-istilah itu tidak benar. (B/W)

Dalam pandangan ASPR, kelompok yang paling nasionalis adalah kelompok yang berpikir tentang kebangsaan dan kebangsaan itu sendiri tidak berarti harus menjadi satu sebagaimana yang ada sampai saat ini yang dipelopori oleh ABRI. Bahkan ASPR menilai bahwa usaha untuk membuat jadi satu dengan cara memaksa di bawah todongan senjata tanpa adanya pengakuan terhadap perbedaan dengan tujuan tetap berkuasa seperti bukanlah nasionalis, melainkan fasis.

Yang paling nasionalis ya yang berpikir tentang kebangsaan itu, bukan mesti harus menjadi satu. Kalau ABRI kan mikirnya harus begini, harus satu. Itu bukan nasionalis, tapi fasis namanya. Pokoknya salah tok ABRI di Indonesia itu. (B/W)

Ideologinya militer kan fasis itu kalau untuk berkuasa. (F/W)

Jelas saja menang mereka punya senjatanya, punya perangnya kok. Siapa yang tidak akan mau kalau sudah ditodong senjata. Itu, ideologi tunggalnya ABRI kan di situ. (B/W)

Sumber Instabilitas: ABRI, Bukan Sipil

Orde Baru menilai kepemimpinan sipil sebagai penyebab instabilitas politik dan malapetaka ekonomi di Indonesia. Kepemimpinan sipil khususnya kepemimpinan partai politik dinilai telah gagal mempertahankan persatuan bangsa karena perbedaan ideologis mereka.

Terhadap pandangan seperti itu, ASPR menilai bahwa klaim seperti itu dibuat agar ABRI bisa berkuasa terus-menerus. Klaim itu untuk menutup-nutupi ketidakmampuannya dalam memerintah. Walaupun sipil masih dianggap belum

mampu memerintah bangsa ini, yang diperlukan adalah koalisi sipil yang demokratis, bukan ABRI.

Itu pandangan mereka, pandangan militer. Mereka maunya mereka terus kan yang memerintah. ABRI malah nggak mampu dan kita butuh koalisi sipil yang demokratik begitu. (F/W)

Pandangan seperti itu muncul karena sampai sekarang sipil tidak pernah diberi kesempatan memimpin bangsa ini. Padahal sebenarnya sipil mampu memimpin karena banyak di antara mereka yang memiliki pendidikan dan intelektualitas yang sangat memadai. Dengan demikian, sipil lemah karena memang ada usaha-usaha untuk melemahkannya. Usaha itu di antaranya adalah tidak pernah diberikannya kesempatan kepada sipil untuk memimpin bangsa ini.

Karena ya rakyat memang dilemahkan. Tapi kalau rakyat kuat, saya rasa ya bisa itu untuk memimpin. Juga apa yang mendukung baik itu pendidikan maupun intelektualitasnya. Persoalannya kan hanya intelektualitas dan kesempatan. Kalau intelektualnya banyak rakyat yang intelektual. Cuma kesempatan nggak ada. Karena memang tidak diberi kesempatan. (AP/W)

ASPR menilai bahwa adanya pertentangan ideologi di antara kelompok sipil selama tidak menimbulkan kericuhan dan kerusuhan merupakan hal yang positif bagi pelaksanaan demokrasi. Perbedaan pendapat bahkan konflik yang terjadi di antara rakyat dipandang sebagai sebuah proses pembelajaran demokrasi selama konflik itu tidak menimbulkan korban di pihak rakyat. Keadaan seperti itu diyakini tidak menjadi sumber terjadinya instabilitas.

Dan kita tidak perlu susah-susah menghitung, gimana kalau yang sipil kan kemudian eker-ekeran. Eker-ekeran kalau dalam kerangka demokrasi mulai dari persinggungan, gesekan sampai perbenturan masih dalam ritme demokrasi asal ndak rusuh, ndak ricuh dan mekanisme ini berjalan dengan baik kan ndak masalah. (F/W)

Ndak persoalan kalau terjadi konflik di tingkat masyarakat, tapi konflik itu proses dari sebuah pembelajaran demokrasi. Tidak mengharuskan ada korban. (B/W)

ASPR menilai justru ABRI yang menciptakan instabilitas. Terjadinya instabilitas itu lebih banyak disebabkan oleh adanya campur tangan ABRI dalam persoalan-persoalan sipil dengan dalih menyelesaikan konflik di antara mereka. Padahal usaha itu hanyalah menjadikan konflik semakin membesar. Hal itu terjadi karena ABRI yang pola kerjanya mengancam dan memaksa selalu menimbulkan korban di pihak rakyat dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dalam setiap menyelesaikan persoalan, ABRI selalu mengangkat senjatanya. Kalau sudah senjata yang berbicara, rakyat tidak mungkin bisa berbicara. Karena itu, persoalan-persoalan yang ditangani ABRI tidak pernah terselesaikan bahkan akan menimbulkan persoalan lain.

Dan ABRI terus mau campur tangan itu persoalannya. Kenapa sih kok harus selalu mau campur tangan? Terbukti mereka ndak mampu. 32 tahun itu militer pegang negara ini dan negara ini sudah hancur terus karena militer. Kenapa mereka maksa masih ingin ikut-ikutan berkuasa? (F/W)

Cobalah ABRI diam ndak akan terjadi konflik-konflik itu. Karena ABRI bergerak, konflik semakin rutin terjadi karena ABRI bergerak. Bergeraknya ingin berkuasa soalnya, bukan sebagai fungsinya sebagai alat pertahanan. Tapi alat stabilisator yang memaksa, artinya stabilitas itu dipaksakan dengan senjata, bukan dengan kesadaran. Jelas saja menang mereka punya senjatanya, punya perangkanya kok. Siapa yang ndak akan manut kalau sudah ditodong senjata. Dengan mereka mengangkat senjata persoalan akan selesai. Tapi selesainya akan meninggalkan persoalan lagi. ABRI sendiri itu pola hidupnya mengancam. Mengancam dan memaksa pola kerjanya. (B/W)

Dengan demikian, ASPR menganggap ABRI sebagai perusak tatanan kehidupan bernegara selama ini. ABRI yang terjun ke masalah-masalah sosial politik menjadi sumber utama rusaknya bangsa ini. Itu terjadi karena ABRI selalu

menggunakan bahasa senjata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sipil. Dengan senjatanya, ABRI bertindak represif. Karena tindakan yang represif itulah, stabilitas yang sesungguhnya tidak pernah terwujud. Sebaliknya, yang timbul justru instabilitas karena ABRI sendiri merongrong stabilitas nasional.

Kalau di Indonesia karena memang yang merusak ABRI kok. Selama ini yang merusak itu dia. Yang merusak tatanan itu ABRI sehingga kalau sekarang ada tuntutan untuk memperbaiki ya sah. Berhubung yang terjadi sekarang itu karena kesalahan-kesalahan ABRI, maka tuntutan ABRI harus bertanggung jawab itu sah karena sampai hari ini pun ABRI masih bergehut tidak hanya di bidangnya, di politik, di ekonomi. Yang jelas kita ketahui ketika dia terjun di politik, ketika dia terjun di ekonomi, yang mereka gunakan bahasa senjata. (B/W)

Cuman ternyata stabilitas nasional tidak bisa dijaga oleh ABRI karena ternyata dari kasus-kasus yang terjadi stabilitas nasional ini malah digerogoti sendiri oleh perilaku ABRI dalam penanganan-penanganan kasus-kasus kemasyarakatan, juga menimbulkan instabilitas. (AU/W)

Fungsi stabilisator dan dinamisator hanyalah merupakan perwujudan dari usaha pemihakan terhadap penguasa. Pemihakan itu sangat terlihat dari segala usaha yang dilakukan ABRI untuk menyukseskan program pembangunan yang menjadi program utama penguasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa fungsi stabilisator dan dinamisator merupakan usaha menekan rakyat agar tidak menjadi penghambat lajunya pembangunan yang diprogramkan penguasa.

Sementara ini dia pada persoalan yang memihak pada kekuasaan itu tadi. Katakanlah di sini ada pembangunan. Ini adalah program dari pemerintah. Tapi kan ada aturan-aturan bahwa harus dibicarakan dengan masyarakat. Dengan adanya dwifungsi ABRI ini, ABRI boleh masuk yang tujuannya menekan rakyat. Kemajuan dengan alasan demi pembangunan ini tadi. Saya rasa dwifungsi ya itu supaya dia bisa menekan rakyat. Masuknya ya lewat itu demi pembangunan, dinamisator, stabilisator, dsb. Yang jelas kita menolak. (AP/W)

Tidak Ada Tempat di DPR bagi ABRI

Orde Baru mengklaim bahwa kehadiran ABRI di lembaga perwakilan bersifat keharusan supaya dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka mengamankan negara ini.

Dalam menanggapi hal di atas, ASPR menolak keras pengangkatan ABRI di lembaga DPR dengan alasan bahwa lembaga DPR merupakan tempat wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Terhadap keberadaan seorang anggota legislatif karena dia sebagai anggota ABRI yang diangkat pemerintah tanpa proses pemilihan umum yang dipilih rakyat seperti itu, ASPR dengan keras menolaknya.

..., tapi kalau sudah ngomong di legislatif sebagai kebijakan politis sudah ndak bisa. Jadi, tidak ada tempat di DPR bagi ABRI. (B/W)

ABRI tidak boleh berada di DPR maupun MPR. Anggota DPR kan anggota yang dipilih rakyat, ABRI saja tidak boleh memilih kok. (G/W)

Terhadap pengangkatan ABRI di lembaga MPR sebagai utusan golongan, ada sebagian kecil subjek yang dengan keras menolaknya. Penolakan itu berdasarkan penilaian bahwa ABRI tidak termasuk dalam golongan tertentu, melainkan termasuk aparat pemerintah yang harus diatur oleh MPR.

ABRI tidak boleh berada di DPR maupun MPR. Anggota DPR kan anggota yang dipilih rakyat, ABRI saja tidak boleh memilih kok. Kalau di MPR dikatakan mewakili golongan itu golongan yang mana, ABRI itu bukan golongan kok, mereka masuk pemerintah yang seharusnya diatur oleh MPR. (G/W)

Memang ada perbedaan penafsiran di antara subjek terhadap istilah 'golongan' yang ada dalam lembaga MPR. Perbedaan penafsiran itu tentu berpengaruh pada penerimaan dan penolakan mereka terhadap pengangkatan

ABRI di lembaga MPR. Sebagian besar subjek memang menerima pengangkatan ABRI di MPR dengan alasan mengesahkan golongan itu. Akan tetapi, mereka berpandangan bahwa lebih baik jika tidak ada pengangkatan di MPR atas nama golongan.

MPR masih bisalah ditoleransi sebagai perwakilan golongan. (B/W)

Bolehlah dia di MPR, mewakili satu suara golongan ABRI. Kalau di DPR dia mewakili siapa terus. Kalau diangkat kan di MPR saja. Utusan golongan ABRI kan gitu. Kalau MPR bolehlah ada pengangkatan dari golongan dengan alasan kita mengesahkan golongan itu. Kalau tidak ada yang diangkat sama sekali itu lebih baik. (F/W)

Jadi, ASPR dengan tegas menolak pengangkatan ABRI di DPR. Meskipun begitu, anggota ABRI diberi hak untuk ikut terlibat di DPR dengan syarat ia harus melepas baju kemiliterannya. Ia harus keluar dari ABRI, masuk partai, dan mengikuti pemilu sebagaimana proses yang ditempuh sipil. Ia harus berbaur dengan rakyat dan menggeluti persoalan-persoalan mereka supaya bisa menangkap dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Kalau mau duduk di DPR harus melepaskan baju ABRI-nya. Silakan berbaur dengan masyarakat sipil! Silakan menggeluti persoalan-persoalan masyarakat sipil yang jauh dari senjata. Tahu persis persoalan di tingkatan masyarakat sipil. Tidak ada lagi kaitannya dia dengan ABRI. Dia harus mengikuti aturan yang ada, harus melalui pemilu. Artinya, orang-orang ABRI yang ingin duduk di legislatif ya keluar dari ABRI, masuk partai, berbaur dengan masyarakat sipil sehingga nanti tahu apa yang harus diperjuangkan. (B/W)

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa di antara argumen yang dikemukakan Orde Baru dalam hal pengangkatan ABRI di parlemen adalah ABRI berfungsi sebagai stabilisator/dinamisator dan sebagai perwujudan dari

manunggalnya ABRI dengan rakyat. Paparan berikut menyajikan respons ASPR terhadap argumen Orde Baru berkaitan dengan hal-hal tersebut.

ABRI Berlagak Jagoan

Dalam merespons klaim bahwa ABRI berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator di DPR, ASPR memperlihatkan penolakan terhadap argumen tersebut. Menurut ASPR, dalam melaksanakan fungsi stabilisator, ABRI tidak harus duduk di DPR karena fungsi stabilisator ABRI itu berkaitan dengan pertahanan negara dari gangguan luar negeri. ABRI juga tidak mungkin melaksanakan fungsi dinamisator karena budaya mereka yang memberlakukan sistem komando jelas-jelas tidak dinamis.

ABRI tidak bisa dikatakan sebagai stabilisator dan dinamisator dengan duduk di DPR/MPR. Dia tugasnya sebagai stabilisator dalam melindungi negara dari gangguan luar negeri. Dinamisator juga tidak mungkin karena mereka mempunyai budaya yang sama sekali tidak demokratis, di sana yang berlaku komando. (G/W)

Ndak pernah ABRI itu membuat dinamika. Ndak pernah dinamis ABRI itu, statis terus. Saptamarga kok, perintah atasan, mana bisa dinamis, omong kosong itu. (F/W)

ASPR berpandangan bahwa dalam tubuh lembaga legislatif tidak diperlukan adanya stabilisator dan dinamisator sebagaimana yang dijadikan dasar untuk mengabsahkan keberadaan ABRI di lembaga tersebut melalui cara pengangkatan. Alasan ABRI sebagai stabilisator di lembaga DPR itu sebenarnya merupakan upaya untuk mengistimewakan kelompoknya sendiri. Seakan-akan hanyalah kesatuan ABRI yang dapat menyelesaikan segala persoalan, berlagak jagoan. ASPR menilai bahwa selesainya persoalan di tangan ABRI bukan karena tuntasnya persoalan yang sesungguhnya, melainkan tuntas yang dipaksakan, artinya tuntasnya persoalan itu

karena todongan senjata. Cara seperti itu jelas akan menimbulkan persoalan baru. ASPR berpandangan bahwa kalau dalam setiap usaha menyelesaikan persoalan harus memakai senjata, siapa pun bisa melakukannya dan tidak harus ABRI yang melakukannya.

Ya kayak apa sih. Lembaga legislatif itu ndak butuh stabilisator dan dinamisator. Mereka sendiri harusnya sudah stabilisator masyarakat, bukan ABRI macak jagoan di tingkatan legislatif mau jadi stabilisator. Yang selalu dikedepankan ABRI itu kan kalau ada saya beres. Lha beresnya pakai senjata. Ndak ABRI pun bisa. Preman-preman itu pun bisa berlaku seperti itu kalau memang diberlakukan hukum senjata. Kita pun bisa. Tapi aturannya kan tidak seperti itu. Demokrasi dipahami di pucuk bayonet, repot. Selalu bisa dan selalu menang, ABRI itu. Kalau pemahamannya seperti itu bahwa saya nanti yang akan menjadi penengah, ya penengahnya pakai senjata, bukan *balance* sama-sama menguntungkan. (B/W)

Dalam menanggapi fungsi ABRI sebagai dinamisator terutama berkaitan dengan pemecahan segala persoalan yang tidak teratasi oleh perwakilan parpol, ASPR menilai bahwa ABRI sesungguhnya tidak mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan hal-hal di luar bidang keamanan. Dalam soal ekonomi atau politik, misalnya, ABRI jelas tidak mampu. Hal seperti itulah yang menjadi sumber kesombongan ABRI. Segala persoalan harus dimintakan pemecahannya kepada ABRI, padahal ABRI sendiri sesungguhnya tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.

Tapi kalau persoalan ekonomi terus moro-moro lari nang ABRI, ABRI iku isok ngopo. Kalau persoalan ekonomi, persoalan politik, bisa apa. Kalau persoalan keamanan ya memang dengan kesadaran penuh dia harus bertanggung jawab tanpa perlu kita lari ke sana. Yang menjadikan ABRI sombong kan itu. Semua dipikir nanti kan saya. (B/W)

Dalam merespons pandangan yang mengatakan jika ABRI tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di DPR dan mereka tidak puas terhadap hasil keputusan itu, mereka dikhawatirkan akan melakukan kudeta, ASPR

menilai bahwa jika ABRI melakukan hal yang demikian itu berarti ABRI harus berbenturan dengan rakyat. Ini berarti pula bahwa dia bukan alat pertahanan dan pengamanan lagi, melainkan sudah berfungsi sebagai pembuat kerusuhan dan kerusakan. Memang dwifungsi semacam itu juga berjalan selama ini. Pada satu sisi dia bertugas mengamankan, sedangkan pada sisi lain dia membuat kerusuhan.

Kalau dia ngotot untuk kudeta, tinggal rakyatnya berani atau ndak. Kalau berani kan benturan akhirnya, artinya sudah bukan lagi menjadi badan pertahanan, sudah menjadi bahan perusak itu sudah. Jadi, kalau menjalankan dwifungsi ya salah satu sisi mengamankan fungsi pertama, sisi lain membuat kerusuhan. Itu dwifungsi yang berjalan selama ini kan. (F/W)

ABRI dan Rakyat: Bukannya Manunggal, Melainkan Lawan

Orde Baru berpandangan bahwa duduknya ABRI di DPR itu sebagai wujud kemanunggalan ABRI dan rakyat sehingga ABRI bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Menanggapi hal tersebut, ASPR menunjukkan kenyataan yang terjadi. Dalam kenyataan jelas terlihat bahwa rakyat selalu berhadap-hadapan atau berlawanan dengan ABRI. ABRI yang lahir dari rakyat memang seharusnya melindungi dan membela rakyat. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa ABRI selalu berpihak pada penguasa. Bahkan kalau ada persoalan antara rakyat dengan pengusaha, misalnya, ABRI pun selalu membela pengusaha dalam menekan rakyat. Berdasarkan kenyataan tersebut, ASPR menilai bahwa ungkapan "manunggaling ABRI dengan rakyat" tidaklah benar.

Realita yang terjadi, rakyat itu selalu berhadap-hadapan dengan ABRI. Kepentingannya itu berbeda. Kepentingan ABRI dengan kepentingan rakyat itu sudah berbeda. Jadi, ndak bener kalau dikatakan bahwa manunggaling ABRI karo rakyat. ABRI sendiri kan sebenarnya dilahirkan untuk kepentingan melindungi rakyat, tapi kenyataannya di perjalanannya kan selalu berhadap-hadapan dengan rakyat. Satu contoh, kasus tanah katakanlah. Ada sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh perusahaan.

Terjadi dialog antara perusahaan dengan sekelompok orang tadi. Nggak ada yang namanya ABRI itu akan melindungi rakyat untuk berhadapan dengan pengusaha, nggak. ABRI akan melindungi pengusaha untuk berhadapan dengan rakyat. Itu sudah jamak lazim itu. Tuhan saja dihadapi kok. Muhammad saja dihadapi sama Soeharto. (B/W)

Seharusnya ABRI tidak hanya manunggal dengan rakyat melainkan harus patuh kepada rakyat karena ABRI terlahir dari rakyat. Jika diibaratkan suatu keluarga, ABRI adalah seorang anak, sedangkan rakyat menjadi ibunya. Karena itu, kalau ABRI sudah berani kepada rakyat bahkan menekan rakyat, dapat diibaratkan sebagai anak yang durhaka kepada ibunya.

Pertama memang ABRI lahir dari rakyat yang fungsinya untuk melindungi rakyat. Tapi dalam proses perjalanannya akhirnya kan berbeda, yang harusnya berfungsi seperti itu. Tapi selalu memposisikan diri berhadapan dengan rakyat. Sama ibu kandungnya saja berani ABRI itu, apalagi sama pembantunya. Ibu kandung, kalau ngomong rakyat kan ibu kandung. Bukan manunggal, dan memang harus patuh sama rakyat, ABRI itu. (B/W)

Pembicaraan tentang dwifungsi ABRI dan demokrasi pada masa Orde Baru tidak bisa dilupakan dari pembicaraan tentang hubungan ABRI dengan Golkar. Keduanya menjadi pilar negara itu yang dianggap sebagai penyokong utama tindakan otoriter penguasa. Karena itu, di bawah ini perlu dipaparkan juga mengenai isu tersebut.

ABRI dan Golkar: Pilar-Pilar Negara Komunis

ABRI memang menjadi sponsor dan bidan kelahiran Golkar sehingga ABRI selalu memberi dukungan penuh dan memihak kepada Golkar. Hal itu dilakukan ABRI dengan pertimbangan perlu adanya kekuatan politik yang dominan dengan tujuan terciptanya situasi politik yang stabil dan kuat.

Menanggapi hal tersebut, ASPR menilai bahwa kalau ABRI mendirikan Golkar berarti itu sudah menyalahi aturan. Adanya partai besar dan partai kecil sebenarnya sesuatu yang berada di luar pemikiran ABRI. Kalau ABRI ikut-ikutan memikirkan partai berarti ia sudah keluar jalur dan di luar wewenangnya. Karena terlahir dari rakyat, ABRI harus melindungi segenap rakyat, ABRI seharusnya tidak boleh berpolitik dan harus netral. Kalau ABRI sudah melindungi satu golongan, Golkar, yang merupakan golongan penguasa berarti ABRI mendukung penguasa dan tidak mendukung atau melindungi rakyat.

Pada awalnya kan sudah keliru ketika ABRI berpolitik. Ngomong Golkar kan ngomong politik. ABRI ndak boleh berpihak. ABRI ndak boleh berpihak pada golongan-golongan tertentu. Kalau ABRI ngomong di Golkar berarti ABRI miliknya Golkar doang. Ini jadi persoalan. ABRI harusnya ndak punya pikiran bahwa harus ada partai yang besar atau partai yang kecil. Itu sudah di luar pemikiran ABRI. Kalau ABRI ngomong tentang itu berarti dia sudah melampaui wewenangnya. Karena ABRI itu dilahirkan dari rakyat, ya harus melindungi segenap rakyat ini, tidak boleh satu golongan. Yang kemarin itu kan satu golongan, golongan Golkar yang notabene golongan penguasa. (B/W)

Usaha untuk membesarkan Golkar hanyalah merupakan usaha penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Penguasa berusaha menguasai segala hal, termasuk partai politik, yang sangat berpengaruh terhadap kekuasaan. Partai politik Orde Baru, Golkar, jelas mendukung kelanggengan kekuasaan itu.

Hubungannya dengan ABRI ya jelas untuk mendukung kekuasaan. Itu tujuan utamanya ya mendukung kekuasaan hubungan ABRI dengan Golkar. (AP/W)

Bahkan ASPR melihat bahwa tidak hanya Golkar yang mendukung penguasa, tetapi ketiga partai yang ada pada masa Orde Baru semuanya milik penguasa.

Bukan cuma Golkar, tiga partai politik pada masa Orde Baru itu semuanya partai politiknya Soeharto. (F/W)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah partai politik pada masa Orde baru itu memang tiga, tetapi sebenarnya hanya satu karena mereka semua partai milik penguasa dan bukan partai milik rakyat. Karena memang bukan partainya, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap partai-partai itu. Ini terbukti dari selalu ikut campurnya penguasa dalam segala urusan partai. ASPR memberikan contoh ketua sebuah partai yang tidak bisa ditentukan sendiri oleh anggota partai tersebut. Sewaktu Orde Baru berkuasa, ketua partai haruslah seseorang yang mendapatkan persetujuan dari penguasa. Karena menerapkan sistem partai tunggal seperti itu, ASPR menilai bahwa penguasa Orde Baru telah menerapkan sistem negara komunis.

Ya paham integralistik itu. Dan komunis juga begitu, satu partai politik aja. Kalau saya memandang Orde Baru ini berdiri dengan tiga pilar: militer, birokrasi, dan partai. Partai ini untuk pemasaran ke rakyat. Antara partai yang satu dengan partai yang lain di antara ketiga partai itu semuanya adalah partainya negara, bukan partainya rakyat. Rakyat tidak bisa menentukan apa-apa terhadap partai-partai itu. Ndak Golkar-nya, ndak PTP-nya, ndak PDI-nya kan. Ya seperti itu tadi saya katakan, memilih ketua partai saja tidak disetujui Mendagri saja ndak jadi. Apa ini bisa dikatakan partainya rakyat? Kan nggak bisa. (F/W)

Karena itu, ASPR menilai bahwa Orde Baru tidak lain adalah negara komunis. Pandangan itu diperkuat dengan argumen bahwa Orde Baru dibangun di atas tiga pilar utama: ABRI, birokrasi, dan partai tunggal. Tiga pilar utama negara ini juga yang digunakan dalam negara-negara komunis seperti Korea Utara dan Cina. Bahkan sebenarnya Soeharto, penguasa Orde Baru, sendiri adalah komunis. Hal seperti itu pernah diungkapkan ASPR dalam sebuah diskusi di GMPR Pandegeling.

Soeharto itu membangun pilar-pilar, tiang-tiangnya negara yang sama juga yang dilakukan oleh negara-negara komunis. Apa pilarnya? Tentara, militer itu yang pertama. Yang kedua birokrasi, kemudian partai yang tunggal itu. Sama kan kayak negara komunis. Di sini ABG itu sama dengan negara komunis: militer, birokrasi, dan partai. sama juga di negara Korea Utara, di Cina, sama. Gak ono bedane sak jane Soeharto itu sama komunis. (F/D)

D i s k u s i

Temuan lapangan di atas menunjukkan bahwa Dwifungsi ABRI menjadi sumber tidak adanya demokrasi di Indonesia. Temuan lapangan ini seiring dengan pandangan dunia internasional, khususnya dunia Barat, yang tidak menerima peran politik langsung dari militer dalam suatu sistem politik demokrasi karena pada dasarnya militer sebagai lembaga bukanlah lembaga demokrasi. Ia adalah lembaga, organisasi keras, ketat, hierarkis, sentralistik, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando dan misinya adalah sebagai alat/kekuatan pertahanan untuk menghadapi, mengendalikan, dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan senjata dari pihak-pihak yang mengancam negara, kedaulatan, integritas wilayah, dan nilai-nilai hidup bangsa. Untuk itu, kalau terpaksa, ia menggunakan pula kekuatan senjata atau berperang.¹ Temuan ini juga mempertegas penelitian Sparringa yang menyatakan bahwa dominasi militer dalam politik Indonesia menyebabkan berbagai problem dan rintangan terhadap demokratisasi politik dan pembangunan ekonomi.²

Arief Budiman yang seide dengan temuan di atas menyatakan bahwa persoalan paling besar akan muncul dari doktrin militer. Dalam militer berlaku

¹ Habib, "ABRI...", h. 20.

² Sparringa, "Discourse...", h. 170.

hierarki yang ketat dengan garis komando yang sangat jelas. Perintah itu harus dijalankan dan tidak bisa dibantah. Tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Cara pandangnya hitam atau putih. Militer hidup dari bahaya-bahaya. Tidak mengherankan, ketika mereka di tampuk kekuasaan, hal-hal yang mengancam eksistensi mereka selalu dianggap bahaya, bahkan kritik pun dianggap sebagai bahaya.³

Agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan, Dwifungsi ABRI harus dicabut. ABRI harus kembali ke barak dan hanya berperan dalam bidang pertahanan. Tuntutan ini seiring dengan tuntutan golongan oposisionis, sebagaimana tersebut dalam penelitian Daniel T. Sparringa, yang menyatakan bahwa mereka sering terjebak oleh kepentingan mereka sendiri yaitu kepentingan ekonomi dan politik. Karena itu, tempat yang tepat untuk militer adalah di barak, hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan bukan bagian dari parlemen atau birokrasi pemerintah dalam suatu negara.⁴ Hasil penelitian Siswati juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu untuk mencapai cita-cita demokrasi harus dilakukan pencabutan dwifungsi ABRI sehingga ABRI tidak lagi bisa melakukan intervensi dan pemaksaan.⁵ Tuntutan pencabutan dwifungsi itu juga datang dari para pakar yang lain seperti Sri Bintang Pamungkas yang mengatakan bahwa ABRI adalah sebuah rintangan bagi demokrasi dan dominasi ABRI dalam sistem politik harus dihentikan.⁶ La Ode Ida juga setuju jika fungsi ABRI dikembalikan seperti semula, sebagai hankam dan melepas atribut peran sospolnya. Demokrasi atau reformasi total tidak akan bisa diwujudkan selama peran sospol dwifungsi tidak dihapus.⁷

³ Lihat "Keshlian Militer Bukan Kelola Negara", dalam *Jawa Pos*, 14 Februari 1999, h. 1.

⁴ Sparringa, "Discourse ...", h. 171; lihat pula "Dwifungsi Bukan Mitos Suci Lagi", dalam *117 Post*, Oktober/02/1998, h. 5.

⁵ Siswati, "Partai ...", h. 239—240.

⁶ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 206.

⁷ Lihat "Tak Mungkin ABRI Kembali ke Barak", dalam *Jawa Pos*, 7 Oktober 1998, h. 8.

Dewi Fortuna Anwar menganjurkan agar ABRI meniru model militer Turki. Artinya, ABRI bisa meninggalkan kancan politik di Indonesia dan mempersilakan adanya sistem yang demokratis, tetapi turun tangan andai didapati partai-partai politik bergerak ke arah pelanggaran konstitusi.⁸ Bahkan Daniel S. Lev mengusulkan prioritas pencabutan dwifungsi ABRI untuk menghindari kemandekan perjalanan reformasi. Senjata yang ada di tangan ABRI membuat kondisi kompetisi tidak *fair*.⁹

Meskipun begitu, dalam pandangan Prof. Dr. Balveer Singh, dwifungsi sebenarnya tidak jelek. Munculnya gagasan agar dwifungsi dihapus bersumber dari implementasi dwifungsi yang keblabasan sehingga merusak citra ABRI itu sendiri. Pandangan internasional juga sering negatif karena ABRI kerap dinilai tidak menghormati semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Di dalam negeri pun citra ABRI sangat terpuruk sehingga semakin banyak suara keras yang menghendaki dwifungsi dihapus sama sekali dan ABRI disuruh kembali ke barak. Aspirasi tersebut muncul karena melihat peran ABRI telah sedemikian besar sehingga ABRI sebenarnya tak sanggup memikulnya.¹⁰

Memang pencabutan dwifungsi itu harus disertai adanya kompensasi terhadap tugas berat yang diemban ABRI, yaitu diberikan kesejahteraan yang memadai. Temuan lapangan ini sejalan dengan pendapat Daniel S. Lev yang menyarankan bahwa mundurnya ABRI dari politik harus diimbangi dengan kenaikan status mereka, misalnya gaji harus naik, rumah cukup, dan fasilitas militer harus dicukupi dengan baik.¹¹ Masih berkaitan dengan hal ini, La Ode Ida juga

⁸ Lihat "ABRI 'Diedili' DPR, Diberi Usul Nyeleneli", dalam *Jawa Pos*, 25 November 1998, h. 3.

⁹ Lihat "Lev: Prioritaskan Cabut Dwifungsi", dalam *Jawa Pos*, 30 April 1999, h. 1.

¹⁰ Lihat "Ketika Dwifungsi Dituding Bias Segalanya", dalam *Jawa Pos*, 24 September 1998, h. 3.

¹¹ Lihat "Lev: Berbahaya jika ABRI Berpolitik", dalam *Jawa Pos*, 20 November 1998, h. 1.

menyatakan bahwa pemerintah harus menaikkan gaji dan anggaran militer. Tanpa itu, sulit ABRI bisa profesional dan menghindari KKN.¹²

Meski ada tuntutan pencabutan dwifungsi, ABRI tetap diberi kesempatan terjun ke dunia sosial politik dengan syarat harus melepas baju ABRI-nya. Artinya, ketika memasuki wilayah sipil itu, mereka tidak boleh lagi memberlakukan hukum militer. Temuan ini memperkuat penelitian Sparringa yang menyatakan bahwa pengangkatan personil militer dalam birokrasi sipil sebaiknya mengalami perubahan struktural. Segera sesudah jabatan militer dipilih, mereka seharusnya bertindak sebagaimana figur sipil. Mereka hendaknya tidak pernah bertindak seperti pejabat angkatan terhadap staf mereka. Hubungan struktural antara pejabat militer dan superioritas militer mereka harus diakhiri segera sesudah mereka menduduki posisi sipil ini.¹³

Pengangkatan Militer dalam Birokrasi Sipil

Orde Baru yang mengklaim bahwa hanya organisasi ABRI merupakan organisasi paling modern sehingga personel-personelnya sangat dibutuhkan dalam birokrasi ternyata ditolak. Pandangan seperti itu muncul karena sipil tidak pernah diberi kesempatan untuk memimpin bangsa. Temuan ini juga mendukung penelitian Sparringa yang menyatakan banyak intelektual secara kuat membantah gagasan bahwa figur sipil tidak mampu menjadi pemimpin nasional karena ketidakmampuannya. Dalam pendapat mereka, ketiadaan figur sipil karena ketiadaan kesempatan. Kaum sipil pada dasarnya telah dikesampingkan dari proses pembuatan keputusan baik pada tingkat nasional maupun regional.¹⁴

¹² Lihat "Tak Mungkin ...", h. 8.

¹³ Sparringa, "Discourse ...", h. 187.

¹⁴ Idem, h. 178.

Kaderisasi dalam tubuh ABRI yang dijadikan dasar untuk menilai kemodernan ABRI dianggap tidak mempunyai kaitan dengan kepemimpinan. Temuan lapangan seperti itu sejalan dengan pendapat Arief Budiman yang menyatakan bahwa keahlian militer memang bukan mengelola negara karena kurikulum pendidikan militer tidak didesain untuk mengelola negara. Mereka dididik dan dibentuk untuk berperang dengan paradigma membunuh atau dibunuh. Artinya, militer hanya dididik untuk menghancurkan musuh. Karena itu, militer akan menghadapi banyak masalah kalau memimpin negara.¹⁵ Daniel S. Lev juga mendukung pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa bila ada tentara masuk dunia politik, dengan sendirinya akan merusak (politik tersebut). Soalnya, keahlian tentara jelas bukan berpolitik. Keahlian mereka adalah kekerasan. Karena militer tidak mempunyai keahlian di luar kemiliteran, dengan sendirinya bila memasuki gelanggang politik, mereka akan menggunakan keahlian yang dikuasai, yaitu keahlian kekerasan.¹⁶ Karena itu, pola orientasi pendidikan dan pengkaderan ABRI tidak perlu lagi dipakai sebagai alasan utama rekrutmen pemimpin bangsa yang bersifat eksklusif, tetapi berfungsi sebagai lembaga pendidikan profesionalisme militer.¹⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ABRI hanya mampu memerintah kalau pemerintahannya bersifat otoriter karena kepemimpinan ABRI bersifat otoriter. Struktur hierarki yang sangat ketat yang berkaitan dengan disiplin yang sangat keras dalam kehidupan militer akan menimbulkan sifat mengutamakan tertib politik. Sikap seperti ini cenderung tidak menyukai adanya hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban politik antara lain

¹⁵ Lihat "Keahlian Militer ...", h. 1.

¹⁶ Lihat "Lev: Berbahaya ...", h. 1.

¹⁷ Matori Abdul Jalil, "Format Politik ABRI di Masa Depan", dalam *Jawa Pos*, 27 November 1998, h. 4.

pencetusan aspirasi dan tuntutan-tuntutan. Sikap tersebut juga menjurus ke gaya pemerintahan yang tertutup dan otoriter. Benarlah apa yang dikatakan Eric A. Nordlinger bahwa suatu pemerintahan otoriter dapat saja dilakukan oleh sipil maupun militer, tetapi jika militer memegang pemerintahan hampir dapat dipastikan bahwa sifat pemerintahannya adalah otoriter.¹⁸

Temuan penelitian beserta berbagai pendapat tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan Sparringa yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mengatasi persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Pendekatan yang berbeda untuk situasi sekarang haruslah menjadi pertimbangan utama. Kepemimpinan militer tidak lagi dipandang sebagai jawaban yang tepat untuk mengatasi persoalan ancaman nasional. Pendekatan keamanan merupakan respons yang dibesar-besarkan terhadap realitas sekarang. Kepemimpinan militer dipandang sebagai konservatif dan menyentuh akar rumput dinamika sosial politik Indonesia.¹⁹

Keberadaan bangsa yang heterogen dijadikan dasar oleh ABRI untuk memotret dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Namun, temuan lapangan menunjukkan sebaliknya. ABRI-lah yang justru sering memunculkan konflik horizontal di antara rakyat sehingga terjadi instabilitas. Isu kesatuan dan keutuhan bangsa ditonjolkan ABRI hanya untuk menjawab kebutuhan ABRI sendiri. Dengan alasan itu, ABRI membuat daerah operasi militer yang tidak lepas dari adanya kekerasan. Temuan ini didukung Aribowo yang mengatakan bahwa kuatnya peran ABRI dalam perpolitikan nasional diwujudkan dalam bentuk struktur hierarkis ABRI-pemerintahan yang merentang

¹⁸ Soebijono, "Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI", dalam Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 131.

¹⁹ Sparringa, "Discourse ...", h. 182—183.

dari pusat (Jakarta) hingga desa (keluarahan-babinsa). Struktur itu diwujudkan untuk mengembangkan doktrin Binter (pembinaan teritorial).²⁰ "Struktur teritorial" seperti ini secara prinsip memastikan adanya kontrol yang hampir total terhadap penduduk oleh ABRI.²¹ Konsensus tentang persatuan dan kesatuan nasional selama ini didefinisikan oleh militer secara sepihak supaya mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan campur tangan.²²

Klaim mengenai adanya pertentangan ideologi di antara kelompok sipil yang oleh Orde Baru dianggap sebagai sumber terjadinya konflik yang membawa kepada instabilitas juga ditolak. Pertentangan ideologi selama tidak menimbulkan kericuhan dan kerusuhan merupakan hal yang positif bagi pelaksanaan demokrasi. Perbedaan pendapat bahkan konflik yang terjadi di antara rakyat merupakan sebuah proses pembelajaran demokrasi. Temuan ini sangat relevan dengan pendapat Alfian yang menilai suasana konflik yang demikian, di samping mengandung kelemahan, juga memperlihatkan wajah yang positif. Melalui polemik-polemik yang rasional dan sehat mereka berhasil melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dalam berbagai bidang: kebudayaan, agama, ekonomi, pendidikan, sosial dan politik. Karena pemikiran-pemikiran mereka itu tersebar, hal itu telah banyak membantu proses peningkatan kecerdasan dan intelektualisme masyarakat.²³

Karena itu, persoalan pokok dari demokrasi bukanlah mematikan konflik, melainkan mencari mekanisme yang tepat agar konflik dapat dikendalikan sehingga tidak merugikan masyarakat. Sistem politik yang mematikan konflik sehingga tidak

²⁰ Aribowo, "Dominasi ABRI, dari Gubernur sampai BUMN", dalam *Jawa Pos*, 28 Desember 1998, h. 2.

²¹ Uhlin, *Oposisi ...*, h. 61.

²² Juwono Sudarsono, "Dilema Demokratisasi Politik di Dunia Ketiga", dalam *Pisma* 6, 1988, h. 69.

²³ Alfian, *Pemikiran ...*, h. 83.

mentoleransi perbedaan pendapat atau kritik hanya ditemukan dalam sistem politik otoriter atau totaliter.²⁴

Justru ABRI yang menciptakan instabilitas di negeri ini. Hal itu terjadi karena adanya campur tangan ABRI dalam persoalan-persoalan sipil dengan dalih menyelesaikan konflik di antara mereka. Padahal usaha itu hanyalah menjadikan konflik semakin membesar bahkan akan menimbulkan persoalan baru. Temuan ini didukung Harold Crouch yang mengatakan bahwa bukan hanya ABRI yang mampu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Kecenderungan ABRI untuk menggunakan pendekatan keamanan justru memperuncing konflik, bukan meredakannya.²⁵

Bahkan temuan ini menunjukkan bahwa ABRI-lah yang menjadi perusak tatanan kehidupan bernegara selama ini. ABRI yang terjun ke masalah-masalah sosial politik menjadi sumber utama rusaknya bangsa ini. Temuan ini relevan dengan pendapat Hasnan Habib yang menyatakan bahwa keterpurukan sistemik negara dan bangsa sekarang ini dianggap sebagai *final product* dwifungsi ABRI. Dwifungsi ternyata lebih banyak menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara ketimbang keuntungan dan kejayaan.²⁶ Sejalan dengan pendapat tersebut, Harold Crouch²⁷ dan Arief Budiman²⁸ juga sependapat bahwa militer terbukti telah memberikan andil penting dalam kegagalan pengelolaan negara di bawah Orde Baru. Yang menjadi pokok masalah dari semuanya itu menurut Harold Crouch adalah campur tangan militer di berbagai hal. Karena itu, partai politik dan organisasi massa yang lain tidak akan dapat berkembang kalau selalu dicampuri

²⁴ Idem, h. 80 & 236.

²⁵ Harold Crouch, "Masalah Dwifungsi ABRI", dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 113.

²⁶ Lihat "Ketika Dwifungsi Dituding Bias Segalanya", dalam *Jawa Pos*, 24 September 1998, h. 3.

²⁷ Lihat "Crouch: Militer Harus Lepas Baju Dulu", dalam *Jawa Pos*, 15 Februari 1999, h. 2.

²⁸ Lihat "Keshlian Militer ...", h. 1.

oleh ABRI. Campur tangan militer dalam masalah sosial politik sangat mungkin karena penyebaran pasukan ABRI di seluruh Indonesia pada praktiknya hanyalah sebagai alat politik.²⁹

Pengangkatan Militer dalam Parlemen

Temuan lapangan juga menolak adanya pengangkatan ABRI di lembaga DPR berdasarkan alasan bahwa lembaga DPR merupakan tempat wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Temuan lapangan ini sejalan dengan pendapat Daniel S. Lev yang mengatakan bahwa semua anggota DPR seharusnya dipilih melalui pemilu. Salah bila ABRI masih ada di DPR.³⁰ Ketua FPP DPR, Zarkasih Nur, juga sependapat dan menyatakan bahwa ABRI sebaiknya keluar dari lembaga perwakilan rakyat. DPR adalah tempat bagi para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Karena ABRI masuk tidak melalui pemilu, ABRI tidak bisa berada di DPR.³¹ Memang seharusnya semua anggota DPR dipilih dan tidak diangkat. Jika ABRI ingin mempunyai anggota-anggotanya di DPR, ia juga harus ikut proses pemilihan. Pengangkatan anggota ABRI sebagai anggota DPR merupakan pemberian hak konstitusi istimewa hanya kepada ABRI yang dengan demikian merupakan diskriminasi politik.³²

Hasnan Habib juga menyatakan bahwa tempat ABRI bukan di DPR, tetapi di MPR. Keberadaan ABRI di parlemen dilatarbelakangi konsensus nasional pada tahun 1969 yang saat itu keadaannya memang darurat. Apabila dalam situasi yang

²⁹ Lihat "Yang Terbaik bagi ABRI, Tak Berbuat Apa-Apa", dalam *Jawa Pos*, 19 November 1998, h. 8.

³⁰ Lihat "Lev: Berbahaya ...", h. 1.

³¹ Lihat "RUU Politik Diperkirakan Rampung Januari", dalam *Jawa Pos*, 9 Oktober 1998, h. 8.

³² Habib, "ABRI ...", h. 47.

telah berubah ini, ABRI masih dipertahankan di DPR, berarti kita memperpanjang masa *emergency* tersebut.³³

Meskipun demikian, anggota ABRI mempunyai hak untuk ikut terlibat di DPR dengan syarat harus melepas baju kemiliterannya. Ia harus keluar dari ABRI, masuk partai, dan mengikuti pemilu sebagaimana proses yang ditempuh sipil. Ia harus berbaur dengan rakyat dan menggeluti persoalan-persoalan rakyat supaya bisa menangkap dan memperjuangkan aspirasi mereka. Temuan ini sejalan dengan pendapat Harold Crouch yang mengatakan bahwa militer tidak mempunyai hak khusus di lembaga perwakilan (legislatif) dan pemerintahan (eksekutif) sesuai dengan definisi murni tentang demokrasi, yaitu "pemerintah harus dipilih oleh rakyat", artinya perwira militer yang bermaksud menjadi pemimpin politik harus ikut dalam pemilihan umum sebagaimana politikus yang lain.³⁴ Kalau memang figur-figur militer ingin ikut pemilihan, mereka sebaiknya mundur dulu dari tentara. Ini harus berlaku dalam semua pemilihan jabatan sipil, seperti bupati, wali kota, dan gubernur untuk menghindari konflik interest.³⁵

Pengangkatan ABRI di DPR dengan alasan sebagai stabilisator dan dinamisator tidak dapat dibenarkan karena fungsi stabilisator ABRI itu berkaitan dengan pertahanan negara dari gangguan luar negeri dan tidak harus duduk di DPR. ABRI juga tidak mungkin melaksanakan fungsi dinamisator karena mereka menggunakan sistem komando yang jelas tidak dinamis. Temuan ini sejalan dengan pendapat Haris yang menyatakan bahwa sulit diharapkan adanya dinamika DPR dengan komposisi fraksi yang amat timpang, Fraksi Golkar yang mayoritas. Ke-75

³³ Lihat "Lev ...", h. 1.

³⁴ Lihat "Crouch: ABRI Lebih Baik Lenger dari DPR", dalam *Jawa Pos*, 31 Oktober 1998, h. 1.

³⁵ Lihat "Crouch: Militer Harus Lepas Baju Dulu," dalam *Jawa Pos*, 15 Februari 1999, h. 1—2.

orang anggota FABRI yang diangkat sudah tentu lebih berorientasi "pengamanan" atas *status quo* daripada mengakomodasi tuntutan perubahan dari masyarakat.³⁶

Alasan ABRI sebagai stabilisator di DPR sebenarnya merupakan upaya untuk mengistimewakan kelompoknya sendiri. Sejalan dengan itu, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa argumentasi ABRI untuk mempertahankan perlunya kursi ABRI di DPR/MPR, yaitu dengan tujuan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta untuk mencegah konflik politik merupakan bagian arogansi ABRI. Pandangan hanya ABRI yang mampu mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta meredam konflik tidak dibenarkan.³⁷

Pengangkatan ABRI di DPR itu sebagai dalih wujud kemanunggalan ABRI dan rakyat juga ditolak. Kenyataan menunjukkan bahwa rakyat selalu berhadapan atau berlawanan dengan ABRI. ABRI yang telah digunakan oleh penguasa untuk menekan rakyat tidak lain hanyalah lawan rakyat. Temuan ini didukung Aribowo yang menyatakan bahwa dalam berbagai kasus perburuhan, pertanahan, dan perumahan sering masyarakat "berhadapan" dengan ABRI. Meskipun awal kasusnya perburuhan murni (masalah PHK), akhirnya berkembang pola konflik antara masyarakat dan ABRI. Karena ABRI merupakan alat represif dari negara dan negara berkewajiban menciptakan *business confidence* bagi sistem kapitalisme, maka masyarakat buruh, tani, dan pencari keadilan selalu berhadapan dengan ABRI.³⁸

³⁶ Hiris, *Menggugat ...*, h. 258.

³⁷ Lihat "ABRI Harus Lepas Status Warga Kelas Satu", dalam *Jawa Pos*, 25 Oktober 1998 h. 8.

³⁸ Aribowo, "Dominasi ABRI ...", h. 2.

ABRI dan Golkar

Usaha ABRI yang mendirikan Golkar dianggap menyalahi aturan karena hal itu berarti ABRI mendukung penguasa dan tidak mendukung atau melindungi rakyat. Usaha tersebut hanyalah merupakan usaha penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Temuan lapangan ini searah dengan pendapat Matori Abdul Djali yang menyatakan bahwa institusi ABRI sebagai lembaga publik yang digaji oleh seluruh rakyat seharusnya tidak berpolitik atau memihak. Bila memihak salah satu kekuatan politik, sama saja ikut bersaing dengan kekuatan politik lain walaupun dilakukan secara tak langsung.³⁹ Karena itu, ABRI tidak boleh lagi mempunyai keterkaitan atau mendukung partai politik mana pun dan harus menghilangkan kekuatan ABG (ABRI, Golkar, dan Birokrasi).⁴⁰

Bahkan Mohtar Mas'ood mengatakan peran sospol ABRI yang dipersiapkan untuk memihak Golkar ternyata sangat rentan sebab Golkar tidak dipersiapkan menjadi partai politik yang menyuarakan kepentingan rakyat dari bawah, namun hanya dimaksudkan untuk menjamin dukungan bagi pemerintah melalui pemilu.⁴¹ Karena itu, menurut mantan Assospol Kassospol ABRI, Suwarno Adiwojoyo, ABRI secara tidak langsung digunakan sebagai alat penguasa untuk melanggengkan penguasa dengan mem-*back up* Golkar.⁴²

Dalam hubungan Golkar-ABRI-parpol, militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar. Dalam banyak hal, kepentingan-kepentingan sipil dan militer di dalam Golkar saling bersesuaian, tetapi ketika kepentingan-kepentingan di dalam Golkar bertentangan dengan militer, kepentingan-

³⁹ Lihat "Dwifungsi ...", h. 4.

⁴⁰ Lihat Jilil, "Format ...", h. 4.

⁴¹ Lihat "Dwifungsi ..." h. 4.

⁴² Lihat "Tak Mungkin ...", h. 8.

kepentingan sipil sering dikorbankan.⁴³ Melihat kenyataan seperti itu, sudah sangat tepat kalau Salim Said menilai bahwa peran sospol ABRI telah menghantarkan ABRI menjadi partai satu-satunya bagi pemerintah. Dalam kedudukan demikian, ABRI sebagai kekuatan politik tidak lagi independen dari pemerintah. Sementara kekuatan pemerintah Orba berangsur dikendalikan seorang Soeharto. Akhirnya, ABRI mau tidak mau hanya mewakili kepentingan politik Soeharto semata.⁴⁴ Memang pola tingkah laku politik Soeharto bersama militer jelas menunjukkan keinginannya untuk membangun sebuah organ politik sipil, Golongan Karya (Golkar), yang kuat yang dapat dipakai sebagai sambungan tangan mereka agar supaya kekuasaan yang mereka miliki dapat dipergunakan secara lebih efektif. Adanya sebuah Golkar yang kuat akan tambah memantapkan posisi dwifungsi di dalam sistem politik, dan pada waktu yang sama tambah memperkuat posisi kekuasaan eksekutif yang dipimpin Soeharto.⁴⁵

.....

⁴³ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 83.

⁴⁴ Lihat "Dwifungsi ..." h. 4.

⁴⁵ Alfian, *Pemikiran ...*, h. 52.

BAB VIII

PERSATUAN NASIONAL: BENTENG KEBIJAKAN TAK BERMORAL

Pada tema persatuan nasional ini, pembicaraan lebih banyak ditekankan pada isu-isu yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Isu-isu yang dimaksud di antaranya adalah ancaman diintegrasikan bangsa (hubungan pusat dan daerah), ancaman SARA, dan ancaman komunis serta Islam radikal. Pada tema ini secara umum ASPR menilai adanya kebijakan rezim yang tidak tepat terutama dalam rangka membina persatuan nasional. Bahkan 'persatuan nasional' sendiri hanya digunakan sebagai pembenaran bagi kebijakan-kebijakan yang dianggap tak bermoral. Berikut ini secara berturut-turut dipaparkan respons ASPR terhadap wacana Orde Baru khususnya berkenaan dengan isu-isu tersebut.

Pusat Tidak Adil, Daerah "Ngamuk"

Pada isu hubungan pusat dan daerah ini muncul tema-tema kecil yang menjadi bagian. Di antaranya yang paling menonjol adalah hubungan Jawa (Jakarta) dengan luar Jawa (luar Jakarta) dan negara kesatuan atau negara federasi. Pada isu ini ASPR menganggap bahwa yang menjadi sumber ancaman terhadap persatuan nasional adalah tidak adanya keadilan pemerintah pusat. Respons ASPR berkaitan dengan isu tersebut dipaparkan sebagai berikut.

Sentralisasi Penyebab Disintegrasi

Orde Baru berpandangan bahwa dalam negara kepulauan seperti Indonesia

terdapat ancaman disintegrasi. Untuk itu, perlu adanya pusat pemerintahan yang kuat yang tak terkalahkan oleh daerah-daerah lain. Berdasarkan pertimbangan itu, pembangunan pada masa Orde Baru lebih dipusatkan di Jawa (khususnya Jakarta) dengan alasan bahwa wilayah tersebut paling padat penduduknya selain alasan historis.

ASPR menolak klaim tersebut. Banyaknya pulau di Indonesia bukanlah merupakan sumber ancaman bagi hubungan pusat dan daerah dalam persatuan nasional. Yang menjadi sumber ancaman bukanlah banyaknya pulau, melainkan tidak adanya keadilan dan pemerataan. Tidak adanya keadilan dan pemerataan itu sebagai akibat dari adanya sentralisasi di segala bidang. Sentralisasi selama Orde baru di antaranya terlihat dari usaha Orde Baru yang menarik semua kekayaan daerah ke Jakarta (Jawa), sedangkan daerah yang menjadi sumber kekayaan alam dibiarkan miskin sehingga terjadi ketimpangan.

Yang mengancam persatuan nasional itu adalah tidak adanya keadilan dan pemerataan. (F/W)

Saya melihat bahwa ini ada ketimpangan di Orde Baru bahwa seharusnya hasil-hasil alam yang ada di suatu pulau atau suatu daerah itu tetap diperuntukkan bagi kesejahteraan atau dikembalikan ke masyarakat yang ada di situ bukan ditarik ke pusat kemudian dibagi oleh pusat. (AU/W)

Dalam bidang politik, sentralisasi terlihat dari adanya keputusan politik baik yang berkaitan dengan kepemimpinan daerah maupun segala kebijakannya yang selalu datang dari pusat (Jakarta), sedangkan suara-suara dari daerah atau dari bawah tidak pernah diperhatikan.

Hubungannya yang jelas dari atas ke bawah, dari pusat lalu ke daerah-daerah. Tapi tidak ada timbal baliknya dari daerah ke pusat. Jadi, hanya satu arah saja. Itu kan sentralisme. (AP/W)

Sentralisasi yang menyebabkan tidak adanya keadilan dan pemerataan inilah yang dianggap sebagai sumber segala permasalahan hubungan pusat dan daerah selama Orde Baru berkuasa. Sentralisasi menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Dampak negatif itu antara lain berupa keinginan dari berbagai daerah di Indonesia untuk memisahkan diri atau merdeka.

... seperti pada masa Orde Baru itu, ya semuanya lari ke Jakarta atau Jawa, ya ngamuk. Mereka memilih mending merdeka dhewe paa. Dan jangan kemudian menyalahkan mereka. Sehingga perlu dilakukan sebuah perbaikan mengarah ke keadilan dan pemerataan itu. (F/W)

Ya karena tidak adanya keadilan, pemerataan sehingga mereka menginginkan berdiri sendiri. Mereka melepaskan diri kan karena tidak adanya keadilan, pemerataan. Artinya kemakmurannya nggak terjamin karena yang makmur hanya wilayah pusat saja dalam hal ini ya Jawa. Itu yang makmur. (AP/W)

ASPR memandang bahwa keadilan dan pemerataan merupakan kunci terjalannya persatuan nasional. Kalau keadilan dan pemerataan dapat diciptakan oleh penguasa, tidak ada persoalan yang berarti dalam hal persatuan nasional meskipun Indonesia ini terdiri atas berbagai pulau. Persatuan akan tercipta dengan sendirinya karena di antara mereka ada perasaan saling membutuhkan. Kalau kebutuhan di antara mereka terpenuhi karena adanya interaksi di antara mereka, secara otomatis akan tercipta persatuan nasional.

Kalau keadilan dan pemerataan itu tercipta, persatuan kan akan lebih mudah. Wong saling membutuhkan kok, orang Jawa butuh sama orang Sulawesi itu, butuh sama orang Irian, saling butuh dan kalau saling memenuhi kebutuhan secara adil dan merata itu kan menjadi indah. (F/W)

Negara Kesatuan atau Federasi Terserah, Yang Penting Keadilan Terwujud

Sebagaimana sudah diuraikan pada bab IV bahwa Orde Baru tidak tertarik kepada negara federasi, tetapi lebih tertarik kepada negara kesatuan dengan otonomi yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal itu, ASPR justru tidak termotivasi untuk menjadikannya sebagai pokok pembicaraan. ASPR tidak mempersoalkan istilah, kesatuan atau federasi. Yang diutamakan adalah bagaimana pengaturan negara ini dalam pelaksanaan teknisnya. Mereka tidak mempersoalkan istilah karena dalam kenyataan terdapat negara kesatuan yang memberikan kekuatan penuh pada daerah, misalnya Prancis. Sebaliknya, ada negara federasi yang tetap sentralistik, misalnya Soviet. Ada juga negara kesatuan yang sentralistik, misalnya Indonesia. Dengan demikian, yang dianggap penting bukan kesatuan atau federasinya, tetapi apa yang harus dilakukan atau diterapkan oleh negara.

Kalau cuman masalah istilah, terserah. (AU/W)

Saya tidak ingin ASPR terjebak dengan isu kesatuan dan federasi. Prinsipnya begini, antara federasi dan negara kesatuan jangan dijadikan sebuah pokok pembicaraan, tetapi apa yang harus ada dalam kondisi negara ini. Taruh contoh Prancis, Prancis negara kesatuan, tapi kekuatan daerah, otonomi daerah demikian kuat. Itu lebih bagus ketimbang pada masa Soviet, negara federasi, tapi tetap sentralistik. Buat apa? Indonesia juga. Katanya negara kesatuan. Kalau Indonesia kemarin negara kesatuan dan sentralistik, ya bukan karena negara kesatuannya saya pikir, tapi karena sentralistiknya. (F/W)

Meskipun tidak mempersoalkan istilah, ASPR lebih condong mengidealkan adanya bentuk negara kesatuan sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri negara pada tahun 1945. Mereka melihat bahwa di Indonesia ini tidak diperlukan adanya bentuk negara federasi dengan alasan bentuk negara tersebut akan mengaburkan cita-cita kebangsaan dari pendiri negara Indonesia.

Saya tetap lebih sepakat tentang negara kebangsaan seperti yang dicita-citakan para founding father pada tahun 1945. Negara kesatuan seperti ketika kita merdeka. Nggak perlu lagi ada model-model federasi atau apa. Saya pikir itu malah lebih mengaburkan cita-cita kebangsaan dan kenegaraan dari pendiri republik ini. Ya seperti yang pernah diomongkan orang pada waktu PPKI itu tentang semangat nasionalisme ya seperti itu. Nggak perlu kita meredefinisikan kembali nasionalismenya dengan membentuk negara federasi atau yang lain. (AU/W)

Selain itu, negara federasi dianggap masih belum disukai oleh rakyat. Hal ini terjadi mungkin karena pemahaman rakyat terhadap negara federasi masih kurang. Banyak di antara rakyat yang memahami negara federasi sebagai negara yang terpecah-pecah dan berdiri sendiri-sendiri. Bertolak dari argumen itulah, ASPR tetap mengidealkan adanya negara kesatuan.

Soalnya kan mungkin alergi dengan kata federasi atau apa, okelah negara kesatuan karena toh kita memang menghendaki itu. (F/W)

Tapi pemahaman rakyat nanti, ya negara federasi dianggap nanti terpecah-pecah kita. Padahal tetap kita dalam satu kesatuan. (AP/W)

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa ASPR menerima negara kesatuan yang sentralistis sebagaimana yang diaplikasikan Orde Baru. ASPR tidak menolak kesatuannya, tetapi menolak sentralistisnya. ASPR berharap agar daerah-daerah diberi kebebasan untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pusat. Dengan kata lain, otonomi yang seluas-luasnya harus diberikan kepada daerah.

Dan saat ini kita lebih memilih otonomi yang seluas-luasnya sebagai suatu istilah. Coba aja otonomi yang seluas-luasnya. (F/W)

Dengan diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, ASPR yakin bahwa keadilan dan pemerataan akan lebih mudah diciptakan. Hal itu

dimungkinkan karena tiap-tiap daerah dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga tercipta kemakmuran di tingkat masyarakat lokal tersebut.

Tapi otonomi itu akan lebih memudahkan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan karena daerah akan mengukur kebutuhannya apa, potensinya apa, bagaimana pemenuhannya kan itu. (F/W)

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah tahu akan potensi daerahnya dan mengembangkan potensi daerahnya untuk kemakmuran masyarakat lokal daerah tersebut. (AU/W)

Wilayah-wilayah ini berdaulat penuh. Untuk perekonomian, pendidikan, ini ya wilayah-wilayah sendiri yang menentukan. Karena wilayah itu paham, daerahnya ini adalah cocok untuk bertani, yang ini cocok untuk industri. (AP/W)

ASPR tetap berkeyakinan bahwa negara kesatuan tidak dapat diidentikkan dengan sentralisasi atau pemusatan kekuasaan. Adanya pemusatan kekuasaan pada masa Orde Baru karena tidak adanya kekuatan lain yang dapat mengimbangi kekuatan eksekutif atau penguasa. Jika semua elemen negara memiliki kekuatan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan, secara otomatis sentralisasi tidak akan terjadi.

Sebenarnya negara kesatuan bisa tidak terjadi pemusatan kekuasaan ketika semua elemen atau alat negara atau alat-alat demokrasi yaitu lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara yang punya kekuatan untuk mengimbangi kekuatan dari pemerintah atau penguasa. (AU/W)

Alasan adanya kesatuan bangsa yang disertai pemusatan kekuasaan pada masa Orde Baru dinilai ASPR sebagai alasan yang dibuat-buat penguasa sebagai dalih atas ketidakmampuan Soeharto memimpin bangsa yang sangat heterogen ini. Sebagai jalan satu-satunya untuk mengatasi ketidakmampuannya dalam memimpin bangsa ini, dia menggunakan cara otoriter. Salah satu bukti adanya kepemimpinan

yang otoriter itu adalah tidak menerima adanya kritik dari pihak lain termasuk rakyat.

Alasan kesatuan bangsa hanya dibuat-buat oleh Soeharto. Sebenarnya dia tidak mampu memimpin rakyat sehingga menggunakan cara-cara yang otoriter dan tidak mau dikritik. (G/W)

Dengan demikian, supaya tidak terjadi lagi pemusatan kekuasaan, perlu adanya pemberdayaan rakyat atau organisasi dan lembaga lain agar bisa berfungsi sebagai kekuatan tersendiri yang dapat mengimbangi kekuatan eksekutif.

SARA: Sebuah Kekayaan, Bukan Ancaman

Orde Baru melihat bahwa SARA merupakan ancaman bagi persatuan nasional. Menanggapi pernyataan seperti itu, ASPR berpendapat bahwa isu SARA sebagai ancaman bagi persatuan nasional merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Orde Baru. SARA memang merupakan potensi yang sejak dulu ada. Akan tetapi, SARA tidak selalu menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Bahkan SARA itu sendiri bisa menjadi nilai tambah atau kekayaan tersendiri kalau bisa mengaturnya.

Saya rasa itu bukan alasan. Itu hanya alasan yang dibuat-buat aja. Karena ini adalah suatu yang gampang dipacu untuk kerusuhan. Ini yang diangkat akhirnya sama pemerintah. Padahal ini bukan alasan. Toh dari dulu Indonesia ini sudah banyak agama dan pada saat itu enak kok bisa. (AP/W)

Bisa menjadi ancaman bisa menjadi nilai tambah. Kalau kita benar-bener bisa memenej atau bisa menjadikan sebuah kekayaan. Saya pikir SARA ini bisa menjadi sebuah kekayaan dari bangsa yang besar ini. (AU/W)

Karena SARA merupakan sesuatu yang sangat mudah dijadikan sebagai sumber kerusuhan, karena memang memiliki potensi konflik yang sangat besar, akhirnya oleh Orde Baru SARA ini dipakai sebagai alat yang sangat efektif untuk

menimbulkan konflik horizontal, untuk mengadu domba kelompok satu dengan kelompok yang lain. Kalau sudah diadu domba, rakyat mudah berkonflik dengan kelompok lainnya. Konflik sesama rakyat seperti ini memang dikehendaki penguasa dengan harapan agar mereka mengonsentrasikan diri pada konflik tersebut sehingga tidak sempat memikirkan hak-hak mereka yang harus dituntut dari negara.

Potensi SARA ini adalah potensi yang sejak dulu sudah ada di Indonesia di mana kemudian potensi konflik SARA ini tetap dijaga oleh penguasa baik itu penguasa Orde Lama atau penguasa Orde Baru. Sentimen-sentimen SARA ini tetap dijaga agar suatu saat rakyat ini tetap bisa berkonflik agar ketika rakyat berkonflik dengan sentimen SARA ini masyarakat tidak lagi memikirkan apakah mereka bisa makan hari ini atau mereka bisa menuntut hak hari ini. Mereka hanya cenderung berpikiran bahwa punya sentimen SARA untuk memusuhi kelompok lain karena berbeda agama atau berbeda suku. (AU/W)

Orde Baru justru mempertahankan cara-cara yang dapat menimbulkan konflik di antara rakyat seperti itu. Bahkan kalau ada usaha-usaha yang dianggap akan meningkatkan kualitas pemikiran rakyat terhadap SARA, misalnya pemikiran-pemikiran yang melihat bahwa SARA merupakan kekayaan bagi bangsa, Orde Baru selalu memangkas usaha tersebut.

Ini adalah dipelihara oleh pemerintah dan yang lebih parah lagi selama Orde Baru kan pemikiran-pemikiran masyarakat agar mereka lebih bisa meningkatkan kualitas pemikiran masyarakat atau peningkatan paradigma berpikir masyarakat yang cenderung dipangkas oleh Orde Baru ini yang menyebabkan pemikiran-pemikiran SARA lebih berkembang di masyarakat. (AU/W)

Usaha yang dilakukan Orde Baru itu di antaranya terlihat dari ikut campurnya negara dalam urusan rakyat yang sifatnya sangat pribadi, misalnya masalah agama. Masalah agama yang merupakan masalah pribadi antara seorang

hamba dengan Tuhannya, oleh Orde Baru dilembagakan sehingga terdapat adanya keharusan bagi rakyat untuk memeluk agama yang disahkan oleh negara. Padahal, sebenarnya seseorang mau beragama atau tidak merupakan urusan seseorang dengan penciptanya, bukan urusan seseorang dengan negara. Usaha seperti itu jelas melanggar hak asasi seseorang.

Untuk urusan agama itu kan urusan pencipta. Itu ya hak mereka. Artinya saya mau beragama atau gak itu kan hak saya. Sedangkan di sini harus beragama. Artinya menjadi penindasan pada hak. Lha kelompok minoritas, Konghucu pada saat itu kan ndak diakui sebagai agama. Baru-baru saja kan dia diakui. Ini kan bentuk dari pelembagaan agama. Ini saya anggap kekeliruan. (AP/W)

ASPR tetap berpandangan bahwa SARA bukanlah merupakan ancaman bagi persatuan nasional. Ancaman itu tidak bersumber pada SARA, tetapi bersumber dari tidak adanya keadilan dan pemerataan. Kalau kepada rakyat yang berbeda-beda suku, ras, dan agamanya itu diberikan hak-hak mereka secara adil dan merata, persatuan nasional tidak akan terancam. Sebaliknya, kalau mereka tidak diperlakukan secara adil, persatuan nasional jelas tidak akan terwujud.

Tetap berangkat dari keadilan dan pemerataan. Kalau antara satu suku dengan suku yang lain dalam kondisi yang adil dan merata, kan persoalannya tinggal ego suku masing-masing. Apa sih ego masing-masing suku selama ini? Ndak, ndak menjadi ancaman. (F/W)

Bahkan terhadap kerusuhan Ambon pun, ASPR tetap menganggap bahwa sumbernya adalah tidak adanya keadilan dan pemerataan itu sehingga terjadi kesenjangan di antara kelompok-kelompok yang ada. Ambon memang memiliki potensi konflik yang cukup besar berkenaan dengan SARA ini. Akan tetapi, jika keadilan dan pemerataan diwujudkan di sana, potensi konflik itu tidak akan muncul.

Agama juga bukan ancaman. Lebih khusus kalau Ambon itu kayaknya. Bisa jadi itu dimanfaatkan karena memang lahannya ini lahan yang mudah dibakar. Tapi persoalannya bukan berangkat dari suku atau agama, keadilan aja dan pemerataan. (F/W)

Bukan masalah agama. Masalah kesenjangan aja. Cuma ada yang memicu yang terbentur pada agama sehingga ini yang terjadi. Tapi intinya pada kesenjangan saja. Tidak adanya pemerataan itu. Terus keadilan, karena di sini yang dianggap yang adil ya mayoritas saja yang merasakan keadilan dan kemakmuran. Minoritas ndak ada yang merasakan itu. (AP/W)

Selain itu, kerusuhan Ambon terjadi karena adanya provokasi dari kelompok-kelompok tertentu bukan karena keragaman agama. Keragaman agama bukanlah merupakan ancaman karena semua agama pasti mengajarkan keharmonisan dan tidak ada satu agama pun yang mengajari pengikutnya mengusahkan terwujudnya disharmoni.

Ambon dan elemen-elemen keagamaan yang sekarang muncul karena adanya provokasi-provokasi yang benar-bener kenceng dari berbagai kelompok untuk memanfaatkan situasi masa transisi dari pemerintahan Habibie ini. Keragaman agama itu sendiri bukanlah suatu ancaman, melainkan sebuah kekayaan karena semua agama ya ndak ada yang mengajarkan untuk kita melakukan disharmoni itu, semua juga mengajarkan untuk suatu keharmonisan, suatu hubungan masyarakat. (AU/W)

Selain masalah agama, isu SARA yang menonjol pada masa Orde Baru adalah problem minoritas Cina dan problem ketegangan kelas. Bagaimana pandangan ASPR sehubungan dengan kedua isu tersebut? Berikut ini dipaparkan pandangan-pandangan mereka.

Bukan Cinanya, Melainkan Rezimnya

Minoritas Cina menjadi satu problematik dan isu sensitif. Problematik itu timbul antara lain karena adanya kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara

orang Cina dan mayoritas pribumi. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil sehingga menyebabkan kemarahan warga pribumi.

Dalam pandangan ASPR, sumber dari segala permasalahan yang menyangkut minoritas Cina adalah pemerintah Orde Baru sendiri. Minoritas Cina diberi fasilitas lebih sehingga kesenjangan sosial semakin lebar. Akibatnya, Cina makin kaya, sedangkan warga pribumi makin miskin. Kesenjangan sosial tersebut menimbulkan kecemburuan sosial yang sering menjadi sumber adanya kerusuhan yang menjadikan orang Cina sebagai sasaran amuk massa.

Ya karena dianggap kesenjangan ini. Kalau aku melihatnya ini kesalahan dari pemerintah sendiri. Karena mereka diberi kesempatan, tapi pribumi sendiri tidak ada kesempatan untuk itu. Dia diberi fasilitas. Seharusnya ya harus sama sih. Artinya biarkan mereka bersaing dengan sendirinya. Tanpa dikasih fasilitas yang lebih. Kalau sekarang ya pada kelompok miskin dulu dan melibatkan kelompok kaya untuk membantu. (AP/W)

Karena itu, agar etnis Cina ini tidak menimbulkan ketegangan, pemerintah seharusnya bertindak adil dalam memberikan fasilitas kepada semua rakyat, tidak ada yang diberi fasilitas lebih daripada yang lain.

Sebenarnya pemerintah di sini sebagai negarawan kan tidak boleh mendeskreditkan golongan tertentu. Semuanya adalah rakyat Indonesia dan semuanya harus diperhatikan. Masalah Cina yang kaya dan pribumi yang miskin itu tidak terlepas dari pemerintah sendiri, kok bisa cara membaginya tidak rata, harusnya pemerintah memikirkan rakyat secara keseluruhan dan harus adil dalam hal ini. (G/W)

ASPR memang percaya bahwa orang Cina sendiri tidak melakukan kesalahan. Yang salah adalah pemerintah Orde Baru yang tidak memberikan keadilan dan pemerataan. Dengan kata lain, Orde Baru telah melaksanakan politik diskriminatif terhadap rakyat. Orang Cina diberi fasilitas lebih, sedangkan orang pribumi tidak.

Ini bukan Cinanya yang salah, tapi yang salah adalah politik diskriminatif itu sendiri, yang memberi keleluasaan terhadap suku-suku tersebut. (DT/D) (diskusi di SAPUK Pandegiling).

Cina memang dikondisikan untuk kaya, tetapi ndak bisa apa-apa. Dia dikandangan, ndak boleh berpolitik. (F/W)

Pemberian fasilitas lebih itu tentu tanpa tujuan. Orang Cina dijadikan sasaran pemerasan yang dilakukan Orde Baru. Selama Orde Baru berkuasa mereka tidak boleh berpolitik. Memang mereka diberi fasilitas lebih, tetapi juga dijadikan sasaran pemerasan oleh Orde Baru. Jadi, mereka juga menjadi korban Orde Baru.

Cina kan juga korbannya Orde Baru. Ini yang menjadi sasaran kan Cina juga, bahwa dia memanfaatkan itu, ada orang-orang Cina yang memanfaatkan itu, apa itu salah Cinanya kan tidak. Pada prinsipnya kita menuntut keadilan dan pemerataannya itu, siapa pun ndak Cina, ndak Arab, ndak Jawa, Sumatra, Madura. Jadi, Cina memang oleh Orde Baru dimanfaatkan. Satu sisi dia diberikan fasilitas lebih, disogehno, tapi dijadikan sasaran empuk. (F/W)

Menurut ASPR, orang Cina harus diperlakukan sebagaimana warga negara yang lain, tidak dibeda-bedakan dalam bidang apa saja termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Dalam bidang budaya secara otomatis budaya mereka harus dipandang sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, mereka harus diberi hak berpolitik yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam bidang ekonomi, mereka juga tidak boleh dilebihkan dari warga negara yang lain.

Pertama, mereka harus diakui sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita punya kekayaan budaya Cina. Yang kedua, adalah mereka dipandang juga sebagai warga negara yang sama dengan warga negara yang lain, ndak ada perbedaan-perbedaan baik itu keturunan atau yang lain, pribumi atau tidak. Tak pikir semuanya pribumi di sini kalau ngomong negara karena Cina sekarang sudah ndak ada Cina yang lahir di negara Cina daratan. Semua juga lahir di sini. Tentang hak berpolitik ya sama aja, karena mereka juga warga negara Indonesia ya punya hak berpolitik. Demikian juga ketika warga negara yang lain dari bangsa yang lain, mereka juga punya hak yang sama dalam hal ekonomi, mendapatkan akses-akses ekonomi. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan. (AU/W)

Harus dilibatkan mereka ke politik, bukan hanya sekedar ekonomi saja. Toh ternyata justru perekonomian Indonesia ini maju karena adanya minoritas Cina ini. Tapi ternyata hak-hak mereka ini yang tidak ada terhadap mayoritas sehingga mereka merasa tersingkirkan. (AP/W)

Problem minoritas Cina di atas juga memperlihatkan adanya pertentangan kelas, ketegangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Memang ketegangan kelas juga menjadi masalah sampai saat ini. Berikut ini dipaparkan respons ASPR terhadap kebijakan Orde Baru dalam mengatasi masalah tersebut.

Tetesan yang Tak Kunjung Datang

Kesenjangan antara kaya dan miskin merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Dalam mengatasi hal tersebut, Orde Baru mengutamakan program pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Orde Baru, "pemerataan" (distribusi ekonomi) hanya dimungkinkan setelah terdapat keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Distribusi ekonomi akhirnya akan menyebar melalui "trickle down effect".

Menanggapi kebijakan yang dijalankan Orde Baru itu, ASPR menilai bahwa kebijakan itu sangat tidak tepat karena kebijakan itu justru menyebabkan kesenjangan sosial yang makin lebar.

Ternyata kebijakan pemerintahan Orde Baru sendiri yang menyebabkan jurang kesenjangan itu ternyata makin lebar. (AU/W)

Makin lebarnya kesenjangan sosial itu terjadi karena kebijakan Orde Baru tersebut hanya menguntungkan kroni-kroni penguasa serta konglomerat yang dekat dengan mereka. Dengan kebijakan itu, orang miskin makin tertindas karena tetesan yang diharapkan dari mereka tidak kunjung datang. Karena tidak adanya

tetesannya yang diharapkan dari para konglomerat itulah, ASPR menggambarkan wadah yang dipakai oleh konglomerat itu selalu diganti dengan wadah yang lebih besar, makin lama makin membesar, seperti halnya balon sehingga tidak akan mungkin ada tetesan dari wadah tersebut.

Masalah kesenjangan antara yang kaya dan miskin ini kan karena ya kapitalis tadi, konglomerat ini. Yang dipentingkan hanya orang-orang tertentu saja, keluarga, orang-orang dekatnya. Perekonomiannya akhirnya yang kaya akhirnya menindas yang miskin, tapi tidak membantu yang miskin untuk jadi kaya atau makmur. (AP/W)

Tapi yang menjadi persoalan sekarang, ternyata 32 tahun telah membuat cangkir itu semakin besar. Jadi, tidak pernah merembes ke bawah (diskusi di SAPUK Pandegiling). (DT/D)

... Ya, cuma di sini ternyata bukan gelas yang dipakai, tetapi balon sehingga semakin membesar, nggak netes-netes. (AP/W)

Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ini, pemerintah seharusnya melindungi hak-hak minoritas, mengutamakan pemerataan, serta mencari jalan agar kelompok miskin bisa mandiri.

Ya untuk antara kelompok minoritas dan mayoritas ini, artinya minoritas ada hak-hak yang perlu dilindungi juga dari kelompok mayoritas ini. Terus kesenjangan ini harus ada pemerataan di mana antara yang kaya dan miskin itu bisa bekerja sama. Yang kaya tidak menindas yang miskin, dan sebaliknya. Cuma salahnya pada waktu Orde Baru, artinya masuklah programnya itu bagus dengan adanya bapak angkat. Tapi ternyata di sini kelirunya hanya membantu sekedar membantu saja, artinya memberi uang ya ini. Tapi tidak membantu bagaimana caranya untuk mandiri. (AP/W)

Komunis dan Islam Radikal: Hantu Ciptaan Orde Baru

Selama Orde Baru berkuasa, komunis dan Islam radikal diklaim sebagai ancaman yang membahayakan. Namun, ASPR melihat hal itu sebagai upaya menakut-nakuti rakyat—menciptakan hantu—agar tidak ada rakyat yang berani

melawan atau berbeda pendapat dengan Orde Baru. Berikut dipaparkan pandangan ASPR secara lengkap.

Soeharto yang Berbahaya, Bukan Komunis

Orde Baru percaya bahwa komunis tetap merupakan ancaman berarti. Karena itu, bangsa Indonesia diharuskan mewaspadaikan kebangkitan komunis. Menanggapi hal tersebut, ASPR menilai bahwa komunis tidak bisa dianggap sebagai ancaman yang membahayakan. Komunis sudah dibantai dan dihabisi oleh penguasa Orde Baru. Dengan demikian, PKI merupakan sosok yang kalah sehingga tidak bisa dianggap sebagai ancaman yang berbahaya. Justru yang berbahaya itu adalah penguasa Orde Baru, Soeharto.

Soeharto itu yang berbahaya. Komunis mana sih, komunis kalah kok dihabisi sama Soeharto. PKI dibantai kok dijadikan sebagai sosok yang kalah, kok masih dianggap sebagai sosok yang berbahaya, ndak ada sudah. (F/W)

Pandangan ASPR terhadap komunis yang dianggapnya tidak lagi berbahaya dilandasi oleh keyakinan bahwa rakyat Indonesia sudah pandai sehingga mereka bisa menilai dan menyeleksi sendiri paham-paham yang ditawarkan kepada mereka. Dengan kemampuan mereka itu, ASPR yakin bahwa program-program komunis tidak lagi diminati oleh rakyat.

Saya melihat bahwa ketika masyarakat sudah punya kultur untuk menilai sesuatu secara jernih dan mereka siap dengan segala perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat, saya pikir apa pun isme yang masuk ke Indonesia ketika masyarakat sudah siap dan bisa memilih dengan sendirinya ndak ada yang disebut ancaman. (AU/W)

Tapi kan rakyat punya artinya pengetahuan-pengetahuan tersendiri artinya itu nanti akan terseleksi oleh rakyat sendiri. Rakyat sudah cukup paham menilai mereka apakah akan mendukung atau tidak. Jadi, bukan ancaman komunis itu. (AP/W)

Kalaupun komunis ditawarkan lagi ndak laku, rakyat ndak suka itu sama komunis. (F/W)

Ancaman komunis merupakan hal yang dibesar-besarkan oleh Orde Baru dengan tujuan agar rakyat takut, tidak menaruh simpati, dan bersikap antipati terhadapnya. Sikap antipati ini sangat diperlukan Orde Baru untuk menyingkirkan semua pihak yang memposisikan diri sebagai musuh Orde Baru atau pihak-pihak yang mengancam kelestarian kekuasaan Orde Baru. Jika sewaktu-waktu muncul pihak-pihak seperti itu, Orde Baru dengan mudah memberikan label komunis kepadanya. Dengan memberikan label komunis itu, Orde Baru seakan-akan secara sah dan mendapat dukungan rakyat dapat menghalang-halangi segala kegiatan dan usahanya. Dengan senjata label komunis yang diberikan kepada musuh-musuhnya itu, kekuasaan Orde baru akan lestari.

Orde Baru itu sebenarnya hanya menciptakan hantu. Dia menciptakan ketakutan. Tujuannya, misalnya, kita membuat label yang label ini bisa dipentung. Tinggal label ini dikalungkan kepada siapa. Kepada yang menentang Soeharto itu kasih aja label itu. Soalnya sederhana saja, dalam bermain politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan. (F/W)

Dapat dikatakan bahwa komunis yang dianggap sebagai ancaman itu sebenarnya bukan ancaman bagi rakyat, bukan ancaman bagi persatuan nasional, tetapi merupakan ancaman bagi kelestarian kekuasaan Orde Baru. Taktik seperti itu juga digunakan oleh kelompok komunis yang berusaha menyingkirkan kelompok sosialis yang dianggap sebagai ancaman bagi kelompok komunis.

Karena dia mengancam pada posisinya, bukan pada rakyat, pada kekuasaan mereka sehingga harus disingkirkan. Sama ketika komunis menyingkirkan kelompok sosialis karena ini dianggap ancaman bagi komunis sehingga harus disingkirkan. Ini adalah kekhawatiran dari penguasa pada saat itu bukan kekhawatiran dari rakyat. (AP/W)

Dalam pandangan ASPR, usaha Orde Baru untuk membesar-besarkan ancaman komunis itu bertujuan untuk menciptakan ketakutan agar rakyat tidak berani memposisikan dirinya berbeda dengan penguasa. Seseorang yang berbeda pendapat dengan penguasa akan mendapatkan label komunis, subversif, makar, pemberontak, dan sebagainya. Jika seseorang sudah mendapat label-label tersebut, penguasa secara sah akan memperlakukan orang tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Orde Baru terhadap PKI pada tahun 1965—diculik, ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh—tanpa perasaan bersalah. Hal seperti itu diungkapkan ASPR dalam sebuah diskusi di GMPR Pandegiling.

Selama 32 tahun rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini menyebarkan rasa ketakutan itu. Dimulai dengan PKI sebagai korbannya. PKI sebagai hantu yang diciptakan oleh Soeharto dan rezim Orde Barunya. Semua PKI diberantas karena memang PKI itu sak jane saingane Soeharto untuk menguasai negara ini pada saat itu. PKI dibantai, dientekno. Dan orang yang dibantai itu baw PKI baw gak kalau ini dianggap akan menjadi cikal bakal untuk berbeda dengan rezim yang dibangun oleh Soeharto, dia dicap PKI, komunis, subversif, makar, pemberontak, opo lah jenenge. Iho yok opo gak wedi dadi PKI, sopo gak wedi ngomong komunis. Yok opo gak wedi berbeda dengan negara, Iha wong nek berbeda karo negara dicap komunis, dicap PKI, nek PKI terus dibelchi? (F/D)

Pemberian label komunis dan sejenisnya itu memang tidak didasarkan pada aturan yang jelas. Semuanya didasarkan pada penafsiran atau penilaian penguasa semata. Seseorang akan dicap komunis jika penguasa menghendaknya. Ketidakjelasan aturan itulah yang menambah ketakutan pada rakyat sehingga tidak mau mengambil risiko berbeda dengan penguasa agar tidak dicap komunis. Hal tersebut diungkapkan ASPR dalam sebuah diskusi di GMPR Pandegiling.

Kenyataan ini membuat suatu apa, dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan, dan ini cenderung untuk mempersulit orang yang dianggap, selalu orang yang dianggap. Tidak ada suatu aturan atau batasan yang jelas, yang dianggap jahat itu seperti apa sih, yang dianggap melawan itu seperti apa

situ. Seperti persepsi ninja, sampai sekarang tidak ada suatu penjelasan dari pihak aparat atau persepsi komunis. Persepsi komunis atau gambaran komunis, komunis itu binatang apa sih. Sampai saat ini kita ndak diberi suatu gambaran yang jelas. tapi kita selalu ditakut-takuti, tapi kita selalu diancam seperti itu. Kalau bahasanya adalah subjektivitas atau sak karepe dhewe sing ngucapne, sak karepe dhewe sing ngomong. Nek kono pengin ngomong komunis ya komunis, nek kono pengin ngomong ninja utowo kono pengin ngomong GPK juga sak karepe dhewe. (K/D)

Bahkan ASPR menghubungkan antara ancaman yang dibesar-besarkan Orde Baru itu dengan usaha mempertahankan dwifungsi ABRI karena Orde Baru sendiri tidak lain adalah ABRI juga. Komunisme dianggap sebagai ancaman karena memang mengancam kelangsungan kekuasaan militer di Indonesia terutama dwifungsi ABRI. Ideologi komunis, Marxisme, jelas bertentangan dengan ideologi militer yaitu fasisme dan kapitalisme.

Ya ada karena Orde Baru tidak lain adalah militer. Mereka melihat komunisme dan macam-macamnya adalah ancaman bagi kelangsungan kekuasaan militer yang ada di Indonesia dan mempertahankan dwifungsinya. Mereka menilai bahwa ketika komunisme merupakan ideologi yang akan melawan kultur militeristik di Indonesia. Ideologisasi-ideologisasi model marxisme itu kan sangat bertabrakan dengan ideologi model fasisme dan kapitalisme karena fasisme merupakan varian dari kapitalisme. (AU/W)

Ancaman Islam Radikal Membodohi Rakyat

Selain komunis, Islam radikal juga diklaim Orde Baru sebagai ancaman nyata atau setidaknya mempunyai potensi mengancam persatuan nasional. Terhadap isu Islam radikal itu, penilaian ASPR sama seperti penilaian mereka terhadap isu komunis. ASPR tetap melihat bahwa Islam radikal atau komunis itu bukan merupakan ancaman yang berbahaya. Dikatakan begitu karena ASPR yakin betul bahwa rakyat sudah mampu mengadakan penilaian sendiri.

Kalau saya sih nggak merasa itu ancaman. Artinya sih boleh saja mereka berpolitik. Artinya ya itu tadi pada rakyat saja. Kita memberikan pendidikan pada rakyat dan dia yang akan menilai apakah dia Islam atau komunis. Itu kita serahkan kepada rakyat karena rakyat punya hak. Atau kalau rakyat ternyata banyak yang memihak ke Islam radikal nggak jadi masalah. Tapi apakah rakyat ndak tahu hal itu. Saya rasa ya tahu. Bukan ancaman. Apakah Islam radikal, apakah komunis, apakah kristenisasi, bukan ancaman ini. (AP/W)

ASPR juga tidak pernah berpandangan Islam radikal, komunis, atau apa. Apa rakyat mau kalau ada orang yang mau mendirikan negara Islam. Rakyat kayaknya ya nggak mau kok. Nggak laku itu. Tapi rakyat mau yang Islami itu mau. Tapi apa terus dinamakan negara Islam? Wah lebih menakutkan lagi terusan, serem jadinya kan. (F/W)

Justru yang menjadi ancaman menurut ASPR adalah tidak diberikannya pendidikan kepada rakyat. Jika demikian yang terjadi, rakyat menjadi bodoh. Kebodohan rakyat itulah yang menjadi ancaman karena akan mudah diombang-ambingkan oleh pihak-pihak tertentu.

Ancamannya kan ketika rakyat ternyata tidak diberi pendidikan. Ini yang mengancam. Ini yang merupakan ancaman. (AP/W)

Usaha pembodohan terhadap rakyat itu selalu dilakukan Orde Baru antara lain dengan menciptakan trauma-trauma pemikiran rakyat dengan membesarkan peristiwa masa lampau seperti peristiwa G 30 S/PKI yang berhubungan dengan ancaman komunis, peristiwa Tanjung Priuk yang berkaitan dengan ancaman Islam radikal.

Kalau melihat kasus-kasus yang terjadi seperti G 30 S/PKI, kasus Tanjung Priuk, mereka sengaja menciptakan trauma-trauma pemikiran masyarakat misalnya dengan isu komunisme yang harus dibasmi di Indonesia kemudian isu-isu sentimen terhadap kelompok-kelompok yang lain misalnya isu Islam radikal. (AU/W)

Bahkan ada peristiwa yang sebenarnya tidak berhubungan dengan komunis maupun Islam radikal, tetapi oleh Orde Baru dianggap termasuk salah satu dari kedua ancaman tersebut. ASPR memberikan contoh kasus GPK Warsidi yang sebenarnya bukan kasus Islam radikal, tetapi kasus perlawanan rakyat terhadap isu tanah. Karena Orde Baru membelokkan kasus tersebut dan dianggap sebagai kasus Islam radikal, akhirnya rakyat berada di belakang Orde Baru dan mengecamnya sebagai tindakan makar.

Kalau kita teliti dalam menilai suatu permasalahan seperti yang di Lampung, kasus GPK Warsidi kan sebenarnya bukan kasus Islam radikal, tapi adalah kasus-kasus perlawanan masyarakat terhadap isu tanah yang terjadi. Cuma waktu itu kan benar-bener dibelokkan bahwa kelompok Warsidi adalah GPK yang berbasiskan agama sehingga masyarakat cenderung menilai bahwa suatu perlawanan adalah perbuatan makar dengan selalu berbasiskan pada trauma-trauma kamunis maupun Islam radikal. (AU/W)

Jadi, dapat dikatakan pula bahwa isu ancaman komunis dan Islam radikal digunakan oleh Orde Baru sebagai alat untuk menutupi ketidakmampuannya dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi rakyat.

D i s k u s i

Temuan lapangan pada tema persatuan nasional ini, seperti dipaparkan di atas, lebih banyak menyorot isu-isu yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Beberapa ancaman yang terlihat menonjol dalam temuan lapangan tersebut adalah ancaman disintegrasi bangsa (hubungan pusat dan daerah), ancaman SARA, serta ancaman komunis dan Islam radikal. Karena itu, ruang diskusi ini dibagi berdasarkan isu-isu tersebut.

Hubungan Pusat dan Daerah

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sifat negara kepulauan yang dimiliki Indonesia tidaklah menjadi sumber ancaman. Yang menjadi sumber ancaman adalah tidak adanya keadilan dan pemerataan sebagai akibat dari adanya sentralisasi. Sentralisasi itulah yang menyebabkan adanya keinginan dari berbagai daerah di Indonesia untuk memisahkan diri atau merdeka. Temuan ini didukung oleh pendapat Daniel T. Sparringa yang dikemukakan dalam suatu diskusi di SAPUK pandegiling.

Apalagi kawan-kawan kita yang ada di luar Jawa. Saya kira juga sering mengeluh soal ketidakadilan. Buat saya ketidakadilan itu punya empat dimensi: (1) antara kaya dan miskin, (2) antara desa dan kota, (3) antara Jakarta dan luar Jakarta, dan (4) antara Jawa dan luar Jawa. Ini mencerminkan ketidakadilan ekonomi yang dimensinya seperti itu. Oleh karena itu, saya bisa mengerti kalau kawan-kawan di Jakarta lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan Jawa dan luar Jawa. Saya bisa mengerti kalau ada orang-orang di Irian, orang-orang di Aceh tiba-tiba lompat pagar, buat apa jadi bagian dari Indonesia kalau minyak saya disedot ke Jakarta, dikorupsi, dan ketika dikembalikan jumlahnya hanya kecil sekali. Ada yang ndak masuk akal. Kalau ada yang menghasilkan devisa yang sangat luar biasa besarnya itu, ada kecamatan-kecamatan miskin yang luar biasa besarnya. Seperti juga di Irian.

Pendapat Mahfud juga seiring dengan temuan lapangan. Dia mengatakan bahwa dari sudut ekonomi, ketidakadilan pusat dan daerah tampak jelas dari kontrasnya kehidupan masyarakat dan kontribusi yang diberikan kepada republik. Buton yang tercatat sebagai penghasil aspal terbesar, konon memiliki banyak jalan yang kekurangan aspal. Di Aceh dan Riau yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar sumbangannya bagi Indonesia itu masih banyak penduduk asli yang masih miskin. Di Irian Jaya yang kaya emas, banyak penduduk yang mati kelaparan.¹

¹ Moh. Mahfud, "Otonomi dengan Topangan Uang secara Adil", dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 1999,

Penelitian Andi Yakub juga menunjukkan kesamaan dengan temuan ini. Temuan tersebut menganggap bahwa sumber masalah adalah sentralisme karena fakta di lapangan memperlihatkan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi masyarakatnya miskin. Banyak subjek mengklaim bahwa hubungan yang tidak adil antara pusat dan daerah tidak bisa diterima. Ketimpangan ini merupakan salah satu faktor yang melahirkan disintegrasi bagi Indonesia.² Beberapa contoh seperti Aceh, Riau, dan provinsi-provinsi di Kalimantan dapat dijadikan sebagai ilustrasi problem paling baik yang dihasilkan dari adanya sentralisasi. Mereka mengecam sentralisasi karena fakta menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat di provinsi sumber-sumber alam yang kaya ini masih miskin.³

Berkenaan dengan negara kesatuan dan federasi, temuan lapangan menyatakan bahwa istilah kesatuan atau federasi tidak perlu dipersoalkan, yang penting adalah teknik pelaksanaannya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Daniel T. Sparringa yang disampaikan dalam sebuah diskusi di SAPUK Pandegiling berikut.

Pertama, jangan terperangkap oleh istilah. Karena federasi atau negara kesatuan itu sebetulnya hanya sekedar nama, label. Dan negara federasi yang kita kenal di dunia ini tidak Negara federasi yang memberikan kesempatan bagi negara bagian, kalau di sini provinsi, untuk menikmati otonomi yang besar itu Amerika. Bagi negara federasi dimana negara bagiannya mirip dengan provinsi di kita adalah Australia. Australia itu negara federasi, tapi kekuatan ee kewenangan pusat, Canberra, itu sangat besar. Jadi, hati-hati terhadap Sementara negara kesatuan itu yang memberikan otonomi yang besar bagi daerah itu adalah Kanada. Kanada itu negara kesatuan, bukan negara federasi.

h. 2.

² Andi Yakub, "Elit Lokal dan Orde Baru: Studi tentang Respons Elite Bugis Terhadap Diskursus Politik Orde Baru", Tesis Program PascaSarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998, h. 118 & 132.

³ Sparringa, "Discourse ...", h. 220.

Temuan lapangan yang mementingkan teknik aplikasinya daripada istilah kesatuan dan federasi diukung oleh pendapat Mahfud yang mengisahkan proses otonomi luas menjadi otonomi yang bertanggung jawab seperti berikut.

Pada awal Orba gagasan pemberian otonomi luas pernah juga dilontarkan sebagai pembalikan atas sentralisasi kekuasaan Orla yang telah diruntuhkan. Gagasan itu sempat dituangkan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Namun, ketika pemerintahan Soeharto berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan, Tap yang sangat demokratis tersebut dicabut dan materi pokoknya tentang otonomi yang seluas-luasnya diganti dengan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab yang ditampung dalam Tap baru tentang GBHN. Bunyi GBHN tentang otonomi nyata dan bertanggung jawab produk Orba ini kemudian diwadahi dengan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang ternyata mengelaborasi sentralisasi kekuasaan kembali. Kata "bertanggung jawab" yang menyertai kata "otonomi nyata" itu dalam praktiknya diartikan bertanggung jawab kepada—dan ditentukan oleh—presiden sehingga desentralisasi yang terbangun adalah desentralisasi yang sentralistik.⁴

Meskipun begitu, temuan lapangan lebih condong mengidealkan bentuk negara kesatuan sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri negara pada tahun 1945. Akan tetapi, negara kesatuan yang diidealkan adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah sehingga keadilan dan pemerataan akan lebih mudah diciptakan karena tiap-tiap daerah dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Temuan ini juga masih didukung oleh Sparringa seperti berikut.

Indonesia memang sedang terancam oleh disintegrasi seperti yang dialami oleh Bosnia. Kita tidak ingin itu terjadi. Saya kira kekayaan terbesar yang dimiliki oleh negeri ini selain kekayaan alam sebenarnya adalah tekad untuk bersatu di bawah sebuah negara kebangsaan yang namanya Indonesia. Sehingga kita bisa berbeda-beda suku, agama, ras tapi mengaku berbahasa satu, mengaku berbangsa satu, dan bertanah air satu Indonesia. Mudah-mudahan ini dapat tetap kita pelihara dengan tetap mengindahkan persoalan keadilan itu harus diselesaikan. Persoalan ketidakadilan antara Jakarta dan luar Jakarta, antara Jawa dan luar Jawa, antara orang kaya dan miskin, bahkan antara desa dan kota harus segera diperbaiki. Oleh karena

⁴ Moh. Mahfud, "Bersemunya Harapan untuk Otonomi Luas", dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 1999, h. 1.

itu, apa pun sistem yang kita pakai saya ingin daerah itu menikmati otonomi yang cukup sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengembangkan satu potensi, potensi daerah, kedua inisiatif lokal yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat, budaya setempat, keadaan ekonomi dan sosial setempat. Yang penting daerah itu punya otonomi yang cukup luas untuk mengembangkan potensinya dan saya percaya itu masih bisa dikerjakan di dalam negara kesatuan. Tapi saya segera mengerti kalau orang segera frustrasi dan melompat ke negara federasi kalau tuntutan terhadap otonomi tidak direspons.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sekjen Depdagri Feisal Tamin yang menegaskan bahwa keadaan geografis Indonesia yang merupakan kepulauan tidak memungkinkan untuk pembentukan negara federasi. Kita harus melihat sejarah perkembangan dunia selama ini yang tidak satu pun negara federasi berbentuk kepulauan. Pembentukan negara federasi mengarah kepada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diperjuangkan melalui pengorbanan harta benda dan jiwa raga pejuang dengan nilai tiada terhingga.⁵

Temuan lapangan ini juga mendukung penelitian Ya'kub yang menyatakan bahwa kelompok otonomis merupakan kelompok yang paling besar di antara kelompok yang ada (federalis, otonomis, unitaris). Mereka kritis terhadap sentralisasi, tetapi tidak setuju dengan konsep federalisme. Mereka menganggap federalisme merupakan potensi yang melahirkan disintegrasi nasional. Mereka lebih mendukung pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.⁶

Namun, temuan ini tidak mendukung pendapat intelektual oposisionis yang lebih tertarik pada sistem federasi daripada negara kesatuan. Mereka beranggapan bahwa keberadaan sistem yang sangat tersentralisasi berakibat pada hambatan pembangunan di daerah, khususnya di luar Jawa. Selain itu, keberadaan sistem

⁵ Lihat "Negara Federal Tak Mungkin", dalam *Jawa Pos*, 27 September 1998, h. 8.

⁶ Ya'kub, "Elit ...", h. 158.

tidak dapat memberikan keadilan dan distribusi ekonomi yang adil terhadap daerah. Mereka menyatakan bahwa sistem federasi tidak populer di antara pendiri negara karena kepentingan tetap mereka. Federasi Indonesia akan lebih kuat jika sistem federasi didasarkan pada pertalian yang sukarela daripada hanya memberikan pengalaman historis.⁷

S A R A

Temuan lapangan menunjukkan bahwa SARA yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman bagi persatuan nasional ditolak. SARA tidak selalu menjadi ancaman bagi persatuan nasional, bahkan bisa menjadi nilai tambah atau kekayaan tersendiri. Orde Baru bahkan memanfaatkan SARA yang memang sangat mudah menimbulkan kerusuhan sebagai alat untuk menimbulkan konflik horizontal, untuk mengadu domba kelompok satu dengan kelompok yang lain.

Temuan lapangan tersebut sejalan dengan berbagai pendapat berikut. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), Burhanuddin Daja, mengatakan bahwa SARA merupakan kekayaan. SARA adalah kodrat Tuhan. Diciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ras, warna kulit, dan sebagainya.⁸ Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berpandangan bahwa SARA itu sebetulnya baik dan positif, seperti halnya negara Indonesia yang terdiri dari persatuan *kebhinekaan*. Secara faktual, Orde Baru cenderung menganggap keanekaragaman tersebut menjadi kelemahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.⁹

⁷ Sparringa, "Discourse...", h. 215—216.

⁸ Lihat "Orba Membual Sekte-Sekte", dalam *Jawa Pos*, 16 Februari 1999, h. 11.

⁹ Lihat "Orba Pandang SARA sebagai Ancaman", dalam *Jawa Pos*, 9 Februari 1999, h. 11.

Sebenarnya keragaman budaya antarsuku bukan ancaman. Sejak kemerdekaan, budaya suku-suku yang bergabung menjadi bangsa Indonesia sudah beragam, tak ada cerita perpecahan dan kerusuhan. Jika dalam sejarah bangsa Indonesia yang berjalan lama dan panjang tidak pernah tercatat ketegangan dan permusuhan antaretnis dan agama, seyogianya di antara kita tidak ada pihak yang tetap bersikukuh menyebut SARA sebagai sumber isu perpecahan dan kerusuhan. Yang ada mungkin intrik-intrik politik-sosial-ekonomi yang 'memanfaatkan' SARA sebagai isu untuk menyulut permusuhan. Adanya suku-suku dengan bahasa daerahnya yang berbeda-beda, adanya agama yang bermacam ragam, dan adanya warga keturunan Arab, Cina, India, Eropa, dan lain-lain semua adalah kenyataan yang kita akui keberadaannya. Ratusan tahun telah berjalan, kakek moyang dan bapak kita tidak pernah bertengkar karena kebhinekaan itu.¹⁰

Dalam hal problem minoritas Cina, temuan lapangan menyatakan bahwa sumber dari segala permasalahan yang menyangkut minoritas Cina adalah perlakuan diskriminatif yang dijalankan rezim Orde Baru. Memang problem paling serius adalah kesenjangan yang luas antara warga Cina dan mayoritas pribumi yang meliputi budaya, sosial, dan paling penting kesenjangan ekonomi. Minoritas Cina menjadi kaya sedangkan mayoritas pribumi miskin dipandang sebagai sesuatu yang menyakitkan hati, tidak dapat diterima, dan tidak adil yang menyebabkan kemarahan dan frustrasi di antara warga pribumi. Situasi ini secara mudah dapat menimbulkan ketegangan rasial antara pribumi dan Cina.¹¹

Temuan lapangan menganjurkan agar Orang Cina diperlakukan sebagaimana warga negara yang lain, tidak dibeda-bedakan dalam bidang apa saja termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Temuan ini diperkuat oleh The Kian Wie,

¹⁰ D. Zawawi Imron, "Virus Kerusuhan di Luar SARA", dalam *Jawa Pos*, 24 Desember 1998, h. 4.

¹¹ Sparringa, "Discourse ...", h. 267.

seorang WNI keturunan yang berprofesi sebagai peneliti di LIPI, yang menyatakan bahwa WNI keturunan sebaiknya tidak lagi dimanjakan dari sisi ekonomi dan dikungkung pada aspek lainnya. Perlakuan diskriminatif terhadap para WNI keturunan pada Orde Baru terbukti membahayakan mereka sendiri dan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Apa pun konsep yang dipilih, kepentingan pembauran harus dinomorsatukan.¹²

Peneliti CSIS Harry Tjan Silalahi juga berpendapat sama. Dia menyatakan sebaiknya diambil apa yang disebutnya "pilihan wajar", yaitu perlunya pendekatan demokratis diberlakukan dalam mengelola pluralisme. Caranya dengan memperkuat hak-hak asasi warga negara secara adil dan menyeluruh, yang meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu lebih menjamin pembauran. Dengan penguatan hak-hak dasar bagi warga negara, orang-orang Cina justru akan memiliki kesempatan lebih banyak lagi menjadi patriot di Indonesia sebab mereka berkesempatan mengabdikan dirinya dalam hal-hal yang terkait langsung dengan praktik berkewarganegaraan (*citizenship*) secara wajar, sehat, dan sempurna.¹³

Sejalan dengan pendapat di atas, para intelektual menganjurkan dilaksanakannya asimilasi secara sempurna meliputi perubahan-perubahan fundamental dalam "jalan pemikiran", tidak hanya fisik atau simbolik, seperti perkawinan dan mengganti nama Cina dengan nama Indonesia. Adopsi nama Indonesia oleh warga Cina belum cukup baik karena dalam praktik mereka masih menjaga nama Cina; perkawinan antara Cina dan pribumi juga hanya sebagian kecil dari asimilasi.¹⁴

¹² Lihat "Etnis Cina Membuka Keseimbangan Keran Peran", dalam *Jawa Pos*, 18 Februari 1999, h. 2.

¹³ Idem.

¹⁴ Sparringa, "Discourse ...", h. 271—272.

Kebijakan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan sosial yang dijalankan Orde Baru dengan konsep "trickle down effect" ditolak karena justru menyebabkan kesenjangan sosial yang makin lebar. Hal itu terjadi karena kebijakan tersebut hanya menguntungkan kroni-kroni penguasa serta konglomerat yang dekat dengan mereka. Dengan kebijakan itu, orang miskin makin tertindas karena tetesan yang diharapkan dari mereka tidak kunjung datang. Hal itu sejalan dengan pendapat intelektual oposisionis yang percaya bahwa isu keadilan distribusi ekonomi jauh lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi, yang sering menciptakan ketimpangan, dan yang secara murni merupakan persoalan pilihan politik daripada problem teknis. Karena itu, mereka secara kuat menolak kebijakan Orde Baru atas pembangunan ekonomi yang mereka anggap telah menciptakan ketimpangan yang besar dan ketiadaan partisipasi politik (demokratisasi) oleh massa.¹⁵

Komunis dan Islam radikal

Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunis tidak bisa dianggap sebagai ancaman yang membahayakan karena komunis sudah dibantai dan dihabisi oleh penguasa Orde Baru. Temuan ini sejajar dengan hasil penelitian Sparringa yang menyatakan bahwa di antara intelektual yang menolak posisi resmi secara radikal menentang gagasan komunisme sebagai ancaman dan berpendapat bahwa pada kenyataannya Pancasila dan UUD 1945 bersama-sama memakai prinsip-prinsip fundamental komunis, seperti prinsip "keadilan sosial".¹⁶

¹⁵ *Idem*, h. 277.

¹⁶ *Idem*, h. 284.

Orde Baru memang berusaha membesar-besarkan ancaman komunis dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan agar rakyat tidak berani memposisikan dirinya berbeda dengan penguasa. Ancaman komunis itu sebenarnya bukan ancaman bagi rakyat atau bagi persatuan nasional, melainkan ancaman bagi kelestarian kekuasaan Orde Baru. Temuan ini memperkuat pendapat intelektual oposisionis yang menyatakan bahwa ancaman komunis telah dibesar-besarkan oleh rezim dan memandangnya dengan kecurigaan sebagai sarana politik untuk mempertahankan status quo. Dalam kelompok intelektual ini, banyak yang mempertanyakan validitas komunisme sebagai ancaman terhadap persatuan nasional dan menyatakan bahwa berbagai bentuk ideologi yang memperjuangkan demokrasi seharusnya diizinkan untuk mengambil bagian dalam politik. Mereka juga mempertanyakan penggunaan istilah "ancaman" yang dipandang sebagai penuh dengan makna politik dan menyatakan bahwa beberapa pergerakan yang membawa perubahan-perubahan dari dalam sebaiknya dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial daripada sebagai ancaman.¹⁷

Pada isu Islam radikal, temuan lapangan memperlihatkan hal yang sama dengan isu komunis. Islam radikal atau komunis itu bukan merupakan ancaman yang berbahaya.

¹⁷ Idem, h. 284—285.

BAB IX

P E M B A H A S A N

Sebagaimana disebutkan pada bab pertama bahwa bab ini akan membahas temuan lapangan yang sudah disajikan pada bab keenam, ketujuh, dan kedelapan. Bagian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan tujuan studi. Secara garis besar ada dua macam permasalahan studi ini yaitu respons ASPR terhadap wacana Orde Baru dan wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR. Sehubungan dengan hal itu, pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua bagian besar sesuai dengan permasalahan studi tersebut.

Respons ASPR Terhadap Wacana Orde Baru

Pembahasan ini berusaha menjawab permasalahan dan tujuan studi yang mengacu pada tema-tema yang sudah ditentukan dalam studi ini. Karena itu, pembahasan studi ini pun dibagi lagi berdasarkan tema-tema tersebut. Tema-tema yang dibahas pada tiap-tiap bagian berturut-turut dari demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional.

Demokrasi Pancasila

Setelah membaca, mempelajari, dan menelaah temuan lapangan, terlihat adanya penolakan ASPR terhadap hampir semua komponen demokrasi yang dijabarkan Orde Baru. Konsep demokrasi Pancasila sebagai tema utama dalam studi ini ditolak oleh ASPR secara tegas dan mendalam. Hal ini terbukti dari adanya

penolakan terhadap konsep demokrasi Pancasila yang partikularistik itu yang datang dari semua subjek yang diwawancarai dan yang diamati peneliti. Tak seorang subjek pun yang menerima argumen yang diajukan Orde Baru berkaitan dengan demokrasi Pancasila. Argumen Orde Baru yang menyatakan bahwa demokrasi bersifat unik dan spesifik ditolak bahkan menurut ASPR keunikan itu terjadi karena sistem politik Orde Baru melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang berarti 'pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat' pada masa Orde Baru tidak terwujud bahkan rakyat tidak dilibatkan sama sekali dalam proses politik. Rakyat tidak terwakili aspirasinya karena memang mereka tidak mempunyai wakil di DPR/MPR. Semua anggota DPR/MPR hanyalah wakil penguasa. Bahkan penolakan terhadap demokrasi yang partikularistik itu diperkuat dengan pernyataan bahwa keunikan itu timbul karena memang demokrasi Pancasila menerapkan sistem komunis.

Kebijakan 'massa mengambang' yang diprogramkan Orde Baru juga ditolak ASPR karena solusi yang ditawarkan Orde Baru dianggap menyimpang. Jika berpandangan bahwa rakyat masih bodoh seharusnya solusi yang diambil adalah mencerdaskan mereka. Hal seperti itu tidak dijalankan Orde Baru, bahkan Orde Baru berusaha membodohi rakyat. Bahkan kebijakan massa mengambang hanyalah merupakan kebijakan yang diprogramkan rezim untuk memobilisasi rakyat ke Golkar yang secara otomatis mendukung kelanggengan kekuasaan Orde Baru.

Kebijakan massa mengambang yang dilaksanakan dengan memanfaatkan paradigma Lipset berdasarkan pemikiran bahwa modernisasi merupakan faktor pendorong utama bagi munculnya kehidupan yang demokratis juga tidak diterima karena pembangunan ekonomi yang menggunakan pendekatan "trickle down

effect” itu hanya menekankan pertumbuhan dan mengesampingkan pemerataan sehingga menunjukkan adanya unsur diskriminasi. Tahapan demokrasi yang ditempuh Orde Baru juga tidak bersifat transparan sehingga ditolak ASPR. Jika tahapan demokrasi yang ditempuh transparan, sudah waktunya Indonesia ini menjadi negara yang demokratis dalam arti yang sesungguhnya.

Begitu juga halnya dengan konsep negara integralistik yang tidak dapat diterima. Interpretasi Orde Baru terhadap negara integralistik yang dikemukakan Soepomo hanya bertujuan mengaburkan posisi negara dan rakyat karena posisi rakyat yang seharusnya lebih kuat, dalam konsep Soepomo posisi itu dibalik. Negara yang diibaratkan sebagai sebuah keluarga menempatkan penguasa pada posisi yang sangat kuat, sedangkan rakyat harus tunduk kepada penguasa. Hal seperti ini terjadi karena Orde Baru memanfaatkan kultur feodal yang bersifat sentralistik dan jelas-jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Konsep ini ditolak juga karena kenyataan menunjukkan bahwa penguasa tidak pernah melindungi dan mengayomi rakyat, bahkan rakyat dituntut selalu patuh kepadanya. Penolakan ASPR terhadap konsep ini terlihat juga pada slogan “MENOLAK TUNDUK MENUNTUT TANGGUNG JAWAB” yang tertulis pada spanduk-spanduk mereka yang dibawa pada saat melakukan demonstrasi atau ditempelkan pada tempat-tempat strategis.

Semua respons ASPR terhadap wacana Orde Baru berkaitan dengan demokrasi Pancasila yang diuraikan di atas dirangkum dalam sebuah tabel berikut.

TABEL 9.1
RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU
TENTANG DEMOKRASI PANCASILA

Komponen	Jenis Respons	Sifat Respons	Alasan
Konsepsi tentang Demokrasi Pancasila	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * tidak ada keterlibatan rakyat dalam proses politik * rakyat tidak mempunyai wakil
Demokrasi yang partikularistik	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * pelaksanaannya melanggar prinsip-prinsip demokrasi * menerapkan sistem negara komunis
Massa mengambang	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * menghambat partisipasi politik rakyat * usaha memobilisasi rakyat ke Golkar
Implementasi demokrasi secara bertahap	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * tahapan demokrasi yang dijalankan tidak jelas * tahapan yang tidak pernah habis
Negara integralistik	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * hanya memanfaatkan kultur feodal * mengaburkan posisi rakyat dan negara * menjadikan negara kuat dan bersifat sentralistik

Penolakan-penolakan ASPR terhadap wacana Orde Baru tersebut tidak bersifat mengada-ada. Hal itu terbukti dari adanya dukungan dari sejumlah studi dan pendapat dari berbagai pihak sebagaimana yang sudah didiskusikan di atas. Kalau mengacu pada kriteria negara yang demokratis sebagaimana yang dipaparkan pada bab II tesis ini, Orde Baru memang tergolong negara yang otoriter. Hal itu terbukti dari ukuran berdasarkan kriteria tingkatan demokrasi yang paling rendah—yaitu demokrasi *pseudo*—saja, Orde Baru sudah tidak termasuk

dalam golongan negara demokratis. Dalam demokrasi pseudo ini, partai-partai oposisi masih diizinkan berada secara legal, sedangkan Orde Baru sendiri melarang adanya oposisi.

Dwifungsi ABRI

Pada tema dwifungsi ABRI ini ada beberapa subtema yang dibicarakan dalam studi ini, yaitu konsepsi tentang dwifungsi, pengangkatan militer dalam birokrasi sipil, pengangkatan militer dalam parlemen, dan hubungan ABRI dengan Golkar.

Konsepsi tentang dwifungsi ABRI yang ditawarkan oleh Orde Baru ditolak oleh ASPR. Penolakan itu didasarkan pada argumen bahwa dwifungsi menjadi penyebab utama tidak adanya demokrasi di Indonesia. Lembaga ABRI yang memiliki budaya komando jelas tidak mungkin demokratis.

Terhadap semua klaim yang dijadikan dasar legitimasi bagi dwifungsi ABRI, ASPR juga menolaknya bahkan memberikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan klaim Orde Baru. Terhadap klaim bahwa ABRI harus diberi tempat di bidang sosial politik karena berjasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ASPR menyatakan bahwa yang berjasa dalam hal itu bukanlah ABRI, melainkan rakyat (laskar rakyat). Kalau dikatakan jasanya banyak, kejahatan ABRI juga banyak: menindas, membunuh, membantai, dan menculik rakyat. Bahkan kalau dengan menonjol-nonjolkan jasanya lalu ingin menguasai negeri ini sepenuhnya, ASPR menilai ABRI sebagai perampok.

Terhadap klaim bahwa dwifungsi merupakan panggilan, rakyatlah yang meminta adanya dwifungsi itu, ASPR menolaknya dan menyatakan bahwa yang

meminta bukanlah rakyat, melainkan penguasa sendiri bahkan dwifungsi dinilai sebagai paksaan karena rakyat dipaksa-paksa minta.

Komponen dwifungsi yang kedua berkaitan dengan pengangkatan militer dalam birokrasi sipil. Terhadap komponen ini, ASPR juga menolak secara tegas dan mendalam. Penolakan tersebut didasarkan pada aturan negara demokrasi yang tidak menempatkan militer dalam birokrasi sipil. Klaim bahwa personel ABRI lebih berkualitas daripada sipil sehingga sangat dibutuhkan dalam birokrasi khususnya untuk mendukung pembangunan ekonomi juga ditolak. Terhadap klaim bahwa ABRI merupakan lembaga yang paling modern sehingga personennya sangat dibutuhkan, ASPR menolak dan menyatakan bahwa sipil sebenarnya memiliki kapabilitas dalam memimpin bangsa, namun tidak pernah diberi kesempatan oleh ABRI. Kaderisasi yang sistematis juga sering dijadikan klaim yang menunjukkan kemodernan ABRI. Terhadap klaim tersebut, ASPR menolaknya dan menyatakan bahwa kaderisasi dalam tubuh ABRI tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan bahkan ASPR menilai bahwa ABRI jelas tidak mampu memimpin masyarakat sipil yang memiliki sifat yang sangat heterogen ini. Jika hal itu terjadi, kepemimpinan yang dijalankan pasti bersifat otoriter. Terhadap klaim bahwa banyaknya personel ABRI yang duduk di birokrasi sipil menjadi gambaran bahwa ABRI masih sangat dibutuhkan untuk memimpin bangsa, ASPR menolaknya dan menyatakan justru itu menunjukkan adanya keinginan ABRI untuk tetap menguasai negara ini.

Terhadap klaim bahwa organisasi ABRI sangat solid, ASPR menolaknya dan menunjuk adanya faksi-faksi dalam tubuh ABRI. Adanya sebutan ABRI hijau dan ABRI merah putih dijadikan sebagai alasan penolakan itu. Terhadap klaim bahwa kepemimpinan ABRI sangat dibutuhkan karena ABRI sebagai perekat bangsa, ASPR

juga menolak dan menyatakan bahwa keutuhan bangsa selama ini bukan karena kepemimpinan ABRI, melainkan karena todongan senjatanya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa keutuhan dan stabilitas yang diciptakan ABRI hanyalah bersifat semu. Apalagi keutuhan itu dipaksakan tanpa mengakui adanya perbedaan dan keragaman. Alasan keutuhan bangsa selalu ditonjolkan ABRI hanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti membuat daerah operasi militer yang tidak lepas dari adanya kekerasan. Karena itu, ABRI yang memotret dirinya sebagai organisasi yang paling nasionalis ditolak oleh ASPR dengan alasan bahwa sifat nasionalis ABRI hanya dilihat dari kemampuannya dalam menjaga keutuhan bangsa dengan cara memaksa tanpa adanya pengakuan terhadap keragaman dan perbedaan. Sifat kepemimpinan seperti itu bukan nasionalis, melainkan fasis.

ABRI mengklaim bahwa kepemimpinan sipil hanya menghasilkan instabilitas politik dan malapetaka ekonomi. Terhadap klaim seperti itu ASPR menolak dan menyatakan bahwa justru ABRI yang menjadi sumber instabilitas. Hal itu terjadi karena ABRI selalu ikut campur dalam masalah-masalah sipil. Ikut campurnya ABRI tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan bahkan menimbulkan persoalan baru. ABRI yang terjun ke dalam masalah sosial politik dinilai sebagai sumber utama rusaknya bangsa ini.

Komponen dwifungsi ABRI yang ketiga berkaitan dengan pengangkatan militer dalam parlemen. Terhadap hal ini, ada dua macam respons. *Pertama*, terhadap pengangkatan ABRI di DPR, ASPR menolak secara tegas dan mendalam dengan memberikan argumen bahwa DPR merupakan tempat wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. *Kedua*, terhadap pengangkatan ABRI di MPR, ASPR menerimanya, namun penerimaannya bersifat superfisial.

Dikatakan seperti itu karena penerimaan sebagian besar hanya karena UUD 1945 telah menentukan adanya pengangkatan utusan golongan di MPR. Mereka juga berpandangan bahwa lebih baik jika tidak ada pengangkatan sama sekali di lembaga perwakilan itu. Bahkan ada sebagian kecil subjek yang menganggap ABRI bukanlah golongan sehingga ABRI tidak boleh diangkat di MPR. Dengan kata lain, subjek ini menolak dengan keras pengangkatan ABRI di MPR.

Terhadap klaim ABRI bahwa pengangkatan ABRI di DPR sebagai stabilisator dan dinamistor, ASPR menolak dan menyatakan fungsi itu berkaitan dengan pertahanan negara dari gangguan luar negeri, tidak ada kaitannya dengan kedudukan ABRI di DPR. Klaim ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator di DPR itu menunjukkan kesombongan ABRI yang memang berlagak jagoan. Terhadap klaim ABRI akan kekhawatiran adanya kudeta yang dilakukan ABRI jika tidak puas terhadap keputusan DPR, ASPR juga menolak dan menyatakan hal itulah sebagai pertanda bahwa ABRI bukanlah alat pertahanan, melainkan pembuat kerusuhan dan kerusakan.

Klaim duduknya ABRI di DPR sebagai perwujudan kemanunggalan ABRI dengan rakyat juga ditolak ASPR. Penolakan itu didasari kenyataan bahwa ABRI selalu berhadap-hadapan dan berlawanan dengan rakyat, ABRI selalu menekan rakyat dan berpihak pada penguasa serta kroninya.

Komponen keempat dari dwifungsi ABRI adalah hubungan ABRI dengan Golkar. Komponen ini juga ditolak oleh ASPR dengan alasan bahwa usaha mendirikan Golkar yang dilakukan ABRI itu menunjukkan ABRI sebagai alat pertahanan negara tidak bersifat netral lagi. Itu juga merupakan bukti bahwa ABRI selalu mendukung penguasa. Bahkan ASPR menilai hubungan ABRI dengan Golkar

yang kemudian tergabung dalam ABG (ABRI, birokrasi, dan Golkar) lebih menguatkan anggapan bahwa Orde Baru merupakan negara komunis karena sistem seperti itu yang dipakai negara komunis—sistem negara yang dibangun di atas tiga pilar: militer, birokrasi, dan partai tunggal.

Semua respons ASPR terhadap wacana Orde Baru berkaitan dengan dwifungsi ABRI yang diuraikan di atas dirangkum dalam sebuah tabel berikut.

TABEL 9.2
RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU
TENTANG DWIFUNGSI ABRI

Komponen	Jenis Respons	Sifat Respons	Alasan
Konsepsi tentang dwifungsi ABRI	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * menjadi sumber tidak adanya demokrasi * lembaga ABRI bukanlah lembaga yang demokratis karena menganut sistem komando
Pengangkatan militer dalam birokrasi sipil	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * hanya menciptakan stabilitas semu yang perlu banyak korban
Pengangkatan militer di DPR	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * anggota DPR merupakan tempat wakil yang dipilih rakyat lewat pemilu
Pengangkatan militer di MPR	penerimaan	superfisial	<ul style="list-style-type: none"> * mewakili golongan ABRI, tetapi lebih baik jika anggota MPR bebas dari adanya pengangkatan
ABRI dan Golkar	penolakan	mendalam	<ul style="list-style-type: none"> * ABRI harus netral (tidak boleh memihak) * ABRI mendukung penguasa dan tidak mendukung rakyat

Persatuan Nasional

Persatuan nasional merupakan salah satu wacana Orde Baru yang utama. Wacana ini dijadikan sebagai sarana untuk mematikan langkah pihak-pihak yang dianggap mengancam kelestarian kekuasaannya. Sebagai wacana dominan, wacana ini melihat adanya isu-isu yang mengancam persatuan nasional. Isu-isu yang selama ini diklaim Orde Baru sebagai ancaman persatuan nasional di antaranya adalah ancaman disintegrasi bangsa, ancaman SARA, ancaman komunis dan Islam radikal.

Terhadap klaim Orde Baru seperti itu, ASPR menolak semua komponen yang dijadikan sebagai isu yang mengancam persatuan nasional. Terhadap klaim Orde Baru yang menganggap negara kepulauan (banyaknya pulau) menjadi ancaman nyata bagi persatuan nasional, ASPR menolaknya dan menyatakan bahwa sumber ancaman itu bukanlah banyaknya pulau atau negara kepulauan, melainkan tidak adanya keadilan dan pemerataan sebagai akibat dari adanya sentralisasi. Sentralisasi inilah yang dampak negatifnya sangat luar biasa, di antaranya berupa keinginan dari berbagai daerah untuk merdeka atau memisahkan diri dari Indonesia.

Terhadap bentuk negara yang diidealkan Orde Baru yaitu negara kesatuan, ASPR tidak menolak dan tidak menerimanya. Dikatakan begitu karena ASPR tidak mempersoalkan istilah "kesatuan atau federasi". Yang dipersoalkan adalah realisasi atau pelaksanaan teknisnya. Alasan itu didasarkan pada kenyataan bahwa ada negara kesatuan yang memberikan kekuatan penuh pada daerah, sebaliknya ada negara federasi yang sentralistik. Orde Baru sendiri tergolong negara kesatuan yang

sentralistik. Dengan demikian, yang ditolak ASPR adalah sentralistiknya itu, bukan negara kesatuannya.

Terhadap isu SARA yang dibesar-besarkan Orde Baru sebagai ancaman, ASPR menolaknya. ASPR tetap pada pendirian bahwa ancaman itu bersumber dari tidak adanya keadilan dan pemerataan yang diberikan kepada rakyat yang berbeda-beda suku, ras, dan agama. Bahkan ASPR menyatakan bahwa isu SARA dipakai oleh Orde Baru sebagai alat untuk menimbulkan konflik horizontal. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa setiap ada usaha menyadarkan rakyat berkaitan dengan isu SARA selalu dipangkas Orde Baru.

Terhadap isu minoritas Cina yang sering menjadi sumber kerusuhan, ASPR menolak kebijakan yang diambil Orde Baru yang bersifat diskriminatif—memberikan fasilitas lebih kepada Cina. Inilah yang menjadi sumber ancaman bagi persatuan nasional. Pemberian fasilitas lebih yang bersifat diskriminatif itu menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial yang kemudian mengakibatkan adanya kerusuhan dengan Cina sebagai sasaran amuk massa. Dengan demikian, ASPR tidak menyalahkan Cinanya, tetapi menyalahkan rezimnya.

Terhadap kebijakan dalam mengatasi kesenjangan sosial yang menggunakan konsep "trickle down effect", ASPR juga menolaknya dan menyatakan bahwa kebijakan itu hanyalah memperlebar kesenjangan sosial karena hanya mengutamakan pertumbuhan, sedangkan pemerataannya tidak pernah dijalankan.

Terhadap klaim Orde Baru bahwa komunis dan Islam radikal merupakan ancaman yang harus diwaspadai, ASPR juga menolaknya dan menyatakan bahwa Soehartolah yang berbahaya, bukan komunis. Penolakan itu didasari keyakinan bahwa rakyat sudah pandai dan mampu menilai paham-paham yang ditawarkan

kepada mereka. ASPR bahkan menilai ancaman komunis dan Islam radikal yang dibesar-besarkan itu untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak berani memposisikan diri berbeda dengan penguasa. Bahkan ASPR melihat adanya hubungan antara ancaman yang dibesar-besarkan Orde Baru dengan usaha mempertahankan dwifungsi ABRI. Karena itu pula, ASPR menilai bahwa komunis hanyalah ancaman bagi kelestarian kekuasaan ABRI atau Orde Baru, bukan ancaman bagi rakyat atau persatuan nasional. Semua respons tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

TABEL 9.3
RESPONS ASPR TERHADAP WACANA ORDE BARU
TENTANG PERSATUAN NASIONAL

Komponen	Jenis Respons	Sifat Respons	Alasan
Negara kepulauan menjadi ancaman disintegrasi	penolakan	mendalam	* ancaman disintegrasi bersumber dari tidak adanya keadilan dan pemerataan sebagai akibat dari adanya sentralisasi
Bentuk negara kesatuan/federasi	bukan penolakan & bukan penerimaan	superfisial	* negara kesatuan atau federasi hanya istilah, yang penting adalah realisasi atau pelaksanaan teknis yang memberikan kewenangan besar kepada daerah
Ancaman SARA	penolakan	mendalam	* ancaman SARA lebih banyak bersumber dari tidak adanya keadilan dan pemerataan yang diberikan kepada mereka yang heterogen itu * tidak ada satu agama pun yang mengajarkan permusuhan/disharmoni
Problem minoritas Cina	penolakan	mendalam	* problem minoritas Cina timbul karena politik diskriminatif yang dijalankan rezim
Kebijakan "trickle down effect"	penolakan	mendalam	* kebijakan itu hanya memperlebar kesenjangan sosial karena hanya mengutamakan pertumbuhan
Ancaman komunis dan Islam radikal	penolakan	mendalam	* rakyat sudah pandai sehingga bisa menilai dan menyeleksi paham-paham yang ditawarkan kepadanya

Berdasarkan uraian seluruh komponen di atas, dapat dilihat bahwa semua komponen utama—demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan isu-isu yang diklaim Orde Baru mengancam persatuan nasional—ditolak secara mendalam oleh ASPR. Memang ada komponen yang diterima secara superfisial—pengangkatan militer di lembaga MPR—dan ada komponen yang tidak ditolak dan tidak diterima—bentuk negara kesatuan—tetapi komponen-komponen itu hanyalah merupakan komponen bagian dari komponen/tema yang lebih besar.

Penolakan ASPR terhadap wacana Orde Baru seperti di atas juga memunculkan pernyataan dengan menggunakan kosakata yang bertentangan dengan pernyataan atau kosakata yang digunakan Orde Baru. Pada tema demokrasi Pancasila, misalnya, muncul kata-kata seperti *komunis* (sebagai respons terhadap demokrasi Pancasila yang partikularistik), *kultur feodal*, *negara sebagai barhala*, dan *sebuah kerajaan* (sebagai respons terhadap konsep negara integralistik) yang kesemuanya mengandung pengertian yang bertentangan dengan konsep demokrasi.

Pada tema dwifungsi ABRI muncul kata-kata seperti *kejahatannya banyak* sebagai respons terhadap *jasanya banyak*, *paksaan* sebagai lawan permintaan, *fasis* sebagai lawan dari nasionalis, *ABRI menimbulkan instabilitas* sebagai respons atas kepemimpinan sipil sebagai sumber instabilitas, *berlagak jagoan* sebagai respons atas peran stabilisator dan dinamisator ABRI di DPR, *fungsi membuat kerusuhan* sebagai respons atas fungsi sospol ABRI, *berlawanan dengan rakyat* sebagai lawan dari manunggal dengan rakyat, *pilar-pilar negara komunis* sebagai respons terhadap hubungan ABRI dengan Golkar. Pada tema persatuan nasional muncul

kata-kata seperti *Soeharto yang berbahaya* sebagai respons terhadap ancaman komunis.

Adanya pernyataan dan kosakata yang dilontarkan oleh ASPR di atas menunjukkan adanya fenomena hegemoni tandingan atau kontrahegemoni (*counter hegemony*) terhadap wacana demokrasi Orde Baru. Hal seperti ini sekaligus membuktikan bahwa bahasa dan praktik kebahasaan tak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat atau medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan sosial-politik. Namun, bahasa tampil sebagai representasi dari dan ruang bagi pergelaran berbagai macam kuasa. Karena itu, bahasa berfungsi sebagai ruang tempat konflik-konflik berbagai kepentingan, kekuatan, kuasa, proses hegemoni dan hegemoni tandingan terjadi.¹

Keadaan seperti itu sesuai dengan apa yang dikatakan Foucault² bahwa dalam kekuasaan senantiasa mengandaikan perlawanan (*resistance*). Lewat wacana-wacana tertentu hubungan-hubungan kekuasaan diciptakan dan didistribusikan dalam masyarakat. Demikian pula, dimungkinkan adanya wacana tertentu yang diciptakan sebagai lawan atau tandingan dari wacana yang sudah ada.

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh kedua pihak—Orde Baru dan ASPR—terlihat adanya interaksi di antara keduanya yang terwujud dalam bentuk pergulatan kekuasaan, manajemen legitimasi, kontrol atas proses akumulasi, dan menyangkut juga produksi budaya serta pembatasan perbedaan pendapat. Memang kekuasaan itu juga bergantung kepada hegemoni yang mengalir dari relasi tarik-menarik antara masyarakat madani dan negara.³

¹ Lihat Hikam, "Bahasa ...", h. 77.

² Sebagaimana dikutip Hikam dalam "Bahasa ...", h. 86.

³ Lihat van Langenberg, "Negara ...", h. 224—225.

Relasi tarik-menarik pengaruh antara ASPR dan negara itu terlihat jelas dari pernyataan-pernyataan Orde Baru yang semuanya direspons oleh ASPR dengan pernyataan yang berlawanan. Sebagai upaya memperjelas adanya relasi tarik-menarik tersebut yang sekaligus menunjukkan adanya pertarungan wacana di antara keduanya, berikut ini dirangkumkan contoh wacana hegemoni dan kontrahegemoni (hegemoni tandingan) yang ditemukan dalam studi ini.

TABEL 9. 4
WACANA HEGEMONI DAN KONTRAHEGEMONI

Wacana Hegemoni	Wacana Kontrahegemoni
1	2
Demokrasi Pancasila bersifat unik dan spesifik Indonesia.	Demokrasi Pancasila melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan berbau komunis.
Negara integralistik memposisikan negara sebagai pelindung rakyat, "ngayomi lan ngayem"	Negara integralistik memanfaatkan kultur feodal sehingga Orde Baru layak disebut sebuah kerajaan karena mengharuskan rakyat patuh kepada sang raja dan rakyat tidak bisa mempengaruhi negara. Negara yang demikian dianggap sebagai bertala.
ABRI sudah selayaknya terlibat dalam masalah sosial politik karena jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI sangat banyak.	Kejahatannya juga banyak, dalam menindas, membunuh, membantai, dan segala macam dengan kekuatannya.

1	2
Dwifungsi ABRI merupakan permintaan rakyat atau sebuah panggilan.	Dwifungsi ABRI merupakan paksaan karena rakyat dipaksa minta kalau perlu dengan cara kerusuhan. Bahkan fungsi sospol ABRI adalah membuat kerusuhan.
ABRI memotret dirinya sebagai organisasi yang paling nasionalis.	ABRI bukan nasionalis, melainkan fasis karena menciptakan keutuhan bangsa dengan cara memaksa tanpa mengakui adanya perbedaan dan keberagaman.
ABRI mengklaim kepemimpinan sipil menimbulkan instabilitas dan malapetaka ekonomi.	ABRI-lah yang menjadi sumber instabilitas karena selalu ikut campur tangan dalam masalah-masalah sipil. ABRI-lah perusak tatanan kehidupan bernegara selama ini.
ABRI harus duduk di DPR/MPR karena berfungsi sebagai stabilisator dan dinamistor.	Fungsi stabilisator dan dinamistor menunjukkan kesombongan ABRI yang selama ini memang berlagak jagoan.
Keberadaan ABRI di DPR sebagai perwujudan kemaunggalan ABRI dengan rakyat.	ABRI menjadi lawan rakyat karena dalam kenyataannya ABRI selalu berlawanan dengan rakyat, menekan rakyat, dan tidak pernah memihak rakyat.
ABRI perlu memihak Golkar karena diperlukan kekuatan politik yang dominan untuk menciptakan stabilitas politik.	ABRI menyimpang dari aturan karena sebagai alat pertahanan negara ia tidak netral lagi bahkan hubungan ABRI-Golkar-Birokrasi menguatkan anggapan bahwa Orde Baru adalah negara komunis.
Ancaman-ancaman seperti SARA dan komunis harus diwaspadai karena berbahaya bagi persatuan nasional.	Bukan SARA atau komunis yang membahayakan persatuan nasional, melainkan Soc-harto yang sangat berbahaya.

Dari berbagai wacana di atas—demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, persatuan nasional—dapat ditarik adanya benang merah di antara ketiga tema utama yang dibicarakan dalam studi ini terutama dari sisi wacana kontrahegemoni sebagai berikut.

Pertama, kondisi bangsa Indonesia yang sangat heterogen dan negara Indonesia yang berupa negara kepulauan karena terdiri atas beribu-ribu pulau dimanfaatkan Orde Baru untuk menjadikannya sebagai ancaman terhadap negara dan bangsa Indonesia. Bahkan ancaman itu dibesar-besarkan oleh Orde Baru dengan maksud menakut-nakuti rakyat dan memanfaatkan trauma rakyat terhadap peristiwa masa lalu, kemudian muncul istilah-istilah komunis, GPK, subversif, pemberontak, makar, dan sebagainya yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi persatuan nasional. Istilah-istilah tersebut juga digunakan Orde Baru untuk memberikan label kepada pihak-pihak yang berani memposisikan diri berbeda dengan Orde Baru. Adanya label-label seperti itu, membuat rakyat semakin takut memposisikan diri berbeda dengan Orde Baru. Hal itu terjadi karena label itu diberikan kepada siapa saja yang menurut Orde baru mengusik kekuasaannya (monopoli interpretasi). Karena itu, selama Orde Baru berkuasa tidak ada pihak yang menyatakan diri sebagai oposisi. Apalagi secara jelas bahwa Orde Baru tidak melegalkan adanya oposisi di Indonesia. Melihat adanya berbagai ancaman tersebut, Orde Baru memunculkan isu utama 'persatuan nasional'. Isu ini sangat ditonjolkan Orde Baru. Persatuan nasional yang menjadi salah satu tema utama wacana Orde baru tidak lepas dari keterkaitan dengan tema-tema utama lainnya: dwifungsi ABRI dan demokrasi Pancasila.

Kedua, isu persatuan nasional beserta ancaman terhadapnya kemudian dibesar-besarkan Orde Baru dengan maksud untuk melibatkan ABRI dalam masalah sosial politik (dwifungsi ABRI). Dengan dalih demi menjaga persatuan nasional dalam masyarakat yang sangat heterogen seperti Indonesia ini, ABRI lalu dilibatkan dalam masalah sosial politik. Untuk itu, ABRI lalu memotret dirinya sebagai organisasi paling solid, paling modern, paling nasionalis, dan hanya mengutamakan kepentingan nasional. Potret seperti itu diperlukan ABRI untuk mengelabui rakyat agar dianggap sebagai satu-satunya organisasi yang mampu mempertahankan persatuan nasional dari segala ancaman tersebut. ABRI yang mengklaim dirinya sebagai perekat bangsa atau penjaga keutuhan bangsa yakin bahwa tanpa dwifungsi ABRI, persatuan nasional tidak akan terwujud bahkan bangsa ini akan pecah berkeping-keping.

Namun, apa yang dilakukan ABRI selama ini justru membesar-besarkan ancaman itu. Bahkan jika ancaman itu tidak terwujud, ada indikasi bahwa ABRI berusaha menunjukkan adanya ancaman itu dengan membuat kerusuhan, sebagaimana disebut ASPR bahwa fungsi sospol ABRI adalah membuat kerusuhan. Dengan adanya kerusuhan itu, rakyat pasti minta perlindungan kepada ABRI karena hal itu memang tugas ABRI dan hanya ABRI yang memegang senjata. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi ABRI bahwa dwifungsi itu merupakan panggilan (permintaan rakyat).

Karena potret ABRI seperti itu pula, Orde Baru mengklaim bahwa hanya ABRI yang mau dan mampu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dari segala upaya yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Pancasila akhirnya dijadikan sebagai tameng oleh ABRI untuk memusnahkan siapa saja yang

diberi label 'anti-Pancasila'—yaitu mereka yang berani memposisikan dirinya berbeda pendapat dengan Orde Baru. Begitu juga dengan wacana hegemoni yang lain seperti kata 'pembangunan' yang dijadikan sebagai kata kunci oleh Orde Baru dalam melancarkan segala programnya. Kepada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan Orde Baru diberikan label 'antipembangunan'. Dengan senjatanya, ABRI memusnahkan pihak-pihak yang dianggap mengancam kelestarian kekuasaan Orde Baru. Orde Baru melalui ABRI, yang menjadi alatnya, tanpa rasa bersalah dan secara sah memusnahkan mereka. ABRI dipakai sebagai alat oleh Orde Baru karena di dalam organisasi ABRI berlaku hukum komando yang harus dipatuhi oleh bawahan. Dengan sistem itu mereka mudah dikendalikan oleh panglima tertinggi, Soeharto. Karena itu, rezim Orde Baru adalah rezim militer yang jelas otoriter dan tidak demokratis sama sekali.

Ketiga, untuk melegalkan adanya dwifungsi ABRI, Orde baru memberi nama demokrasinya dengan demokrasi Pancasila yang diklaim sebagai demokrasi yang unik dan spesifik Indonesia. Hal tersebut hanyalah merupakan upaya Orde Baru untuk mengelabui rakyat agar demokrasi Pancasila tidak disamakan dengan konsep demokrasi yang sesungguhnya. Padahal sebagaimana sudah dibicarakan di atas bahwa demokrasi yang sesungguhnya tidak menerima peran militer secara langsung dalam suatu sistem politik. Bahkan Orde Baru mengklaim bahwa dwifungsi ABRI merupakan konsep politik yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi Pancasila. Dengan label 'Pancasila' itu pula, Orde Baru berusaha memonopoli interpretasi terhadap demokrasi Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis.

Melihat kenyataan praktik politik Orde Baru seperti itu, ASPR lantas tidak tertarik bahkan tidak percaya sama sekali terhadap segala program dan kebijakan yang dijalankan Orde Baru. ASPR sangat yakin bahwa demokrasi tidak mungkin diturunkan dari atas. Demokrasi harus dibangun dari bawah (rakyat). Karena itu, ASPR melihat bahwa supaya demokrasi bisa berjalan, haruslah ada usaha membangun kekuatan politik rakyat yang dimulai dengan memberikan pendidikan kepada mereka. Demokrasi yang dibangun dari bawah itu mengidealkan praktik politik sebagaimana tergambar dalam wacana demokrasi ideal mereka di bawah ini.

Wacana Demokrasi yang Ideal

Berdasarkan uraian di atas yang didukung dengan temuan lapangan yang sudah disajikan di bagian depan, terlihat bahwa demokrasi yang diidealkan oleh ASPR adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Yang utama adalah rakyat harus terlibat dalam proses politik: merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasil—seiring dengan definisi demokrasi itu sendiri. Memang disadari bahwa demokrasi adalah konsep perwakilan. Akan tetapi, yang diidealkan ASPR adalah adanya wakil rakyat yang benar-benar dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Wakil seperti itu hanyalah wakil yang benar-benar dipilih rakyat, bukan wakil yang diangkat penguasa. Ini berarti pula bahwa partai yang mengikuti pemilu haruslah partai milik rakyat. Artinya, penguasa tidak boleh ikut campur lagi dalam masalah internal partai, tidak ada lagi istilah-istilah seperti 'pembinaan', *litsus*, *recall*, dan

sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan wakil yang duduk di lembaga parlemen itu menjadi wakil penguasa, bukan wakil rakyat.

Dalam mengatasi tingkat pendidikan rakyat yang masih rendah, yang diidealkan ASPR adalah adanya pendidikan terutama pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat yang dianggap masih bodoh itu agar mereka mengetahui kewajiban dan hak mereka. Dengan demikian, bukan hanya kewajiban yang dituntut oleh penguasa kepada rakyat, tetapi rakyat harus mengetahui hak-hak mereka yang harus dituntut dari penguasa.

ASPR juga mengidealkan adanya tahapan pelaksanaan demokrasi yang transparan, tidak kabur bahkan tidak dijalankan sama sekali tahapan itu seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Dengan tahapan-tahapan yang transparan, ASPR percaya sudah waktunya bangsa Indonesia ini memiliki sistem politik yang demokratis.

Dalam subtema 'negara integralistik', ASPR jelas menolak penafsiran seperti yang dikemukakan Soepomo karena mengaburkan posisi negara dan rakyat. Karena itu, ASPR menuntut agar posisi rakyat dikembalikan seperti semula, sesuai dengan prinsip demokrasi, posisi rakyat yang kuat dan berdaya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara hanyalah alat rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan demikian, negara haruslah melayani keinginan-keinginan rakyat, bukan sebaliknya rakyat dituntut dan dipaksa melayani kemauan negara. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan adanya pemberdayaan rakyat.

Supaya demokrasi yang diidealkan oleh ASPR seperti di atas bisa terwujud, dwifungsi ABRI harus dicabut. ABRI harus kembali ke barak. ABRI tidak boleh lagi

ikut campur dalam masalah-masalah sipil karena hal itu menjadi sumber utama tidak adanya demokrasi di Indonesia.

Meskipun begitu, ASPR tidak anti-ABRI. ASPR membutuhkan ABRI sebagai alat pertahanan. Sebagai kompensasi dari dihapuskannya dwifungsi ABRI dan tugas berat yang diembannya, ASPR menyarankan agar rezim memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi ABRI. Personel ABRI hanya boleh terjun ke dalam masalah sipil jika melepas baju ABRI-nya. Ini berarti bahwa ketika memasuki wilayah sipil, personel ABRI tersebut tidak lagi menerapkan hukum militer dalam wilayah sipil dan tidak lagi menggunakan cara-cara militer dalam menangani sebuah persoalan.

Dalam membina persatuan nasional, tidak perlu ditakutkan adanya ancaman disintegrasi karena adanya beribu-ribu pulau di Indonesia. Yang harus diutamakan adalah diwujudkannya keadilan dan pemerataan karena dengan begitu persatuan nasional akan terwujud dengan sendirinya sebagai akibat dari adanya rasa saling membutuhkan di antara daerah. Itu berarti bahwa sentralisasi harus dihapuskan karena hal itu dianggap menjadi sumber utama disintegrasi bangsa.

Berkaitan dengan bentuk negara, yang diidealkan ASPR masih tetap negara kesatuan sebagaimana yang dicita-citakan *founding father* kita, tetapi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah karena dengan begitu keadilan dan pemerataan akan lebih mudah diciptakan dan tiap-tiap daerah bisa mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing.

Dalam subtema ancaman SARA, ASPR mengidealkan diwujudkannya keadilan dan pemerataan dengan menghapus sifat-sifat diskriminasi. Kepada rakyat yang berbeda-beda suku, ras, agama harus diberikan hak-hak mereka secara adil dan merata. Jika terjadi hal yang demikian itu, persatuan nasional pasti terwujud.

Begitu juga dalam hal problem minoritas Cina, rezim harus memperlakukan orang Cina dalam segala bidang: budaya, politik, ekonomi sebagaimana warga negara yang lain. Dalam bidang budaya, budaya Cina harus dipandang sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, mereka harus diberi hak berpolitik yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam bidang ekonomi, mereka juga tidak boleh dilebihkan dari warga negara lainnya.

Dalam hal kebijakan rezim untuk mengatasi kesenjangan sosial, ASPR mengidealkan adanya penekanan pada pemerataan, bukan pada pertumbuhan sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru karena pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan menyebabkan kesenjangan sosial bertambah lebar.

Dalam subtema ancaman komunis dan Islam radikal, rezim tidak perlu menakut-nakuti rakyat dengan membesar-besarkan kedua isu tersebut karena hal itu bersifat membodohi rakyat. Kebodohan rakyat inilah yang dianggap sebagai ancaman karena dengan begitu rakyat mudah diperalat atau diombang-ambingkan pihak-pihak tertentu. Karena itu, rezim seharusnya memberikan pendidikan dan penyadaran dalam masalah komunis dan Islam radikal kepada rakyat sehingga mereka mampu menilai dan menyeleksi paham-paham yang ditawarkan kepada mereka.

Semua paparan mengenai wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR di atas dirangkum dalam sebuah tabel berikut.

TABEL 9.5
WACANA DEMOKRASI YANG IDEAL

Komponen utama	Sasaran	Upaya yang ditempuh
Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> * Terciptanya pemerintahan 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' (demokratis) * Adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik: merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasil 	<ul style="list-style-type: none"> * memberikan pendidikan kepada rakyat agar memiliki keberdayaan * rakyat memilih wakilnya sendiri tanpa intervensi rezim * mengupayakan transparansi dalam pelaksanaan tahapan demokrasi * mengembalikan posisi rakyat kepada posisi yang kuat
ABRI	<ul style="list-style-type: none"> * Terbentuknya ABRI yang profesional di bidang pertahanan tanpa ikut campur dalam bidang sosial politik 	<ul style="list-style-type: none"> * mencabut dwifungsi ABRI: mengembalikan ABRI pada tugas semula di bidang pertahanan * memberikan kesejahteraan yang memadai kepada personel ABRI * menuntut personel ABRI untuk melepaskan baju ABRI-nya jika ingin terlibat dalam bidang sosial politik
Persatuan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> * Terciptanya persatuan nasional sebagaimana yang dicita-citakan founding father 	<ul style="list-style-type: none"> * menghilangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat sentralistik * mewujudkan negara kesatuan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah * mewujudkan keadilan dan pemerataan dan meniadakan politik diskriminasi * pelaksanaan pembangunan yang menekankan pemerataan, bukan pertumbuhan * memberikan penyadaran/pendidikan kepada rakyat dalam hal SARA, komunis, Islam radikal

Apa pun dan bagaimana pun wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR di atas dapat dijadikan sebagai wacana alternatif bagi praktik politik di Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang benar-benar demokratis. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa bagaimanapun kondisinya, rakyat harus ikut terlibat dalam proses politik. Apalagi demokrasi yang diidealkan oleh ASPR tersebut banyak memiliki relevansi dengan berbagai hasil studi dan pendapat para ilmuwan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wacana demokrasi yang diidealkan ASPR ini tidaklah bersifat subjektif semata, melainkan merupakan sebuah intersubjektivitas. Bahkan intersubjektivitas ini mengacu kepada sebuah realitas.⁴

⁴ Lihat C.A. van Peursen, *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990), h. 15.

BAB X

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORETIS

Setelah melalui proses yang sangat panjang, mulai dari pembicaraan mengenai latar belakang masalah sampai pada temuan lapangan dan pembahasan studi, pembicaraan dalam studi ini telah sampai pada bab terakhir. Pada bab ini, dipaparkan dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan implikasi teoretis. Selain dua hal pokok tersebut, dipaparkan pula keterbatasan studi ini serta rekomendasi bagi studi lain yang sejenis.

Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini diisi dengan paparan secara ringkas tentang hal-hal yang menjadi pokok permasalahan studi ini berdasarkan temuan lapangan, diskusi, dan pembahasan yang sudah dipaparkan di bagian depan. Setelah mencermati berbagai hal tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan studi sebagai berikut.

Respons ASPR terhadap wacana Orde Baru dalam semua komponen utama—demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, persatuan nasional—memperlihatkan adanya penolakan yang mendalam. Hanya pada dua komponen bagian saja yang tidak terlihat adanya penolakan itu—yaitu dalam hal kedudukan ABRI di MPR yang diterima secara superfisial dan bentuk negara kesatuan yang tidak diterima dan tidak ditolak.

Terhadap komponen utama 'demokrasi Pancasila', ASPR menolak secara keras dan mendalam. Temuan lapangan menganggap bahwa Orde Baru sangat tidak demokratis. Ketidakdemokratisan Orde Baru itu ditandai oleh tidak adanya

keterlibatan rakyat dalam proses politik: rakyat tidak memiliki suara bahkan tidak memiliki harga. Tidak adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik ini di antaranya tecermin dalam kebijakan 'massa mengambang'. Kebijakan yang dibuat Orde Baru sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa tingkat pendidikan rakyat masih rendah itu dinilai oleh ASPR sebagai solusi yang sangat menyimpang dari persoalan yang ada. Karena itu, kebijakan tersebut dinilai hanya sebagai taktik Orde Baru untuk memobilisasi rakyat ke Golkar.

Demokrasi Pancasila hanyalah sebuah demokrasi dalam namanya, tetapi pelaksanaannya sangat otoriter. Pernyataan tersebut juga terbukti dari adanya konsep negara integralistik berdasarkan pandangan Soepomo yang lebih mengutamakan persatuan keseluruhan dalam negara dan menolak adanya hak-hak dasar bagi rakyat. Pandangan seperti itu hanya berusaha mengaburkan posisi rakyat dan negara serta memanfaatkan kultur feodal sehingga menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

Sama halnya dengan komponen demokrasi Pancasila, terhadap komponen 'dwifungsi ABRI', ASPR juga menunjukkan penolakan secara mendalam. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa dwifungsi ABRI merupakan sumber dari tidak adanya demokrasi di Indonesia. Temuan ini sekaligus membuktikan pandangan dunia Barat yang tidak menerima peran militer secara langsung dalam suatu sistem politik karena lembaga militer bukanlah lembaga demokrasi. Agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan, Dwifungsi ABRI harus dicabut. ABRI harus kembali ke barak dan tidak lagi turut campur dalam urusan-urusan sosial politik.

Isu-isu yang diklaim Orde Baru sebagai ancaman terhadap 'persatuan nasional' juga ditolak secara keras oleh ASPR. Ancaman 'disintegrasi bangsa', 'SARA',

dan 'komunis serta Islam radikal' dibesar-besarkan Orde Baru untuk menakut-nakuti rakyat agar mereka mencari perlindungan kepada ABRI—karena hanya ABRI yang memegang senjata. Dengan begitu, dwifungsi ABRI tetap berjalan. Temuan lapangan menyatakan bahwa segala ancaman itu tidaklah bersumber pada isu-isu tersebut, tetapi lebih bersumber pada tidak adanya keadilan dan pemerataan atau politik diskriminasi sebagai akibat dari adanya pemusatan kekuasaan di tangan penguasa (sentralisasi).

Adapun wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, yaitu adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik: merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menikmati hasil. Wakil rakyat harus benar-benar dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Wakil seperti itu hanyalah wakil yang benar-benar dipilih rakyat, bukan wakil yang diangkat penguasa. Supaya rakyat bisa terlibat secara aktif dalam proses politik itu, diperlukan adanya pendidikan terutama pendidikan politik bagi rakyat agar mereka mengetahui kewajiban dan hak mereka. Supaya proses tersebut bisa berjalan, konsep 'negara integralistik' Soepomo yang menyimpang dari teori integralistik itu harus dihilangkan dan posisi rakyat harus diperkuat dan diberdayakan. Tanpa itu, demokrasi tidak akan berjalan.

Agar demokrasi yang sesungguhnya bisa terwujud, harus tidak ada lagi campur tangan ABRI dalam masalah-masalah sipil karena hal itu hanyalah menjadi sumber utama tidak adanya demokrasi di Indonesia. Anggota ABRI hanya boleh menduduki wilayah sipil jika melepaskan baju ABRI-nya. Ketika memasuki wilayah sipil, mereka tidak boleh lagi memberlakukan hukum militer. Ini tidak berarti bahwa ASPR anti-ABRI. ASPR membutuhkan ABRI sebagai alat pertahanan. Sebagai

kompensasi dari dihapuskannya dwifungsi ABRI dan tugas berat yang diembannya, rezim harus memberikan kesejahteraan yang lebih memadai bagi ABRI.

Dalam membina persatuan nasional, rezim tidak perlu membesar-besarkan isu yang dianggap sebagai ancaman seperti 'disintegrasi bangsa', 'SARA', 'komunis dan Islam radikal' karena rakyat sudah sadar akan kemajemukan bangsa ini dan mampu menilai serta menyeleksi paham-paham yang ditawarkan kepada mereka. Untuk lebih memberdayakan mereka agar tidak terpengaruh oleh adanya isu-isu tersebut diperlukan adanya pendidikan (terutama pendidikan politik) yang diberikan kepada mereka.

Karena sumber dari segala ancaman adalah politik diskriminasi yang dilakukan rezim, untuk mewujudkan persatuan nasional dan demokrasi harus diutamakan adanya keadilan dan pemerataan. Kepada rakyat yang berbeda-beda suku, ras, agama harus diberikan hak-hak mereka secara adil dan merata. Jika hal yang demikian itu terjadi, persatuan nasional pasti terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal itu pula, harus diberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah sehingga keadilan dan pemerataan akan lebih mudah diciptakan. Dengan begitu, persatuan nasional akan terwujud dengan sendirinya sebagai akibat dari adanya rasa saling membutuhkan di antara daerah.

Akhirnya, wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR ini dapat dianggap sebagai wacana alternatif untuk membangun demokrasi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa bagaimanapun kondisinya, rakyat harus ikut terlibat dalam proses politik.

Implikasi Teoretis

Temuan-temuan studi, diskusi, pembahasan, dan kesimpulan studi ini sudah diuraikan di bagian depan. Uraian berikut ini merupakan upaya menempatkan hasil studi pada posisi teori yang relevan—tentu saja dengan dukungan studi-studi lain (jika ada) yang terkait dengan studi ini. Dengan upaya tersebut diharapkan studi ini dapat memberikan sumbangan khazanah teoretis yang membicarakan wacana demokrasi.

Pertarungan antara Orde Baru dan Aktivis (ASPR) dalam Perspektif Gramscian dan Foucauldian

Sudah disebutkan di bagian depan bahwa pembicaraan mengenai demokrasi tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai hubungan negara dan masyarakat. Apabila masyarakat (madani) relatif kuat berhadapan dengan negara, demokrasi akan berjalan. Sebaliknya, jika negara kuat dan masyarakat lemah, demokrasi akan mandek. Hasil studi ini menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemandekan. Kemandekan itu disebabkan oleh adanya posisi Orde Baru yang sangat kuat berhadapan dengan rakyat sehingga rakyat tidak dilibatkan sama sekali dalam proses politik. Hal ini sekaligus memperkuat pandangan Poulantzas dengan teori negara otonomnya yang menyatakan bahwa negara merupakan badan yang aktif, dominan, hegemonik, dan mandiri dalam membuat kebijakan untuk kepentingan negara.

Orde Baru memang relatif otonom terhadap persaingan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Itu dicapai karena ia mengharamkan politik massa

dan politik afiran yang tumbuh dan berakar pada kekuatan-kekuatan nyata dalam masyarakat. Bahkan ia mempresentasikan dirinya sebagai wakil sejati dari seluruh kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Potret diri seperti itu telah melahirkan 'turunan-turunan baru' yang serba mengambang: elite mengambang, partai mengambang, ormas mengambang, pers mengambang, dan intelektual mengambang. Karena itu, Sparringa menyebutnya dengan negara mengambang.¹

Otonomi dan kuatnya Orde Baru itu dibangun dengan apa yang dalam perspektif Gramscian disebut hegemoni. Hegemoni—sebagai suatu cara yang digunakan rezim untuk menaklukkan rakyat dalam rangka mempertahankan kekuasaannya melalui penanaman pengetahuan, nilai, serta norma sehingga tercipta kepatuhan aktif lewat kepemimpinan moral dan intelektual—sangatlah relevan dengan Orde Baru.

Orde Baru memaksakan visi hegemoninya melalui berbagai institusi seperti sekolah, media massa, agama, bahkan melalui berbagai praktik kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Orde Baru memonopoli interpretasi terhadap Pancasila (termasuk demokrasi Pancasila) dan hasil interpretasinya itu disosialisasikan melalui berbagai lembaga tersebut. Di sekolah-sekolah dari sekolah dasar bahkan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi diajarkan bidang-bidang studi yang mendukung visi hegemoni Orde Baru seperti Pancasila (PPKn), sejarah, dan kewiraan hasil interpretasi Orde Baru itu.

Fenomena tersebut sekaligus membenarkan teori Foucault yang melihat adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan: sebuah kekuasaan akan menciptakan pengetahuan dan sistem informasi baru—tentu saja pengetahuan dan

¹ Lihat Sparringa, "Nasionalisme ...", h. 55.

informasi yang sesuai dengan interpretasi rezim demi kelanggengan kekuasaannya. Dengan demikian, pengetahuan yang didapatkan para pelajar dan mahasiswa Indonesia diharapkan dapat mendukung kekuasaan Orde Baru. Dengan begitu, posisi Orde Baru semakin kuat karena akan mendapat legitimasi dari rakyat.

Selain itu, visi hegemoni Orde Baru juga disebar dan ditanamkan melalui bahasa—sebagai sarana utama yang melayani fungsi hegemoni—yang terlukis dalam daftar kata kunci yang secara kontinu diulang-ulang dalam wacana politik negara.² Kata ‘pembangunan’ lalu menjadi kata kunci dalam menyebarkan visi hegemoni Orde Baru beserta istilah-istilah lain: Orde Pembangunan, Bapak Pembangunan, Kabinet Pembangunan, stabilitas nasional, persatuan nasional, kepentingan nasional, konsensus nasional. Memang Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai basis utama bagi pembentukan legitimasi politik rakyat. Dengan kata lain, pembangunan (ekonomi) menjadi pilar legitimasi Orde Baru: hanya karena pembangunanlah Orde Baru (Soeharto) itu eksis. Kata ‘pembangunan’ itu sendiri bahkan telah menciptakan realitas sosial tersendiri yang “menyelimuti seluruh suasana kebatinan bangsa” sehingga Sparringa mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi asas tunggal negeri ini adalah ‘pembangunan’.³

Pentingnya peran bahasa sebagai sarana untuk melayani fungsi hegemoni menyebabkan keterasingan bahasa dari fungsi dan konteks sosialnya yang tradisional. Fenomena bahasa memiliki cakupan visi dan dampak sosio-politis. Plato⁴ pernah mengatakan, kalau penguasa menjadi otoriter, bahasa sudah hampir pasti akan menjadi kacau balau dan juga mengacau-balaukan. Untuk

² Lihat van Langenberg, “Negara...”, 227.

³ Lihat Sparringa, “Nasionalisme...”, h. 56.

⁴ Sebagaimana dikatakan Fransiskus Borgias dalam “Bahasa dan Realitas Perubahan Sosial”, dalam *Basis*, No. 10, Oktober 1993, h. 366.

melanggengkan struktur dan mempertahankan status quo, penguasa akan melakukan manipulasi sosio-politis lewat manipulasi pemakaian bahasa. Fenomena yang ditemukan dalam studi ini membenarkan perkataan Plato tersebut. Kata-kata seperti *demokrasi Pancasila*, *dwifungsi ABRI*, *persatuan nasional*, *ngayomi* dan *ngayomi*, *ABRI perekat bangsa*, *ABRI nasionalis*, dan sejumlah kata lain yang sudah dibicarakan di depan menjadi bukti nyata kebenaran manipulasi bahasa demi kepentingan penguasa.

Praktik bahasa seperti itu—yang menampilkan sesuatu yang berbeda dengan yang dimaksudkan atau berbeda dengan keadaan sebenarnya—disebut Ben Anderson sebagai bahasa topeng.⁵ Ide tentang topeng ini menjadi ide yang tersamar dengan maksud-maksud tersembunyi di baliknya, ia digunakan untuk memperdaya atau untuk menyembunyikan kebenaran. Kata-kata tersebut semuanya menyiratkan terjadinya pengkhianatan atas realitas tunggal yang real.⁶ Dengan demikian, kata atau bahasa diperlakukan sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap massa dengan tujuan akhir 'tetap berkuasa'.

Dominasi Orde Baru yang dicapai dari kemenangan intelektual dan moral itu—melalui pembentukan pengetahuan dan sistem informasi baru—dalam sebuah perjuangan revolusioner harus dilawan dengan pendidikan/pengetahuan. Dalam hal ini diperlukan adanya peran intelektual (organik)—intelektual yang secara organis berakar di dalam rakyat—untuk membentuk sebuah *historical bloc*. Setelah terbentuknya *historical bloc* itu, dimungkinkan terjadi *war of position* dan

⁵ Lihat Mochtar Pabottingi, "Komunikasi Politik dalam Transformasi Ilmu Politik", dalam *Prisma* 6, Juni 1991, h. 19.

⁶ Lihat Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1990), h. 150; lihat pula Benedict R. O'G. Anderson, "Bahasa Politik Indonesia, dalam Latif dan Ibrahim, *Bahasa ...*, h. 153.

'melenyapnya negara'. Fenomena yang dijumpai di lapangan—yang terlihat dalam profil kelompok ASPR dengan segala aktivitas dan programnya—sangat relevan dengan teori tersebut. Kelompok ASPR yang pembentukannya diprakarsai oleh tokoh-tokoh alumnus dari FKMS—dapat digolongkan sebagai intelektual organik—berusaha membuat jaringan dengan organisasi yang berbasis massa dan memberikan pendidikan politik kepada mereka dengan program sekolah rakyatnya. Aktivitas seperti itu sangat efektif dalam memberikan penyadaran kepada rakyat termasuk yang ada di kantong-kantong ASPR sehingga diharapkan akan terbentuk *historical bloc*. Pada akhirnya nanti, mereka akan berusaha mengadakan *war of position* sehingga terbentuklah negara baru dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Gambaran seperti itu selain sesuai dengan pandangan Gramsci, juga sangat didukung oleh teori Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya datang 'dari atas', tetapi juga 'dari bawah' atau 'dari dalam' diri masyarakat: kekuasaan ada dan tersebar serta datang dari mana-mana, dan yang fundamental terletak dalam pengetahuan. Ini berarti bahwa rakyat yang selama ini dianggap bodoh kemudian lebih dibodohkan lagi oleh Orde Baru dengan menciptakan ketakutan-ketakutan sebagaimana sudah dibicarakan dalam hasil studi ini harus diberi pengetahuan agar mereka memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban mereka serta dapat membedakan ideologi yang bersifat negatif dan pengetahuan yang berdasarkan kebenaran. Pengetahuan seperti itu akan berpengaruh pada hubungan kekuasaan.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengetahuan para aktivis kelompok ASPR sangat luas⁷ sehingga mereka tidak mudah menerima ideologi Orde Baru bahkan terlihat adanya perlawanan terhadap Orde Baru. Perlawanan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengetahuan yang mereka miliki. Bahkan terhadap penggunaan bahasa topeng Orde Baru pun mereka sangat peka dan tidak mudah percaya. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan penolakan terhadap komponen-komponen utama wacana demokrasi Orde Baru secara total. Penolakan itu juga dinyatakan dengan kata-kata yang memperlihatkan kontrawacana (*counter-discourse*) seperti yang dikatakan Foucault⁸ sebagai "pengetahuan yang tersembunyi" yang selalu mengancam wacana dominan melalui gangguan dan perlawanan untuk menundukkannya.

Dengan demikian, terdapat persaingan ragam bahasa antara wacana dominan dan kontrawacana. Hal seperti itu juga dapat dipahami dalam kerangka berpikir yang dirumuskan oleh Gramsci dan Mikhail Bakhtin.⁹ Baik Gramsci maupun Bakhtin menganalisis kedua kutub—wacana dominan dan kontrawacana—ini sebagai prinsip-prinsip hegemonik yang bertentangan dan bersaing. Pihak penguasa menetapkan wacana berkewenangan atau prinsip hegemonik. Diterima atau tidaknya pandangan dunia pihak lain berkaitan dengan proses bagaimana suatu ragam bahasa menghasilkan prestise yang cukup tinggi sehingga memancarkan daya tarik estetis, linguistik, dan ideologis.

⁷ Keadaan seperti ini memang masih dirasakan terbatas pada tokoh-tokoh ASPR, tetapi diyakini akan terjadinya transfer pengetahuan itu kepada seluruh anggota ASPR karena adanya sekolah rakyat yang dibentuk oleh ASPR ini.

⁸ Lihat Muhammad A.S. Hikam, "Perlawanan Sosial: Telaah Teoretis dan Beberapa Studi Kasus", dalam *Prisma* 8, 1990, h. 88.

⁹ Sebagaimana dikatakan Dede Oetomo dalam "Dimensi Kerakyatan dalam Dinamika Keindonesiaan", Makalah Diskusi Panel, Surabaya, 20 Desember 1997, h. 3.

Sebagai contoh kata-kata yang menunjukkan kontrawacana atau kontrahegemoni yang ditemukan dalam studi ini di antaranya *demokrasi Pancasila slogan menyasatkan, dwifungsi cermin arogansi ABRI, persatuan nasional benteng kebijakan tak bermoral* yang merupakan generalisasi dari kata-kata lain yang lebih khusus seperti *melanggar prinsip demokrasi, berbau komunis, negara integralistik berkultur feodal, sebuah kerajaan, kejahatan ABRI banyak, fasis, sumber instabilitas, Soeharto yang berbahaya*.

Selain kata-kata seperti di atas, wacana kontrahegemoni yang ditemukan di lapangan ada yang berbentuk plesetan—plesetan terhadap mars ABRI untuk mendekonstruksi wacana dwifungsi ABRI. Memang plesetan ini merupakan semacam “konsolidasi” perlawanan secara simbolis.¹⁰ Konsolidasi perlawanan melalui simbol itu sangat penting dan menentukan karena simbol merupakan dunia batin (*inner-world*) dan bukan dunia wadag (*outer-world*).¹¹ Dilihat dari jenisnya, plesetan yang ditemukan dalam studi ini dapat digolongkan ke dalam jenis plesetan oposisi¹² karena plesetan ini memberikan nalar dan acuan yang secara konfrontatif bertabrakan atau menjungkirbalikkan apa yang sudah lazim dalam masyarakat.¹³ Akhirnya, apakah plesetan itu akan dianggap sebagai suatu penyelewengan belaka

¹⁰ Lihat Christanto P. Rahardjo, “Dinamika Plesetan Jawa: Sebuah Konstruksi Anekdotis Politis”, dalam *Prisma* 1, Januari 1996, h. 18.

¹¹ Djoko Saryono dan Herlinawati Syaukat, “Bahasa Indonesia sebagai Cermin Dinamika Kekuasaan ORBA”, dalam *Basis*, No. 2, Februari 1993, h. 57.

¹² Ariel Heryanto, “Pelecehan dan Kesewenang-wenangan Berbahasa Plesetan dalam Kajian Bahasa dan Politik di Indonesia”, dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.), *PELEBA 9*, (Yogyakarta: Kencana, 1996), h. 115.

¹³ Plesetan yang ditemukan dalam studi ini menunjukkan adanya usaha merontokkan opini masyarakat yang selama ini memandang ABRI sangat banyak jasanya dalam membela kepentingan rakyat, sedangkan plesetan itu sendiri memandang bahwa ABRI tidak ada gunanya sama sekali bagi rakyat sehingga ada tuntutan untuk dibubarkan—terutama dibubarkan dari fungsi sosial politiknya.

atau justru sebagai sebuah daya gaib dari gejala berbudi bahasa tergantung pada latar belakang dan kepentingan seseorang.¹⁴

Bagaimanapun kuatnya sebuah negara, memang masih ada ruang tempat beberapa kelompok secara aktif melakukan segala sesuatu untuk memperlebar kebebasan pribadi dan membela kepentingan individu serta kelompok mereka. Temuan ini membuktikan hal tersebut. Meskipun Orde Baru sangat kuat dan otonom dan jelas otoriter, para aktivis termasuk di dalamnya ASPR selalu berusaha menuntut ditegakkannya demokrasi di Indonesia. Tuntutan itu ditunjukkan dengan aktivitasnya yang sering turun ke jalan. Dengan demikian, meskipun Orde Baru memonopoli interpretasi terhadap demokrasi Pancasila—tentu saja dengan memanfaatkan bermacam-macam ideologi sebagaimana disebutkan di atas—dan berusaha mempengaruhi masyarakat madani agar mempunyai interpretasi terhadap demokrasi Pancasila seperti apa yang dikehendaki olehnya, tidak berarti bahwa ia aman dari interpretasi yang berbeda dari interpretasi yang diberikannya. Orde Baru ternyata mendapatkan perlawanan dari masyarakat madani—dalam hal ini para aktivis ASPR—yang mengerti akan keburukan ideologi yang digunakan Orde Baru.

Hal itu terbukti dari adanya penolakan terhadap semua komponen utama dalam demokrasi Pancasila. Perlawanan itu juga terbukti dari seringnya aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut ditegakkannya demokrasi dan hak asasi manusia. Apalagi bahasa yang mereka gunakan menunjukkan adanya wacana kontrahegemoni sebagai respons terhadap wacana hegemoni Orde Baru. Adanya

¹⁴ Budi Susanto, S.J., "Yogya(kar)jarna Berbudi-Bahasa Jawa Dikaji Ulang" dalam Bambang Karwanti Purwo (ed.), *PELLRA 5*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 57.

pertarungan wacana—antara wacana hegemoni dan kontrahegemoni—seperti itu memperlihatkan adanya *war of position* di antara Orde Baru dan para aktivis termasuk aktivis kelompok ASPR.

Hasil studi yang menunjukkan adanya unsur perlawanan terhadap hegemoni negara seperti ini sekaligus mendukung temuan studi yang lain di antaranya yang dilakukan Hotman Siahaan, Zainuddin Maliki, dan Tri Sulistyaningsih. Studi Hotman Siahaan menyimpulkan bahwa kuatnya hegemoni negara dan aparaturnya yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan petani (rakyat) melahirkan kesadaran untuk melakukan tindakan pembangkangan.¹⁵ Zainuddin Maliki dalam kesimpulan studinya menyatakan bahwa gerakan petani di desa Tanen mencerminkan perlawanan,¹⁶ sedangkan studi Tri Sulistyaningsih menyimpulkan bahwa gencarnya hegemonisasi negara atas masyarakat tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan pola pikir masyarakat secara menyeluruh. Hegemoni selalu menyisakan resistensi di masyarakat.¹⁷

Fenomena ini sekaligus membenarkan teori strukturasi yang dicetuskan Giddens, yaitu sebuah teori hubungan antara agen dan struktur—dalam hal ini ASPR dan Orde Baru—yang memperlihatkan adanya pengaruh-mempengaruhi yang bersifat dualitas dan dialektika antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Hal ini terbukti dari adanya ASPR yang tidak semata-mata sebagai subjek yang pasif, melainkan selalu aktif menuntut ditegakkannya

¹⁵ Lihat Siahaan, "Pembangkangan ...", h. 233.

¹⁶ Zainuddin Maliki, "Hubungan Negara dengan Masyarakat: Studi Kasus Respons Masyarakat Sentri di Desa Tanen Terhadap Negeranisasi pada Masa Orde Baru", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996, h. 214.

¹⁷ Tri Sulistyaningsih, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Keluarga Kecil Bahagian dan Sejahtera (KKBS) dalam Perspektif Hegemoni Negara atas Warga Masyarakat", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998, h. 182.

demokrasi. Bagaimanapun kuat dan dominannya Orde Baru sebagai struktur, pada saat tertentu terdapat peluang (*enabling*) bagi para aktivis untuk bersikap dan mengajukan pilihan lain. Hal seperti ini di antaranya terlukis dari adanya peristiwa lengsernya Soeharto dari puncak kekuasaan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998 karena desakan para aktivis.

Fenomena lengsernya Soeharto itu juga menandai adanya kemungkinan “melenyapnya negara”—menghilangnya masyarakat politik (negara) dan munculnya suatu masyarakat yang teratur (masyarakat madani) sebagai konsekuensi dari adanya krisis hegemoni—sebagaimana yang telah dialami Orde Baru. Orde Baru yang menjadikan ‘pembangunan’ sebagai basis legitimasi (material) mengalami krisis hegemoni ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi itu tentu saja pembangunan di segala bidang mengalami kemacetan dan akhirnya kata “pembangunan” yang semula memiliki kesaktian yang luar biasa seketika itu hilang kesaktiannya bahkan bapaknya sendiri, Bapak Pembangunan, harus *lengser keprabon* dari singgasana kerajaan Orde Baru.

Kelompok ASPR dalam Konteks Teori Perlawanan

Uraian di atas menyatakan bahwa dalam kelompok ASPR terdapat unsur perlawanan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ASPR ini melakukan perlawanan? Bagaimana bentuk perlawanan itu diwujudkan? Dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, fenomena yang ditemukan dalam studi ini dianalisis berdasarkan teori perlawanan seperti yang sudah diuraikan di bagian depan.

Fenomena yang ditemukan dalam studi ini sangat sesuai dengan pendapat Susan Eckstein yang menyatakan bahwa terjadinya perlawanan dimotivasi oleh adanya struktur sosial yang ditandai ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang menimbulkan perbedaan kepentingan di antara penguasa dan rakyat (marjinal). Ted Robert Gurr¹⁸ melihat banyaknya anggota masyarakat menjadi marah karena terdapat kesenjangan antara *value expectations* (nilai pengharapan) dan *value capabilities* (nilai kemampuan). Adanya kesenjangan antara barang-barang berharga dengan kesempatan atau kemampuan yang dianggap menjadi haknya untuk mendapatkan barang berharga tersebut.

Fenomena yang ditemukan dalam studi ini menunjukkan bahwa kelompok ASPR sebagai salah satu contoh kelompok marjinal¹⁹ sangat giat mengikuti aksi unjuk rasa (mengadakan perlawanan) bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan, melainkan karena terbatasnya sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan. Hal seperti ini terlihat dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh rakyat (anggota ASPR) yang tersebar di berbagai kantong ASPR yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari kelompok marjinal. Akan tetapi, bergabungnya rakyat tersebut dengan ASPR ini bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi mereka yang selama ini tidak tersalurkan melalui wakil-wakil mereka di DPR/MPR—karena sebagaimana ditunjukkan studi ini bahwa anggota DPR/MPR memang bukan wakil

¹⁸ Sebagaimana dikatakan Hotman M. Siahaan dalam "Dinamika Politik Kelompok Marginal", dalam Suailo, *Masyarakat ...*, h. 79.

¹⁹ Kelompok marjinal yang dimaksud dalam studi ini adalah kelompok rakyat yang tidak terlalu beruntung dalam hidupnya sesuai dengan definisi yang ada dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 631. Kelompok ASPR dianggap sebagai salah satu contoh kelompok marjinal berdasarkan mayoritas pekerjaan yang mereka miliki—tukang becak, buruh, petani, pedagang kaki lima, pengamen, bahkan penganggur—sebagaimana sudah dipaparkan pada bab kelima tesis ini.

rakyat. Dengan demikian, tujuan utama dari adanya perlawanan yang mereka lakukan ini hanyalah satu: adanya perubahan bagi kehidupan mereka.

Hal seperti itu sesuai dengan apa yang dikatakan Hotman M. Siahaan²⁰ bahwa golongan "arus bawah" ini mengalami deprivasi relatif ketika makin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai pengharapan tentang taraf hidup yang lebih baik, demokratisasi, keterbukaan, kebebasan pendapat, berorganisasi, namun nilai kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, iklim demokratisasi, keterbukaan, dan berbagai kebebasan individu dirasakan menurun akibat lemahnya institusi ekonomi golongan bawah, lemahnya kekuatan prodemokrasi di dalam masyarakat, partai-partai politik, lembaga-lembaga wakil rakyat, dan institusi lainnya yang seharusnya berfungsi meningkatkan iklim yang lebih demokratis dan terbuka.

Fenomena yang ditemukan dalam studi ini juga dapat dipahami dengan teori Barrington Moore yang menjelaskan bahwa kepatuhan dan perlawanan sosial disebabkan oleh kebudayaan moral di dalam masyarakat yang mengarahkan kemarahannya menjadi suatu gerakan sosial. Ketidakadilan sosial, misalnya, telah menyebabkan terjadinya banyak gerakan perlawanan. Temuan lapangan juga banyak membicarakan masalah tidak adanya keadilan dan pemerataan dalam kebijakan-kebijakan Orde Baru yang dianggap menjadi ancaman bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Karena itu pula, muncul perlawanan yang dilakukan oleh ASPR terhadap Orde Baru dan ini sumbernya adalah tidak adanya keadilan sosial.

Temuan studi ini juga sangat relevan jika didasarkan pada teori Stanley Milgram yang menyatakan bahwa perlawanan terhadap kekuasaan hanya terjadi

²⁰ Siahaan, "Dinamika ...", h. 80.

dengan dukungan kolektif dan jarang sekali muncul dari kehendak individual. Teori ini terlihat jelas dari adanya usaha ASPR yang membentuk jaringan-jaringan baik jaringan di dalam kota yang berupa kantong-kantong ASPR maupun di luar kota seperti di Jakarta (SORAK), Ngawi (FKMI), dan lain-lainnya. Dengan membentuk jaringan-jaringan tersebut perlawanan yang dilakukan dapat lebih efektif karena terjadi dengan dukungan kolektif.

Berbeda dengan bentuk perlawanan petani yang ditemukan dalam studi Hotman Siahaan yang lebih ditujukan untuk mempertahankan subsistensi daripada ideologis dan bentuk perlawanan masyarakat miskin yang ditemukan dalam studi Bagong Suyanto yang sebatas pada bentuk protes sosial atau ekspresi rasa tidak puas saja dan tidak berlanjut dengan bentuk perlawanan yang sifatnya terbuka (demonstrasi),²¹ perlawanan yang ditemukan dalam studi ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk demonstrasi yang bersifat terbuka dan lebih dimotivasi oleh kepentingan politik dan ideologi. Hal yang menjadi bukti temuan seperti itu adalah adanya aksi-aksi perlawanan yang sifatnya terbuka dengan cara turun ke jalan atau mendatangi pusat-pusat pemerintahan, lembaga perwakilan, atau lembaga pemberitaan yang umumnya berupa penolakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan sangat tidak aspiratif.

Aksi-aksi seperti itu selain bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat juga sekaligus menciptakan opini rakyat. Dengan demikian, terbukti adanya kesesuaian antara fenomena yang ditemukan dalam studi ini dengan teori Foucault tentang kekuasaan/pengetahuan. ASPR meyakini bahwa pendidikan (politik) harus

²¹ Bagong Suyanto, "Pemberdayaan dan Resistensi Diskursif Masyarakat Miskin: Suatu Studi Lentang Manfaat Pemberian Bantuan Dana IDT dan Bentuk Resistensi Sosial Masyarakat Miskin dalam Menyiasati Intervensi Negara dalam pelaksanaan Program IDT di Propinsi Jawa Timur", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1999, h. 246—247.

diberikan kepada rakyat agar mereka memiliki keberdayaan. Keyakinan itu diwujudkan dalam program sekolah rakyat yang dibentuknya di setiap kantong ASPR yang tujuan utamanya adalah membangun kekuatan rakyat dan membantu mereka melahirkan "kesadaran kritis" agar rakyat berdaya: mengerti, memahami, dan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka dan akhirnya mereka mampu memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini. Pendidikan seperti itu disebut pendidikan kritis dan dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menciptakan gerakan kontrahegemoni. Pendidikan kritis ini merupakan media terbaik untuk membantu rakyat membangun sejarah mereka sendiri dan resistensi terhadap kekuatan dan ideologi yang menindas mereka. Tujuan pendidikan kritis adalah menciptakan kesadaran kritis di kalangan rakyat dan mentransformasikan kesadaran palsu mereka kepada kesadaran kritis.²²

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan juga bahwa wacana demokrasi yang ditemukan dalam studi ini adalah wacana radikal: wacana populis kritis—dalam klasifikasi Uhlin disebut wacana populis kiri—karena wacana demokrasi yang diidealkan adalah demokrasi partisipatoris, melibatkan kelas bawah dan kelompok pinggiran. Demokrasi harus muncul dari bawah sehingga sangat diperlukan adanya partisipasi rakyat dalam hal ini. Kandungan keputusan demokrasi harus menguntungkan mayoritas rakyat kecil. Hal ini sekaligus memperkuat studi Anders Uhlin yang menunjukkan bahwa wacana populis kiri menonjol di antara para aktivis mahasiswa dan merupakan wacana yang lazim di kalangan aktivis LSM yang berorientasi pada masyarakat bawah.²³

²² Fakih, *Masyarakat ...*, h. 153.

²³ Lihat Uhlin, *Oposisi ...*, h. 138.

Rekomendasi

Studi ini pada dasarnya memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud di antaranya adalah settingnya yang terbatas pada kelompok ASPR—sebagaimana disebutkan bahwa studi ini termasuk studi kasus—dan keterbatasan dalam hal teori serta metodenya terutama yang berkaitan dengan teknik samplingnya. Teknik sampling dalam penentuan subjek yang diwawancarai seolah-olah menunjukkan adanya penyimpangan dari latar belakang studi ini—sebagaimana disebutkan bahwa studi ini berusaha mengungkap wacana politik rakyat yang selama ini tersingkir dari wacana politik normal—karena subjek umumnya diambil dari kalangan intelektual organik (para tokoh ASPR) sehingga wacana demokrasi yang dihasilkan dari studi ini lebih bersifat elitis.

Hal seperti itu terjadi karena latar belakang studi ini disusun sebelum peneliti terjun ke lapangan sehingga belum tahu keadaan lapangan sebenarnya. Setelah peneliti terjun ke lapangan dengan mengikuti beberapa pembicaraan mereka baik dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam diskusi-diskusi yang mereka adakan, peneliti memperkirakan bahwa rakyat yang masih menjalani sekolah rakyat dan umumnya masih duduk di kelas satu—dalam versi sekolah rakyat yang dibentuk ASPR—kurang mampu menjawab pertanyaan terbuka dalam sebuah wawancara mendalam sebagai salah satu teknik koleksi data studi ini apalagi pembicaraan studi ini sejak semula sudah diarahkan pada tiga tema utama: demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional dalam rangka menjangkau respons ASPR terhadap wacana Orde Baru dalam tema-tema tersebut serta wacana yang diidealkan mereka. Apalagi ada tokoh ASPR yang menyatakan

bahwa dalam tingkatan merespons terhadap wacana Orde Baru, rakyat mungkin bisa melakukannya. Akan tetapi, pada tingkatan konsep demokrasi yang diidealkan, mereka dinilai belum dapat melakukannya. Karena itu, peneliti menentukan jalan pintas dengan mewawancarai para tokoh mereka yang benar-benar mengetahui seluk beluk ASPR serta yang dapat mewakili wacana demokrasi mereka.

Beranjak dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, hasil studi ini harus dipahami dalam konteks dan waktu tertentu. Hal ini juga berarti bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam studi ini lebih banyak menyangkut aspek-aspek mikro—walaupun mungkin implikasi-implikasi makronya dapat dibuat. Karena itu, diperlukan studi lain tentang wacana demokrasi ini dengan setting yang lain seperti kelompok rakyat selain ASPR ini atau para elite partai politik sehingga hasil studinya bisa mengklasifikasikan partai mana yang benar-benar memperjuangkan tegaknya demokrasi dan mana yang tidak.

Bahkan bisa jadi diperlukan studi yang menindaklanjuti studi ini dengan mengambil subjek rakyat bawah dengan setting kantong-kantong ASPR sendiri yang jumlahnya makin banyak yang saat ini para anggotanya sedang mengikuti sekolah rakyat sehingga hasil studi itu bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dari studi ini.

Apalagi adanya perubahan perpolitikan Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini sebagai konsekuensi dari adanya lengsernya Soeharto dari puncak kekuasaan Orde Baru jelas membutuhkan studi lain yang membicarakan wacana demokrasi seperti ini yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding dan sekaligus sebagai dasar untuk mengatakan ada tidaknya perubahan format politik Indonesia pada masa Soeharto dengan masa sesudahnya. *****

DAFTAR PUSTAKA

- Ake, Claude, *A Theory of Political Integration*, (Illinois: The Dorsey Pres, 1967).
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992).
- Aminah, Siti, "Dominasi Negara dalam Kehidupan Kelompok Marjinal di Perkotaan", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- Amiruddin, "Demokratisasi dan Negara Orde Baru", dalam *Prisma* 11, November 1994.
- Anderson, Benedict R. O'G., *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1990).
- , "Bahasa Politik Indonesia, dalam dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Anonim, "Ketika Dwifungsi Dituding Biang Segalanya", dalam *Jawa Pos*, 24 September 1998.
- , "Negara Federal Tak Mungkin", dalam *Jawa Pos*, 27 September 1998.
- , "Dwifungsi Bukan Mitos Suci Lagi", dalam *117 Post*, Oktober/ 02/1998.
- , "Tak Mungkin ABRI Kembali ke Barak", dalam *Jawa Pos*, 7 Oktober 1998.
- , "RUU Politik Diperkirakan Rampung Januari", dalam *Jawa Pos*, 9 Oktober 1998.
- , "ABRI Harus Lepas Status Warga Kelas Satu", dalam *Jawa Pos*, 25 Oktober 1998.
- , "Crouch: ABRI Lebih Baik Lengser dari DPR", dalam *Jawa Pos*, 31 Oktober 1998.
- , "Yang Terbaik bagi ABRI, Tak Berbuat Apa-Apa", dalam *Jawa Pos*, 19 November 1998.
- , "Lev: Berbahaya jika ABRI Berpolitik", dalam *Jawa Pos*, 20 November 1998.

- , "ABRI 'Diadili' DPR, Diberi Usul Nyelonoh", dalam *Jawa Pos*, 25 November 1998.
- , "Orba Pandang SARA sebagai Ancaman", dalam *Jawa Pos*, 9 Februari 1999.
- , "Keahlian Militer Bukan Kelola Negara", dalam *Jawa Pos*, 14 Februari 1999.
- , "Crouch: Militer Harus Lepas Baju Dulu", dalam *Jawa Pos*, 15 Februari 1999.
- , "Orba Membuat Sekte-Sekte", dalam *Jawa Pos*, 16 Februari 1999.
- , "Etnis Cina: Membuka Keseimbangan Keran Peran", dalam *Jawa Pos*, 18 Februari 1999.
- , "Lev: Prioritaskan Cabut Dwifungsi", dalam *Jawa Pos*, 30 April 1999.
- Aribowo, "Dominasi ABRI, dari Gubernur sampai BUMN", dalam *Jawa Pos*, 28 Desember 1998.
- , "Partisipasi-Polarisasi dalam Pemilu "Baru", dalam *Jawa Pos*, 8 Maret 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Azca, M. Najib, *Hegemoni Tentara*, (Yogyakarta: LKIS, 1998).
- Aziz, Abdul, "Negara dan Perlawanan Elite Petani: Suatu Perspektif Sosiologis Struktural tentang Perlawanan Elite Petani di Pedesaan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat", Tesis Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 1996.
- Bellamy, Richard, *Teori Sosial Modern Perspektif Italia*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Bocock, Robert, *Hegemony*, (London: Tavistock Publications Limited, 1986).
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: John Wiley & Sons, 1975).
- Borgias, Fransiskus, "Bahasa dan Realitas Perubahan Sosial", dalam *Basis*, No. 10, Oktober 1993.

- Bova, Russel, "Democracy and Liberty: The Cultural Connection", dalam *Journal of Democracy*, Vol. 8, Number 1, January 1997.
- Buci-Glucksmann, Christine, *Gramsci and the State*, (London: Lawrence and Wishart, 1980).
- Budiman, Arief, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clyton: Monash University, 1992).
- , *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).
- Bungin, Burhan, "Hubungan Negara dan Masyarakat: Analisis Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 16, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Crouch, Harold, "Masalah Dwifungsi ABRP", dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengritiknya II*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
- Diamond, Larry, "Is The Third Wave Over?" dalam *Journal of Democracy*, Volume 7, Number 3, July 1996.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Fatah, R. Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- , "Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi: Potret Pergeseran Politik Orde Baru", dalam *Prisma* 4, April 1994.
- , "Teori Negara dan Negara Orde Baru", dalam *Prisma* 12, Desember 1994.
- Foulcher, Keith, "The Construction of an Indonesian National Culture: Patterns of Hegemony and Resistance", dalam Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clyton: Monash University, 1992).
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Outline of Theory of Structuration*, (Cambridge: Polity Press, 1995).

- Gozali, Ardibowo, "Hegemoni Kelas Penguasa dan Pengaruhnya terhadap Gerakan Mahasiswa", Skripsi FISIP Universitas Airlangga Surabaya, 1996.
- Habib, A. Hasnan, "ABRI dan Demokratisasi Politik", dalam Selamat Ginting dkk., *ABRI dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Haris, Syamsuddin dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Haris, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- , *Menggugat Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1998).
- Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Percaturan Politik Nasional*, (Jakarta: Citra Mandala Pratama, 1995).
- Hasyim, Tony dkk, "Bentrokan Setelah Menolak Dialog", dalam *Forum Keadilan* No. 1, 20 April 1998.
- Hendarto, Heru, "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Hendrarso, Emy Susanti, "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Hendratmoko, Heru, "Gerakan Mahasiswa Indonesia", Skripsi FISIP Universitas Airlangga Surabaya, 1992.
- Heryanto, Ariel, "The Development of 'Development'", dalam *Indonesia* No. 46, Oktober 1988.
- , "Pelecehan dan Kesewenang-wenangan Berbahasa Plesetan dalam Kajian Bahasa dan Politik di Indonesia", dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.), *PELLBA 9*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996).

- Hikam, Muhammad A.S., "Perlawanan Sosial: Telaah Teoretis dan Beberapa Studi Kasus", dalam *Prisma* 8, 1990.
- , *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- , "Bahasa dan Kekuasaan: Penghampiran Discursive Practice" dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Hoare, Quintin dan Geoffrey Nowell Smith, *Selections from the Prison of Notebooks of Antonio Gramsci*, (New York: International Publishers, 1992).
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Ibrahim, Idi Subandy dan Dedy Djamiluddin Malik, *Hegemoni Budaya*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997).
- Imron, D. Zawawi, "Virus Kerusuhan di Luar SARA", dalam *Jawa Pos*, 24 Desember 1998.
- Jalil, Matori Abdul, "Format Politik ABRI di Masa Depan", dalam *Jawa Pos*, 27 November 1998.
- Janamijaya, I Gede, "Partisipasi Politik dalam Pembangunan Politik Masa Orde Baru, 1966--1992", Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996.
- Keliat, Maimur, "Negara dan Globalisasi", dalam I. Basir Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).
- Kuncoro, Bambang, "Perilaku Politik Warga Pinggiran: Studi tentang Perubahan Perilaku Memilih Warga Desa pada Pemilu Tahun 1971-1997 di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998.
- Laurain, Jorge, *Konsep Ideologi*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997).

- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Mahfid, Moh., "Berseminya Harapan untuk Otonomi Luas", dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 1999.
- , "Otonomi dengan Topangan Uang Secara Adil", dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 1999.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).
- Maliki, Zainuddin, "Hubungan Negara dengan Masyarakat: Studi Kasus Respons Masyarakat Santri di Desa Tanen Terhadap Negeranisasi pada Masa Orde Baru", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996.
- Marshall, Catherine dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (California: SAGE Publications, Inc., 1989).
- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- , *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Muhaimin, Yahya A., "Pengantar", dalam Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- Noer, Deliar, "Denyut Nadi Mahasiswa", dalam *Forum Keadilan* No. 2, 4 Mei 1998.

- Oetomo, Dede, "Penelitian Kualitatif", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- , "Dimensi Kerakyatan dalam Dinamika Keindonesiaan", Makalah Diskusi Panel, Surabaya, 20 Desember 1997.
- Pabottingi, Mochtar, "Komunikasi Politik dalam Transformasi Ilmu Politik", dalam *Prisma* 6, Juni 1991.
- , "Pengantar", dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- , "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis Politik dan Arah Pemecahannya", dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi, *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Rahardjo, Christanto P., "Dinamika Plesetan Jawa: Sebuah Konstruksi Anekdotis Politis", dalam *Prisma* 1, Januari 1996.
- Raillon, Francois, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Rais, Amin, "Pengantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Rakhmat, Jaladuddin, "Komunikasi dan Perubahan Politik di Indonesia", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, (Toronto: McGraw-Hill Companies, Inc., 1996).
- Rozaki, Abdur, dan A. Wisnuhardana, "Gerakana Mahasiswa di Tengah Krisis Ekonomi Politik", *Basis* No. 03--04, 1998.

- Sanit, Arbi, "Organisasi Politik, Organisasi Massa dan Politik Demokratisasi Masyarakat", dalam *Prisma* 6, 1988.
- , "Politik Mahasiswa", dalam *Gatra* No. 23, 25 April 1998.
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986).
- Saryono, Djoko dan Herlinawati Syaukat, "Bahasa Indonesia sebagai Cermin Dinamika Kekuasaan ORBA", dalam *Basis*, No. 2, Februari 1993.
- Sasono, Adi, "Demokratisasi Politik, Seiring dengan Demokratisasi Ekonomi", dalam *Prisma* 6, 1988.
- Sasono, Erik, "Demokratisasi dalam Kepolitikan Orde Baru", dalam *Prisma* 10, Oktober 1994.
- Siahaan, Hotman, "Pembangkitan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996.
- , "Dinamika Politik Kelompok Marginal", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- Simanjutak, Mersilam, *Pandangan Negara Integratif*, (Jakarta: PT Anem Kosong Anem, 1997).
- Siswati, "Partai Rakyat Demokratik dan Demokratisasi: Suatu Studi tentang Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Demokratisasi", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1997.
- Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- , "Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI", dalam Soebijono dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

- Sparringa, Daniel T., "Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia", Tesis Doktorat, Flinders University of South Australia, 1997.
- , "Nasionalisme Orde Baru dan Globalisasi: Sebuah Taksonomi Sosiologi Politik Intelektual Indonesia, dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- , "Dari 'Sebuah Panggilan' ke 'Kembali ke Barak Sekarang': Sebuah Taksonomi Paradigma Intelektual Indonesia tentang Dwifungsi ABRI", dalam *117 Post* No. 2, Oktober 1998.
- Spradley, James P., *Participant Observation*, (Florida: Holt, Rinehart and Winston, 1980).
- , *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997).
- Subono, Nur Imam, "Demokratisasi Masyarakat, Apa yang Harus Dilakukan?", dalam *Prisma* 6, 1988.
- Sudarso, "Metode dan Prosedur Penelitian", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Sudarsono dkk., "Menggugat Para Wakil Rakyat", dalam *Forum Keadilan: Edisi Khusus "Parlemen Kita Sepanjang Sejarah"*, Agustus 1997.
- Sudarsono, Juwono, "Dilema Demokratisasi Politik di Dunia Ketiga", dalam *Prisma* 6, 1988.
- Sulistyaningsih, Tri, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Keluarga Kecil Bahagian dan Sejahtera (KKBS) dalam Perspektif Hegemoni Negara atas Warga Masyarakat", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998.
- Supriyanto, Didik, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Panjang NKK/BKK*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

- Surbakti, Ramlan, "Perspektif Kelembagaan-Baru Mengenai Hubungan Negara dengan Masyarakat", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- , "Teori dalam Penelitian Ilmu Sosial", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- , "Ditsospol dan Pembentukan Civil Society", dalam I. Basis Susilo, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Susanto, Budi, "Yogya(kar)tamu Berbudi-Bahasa Jawa Dikaji Ulang" dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.), *PELLBA* 5, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Susanto, Dwi dkk., "Kecenderungan Demokrasi Elitis di Negara-Negara Sedang Berkembang", dalam *Prisma* 6, 1988.
- Susilo, I Basis, *Masyarakat dan Negara*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- Suyanto, Bagong, "Pemberdayaan dan Resistensi Diskursif Masyarakat Miskin: Suatu Studi tentang Manfaat Pemberian Bantuan Dana IDT dan Bentuk Resistensi Sosial Masyarakat Miskin dalam Menyiasati Intervensi Negara dalam pelaksanaan Program IDT di Propinsi Jawa Timur", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1999.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research*, (Newbury Park, California: SAGE Publications, 1990).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Uhlir, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Utami, Sri Wiryanti Budi, "Pria/Wanita: Studi Perbedaan Wacana Proses Pengambilan Keputusan Masalah Publik di Lingkungan Kelompok", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1997.



- van Langenberg, Michael, "The New Order State: Language, Ideology, Hegemony", dalam Arief Budiman, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clyton: Monash University, 1992).
- , "Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1996).
- van Peursen, C.A., *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*, (Jakarta: PT Gramedia, 1990).
- Wardi, Priyanto, "Gerakan Mahasiswa di Surabaya Era 1990-an", Skripsi FISIP Universitas Airlangga Surabaya, 1993.
- Waters, Malcolm, *Modern Sociological Theory*, (London: SAGE Publications, 1994).
- Wignjosebroto, Soetandyo, "Grounded Research: Apa dan Bagaimana", dalam Bagong Suyanto dkk., *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Wijayanta, Hanibal W.Y. dkk., "Gerakan Reformasi Mencari Jalan", dalam *Forum Keadilan* No.2, 4 mei 1998.
- Ya'kub, Andi, "Elit Lokal dan Orde Baru: Studi tentang Respons Elite Bugis Terhadap Diskursus Politik Orde Baru", Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1998.
- Yin, Robert K., *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Zuhro, R. Siti, "Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoretis", dalam *Jurnal Ilmu Politik* 14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993).
